



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan visi dan misi Bupati Sukoharjo;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Program Pembangunan Daerah adalah Program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan kepala Daerah Tahun 2024.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. RPJMN;
 - d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
- b. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III berisi Visi, Misi, dan program prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (3) Tata cara Pengendalian dan Evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. terjadinya bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

ABDUL HARIS WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4-140/2025) Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan Daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan Arah, Tujuan, Sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan Daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Sukoharjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati Sukoharjo untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program pembangunan Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 333

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengharuskan daerah untuk menyusun Dokumen Perencanaan Daerah. Proses penyusunan dokumen ini dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan *top-down*, sementara substansinya melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan, dapat mendukung berjalannya Pembangunan daerah yang sistematis, sehingga pemanfaatan sumber daya daerah dan pemerataan pembangunan di masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Salah satu dokumen perencanaan yang diatur dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun mempedomani dokumen RPJPD dan RPJMN. Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki kewajiban untuk menyusun dan kemudian menetapkan Dokumen Perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 ini merupakan tahapan pembangunan jangka menengah pertama dari pelaksanaan kebijakan yang termuat dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sukoharjo periode tahun 2025-2045. Visi Pembangunan Jangka Panjang yang akan dicapai Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2045 yaitu **“SUKOHARJO BERMARTABAT, MAJU, MAKMUR DAN BERKELANJUTAN”**, pencapaian visi tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: (1) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang Tumbuh Baik utamanya didukung Peningkatan Pendapatan per Kapita; (2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan; (3) Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional meningkat; (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan (5) Kontribusi penurunan emisi GRK Kumulatif menurun menuju *net zero emission*. Misi (agenda) pembangunan Kabupaten Sukoharjo dalam pencapaian Visi pembangunan jangka panjang, terdiri atas (1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (*Governance*); (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul; (3) Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif; dan (4) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif Terhadap Kelestarian Lingkungan.

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 juga diharapkan dapat menjadi penjabaran tema kebijakan RPJPD pada tahap I, yaitu Penguatan Landasan Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Sukoharjo. Tahap ini merupakan penguatan landasan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal termasuk didalam pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dan peningkatan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan didukung sumber daya manusia yang berdaya saing, pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*, daerah yang kompetitif dan inovatif.

Dalam kerangka tersebut, RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 juga menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam menetapkan skenario pembangunan berkelanjutan selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan prinsip pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan target

pembangunan nasional jangka menengah serta mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 juga menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dengan Visi: **“SUKOHARJO LEBIH MAJU, ADIL DAN BERMARTABAT”**. Dalam mewujudkan visi, diimplementasikan melalui lima misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- Misi 1: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance) Serta Layanan Publik yang Berkualitas.**
- Misi 2: **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif dan Responsif Gender.**
- Misi 3: **Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif.**
- Misi 4: **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan.**
- Misi 5: **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.**

Selain itu, RPJMD ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang, tantangan globalisasi, serta kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan pendekatan perencanaan yang berbasis data dan analisis mendalam, dokumen ini menjadi instrumen utama dalam menjamin kesinambungan pembangunan daerah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 juga berperan dalam mewujudkan sinergi antara kebijakan pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan daerah melalui penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah serta dokumen perencanaan sektoral lainnya, antara lain: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah (RIPJ-PID), dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Dengan demikian, RPJMD ini akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kabupaten Sukoharjo, serta memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 juga menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan selama periode RPJMD dan juga sebagai pedoman menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

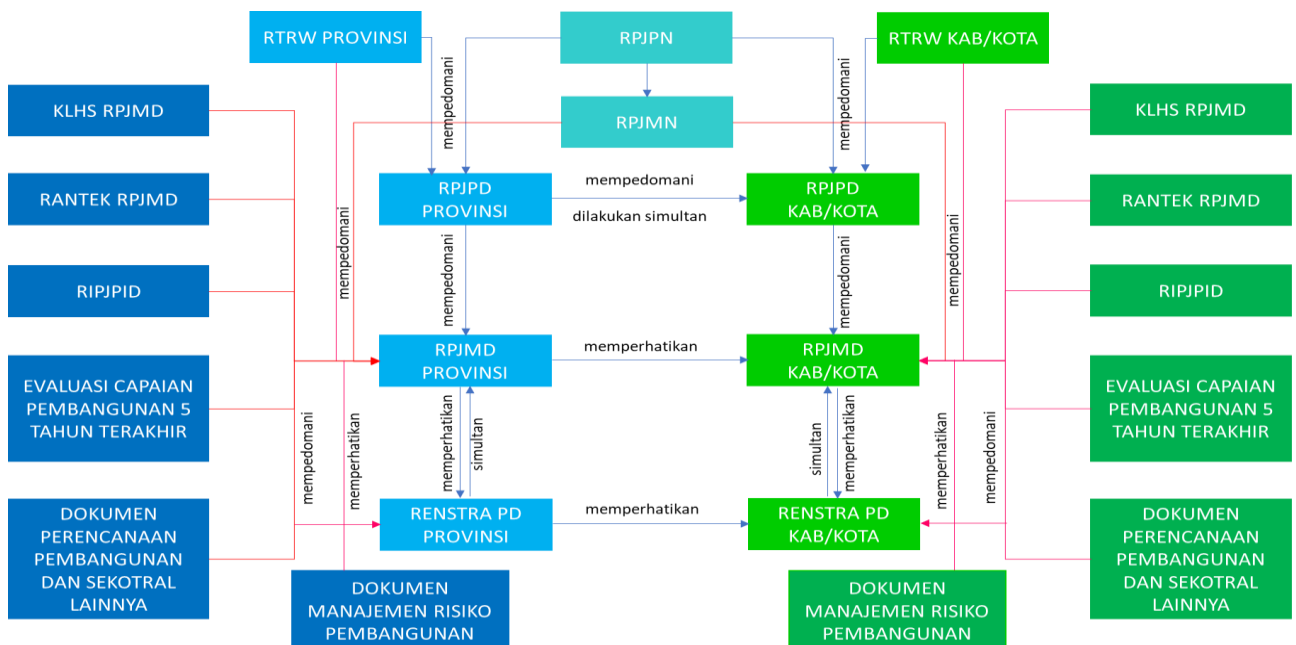
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 mempedomani dokumen rencana pembangunan lainnya yaitu RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, RPJPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2045 serta memperhatikan RTRW Kabupaten Sukoharjo, dan KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Sukoharjo ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPd selama periode Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sukoharjo dengan dokumen perencanaan lainnya secara jelas seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjelasan keterkaitan dengan Dokumen perencanaan lainnya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo mempedomani dokumen RPJMN tahun 2025-2029, terutama terkait dengan isu strategis, visi dan misi presiden terpilih, sasaran pokok dan agenda pembangunan beserta indikasi yang tercantum dalam RPJMN.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 terutama terkait dengan permasalahan, tujuan dan sasaran, arah kebijakan Pembangunan dan Indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Sukoharjo periode Tahun 2025-2045, terutama terkait dengan isu strategis, Sasaran Pokok, Arah Kebijakan pembangunan pada RPJMD Tahap I dalam dokumen RPJPD.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo mempedomani dokumen RTRW Kabupaten Sukoharjo tahun 2024-2044, terutama terkait dengan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang tahun 2024-2044.

5. Dokumen Perencanaan Multisektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor lain yang tersusun antara lain Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), serta dokumen perencanaan strategis lainnya.

6. Rencana Strategis (Renstra)

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat Perangkat Daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Sukoharjo dalam periode Tahun 2025 hingga Tahun 2029.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud ditetapkannya dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029 ke-dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai dengan indikator kinerja Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan Pembangunan daerah selama periode Tahun 2025-2029.

Tujuan ditetapkannya dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2025-2029;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang berbatasan;
3. Menjadi pedoman penyelenggaraan Pembangunan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2025-2029;

4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika RPJMD

Sistematika RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Pada bab ini memuat kondisi daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pengelompokan dalam 4 (empat) aspek pembangunan dengan menggunakan data 5 (lima) tahun sebelumnya (Tahun 2020-2024), meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, kemudian memuat gambaran keuangan daerah yang menggambarkan tentang realisasi APBD Tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029, pada bab ini juga digambarkan mengenai Permasalahan dan Isu strategis Daerah.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029 disertai dengan Strategis, Arah Kebijakan dan Program prioritas Pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini memuat daftar program perangkat daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah Tahun 2025-2029, selain itu pada bab ini juga memuat mengenai target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).



BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

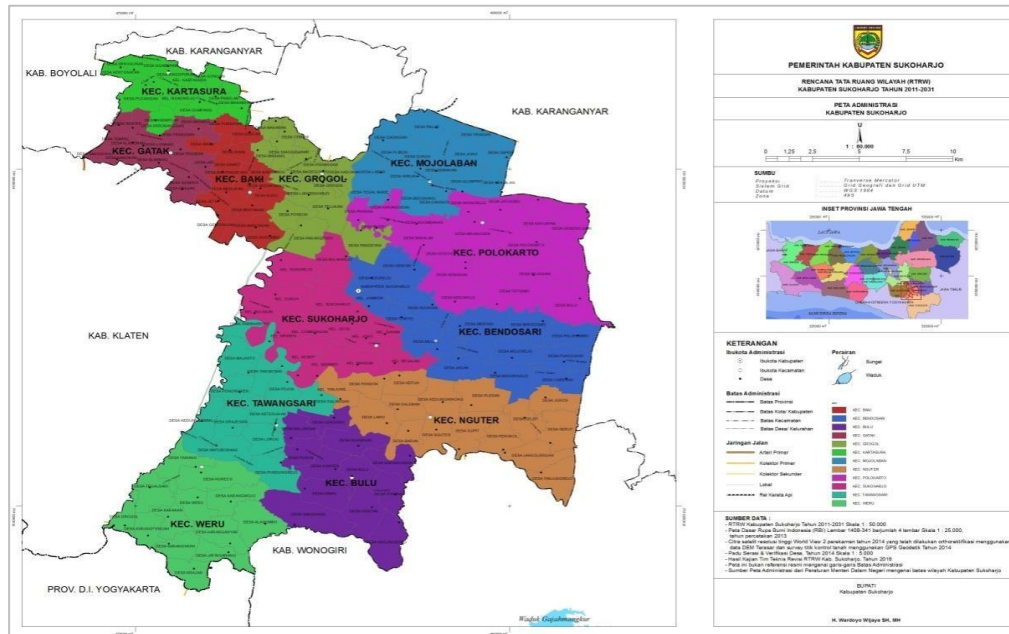
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian selatan, dan secara geografis berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya yang strategis, berada di koridor ekonomi Solo–Yogyakarta–Semarang, menjadikan Sukoharjo memiliki peran penting dalam mendukung integrasi wilayah dan konektivitas antar pusat pertumbuhan regional di Pulau Jawa.

Secara astronomis, Sukoharjo berada di antara 110°57'33,70"–110°42'6,79" BT dan 7°32'42,00" LS, serta secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan, 17 kelurahan, dan 150 desa berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar di utara, Kabupaten Karanganyar di timur, Kabupaten Gunungkidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali dan Klaten di barat. Letak ini menjadikan Sukoharjo sebagai daerah *hinterland* penting bagi Kota Surakarta, sekaligus pintu masuk bagi konektivitas dengan Provinsi DIY dan wilayah selatan Jawa Tengah.

Sebagai bagian dari sistem ruang Provinsi Jawa Tengah, Sukoharjo diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang Jawa Tengah 2025–2045, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, pemerataan akses layanan dasar, dan penguatan rantai nilai industri berbasis kerakyatan. Dukungan regulasi melalui enam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang batas wilayah, yaitu Permendagri No 19 Tahun 2014; Permendagri No 49 Tahun 2016; Permendagri No 52 Tahun 2016; Permendagri No 53 Tahun 2016; dan Permendagri No 63 Tahun 2017) juga menegaskan posisi Sukoharjo sebagai wilayah yang telah memiliki kepastian hukum tata batas.



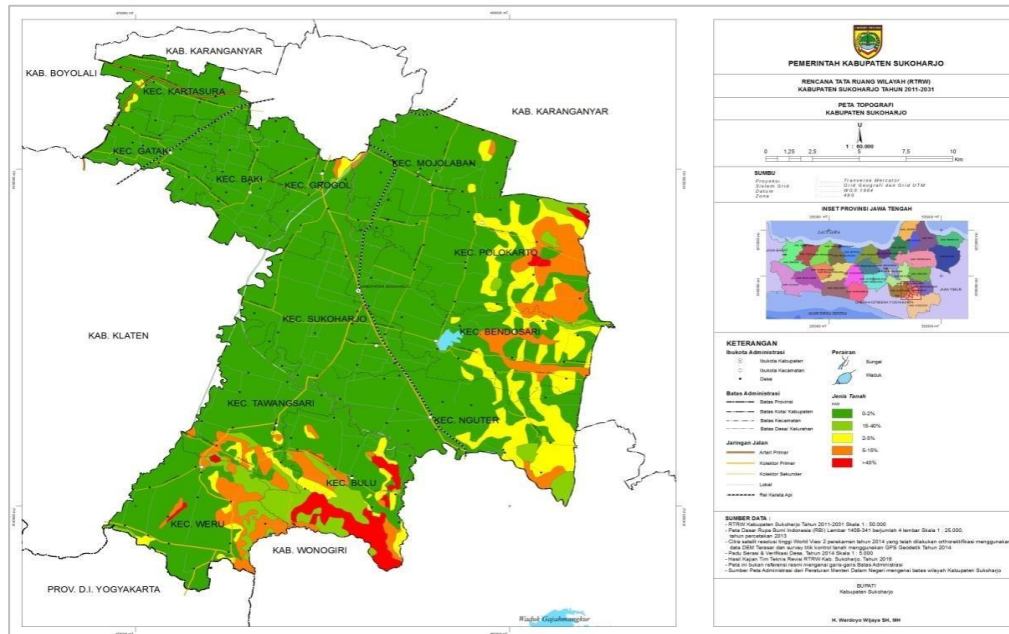
Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sukoharjo

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Secara topografis, Kabupaten Sukoharjo memiliki morfologi wilayah yang dapat dibedakan menjadi dua tipe utama, yakni wilayah dataran dan wilayah perbukitan. Wilayah dataran mencakup kecamatan-kecamatan seperti Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban. Sementara itu, kawasan perbukitan tersebar di Kecamatan Bulu, Weru, Tawangsari, Nguter, Polokarto, dan Bendosari. Ketinggian wilayah berada di kisaran 80–125 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan titik terendah berada di Grogol dan tertinggi di Polokarto.

Dilihat dari kemiringan lereng, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki lereng landai (0–8%), mencakup Weru hingga Kartasura, menjadikan kawasan ini relatif aman untuk pengembangan pemukiman dan infrastruktur. Namun, beberapa wilayah seperti Polokarto, Nguter, dan Weru memiliki kemiringan agak landai hingga curam (8–15%), yang perlu diperhatikan dalam pengendalian erosi, konservasi, dan ketahanan bencana.

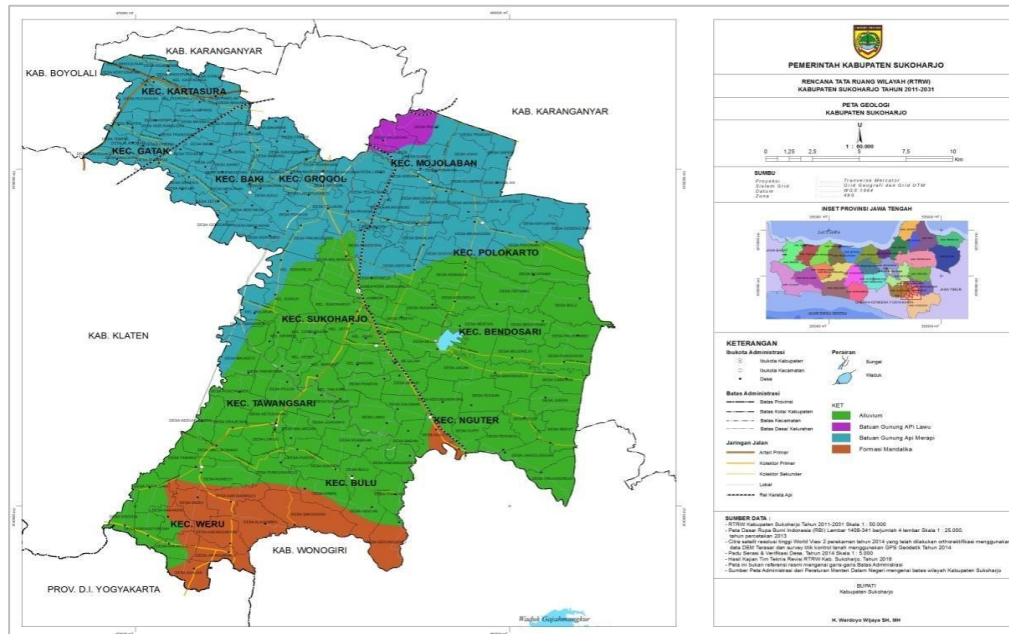


Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Sukoharjo

Dari segi geologi, wilayah Sukoharjo disusun oleh empat jenis batuan utama, yaitu **Alluvium**, **batuan Gunung Api Merapi**, **batuan Gunung Api Lawu**, dan **Formasi Mandalika**. Jenis tanah Alluvium yang tersebar di kecamatan seperti Tawangsari, Bulu, Nguter, dan Sukoharjo dikenal subur dan cocok untuk tanaman pangan seperti padi dan palawija. Sementara itu, batuan hasil erupsi Gunung Merapi yang menyusun wilayah Gatak hingga Mojolaban juga memberikan kontribusi besar terhadap kesuburan tanah di kawasan tersebut.

Sebagian kecil Kecamatan Weru dan Nguter memiliki karakteristik geologi Formasi Mandalika, yaitu tanah berbatu hasil gunung api tua dari Pegunungan Selatan Jawa Timur. Tanah ini kurang subur dan memiliki risiko longsor lebih tinggi, sehingga perlu perlakuan khusus dalam pemanfaatan ruang dan pembangunan. Di sisi lain, sebagian wilayah Mojolaban mengandung batuan Gunung Api Lawu yang memberikan peluang untuk pengembangan pertanian spesifik dan pengelolaan konservasi tanah berbasis potensi lokal.



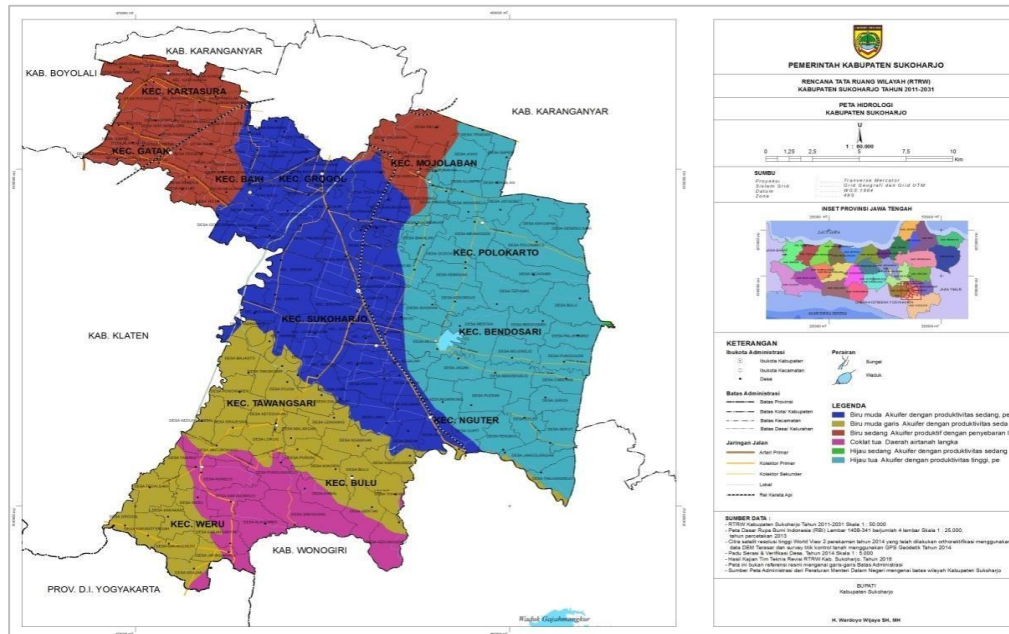
Sumber: Perda No.1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Sukoharjo

Potensi sumber daya air di Kabupaten Sukoharjo tergolong cukup melimpah, didukung oleh keberadaan sejumlah sungai utama, mata air, waduk, dan embung. Wilayah ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Hulu, Samin, dan Dengkeng, yang mencakup Sungai Bengawan Solo, Sungai Brambang, hingga Sungai Walikan. Permasalahan utama yang sering terjadi berkaitan dengan DAS adalah banjir tahunan akibat kondisi drainase yang tidak optimal serta letak wilayah Sukoharjo yang berada di bawah tanggul Sungai Bengawan Solo, sehingga diperlukan penguatan sistem pengendalian banjir dan irigasi lokal.

Terdapat beberapa mata air penting di Kecamatan Bulu (Pecinan, Baseng, Kamal), Baki (Kluyon), Weru (Banyubiru, Kedunggandong), dan Tawangsari (Pundungrejo). Kehadiran mata air ini sangat penting dalam mendukung ketahanan air dan sistem irigasi lokal, terutama bagi kawasan pertanian dan pemukiman.

Di samping itu, Waduk Mulur menjadi infrastruktur pengairan utama yang dapat menampung 3,4 juta m³ air dan mengairi 4.787 hektare sawah. Dukungan tambahan berasal dari Dam Colo yang melayani 10.577 hektare lahan, serta berbagai embung di wilayah Bulu, Tawangsari, Bendosari, Nguter, dan Sukoharjo. Namun, penyebaran dan kapasitas infrastruktur air ini masih belum sepenuhnya merata, sehingga perlu penguatan distribusi dan rehabilitasi jaringan irigasi dalam menghadapi tekanan iklim dan ketahanan pangan.



Sumber : Perda No.1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo berada dalam zona iklim tropis dengan dua musim dominan, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, serta suhu udara berkisar antara 23°C hingga 34°C. Kelembapan udara cukup tinggi, mencapai 92%, mencerminkan karakteristik wilayah tropis basah yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan vegetasi namun juga rawan terhadap risiko iklim ekstrem.

Curah hujan tahunan tercatat bervariasi antara 1.000 hingga 2.500 mm, dan wilayah ini terbagi ke dalam tiga kategori intensitas: rendah (1.000–1.500 mm), sedang (1.500–2.000 mm), dan tinggi (2.000–2.500 mm). Kecamatan Kartasura memiliki intensitas curah hujan tertinggi, sementara kecamatan seperti Grogol, Sukoharjo, Nguter, Bulu, dan sebagian Bendosari berada dalam kategori curah hujan terendah. Sebagian besar wilayah lainnya, seperti Gatak, Baki, Mojolaban, Weru, Polokarto, dan Tawangsari, memiliki curah hujan sedang, hal ini berimplikasi terhadap kapasitas produksi pertanian dan ketersediaan air tanah.

Kondisi klimatologi ini menunjukkan adanya disparitas spasial dalam distribusi curah hujan yang dapat menyebabkan ketimpangan produktivitas sektor pertanian antar wilayah. Kecamatan dengan curah hujan tinggi berpotensi menghadapi risiko banjir dan genangan musiman, sedangkan wilayah dengan curah hujan rendah menghadapi kerentanan terhadap kekeringan dan defisit air irigasi. Hal ini juga berimplikasi pada ketahanan pangan lokal serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, khususnya petani lahan tadah hujan. Dalam konteks perubahan iklim global, variasi curah hujan yang semakin ekstrem dan tidak menentu menjadi tantangan tambahan bagi perencanaan wilayah dan pengelolaan sumber daya air.



Kabupaten Sukoharjo memiliki total luas wilayah ±49.323 hektare atau sekitar 1,5% dari total wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penggunaan lahan di Sukoharjo diklasifikasikan ke dalam dua fungsi utama, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mencerminkan pemanfaatan lahan untuk sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, industri, dan permukiman, sementara kawasan lindung diarahkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

II-6

Tabel 2.1 Peruntukan Lahan Kabupaten Sukoharjo

No	Peruntukan Lahan	Luas (ha)
1	Hutan Lindung	297,00
2	Hutan Produksi	70,00
3	Hutan Rakyat	3.500,00
4	Pertanian Lahan Basah	23.502,00
5	Pertanian Lahan Kering	3.362,00
6	Perkebunan	708,00
7	Peternakan	138,00
8	Pertambangan	166,00
9	Industri	2.352,00
10	Pariwisata	9,00
11	Permukiman	15.092,00
12	Lainnya	127,00
Jumlah		49.323,00

Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

Sumberdaya lahan di Kabupaten Sukoharjo berupa kawasan budidaya berupa kawasan peruntukan hutan dan kawasan pertanian, dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kawasan budidaya tersebut seluas 31.280 Ha.

Tabel 2.2 Potensi Sumber Daya Lahan

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	70
2	Kawasan Hutan Rakyat	3.500
3	Kawasan Pertanian lahan basah	23.502
4	Kawasan Pertanian lahan kering	3.362
5	Kawasan peruntukan perkebunan	708
6	Kawasan peruntukan peternakan	138
Jumlah		31.280

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung air Kabupaten Sukoharjo dilihat dari perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan defisit. Berdasarkan pendekatan potensi air permukaan, ketersediaan air di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 tercatat sebesar 11.019.751,32 m³/tahun. Sementara itu, kebutuhan air secara aktual untuk mendukung aktivitas penduduk, industri, pertanian, dan peternakan mencapai 774.931.577,92 m³/tahun. Perbandingan ini menunjukkan bahwa daya dukung air pada tahun 2022 mengalami defisit signifikan, karena kebutuhan air (DA) jauh melampaui ketersediaan air (SA).

Proyeksi tahun 2029 menunjukkan peningkatan kebutuhan air menjadi 986.549.005,76 m³/tahun. Kenaikan ini didorong oleh dinamika pertumbuhan

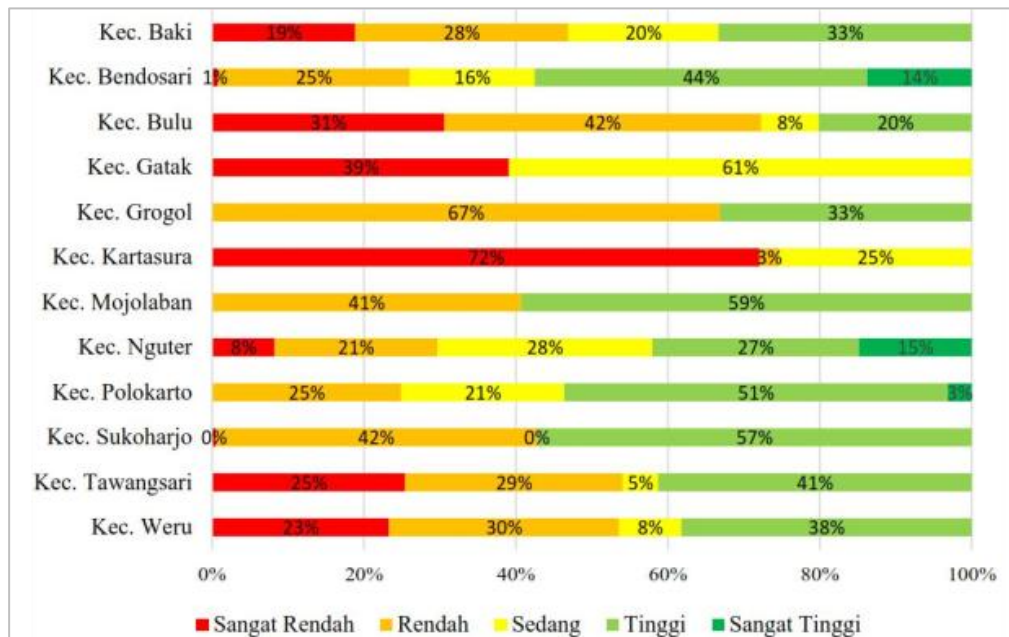
[illegible]

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan Polokarto dan Bendosari secara spesifik memiliki konsentrasi wilayah dengan kategori tinggi dan sangat tinggi. Kondisi ini didukung oleh karakteristik ekoregion yang berada pada lereng vulkan tengah Gunung Lawu dan

keberadaan Waduk Mulur sebagai penyimpan cadangan air permukaan, menjadikan wilayah tersebut sebagai zona strategis dalam penyediaan air bersih.

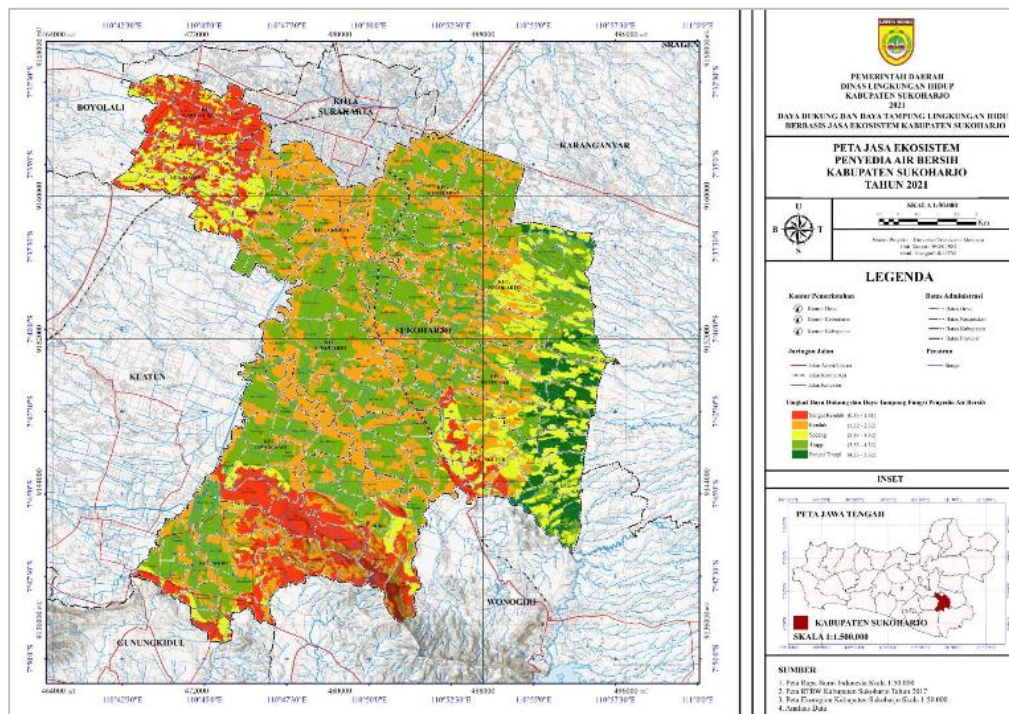
Meskipun sebagian wilayah Sukoharjo memiliki potensi tinggi dalam jasa lingkungan air bersih, terdapat pula beberapa kecamatan dengan dominasi kelas rendah hingga sangat rendah. Misalnya, Kecamatan Kartasura dan Grogol yang menunjukkan sebaran signifikan pada kategori sangat rendah dan rendah, sehingga perlu perhatian khusus dalam pengelolaan tata ruang dan konservasi sumber daya air.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.7 Grafik Sebaran Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kabupaten Sukoharjo

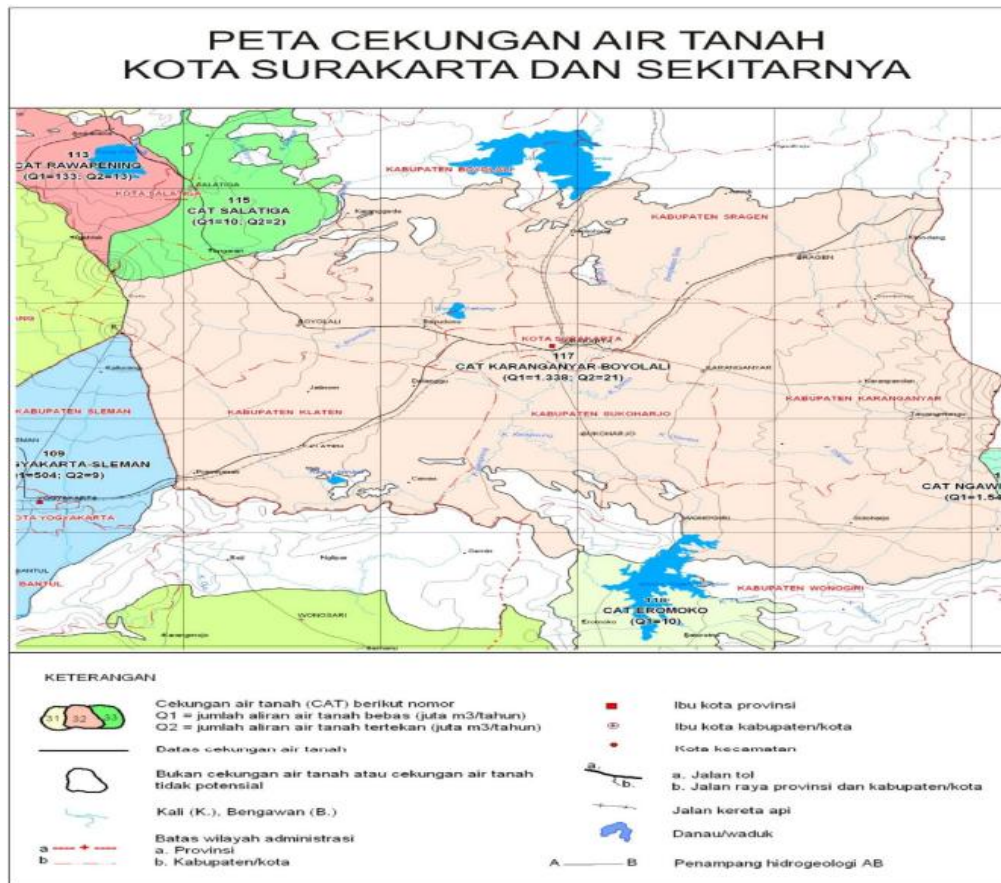
Berikut peta jasa lingkungan penyedia air bersih Kabupaten Sukoharjo berdasarkan KLHS RPJMD 2025-2029.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.8 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi sumber daya air yang cukup melimpah, baik berupa air tanah maupun air permukaan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali dengan potensi aliran air tanah bebas mencapai 1.338 juta m³ per tahun, sementara bagian kecil di wilayah selatan masuk dalam CAT Eromoko dengan potensi sebesar 10 juta m³ per tahun. Potensi air tanah di wilayah ini didukung oleh keberadaan 17 sumber mata air alami yang tersebar di Kecamatan Bulu, Gatak, Kartasura, Tawangarsi, dan Weru, serta 42 sumur dalam (deep well) yang berada di Kecamatan Baki, Bendosari, Bulu, Grogol, Mojolaban, Nguter, Polokarto, Tawangarsi, dan Weru. Selain air tanah, Sukoharjo juga memiliki potensi air permukaan yang berasal dari sungai dan tampungan buatan seperti embung dan waduk. Wilayah ini termasuk dalam Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Solo Hulu yang terdiri dari Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Brambang, Sungai Jlantah, Sungai Samin, Sungai Ranjing, dan Sungai Walikan. Total terdapat 34 sungai, 1 waduk, dan 24 embung yang menjadi sumber daya air permukaan utama di Kabupaten Sukoharjo, yang sangat berpotensi untuk mendukung kebutuhan domestik, pertanian, serta ketahanan lingkungan daerah.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.9 Peta Cekungan Air Tanah Kota Surakarta dan Sekitarnya

Kecukupan Atau Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Sukoharjo mengalami surplus. Status daya dukung pangan di Kabupaten Sukoharjo dianalisis melalui pendekatan komparatif antara ketersediaan dan kebutuhan pangan utama, yaitu beras. Berdasarkan hasil analisis tahun 2022 hingga proyeksi tahun 2029, Kabupaten Sukoharjo secara konsisten mengalami status surplus dalam penyediaan beras. Artinya, produksi beras lokal mampu melampaui kebutuhan konsumsi minimum penduduknya.

Pada tahun 2022, kebutuhan beras sebesar 113.008,22 ton berhasil dipenuhi oleh produksi beras dari luas sawah eksisting sebesar 251.136 ton. Proyeksi hingga tahun 2029 dengan estimasi jumlah penduduk 983.000 jiwa menunjukkan kebutuhan beras sebesar 122.767,57 ton, sementara produksi tetap berada di angka 250.854 ton. Seluruh data menunjukkan *supply-demand ratio* > 1, mengindikasikan kapasitas swasembada pangan daerah yang stabil dan kuat.

Lebih lanjut, produktivitas per kapita menunjukkan bahwa nilai konsumsi fisik beras minimum tetap pada angka 0,12 ton/orang/tahun, dan nilai produktivitas Sukoharjo mampu memenuhi batas tersebut dengan konsisten. Ini diperkuat dengan analisis daya dukung lahan sawah melalui rasio α (α = lahan tersedia ÷ lahan diperlukan). Nilai α > 1 secara konsisten dari tahun 2022 hingga 2029



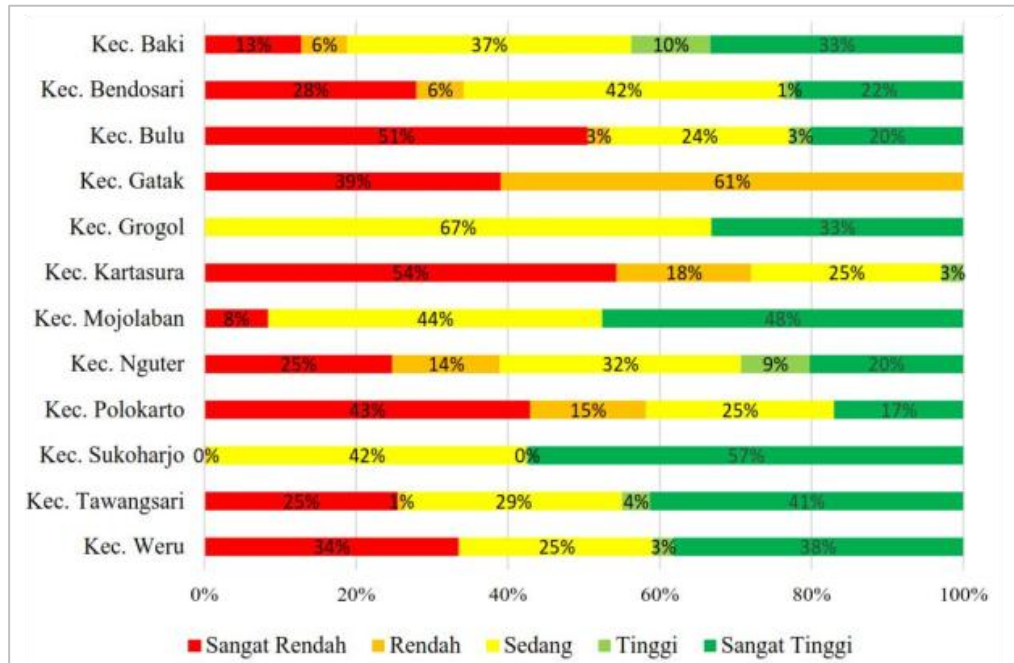
membuktikan bahwa daya dukung lahan terhadap ketahanan pangan berada dalam kondisi optimal dan mendukung swasembada. Memperlihatkan bahwa Kabupaten Sukoharjo berada dalam kondisi yang cukup aman dan resilien secara ketahanan pangan, dengan cadangan produksi yang memungkinkan distribusi beras secara merata. Namun demikian, ketergantungan pada luas lahan sawah yang stagnan perlu diantisipasi dalam kebijakan jangka menengah, terutama dalam menghadapi alih fungsi lahan dan variabilitas iklim.

Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung penyediaan pangan didominasi pada kelas sedang dan tinggi.

Jasa lingkungan penyedia pangan merupakan komponen penting dalam sistem daya dukung wilayah, karena berkaitan langsung dengan kapasitas suatu daerah untuk menjamin ketahanan pangan bagi penduduknya. Di Kabupaten Sukoharjo, sektor ini didukung oleh kondisi geografis dan ekologis yang khas, yakni berada pada zona kaki lereng Gunung Lawu dan Merapi serta dataran aluvial yang subur. Karakteristik ini membentuk suatu ekoregion produktif yang berpotensi tinggi dalam mendukung sistem penyediaan pangan.

Klasifikasi kemampuan jasa lingkungan dalam penyediaan pangan menunjukkan dominasi kelas sedang dan tinggi, dengan porsi tertinggi berada pada kelas sedang seluas 16.391,87 ha (33% dari total luas wilayah), diikuti oleh kelas tinggi sebesar 14.172,97 ha (29%), dan kelas sangat tinggi 2.680,53 ha (sekitar 5%). Sementara itu, luas wilayah pada kelas rendah dan sangat rendah hanya mencakup masing-masing 8% dan 3% dari total wilayah.

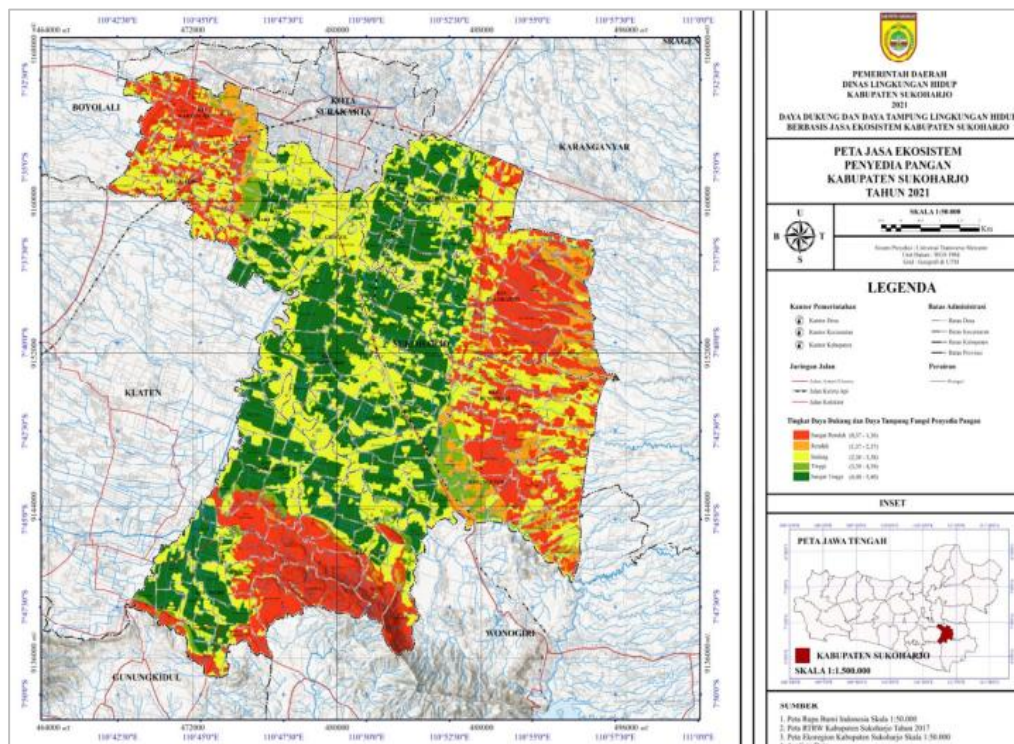
Distribusi ini secara geografis terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Sukoharjo yang memiliki luas dominasi kelas sangat tinggi terbesar, serta wilayah lain yang didukung oleh tutupan lahan sawah sebagai penopang utama jasa penyedia pangan. Sawah menyumbang 43% dari total luasan lahan, menjadikan sektor pertanian lahan basah sebagai elemen penting dalam menjaga keberlanjutan ketahanan pangan daerah.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.10 Grafik Sebaran Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Sukoharjo

Berikut peta jasa lingkungan penyedia pangan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan KLHS RPJMD 2025-2029.

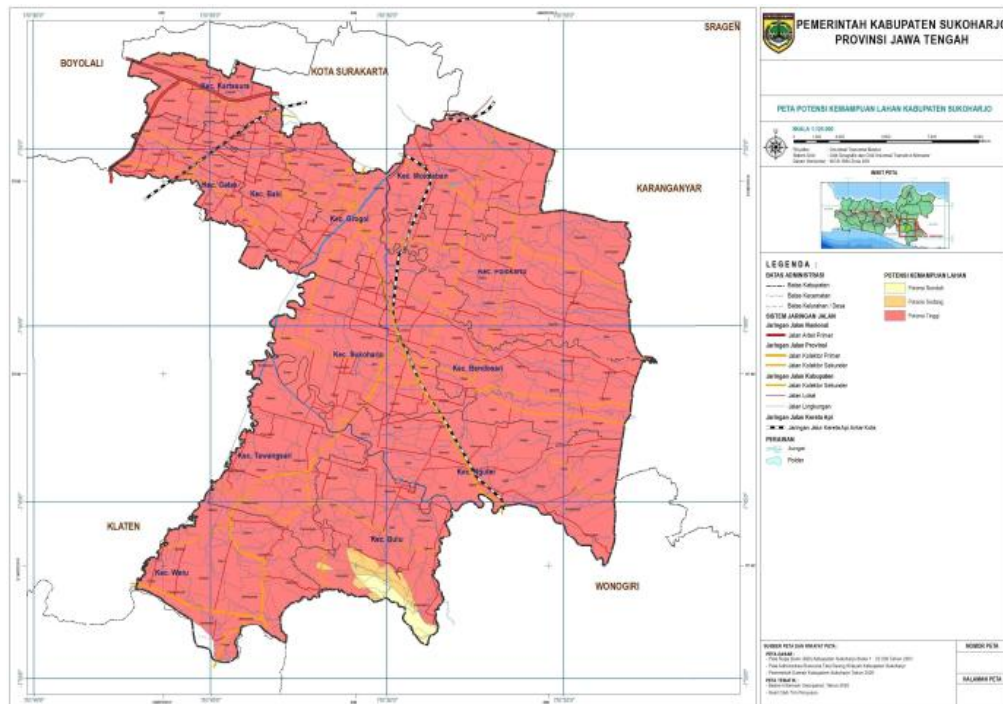


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.11 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.12 Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Sukoharjo

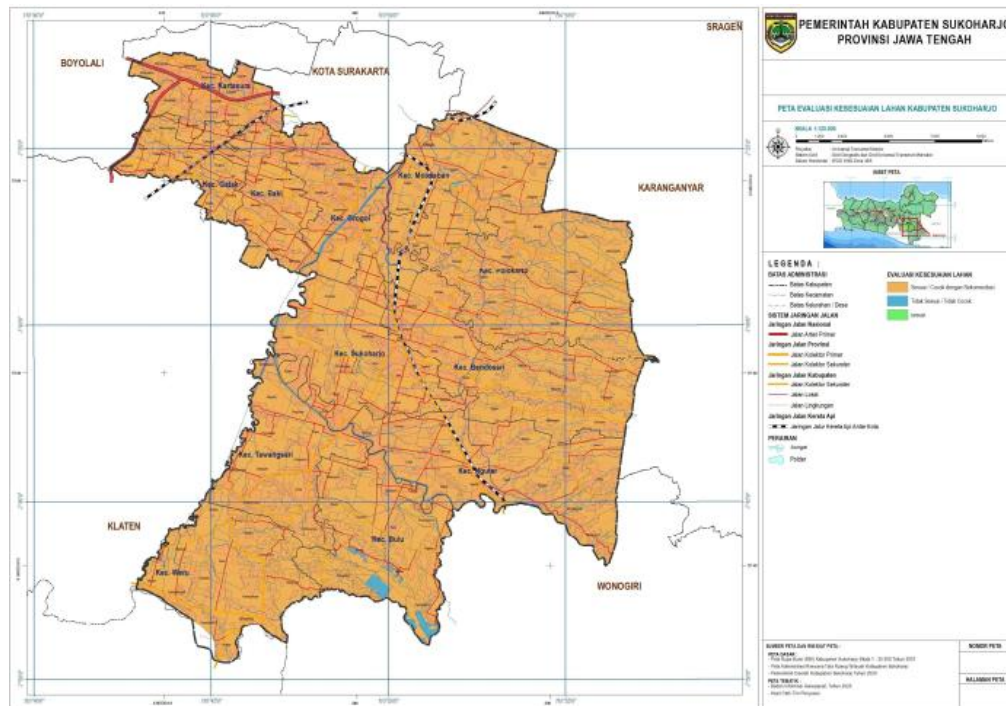
II-14



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.13 Peta Potensi Kemampuan Lahan Kabupaten Sukoharjo

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 88,3% wilayah Kabupaten Sukoharjo tergolong sesuai dengan rencana pengembangan (kategori sesuai/cocok), sedangkan 11,7% sisanya dikategorikan sesuai bersyarat. Luasan yang sesuai bersyarat tersebut perlu memperhatikan aspek fisik dan ekologis agar kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hasil evaluasi kemampuan dan kesesuaian lahan dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki kapasitas spasial yang sangat baik dalam mendukung rencana pembangunan jangka menengah, terutama pada sektor pertanian, permukiman, dan infrastruktur dasar. Namun demikian, adanya risiko kerentanan lingkungan pada wilayah dengan potensi rendah dan sesuai bersyarat, yang jika tidak diantisipasi akan berdampak pada penurunan daya dukung dan peningkatan risiko bencana lingkungan.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.14 Peta Evaluasi Kesesuaian Lahan Kabupaten Sukoharjo

Konsumsi lahan perkapita (Ambang batas lahan) Kabupaten Sukoharjo 0,076 Ha/jiwa. Analisis daya dukung lahan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan indikator konsumsi lahan perkapita menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas tampung antar wilayah kecamatan. Mengacu pada kriteria Yeates, ambang batas minimal konsumsi lahan per jiwa ditetapkan sebesar 0,076 ha/jiwa untuk wilayah dengan populasi 100.000 jiwa, dan 0,070 ha/jiwa untuk wilayah dengan populasi 250.000 jiwa.

Berdasarkan nilai konsumsi aktual lahan per jiwa, hanya beberapa kecamatan yang masih memenuhi ambang batas tersebut, yaitu Kecamatan Bendosari, Bulu, Nguter, Polokarto, dan Weru. Kecamatan-kecamatan ini masih memiliki kapasitas lahan yang mencukupi untuk mendukung aktivitas kehidupan penduduk secara layak, sehingga dikategorikan sebagai wilayah dengan daya tampung lahan mencukupi. Sebaliknya, Kecamatan Baki, Gatak, Grogol, Kartasura, Mojolaban, Sukoharjo, dan Tawangsari tercatat memiliki nilai konsumsi lahan per jiwa di bawah ambang batas. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut telah mengalami tekanan populasi yang melebihi kapasitas dukung ruangnya, sehingga tidak lagi mampu menyediakan lahan secara optimal bagi kebutuhan dasar penduduk.

2.1.1.4 Kemandirian Pangan

Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kemajuan signifikan dalam indikator kemandirian pangan, yang tercermin dari peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari 88,76 pada tahun 2020 menjadi 90,93 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam aspek ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang menopang ketahanan pangan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun pernah mengalami lonjakan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) pada tahun 2022 sebesar 12,74%, tren menurun secara konsisten hingga 8,05% di tahun 2024 mencerminkan perbaikan konsumsi gizi masyarakat dan penguatan akses terhadap pangan bergizi. Di sisi lain, ketersediaan pangan utama mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yang dimulai dengan 240,13 ton pada 2020, menurun pada 2021, namun meningkat tajam pada 2022 dan 2024 hingga mencapai 278,01 ton. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi pangan daerah masih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi iklim, produktivitas lahan, dan efisiensi distribusi.

Capaian kinerja sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi antar komoditas. Produksi padi sebagai komoditas utama sempat mengalami peningkatan dari 370.305 ton pada tahun 2021 menjadi 399.793 ton di tahun 2023, namun menurun kembali menjadi 340.997 ton pada tahun 2024, diiringi fluktuasi produktivitas dari 77,20 kw/ha pada 2021 menjadi 70,64 kw/ha pada 2024. Produksi jagung pun mengalami tren serupa, dengan kenaikan pada 2023 sebesar 21.964 ton namun turun kembali menjadi 18.494 ton pada 2024, disertai penurunan produktivitas menjadi 88,05 kw/ha. Sementara itu, produksi kedelai cenderung menurun drastis dari 5.875 ton pada 2022 menjadi 2.050 ton pada 2024, disertai penurunan produktivitas dari 27,35 kw/ha menjadi 22,33 kw/ha. Komoditas hortikultura relatif stabil dengan kenaikan dari 2.743,6 ton pada 2021 menjadi 2.442,4 ton pada 2024. Produksi ubi kayu mengalami penurunan tajam di tahun 2023 (1.315 ton) namun meningkat menjadi 9.654 ton pada 2024 dengan produktivitas 279,83 kw/ha. Untuk subsektor tanaman industri, produksi kelapa, lada, mete, dan tebu menunjukkan fluktuasi, di mana produksi tebu menurun tajam dari 2.933 ton pada 2022 menjadi 1.374,45 ton pada 2024. Pada sisi ketahanan pangan, ketersediaan energi per kapita mengalami peningkatan dari 3.765 kkal/kapita/hari pada 2021 menjadi 3.882 kkal/kapita/hari di tahun 2022, meskipun data konsumsi energi tahun 2023 dan 2024 belum tersedia.

Di sisi peternakan, produksi daging meningkat dari 13.795,80 ton di tahun 2021 menjadi 14.384,28 ton pada 2024, sementara produksi telur juga mengalami peningkatan dari 13.406,30 ton pada 2021 menjadi 14.031,19 ton pada tahun 2024. perkembangan jumlah ternak di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi yang signifikan antar jenis ternak besar dan kecil. Pada kategori ternak besar, jumlah kuda muda sempat meningkat tajam dari 47 ekor pada tahun 2020 menjadi 169 ekor pada 2023, namun mengalami penurunan drastis

menjadi hanya 29 ekor pada 2024; tren serupa terjadi pada kuda dewasa yang mencapai puncak 263 ekor pada 2023 lalu menurun menjadi 39 ekor pada 2024. Kerbau muda dan dewasa menunjukkan tren kenaikan stabil hingga 2023 namun kembali menurun pada 2024, masing-masing menjadi 52 dan 89 ekor. Populasi sapi muda dan dewasa mengalami penurunan tajam, dengan sapi muda berkurang dari 14.312 ekor pada 2023 menjadi 10.561 ekor pada 2024, dan sapi dewasa dari 13.150 ekor menjadi 9.032 ekor dalam periode yang sama. Sementara itu, pada kelompok ternak kecil, populasi ayam ras menunjukkan lonjakan luar biasa dari 5.873.955 ekor pada 2023 menjadi 12.517.651 ekor pada 2024, menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat, diikuti oleh ayam bukan ras yang meningkat menjadi 1.182.717 ekor di tahun 2024. Jumlah itik muda meningkat hingga 2023 namun mengalami penurunan menjadi 68.946 ekor pada 2024, dan jumlah itik dewasa pun menurun dari 213.244 ekor pada 2023 menjadi 168.322 ekor pada 2024. Perubahan dinamika populasi ternak ini mencerminkan adanya fluktuasi produksi peternakan yang dapat dipengaruhi oleh faktor teknis, kebijakan dukungan, penyakit ternak, perubahan iklim, maupun preferensi pasar, sehingga memerlukan strategi pengembangan peternakan yang adaptif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kondisi indikator kemandirian pangan tersebut menggambarkan pentingnya intervensi dan inovasi sektor pertanian guna menjaga keberlanjutan produksi, stabilitas produktivitas, dan penguatan ketahanan pangan daerah.

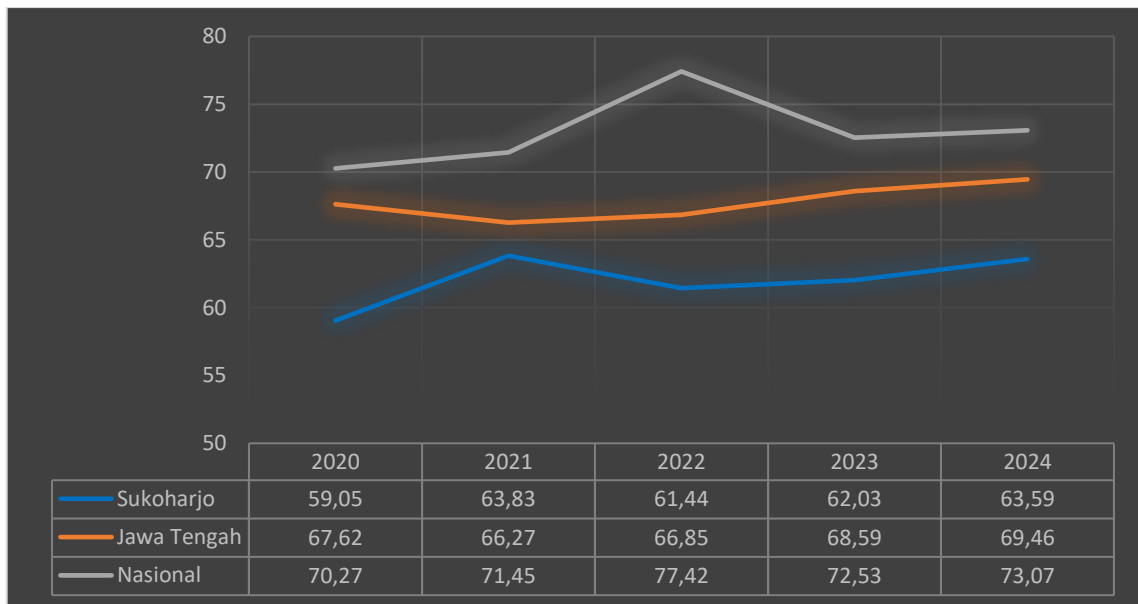
Tabel 2.3 Perkembangan Indikator Kemandirian Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan (angka)	88,76	88,7	89,11	91,02	90,93
Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernutrition</i>), dalam %	11,54	11,92	12,74	10,31	8,05
Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	240,13	217,68	270,98	248,8	278,01

Sumber: Dinas Pangan (Diolah)

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

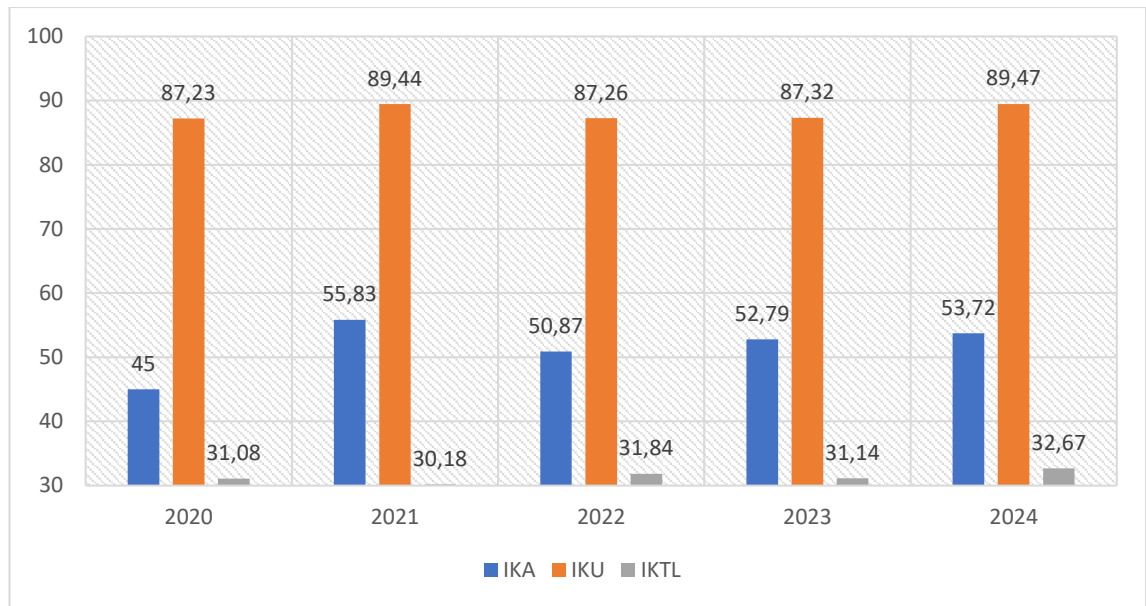
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukoharjo semakin baik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024, dengan capaian meningkat dari 59,05 pada tahun 2020 (kategori kurang baik, $50 < \text{IKLH} \leq 60$) menjadi 63,59 pada tahun 2024 (kategori cukup baik, $60 < \text{IKLH} \leq 70$), yang mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran dan perlindungan sumber daya alam. Peningkatan IKLH Kabupaten Sukoharjo tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan capaian IKLH Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,46 dan nasional sebesar 73,07 pada tahun 2024, menunjukkan adanya kesenjangan dalam kualitas lingkungan, terutama disebabkan oleh tekanan terhadap kualitas lahan akibat alih fungsi yang tinggi dan keterbatasan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.15 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Indeks)

Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang beragam, serta turut mempengaruhi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara agregat. IKA menunjukkan tren peningkatan dari kategori “kurang” pada tahun 2020 (45) menjadi kategori “sedang” sejak tahun 2021, dengan capaian 53,72 pada 2024. Namun, kualitas air sungai tetap menjadi perhatian serius mengingat parameter pencemar seperti BOD, COD, TSS, dan Fecal Coliform banyak melebihi baku mutu, terutama karena Kabupaten Sukoharjo dilewati oleh 34 sungai besar dalam sistem Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Solo Hulu. Di sisi lain, IKU konsisten berada pada kategori “baik” dengan capaian tertinggi 89,47 pada 2024, meskipun fluktuatif akibat tekanan dari transportasi dan aktivitas industri yang menghasilkan berbagai polutan udara. Sementara itu, IKTL mengalami tren fluktuatif dengan peningkatan perlahan dari 31,08 (2020) menjadi 32,67 (2024), tetapi tetap berada pada tingkat yang cukup rendah, mencerminkan tantangan dalam pengendalian alih fungsi lahan serta keterbatasan dalam teknologi pemetaan dan pengelolaan tutupan lahan. Ketiga indeks ini berkontribusi langsung terhadap IKLH Kabupaten Sukoharjo, di mana meskipun terdapat peningkatan IKLH dari 59,05 (2020) menjadi 63,59 (2024), capaian ini masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Oleh karena itu, perbaikan kualitas air dan tutupan lahan menjadi agenda penting dalam memperkuat pengelolaan lingkungan dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.16 Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Indeks)

Perkembangan timbulan sampah di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020 hingga 2022 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan dominasi timbulan berasal dari sektor rumah tangga dan non-industri. Pada tahun 2020, timbulan sampah mencapai 365.375,00 kg/hari, mengalami penurunan menjadi 360.030,45 kg/hari di tahun 2021 yang dapat dikaitkan dengan kebijakan pembatasan sosial dan anjuran tinggal di rumah selama pandemi Covid-19, sebelum kembali meningkat menjadi 362.525,64 kg/hari di tahun 2022. Sementara itu, sampah dari kegiatan industri menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, dari 582,52 m³/hari pada 2020 menjadi 362 m³/hari pada 2022, di mana sektor industri kesehatan (seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik) merupakan penyumbang terbesar timbulan sampah industri, terutama pada masa pandemi. Proporsi timbulan sampah pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sektor non-industri menyumbang sekitar 85% (2.246,59 m³/hari), sedangkan industri menyumbang 15% (407,42 m³/hari), dan pada tahun 2022, proporsinya berubah menjadi 86% (2.262,16 m³/hari atau 362.525,64 kg/hari) untuk non-industri dan 14% (362 m³/hari) untuk industri. Berdasarkan data Dinas lingkungan hidup, pada tahun 2023 meningkat menjadi 2.279,36 m³/hari dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 2.291,18 m³/hari. Data ini menegaskan bahwa timbulan sampah rumah tangga merupakan sumber utama beban pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo. Dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Kabupaten Sukoharjo memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mojorejo di Kecamatan Bendosari seluas 4,5 hektare dengan sistem kontrol landfill dan kapasitas sebesar 900.000 m³, yang pada tahun 2022 telah terisi sebesar 895.731 m³ atau sekitar 99,5% dari kapasitas maksimal, mengindikasikan perlunya kebijakan strategis terkait keberlanjutan fasilitas TPA. Di samping itu, keberadaan

14 Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) dan 244 bank sampah berperan penting dalam mendukung pengurangan volume sampah ke TPA dan meminimalkan praktik pembuangan sampah secara liar yang disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah di tingkat lokal. Optimalisasi sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan persampahan di Sukoharjo secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, tercatat jumlah timbulan sampah mencapai 133.804,91 ton per tahun yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikalikan dengan faktor estimasi timbulan per kapita. Dari total timbulan tersebut, sebanyak 21.753,25 ton atau setara 16,26% berhasil dikurangi melalui tiga mekanisme utama, yakni pembatasan timbulan sampah sebesar 450,09 ton, pemanfaatan kembali sebesar 648,53 ton, serta pendauran ulang sebesar 20.654,63 ton. Di sisi lain, penanganan sampah yang meliputi proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir mencapai 84.046,72 ton atau 62,81% dari total timbulan. Secara lebih rinci, proses pengolahan mencatatkan konversi sampah menjadi bahan baku (misalnya untuk pakan ternak, kompos, atau *upcycle*) sebesar 16,42 ton, sedangkan pemanfaatan sebagai sumber energi belum terealisasi. Mayoritas penanganan sampah dilakukan melalui pemrosesan akhir dengan volume mencapai 84.030,30 ton. Jika digabungkan, total sampah yang berhasil dikelola pada tahun tersebut sebanyak 105.799,97 ton atau sekitar 79,07% dari total timbulan sampah. Namun demikian, masih terdapat sisa sampah sebesar 28.004,94 ton atau 20,93% yang belum terkelola secara optimal. Angka ini menandakan bahwa meskipun capaian pengelolaan sampah Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan efektivitas strategi pengurangan dan penanganan sampah secara terintegrasi guna mencapai target pengelolaan sampah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sukoharjo masih menunjukkan kebutuhan peningkatan signifikan dalam rangka mendukung kualitas lingkungan dan keberlanjutan tata ruang wilayah. Berdasarkan data yang tersedia, luas taman sebagai RTH publik hanya mencapai 2,89 ha, sementara kawasan lindung yang berfungsi sebagai RTH memiliki luasan 1.482 ha yang terdiri dari kawasan hutan lindung (297 ha), sempadan sungai (1.173 ha), kawasan sekitar danau atau waduk (5 ha), dan sempadan mata air (7 ha). Meskipun kawasan dengan fungsi ekologis telah menyumbang cukup besar dalam total luasan RTH, kontribusi ruang terbuka hijau dalam bentuk taman kota masih sangat minim. Hal ini menunjukkan ketimpangan antara kebutuhan ruang terbuka yang representatif secara fungsional dan estetis dengan penyediaan aktual di kawasan perkotaan. Peningkatan luasan RTH melalui pembangunan RTH publik maupun privat menjadi penting, seperti taman kota, taman lingkungan, dan jalur hijau, serta mendorong penerapan konsep *green building* yang menyediakan ruang terbuka pada lahan-lahan terbangun. Penambahan RTH sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan

iklim, peningkatan kualitas udara dan air, serta penyediaan ruang interaksi sosial dan rekreasi bagi masyarakat Sukoharjo.

Tabel 2.4 Luas RTH Berdasarkan Tipologi RTH

No	RTH Berdasarkan Tipologi	Luas (Ha)
A	Kawasan/Zona RTH	
1	Kawasan Hutan Lindung	297
B	Kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH	
1	Sempadan Sungai	1.173
2	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	5
3	Sempadan Mata Air	7
	Total Luas	1.482

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

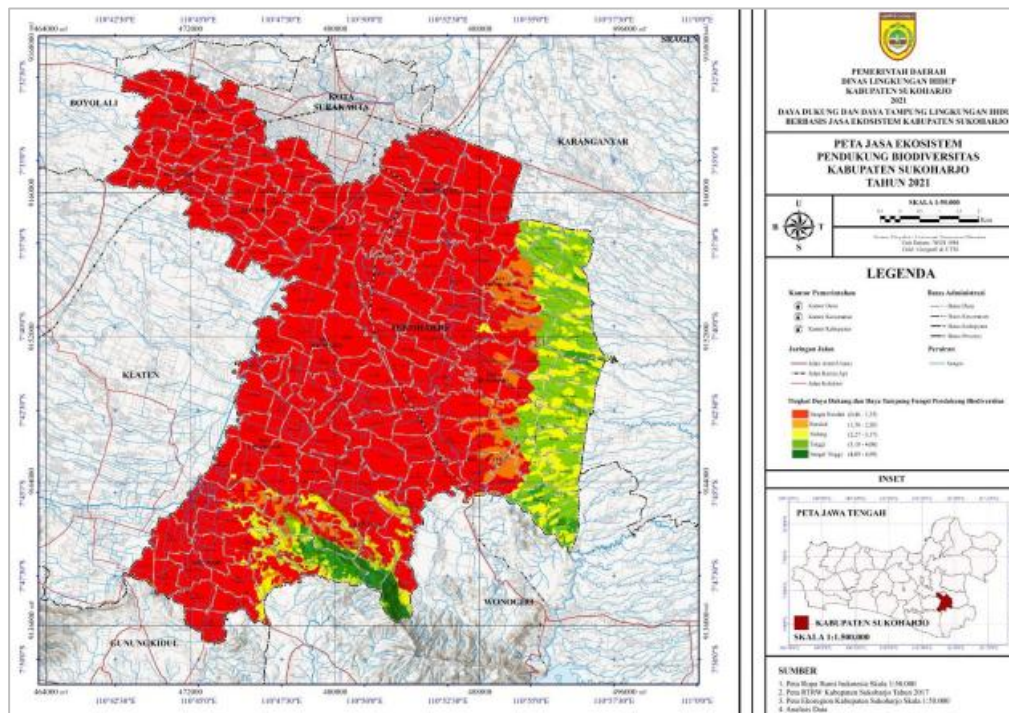
Kondisi jasa lingkungan keanekaragaman hayati (biodiversitas) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa mayoritas wilayah berada pada kategori biodiversitas sangat rendah, terutama di kecamatan dengan dominasi tutupan lahan permukiman dan sawah, seperti Kecamatan Baki, Gatak, Grogol, Kartasura, Mojolaban, dan Sukoharjo. Luas wilayah dengan biodiversitas sangat rendah ini mencapai 38.919,26 hektar atau sekitar 79% dari total wilayah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menunjukkan degradasi fungsi ekologis dan menurunnya kapasitas habitat alami dalam mendukung kehidupan flora dan fauna. Biodiversitas yang tinggi dan sangat tinggi hanya ditemukan di sebagian kecil wilayah, yakni pada kawasan dengan tutupan lahan hutan yang masih lestari, seperti di Kecamatan Bulu (dengan biodiversitas sangat tinggi seluas 843,94 ha) serta Kecamatan Polokarto (dengan biodiversitas tinggi seluas 1.572,47 ha). Sementara itu, kategori sedang dan rendah terdapat pada enam kecamatan lainnya, yaitu Bendosari, Bulu, Nguter, Polokarto, Tawang Sari, dan Weru, dengan total luasan hanya sekitar 11% dari keseluruhan wilayah. Keanekaragaman hayati yang terbatas ini sangat berkaitan dengan kondisi ekoregion Sukoharjo yang didominasi oleh dataran rendah dan aktivitas alih fungsi lahan yang intensif. Pelestarian kawasan bervegetasi tinggi dan perbukitan berhutan perlu ditingkatkan guna mempertahankan habitat alami dan mendukung keberlanjutan fungsi ekologis di Kabupaten Sukoharjo.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.17 Grafik Sebaran Persentase Lingkungan Biodiversitas Kabupaten Sukoharjo

Berikut peta jasa lingkungan biodiversitas Kabupaten Sukoharjo berdasarkan KLHS RPJMD 2025-2029.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.18 Peta Jasa Lingkungan Biodiversitas Kabupaten Sukoharjo

2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren penurunan signifikan selama periode 2020–2024. IRB Kabupaten Sukoharjo semula dari angka 93,2 pada tahun 2020 menjadi 64,18 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat serta perbaikan dalam aspek kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penurunan IRB mengindikasikan bahwa Kabupaten Sukoharjo telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Meskipun demikian, angka IRB Sukoharjo masih berada dalam kategori sedang sehingga tetap memerlukan upaya lanjutan untuk mencapai kategori risiko rendah. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan, IRB Sukoharjo secara konsisten lebih rendah dari angka provinsi, yang pada tahun 2020 berada di angka 132,99 dan menurun menjadi 99,61 pada tahun 2024, menunjukkan Kabupaten Sukoharjo relatif siap dan adaptif dalam menghadapi potensi ancaman bencana.

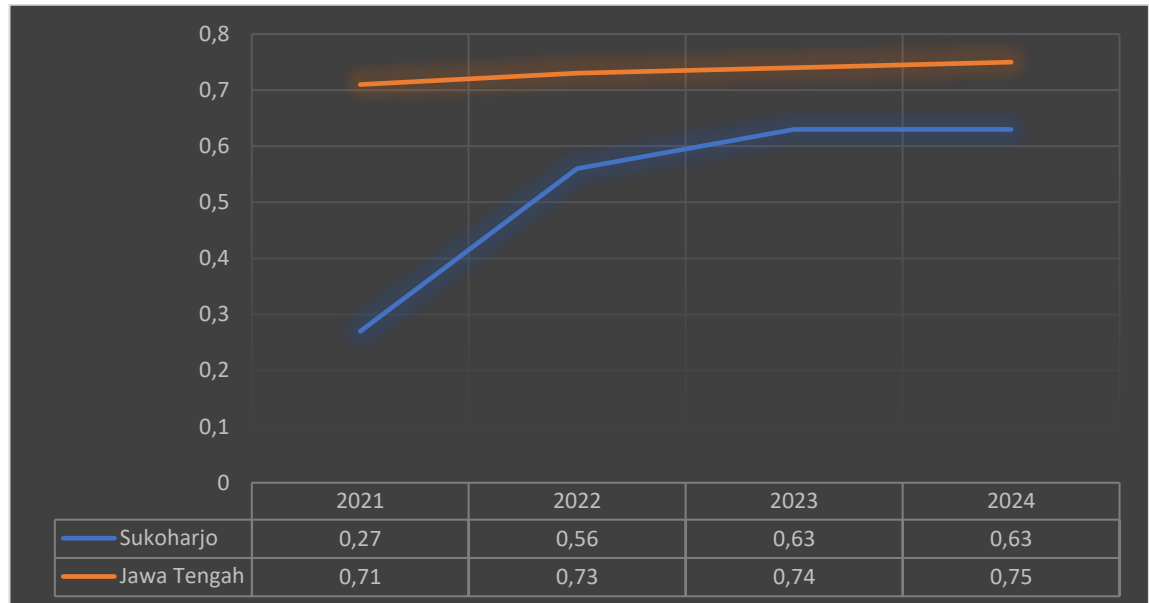


Sumber: BPBD, Kab. Sukoharjo

Gambar 2.19 Perkembangan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sukoharjo dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Indeks)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sukoharjo menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Peningkatan IKD mencerminkan meningkatnya kapasitas wilayah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. IKD Sukoharjo pada tahun 2021 hanya sebesar 0,27, kemudian melonjak menjadi 0,56 pada tahun 2022, dan terus meningkat hingga mencapai 0,63 pada tahun 2023 dan tetap bertahan di angka yang sama pada tahun 2024. Meskipun masih di bawah rata-rata IKD Provinsi Jawa Tengah yang telah mencapai 0,75 pada tahun 2024, peningkatan IKD Sukoharjo ini menunjukkan bahwa berbagai upaya mitigasi dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan

oleh pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, tren peningkatan IKD ini juga sejalan dengan tren penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB), yang menunjukkan keterkaitan antara peningkatan kapasitas daerah dengan kemampuan untuk menurunkan risiko dan dampak bencana di wilayah tersebut.



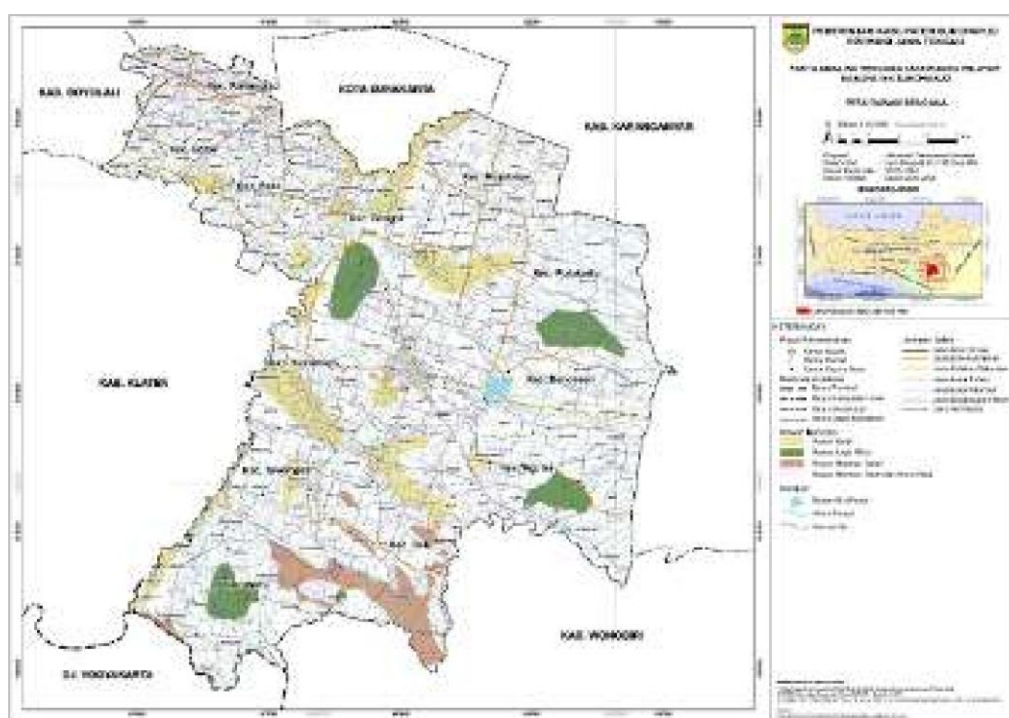
Sumber: BPBD Kab. Sukoharjo

Gambar 2.20 Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Jawa Tengah Tahun 2021-2024

Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat risiko bencana yang cukup kompleks dengan sebaran enam jenis bencana alam utama, yakni banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Kondisi geografis Sukoharjo yang terdiri atas dataran rendah dan beberapa wilayah perbukitan menyebabkan beragamnya potensi bahaya bencana. Ancaman banjir melanda hampir seluruh kecamatan, terutama yang terletak di ekoregion dataran aluvial seperti Kecamatan Baki, Grogol, Kartasura, Sukoharjo, hingga Weru. Sementara itu, cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang (puting beliung) umumnya terjadi di kecamatan yang sama dengan banjir dan diperparah oleh topografi cekungan dari berbagai sisi lereng yang menyebabkan angin memusat di wilayah dataran. Ancaman gempa bumi di Sukoharjo relatif rendah karena berada jauh dari sesar aktif, namun wilayah selatan seperti Tawangsari, Weru, Nguter, dan Bulu memiliki potensi gempa yang lebih tinggi dibanding wilayah utara. Kebakaran hutan dan lahan lebih dominan terjadi di kawasan perbukitan sisi selatan seperti Kecamatan Bulu, Tawangsari, dan Weru, dengan tingkat kerentanan sedang pada wilayah dengan perkebunan karet seperti Polokarto.

Kekeringan juga menjadi risiko yang nyata di wilayah puncak perbukitan karena morfologi dan geologi yang menyebabkan keterbatasan sumber air, terutama saat musim kemarau. Daerah dengan potensi kekeringan meliputi Kecamatan Bulu, Tawangsari, dan Weru. Tanah longsor pun mengancam wilayah

perbukitan dengan lereng curam seperti Kecamatan Bulu, Weru, dan Tawang Sari. Sementara itu, wilayah dataran relatif aman terhadap longsor kecuali yang berada dekat tebing sungai yang memiliki potensi longsor lokal. Ancaman wabah menyebar merata di seluruh kecamatan. Secara keseluruhan, kondisi risiko bencana di Sukoharjo menuntut strategi mitigasi berbasis spasial dan ekologis yang mempertimbangkan karakteristik topografi, morfologi, serta intensitas kerentanan setiap jenis bencana di masing-masing kecamatan, guna mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko kebencanaan.



Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

Gambar 2.21 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sukoharjo

Berikut tabel lokasi rawan bencana Kabupaten Sukoharjo berdasarkan RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044.

Tabel 2.5 Lokasi Rawan Bencana Kabupaten Sukoharjo

No.	Jenis Bencana	Lokasi
1	Longsor	Bulu, Tawang Sari, Weru
2	Banjir	Baki, Bendosari, Gatak, Grogol, Kartasura, Mojolaban, Nguter, Polokarto, Sukoharjo, Weru, Tawang Sari
3	Cuaca Ekstrem	Bendosari, Baki, Gatak, Grogol, Kartasura, Mojolaban, Nguter, Polokarto, Sukoharjo, Tawang Sari, Bulu, Weru
4	Kekeringan	Weru
5	Gempa Bumi	Gatak, Nguter, Tawang Sari, Weru
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Bulu, Mojolaban, Nguter, Sukoharjo, Tawang Sari, Weru
7	Wabah	Seluruh Kecamatan

Sumber : RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

Berbasis data potensi ancaman bencana yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Sukoharjo, diketahui bahwa klasifikasi wilayah berdasarkan ancaman banjir menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan berada dalam kelas bahaya tinggi, dengan total luasan mencapai 32.608 hektar (ha) untuk kategori tinggi, 12.469 ha untuk sedang, dan hanya 4.239 ha yang tergolong rendah. Kecamatan dengan ancaman banjir tertinggi antara lain Bendosari (5.580 ha), Sukoharjo (4.666 ha), dan Polokarto (3.761 ha). Sementara itu, dari aspek ancaman tanah longsor, sebagian besar wilayah Kabupaten Sukoharjo tergolong rendah dengan luasan mencapai 41.025 ha, hanya 3.559 ha yang masuk kategori tinggi (mayoritas berada di Kecamatan Bulu), dan sisanya 4.265 ha berada dalam kategori sedang. Kecamatan Bulu tercatat sebagai satu-satunya wilayah dengan potensi tanah longsor tinggi signifikan, yakni 2.511 ha. Adapun pada potensi cuaca ekstrem, seluruh kecamatan diklasifikasikan dalam kelas rendah, meskipun beberapa wilayah seperti Sukoharjo (1.550 ha), Mojolaban (879 ha), dan Bulu (801 ha) memiliki area cukup luas yang tergolong dalam kategori tinggi. Total luasan wilayah dengan potensi cuaca ekstrem tinggi di seluruh kabupaten tercatat sebesar 5.096 ha, dengan 7.392 ha dalam kategori sedang, dan dominan sebesar 35.659 ha dalam kategori rendah. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo menghadapi risiko multi-bencana yang perlu ditangani secara komprehensif, baik dalam aspek mitigasi struktural (infrastruktur) maupun non-struktural (penataan ruang dan peningkatan kapasitas masyarakat).

Berikut data potensi bencana banjir di Kabupaten Sukoharjo menurut parameter dalam menentukan indeks bahaya banjir (daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, serta curah hujan).

Tabel 2.6 Potensi Ancaman Banjir Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Baki	-	-	2.293	Tinggi
2	Bendosari	-	-	5.580	Tinggi
3	Bulu	2.844	1.783	-	Rendah
4	Gatak	-	-	2.046	Tinggi
5	Grogol	-	-	3.137	Tinggi
6	Kartasura	-	-	2.169	Tinggi
7	Mojolaban	-	658	3.103	Tinggi
8	Nguter	-	2.326	3.466	Tinggi
9	Polokarto	-	2.992	3.761	Tinggi
10	Sukoharjo	-	-	4.666	Tinggi
11	Tawangsari	889	2.754	308	Sedang
12	Weru	506	1.956	2.077	Tinggi
Kabupaten Sukoharjo		4239	12469	32608	Tinggi

Sumber: *Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo*

Data potensi bencana tanah longsor di Kabupaten Sukoharjo menurut parameter dalam menentukan indeks bahaya tanah longsor (kemiringan lereng, panjang lereng, arah lereng, curah hujan, stabilitas lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, kedalaman tanah/solum, dan tipe tanah/tekstur tanah) sebagai berikut:

Tabel 2.7 Potensi Ancaman Tanah Longsor Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Baki	2293	-	-	Rendah
2	Bendosari	5580	-	-	Rendah
3	Bulu	1519	598	2511	Tinggi
4	Gatak	2046	-	-	Rendah
5	Grogol	3137	-	-	Rendah
6	Kartasura	2169	-	-	Rendah
7	Mojolaban	3761	-	-	Rendah
8	Nguter	4648	411	734	Rendah
9	Polokarto	6753	-	-	Rendah
10	Sukoharjo	4666	-	-	Rendah
11	Tawang Sari	2729	755	-	Rendah
12	Weru	1724	2501	314	Sedang
Kabupaten Sukoharjo		41025	4265	3559	Rendah

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo

Data potensi bencana tanah longsor di Kabupaten Sukoharjo menurut parameter dalam menentukan indeks bahaya cuaca ekstrem (keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan) sebagai berikut:

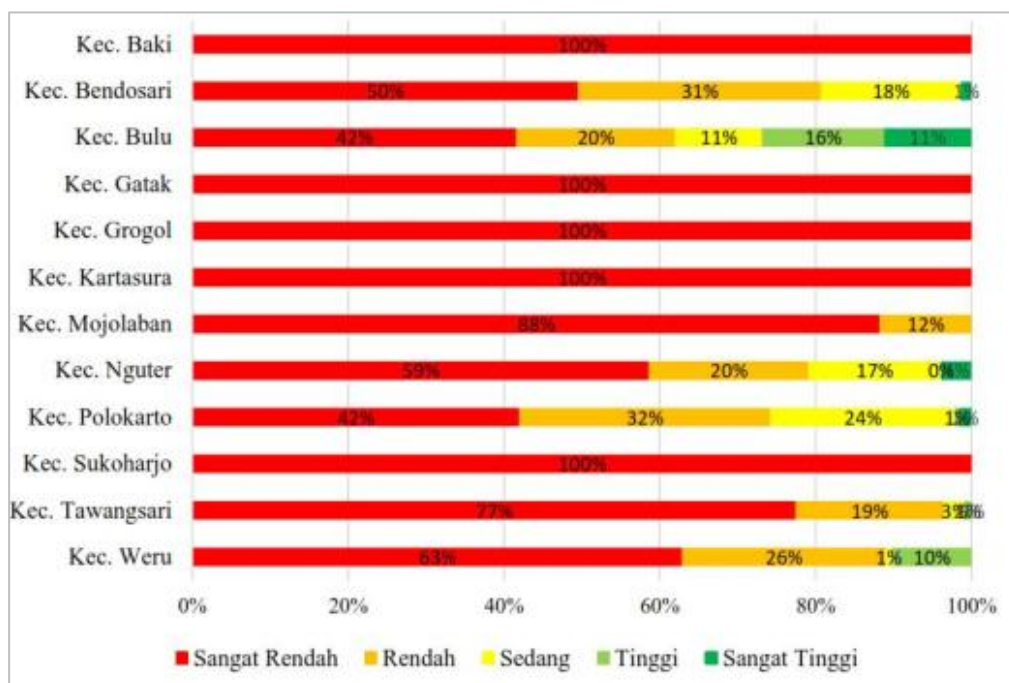
Tabel 2.8 Potensi Ancaman Cuaca Ekstrem Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Baki	1306	710	277	Rendah
2	Bendosari	4530	641	409	Rendah
3	Bulu	2666	1160	801	Rendah
4	Gatak	2046	-	-	Rendah
5	Grogol	2435	-	-	Rendah
6	Kartasura	2169	-	-	Rendah
7	Mojolaban	2005	877	879	Rendah
8	Nguter	5793	-	-	Rendah
9	Polokarto	4572	1611	569	Rendah
10	Sukoharjo	2607	508	1550	Rendah
11	Tawang Sari	3225	260	-	Rendah
12	Weru	2303	1625	610	Rendah
Kabupaten Sukoharjo		35659	7392	5096	Rendah

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo

Jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih berada dalam kategori sangat rendah dalam kemampuan infrastruktur pencegahan dan perlindungan bencana. Kabupaten Sukoharjo yang didominasi dataran aluvial

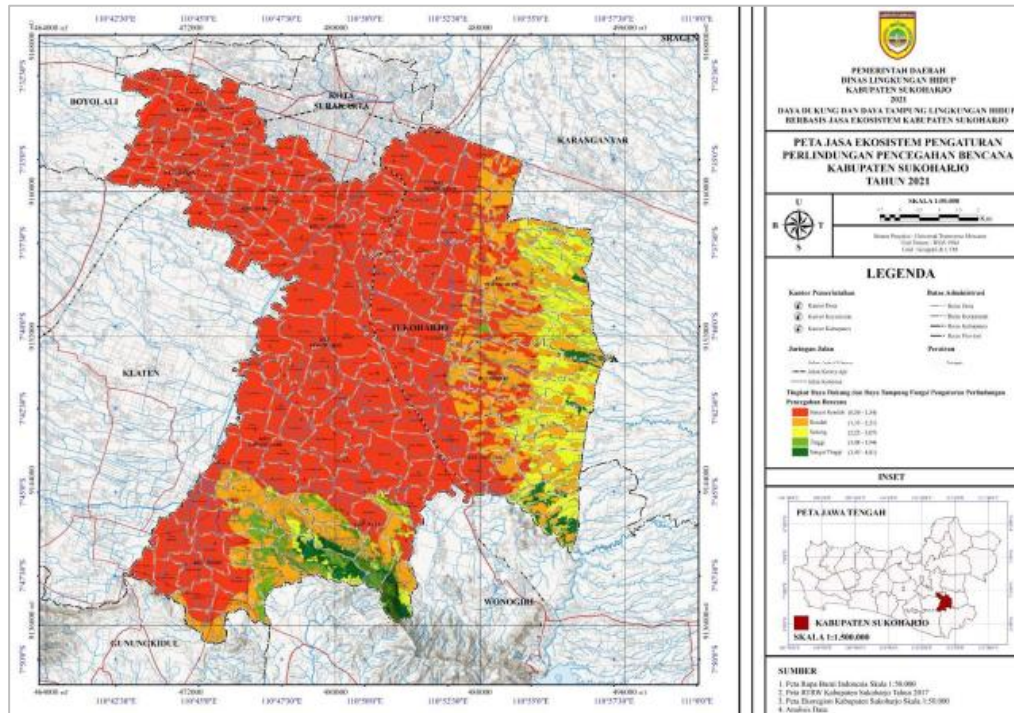
dengan tutupan lahan berupa permukiman memiliki risiko tinggi terhadap banjir dan cuaca ekstrem, terutama di wilayah utara dan tengah. Di sisi lain, wilayah selatan seperti Kecamatan Bulu dan Weru memiliki risiko tinggi terhadap tanah longsor dan kekeringan akibat kondisi morfologi perbukitan denudasional. Kecamatan Bulu menempati kelas jasa lingkungan sangat tinggi (521,47 ha) dan tinggi (725,94 ha), disusul Kecamatan Weru dan Nguter. Untuk kelas sedang, Kecamatan Polokarto dan Nguter mendominasi, sementara kelas rendah tersebar di berbagai wilayah termasuk Polokarto dan Bendosari. Adapun kelas sangat rendah mencakup mayoritas wilayah Sukoharjo dengan luas 34.491,09 ha atau 70 persen dari total wilayah, termasuk lima kecamatan yang seluruhnya tergolong dalam kelas sangat rendah yaitu Baki, Gatak, Grogol, Kartasura, dan Sukoharjo. Kondisi ini menunjukkan perlu peningkatan resiliensi wilayah terhadap bencana untuk meminimalisir kerentanan terhadap berbagai jenis ancaman bencana.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.22 Grafik Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

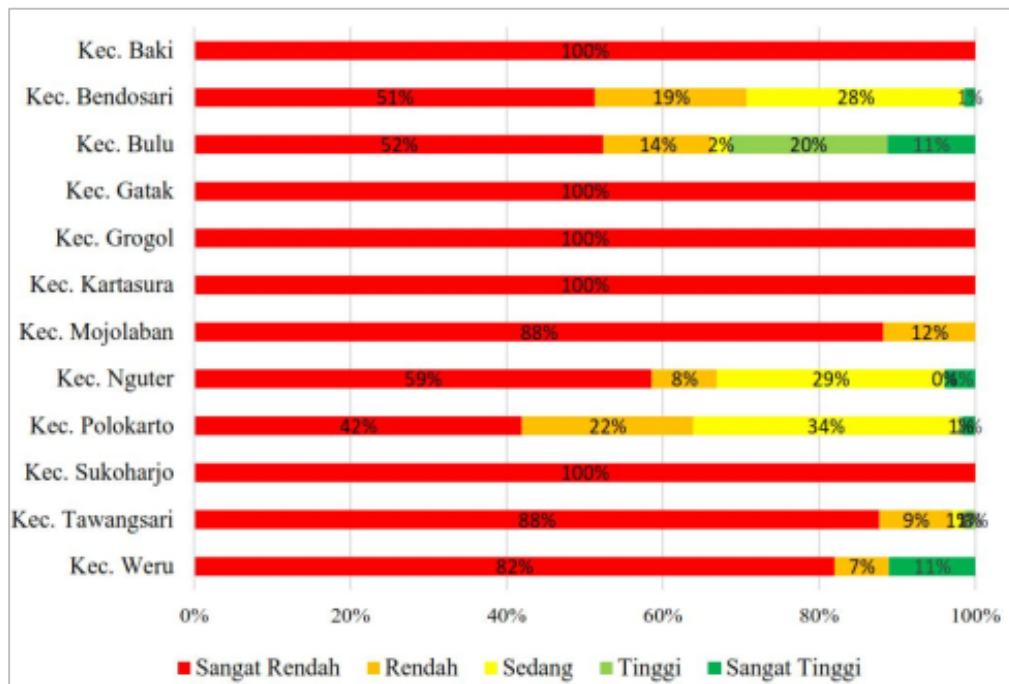
Berikut peta jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan bencana Kabupaten Sukoharjo berdasarkan KLHS RPJMD 2025-2029.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.23 Peta Jasa Lingkungan Pencegahan Dan Perlindungan Bencana Kabupaten Sukoharjo

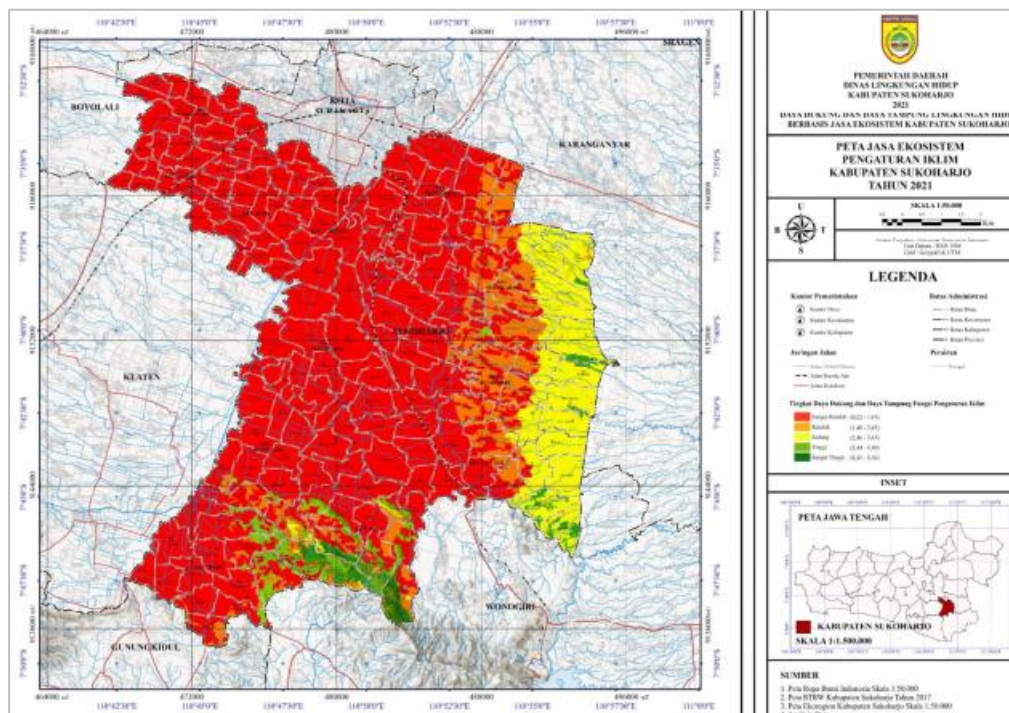
Jasa lingkungan pengaturan iklim di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan karakteristik dominan dengan kategori kelas sangat rendah dan rendah, seiring dengan struktur ekoregion yang didominasi oleh dataran aluvial dan tutupan lahan berupa permukiman. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kontribusi ekologis wilayah permukiman terhadap fungsi pengaturan iklim, terutama karena permukiman tidak memiliki kemampuan serapan karbon atau pengaruh mikroklimat yang signifikan. Sebaliknya, fungsi pengaturan iklim yang lebih baik cenderung terpusat pada wilayah kaki lereng dan perbukitan, di mana masih terdapat tutupan lahan alami atau hutan. Kecamatan Bulu menempati posisi strategis sebagai kawasan dengan peran penting dalam pengaturan iklim, dengan luasan kelas sangat tinggi mencapai 521,47 ha dan kelas tinggi seluas 939,77 ha, didukung oleh keberadaan hutan yang luas. Selain itu, Kecamatan Polokarto menunjukkan kontribusi yang cukup besar pada kategori kelas sedang dan rendah, masing-masing seluas 2.271,80 ha dan 1.468,97 ha, yang mencerminkan keberagaman tutupan lahan di wilayah tersebut. Kategori kelas sangat rendah tersebar di seluruh kecamatan dan merupakan indikasi degradasi jasa pengaturan iklim akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.24 Grafik Sebaran Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Sukoharjo

Berikut peta jasa lingkungan pengaturan iklim Kabupaten Sukoharjo berdasarkan KLHS RPJMD 2025-2029.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.25 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Sukoharjo

Total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren penurunan signifikan dari tahun 2019 hingga 2022. Total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 4.600,07 Gg CO₂ eq pada tahun 2019 menjadi 1.857,60 Gg CO₂ eq pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung target nasional pengurangan emisi, sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim global. Sektor energi tetap menjadi penyumbang terbesar emisi GRK dengan kontribusi sebesar 65,42% pada tahun 2022, meskipun mengalami penurunan dari 2.064,42 Gg CO₂ eq (2019) menjadi 1.215,27 Gg CO₂ eq (2022). Sektor pertanian menjadi penyumbang emisi terbesar kedua pada tahun 2022 sebesar 29,79%, sementara sektor pengelolaan limbah menunjukkan peningkatan dari 65,16 Gg CO₂ eq (2019) menjadi 97,52 Gg CO₂ eq (2022), atau sekitar 5,25% dari total emisi. Sektor kehutanan secara konsisten menunjukkan angka negatif, yang berarti memberikan kontribusi sebagai penyerap karbon, dengan nilai tertinggi penyerapannya tercatat pada tahun 2020 sebesar -28,40 Gg CO₂ eq.

Berdasarkan pembaruan data tahun 2023 dan 2024, total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Sukoharjo menurun dari tahun 2022 menjadi 1.687,97 Gg CO₂ eq pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 1.358,46 Gg CO₂ eq pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan efektivitas berbagai upaya mitigasi emisi yang dilakukan pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan respons terhadap krisis iklim global. Sektor energi tetap menjadi kontributor terbesar emisi GRK meskipun terjadi penurunan signifikan, dari tahun 2022 menjadi 1.161,84 Gg CO₂ eq (68,83%) pada 2023, dan kembali turun menjadi 825,66 Gg CO₂ eq (60,92%) pada 2024. Sektor pertanian menjadi penyumbang emisi terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 26,82% (452,79 Gg CO₂ eq) pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 33,54% (457,91 Gg CO₂ eq) pada tahun 2024. Sektor pengelolaan limbah juga menunjukkan peningkatan kontribusi secara bertahap, dari 97,52 Gg CO₂ eq (2022) menjadi 76,79 Gg CO₂ eq (2023) dan 81,03 Gg CO₂ eq (2024), dengan proporsi terhadap total emisi sebesar 5,25%, 4,55%, dan 5,99% secara berurutan. Di sisi lain, sektor kehutanan tetap menunjukkan peran penting sebagai penyerap karbon, meskipun nilai serapannya menurun, yakni dari -15,98 Gg CO₂ eq (2022) menjadi -10,78 Gg CO₂ eq (2023) dan -11,28 Gg CO₂ eq (2024). Dengan tren positif penurunan emisi dan pemanfaatan potensi serapan karbon dari sektor kehutanan, Kabupaten Sukoharjo menunjukkan arah pembangunan yang semakin selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon.

Tabel 2.9 Perkembangan Besar Emisi Yang Dihasilkan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Sektor	2020		2021		2022		2023*		2024*	
	Gg CO ₂ eq	(%)	Gg CO ₂ eq	(%)	Gg CO ₂ eq	(%)	Gg CO ₂ eq	(%)	Gg CO ₂ eq	(%)
Energi	1.508,63	62,83	1.429,25	72,77	1.215,27	65,42	1.161,84	68,83	825,66	60,92
Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	250,16	10,42	6,03	0,31	7,33	0,39	7,33	0,43	5,14	0,38
Pertanian	601,89	25,06	480	24,44	553,46	29,79	452,79	26,82	457,91	33,54
Kehutanan	-28,40	-1,18	-22,67	-1,15	-15,98	-0,86	-10,78	-0,63	-11,28	-0,83
Pengelolaan Limbah	69,01	2,87	71,35	3,63	97,52	5,25	76,79	4,55	81,03	5,99
Jumlah	2.401,29	100	1.963,95	100	1.857,60	100	1.687,97	100	1.358,46	100

Keterangan: *) Update data dari Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

2.1.1.7 Demografi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mengoptimalkan pengelolaan wilayah berdasarkan dinamika demografisi agar potensi pertumbuhan dapat **diakselerasi secara berkelanjutan**. Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 mencatat jumlah penduduk sebesar 916.472 jiwa dengan komposisi seimbang antara laki-laki (458.337 jiwa) dan perempuan (458.135 jiwa). Struktur penduduk menunjukkan dominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun) yang mencapai 638.161 jiwa atau sekitar 69,63% dari total penduduk, menjadi indikasi kuat adanya potensi bonus demografi yang dapat mendorong akselerasi pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, dominasi usia produktif juga menuntut kesiapan daerah dalam penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan penguatan kualitas SDM agar tidak menjadi beban ekonomi akibat tingginya tingkat pengangguran. Sementara itu, kelompok usia non-produktif terdiri dari usia muda (0–14 tahun) sebanyak 191.796 jiwa (20,93%) dan usia lanjut (65 tahun ke atas) sebanyak 86.515 jiwa (9,44%), mengindikasikan adanya beban tanggungan terhadap penduduk usia produktif yang masih cukup besar, meskipun masih dalam batas wajar untuk memanfaatkan peluang bonus demografi. Berdasarkan perhitungan dependency ratio atau rasio ketergantungan, yaitu perbandingan jumlah penduduk non-produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun), diperoleh rasio sebesar 43,61%, artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 44 orang usia non-produktif. Rasio ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo saat ini berada dalam kondisi demografis yang relatif menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi, namun tetap perlu strategi antisipatif terhadap ketimpangan distribusi penduduk.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	28.122	26.721	54.843
5–9	34.373	32.211	66.584
10–14	36.035	34.334	70.369
15–19	36.461	34.049	70.510
20–24	35.410	33.939	69.349
25–29	33.611	32.496	66.107
30–34	32.047	31.444	63.491
35–39	30.800	30.534	61.334
40–44	36.426	35.823	72.249
45–49	34.477	34.677	69.154
50–54	29.821	31.034	60.855
55–59	27.773	29.933	57.706
60–64	22.508	24.898	47.406
65–69	17.141	18.051	35.192
70–74	11.553	11.877	23.430
75+	11.779	16.114	27.893
Jumlah Usia 0-14	98.530	93.266	191.796
Jumlah Usia 15-64	319.334	318.827	638.161
Jumlah Usia 65 ke Atas	40.473	46.042	86.515
Dependency Ratio (%)			43,61
Kabupaten Sukoharjo	458.377	458.135	916.472

Sumber: BPS (Diolah)

Sebaran penduduk yang masih belum merata, dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Kartasura (5.361 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Bulu (794 jiwa/km²), perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan wilayah dan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar. Rasio jenis kelamin yang hampir seimbang (99,9%) menunjukkan komposisi gender yang stabil, sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 0,96% mengindikasikan tren pertumbuhan yang moderat.

Tabel 2.11 Perbandingan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, 2023 dan 2024

Kecamatan	Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk 2019*-2020 (%)			Distribusi Penduduk (%)		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		Rasio Jenis Kelamin (%)	
	2023	2024	2010-2020	2020-2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
010 Weru	56.468	57.059	0,48	1,08	1,05	6,03	6,06	1.238,33	1.251	99,49	99,5
020 Bulu	36.129	36.845	1,54	2,02	1,98	3,82	3,91	778,64	794	101,42	100,9
030 Tawang Sari	53.921	54.412	0,32	0,94	0,91	5,76	5,78	1.371,34	1.384	100,38	100,2
040 Sukoharjo	99.642	100.572	0,35	0,97	0,93	10,65	10,68	2.128,19	2.148	100,69	100,8
050 Nguter	55.644	56.825	1,43	2,16	2,12	5,85	6,03	961,87	982	101,65	101,7
060 Bendosari	64.579	65.644	1,16	1,68	1,65	6,85	6,97	1.158,99	1.178	99,56	99,5
070 Polokarto	86.932	88.055	0,75	1,33	1,29	9,26	9,35	1.299,63	1.316	100,43	100,4
080 Mojolaban	99.662	100.768	0,55	1,14	1,11	10,63	10,70	2.602,82	2.632	99,26	99,1
090 Grogol	128.089	128.105	0,07	0,05	0,01	14,00	13,60	4.088,38	4.089	100,13	100,1
100 Baki	78.808	79.651	0,50	1,10	1,07	8,41	8,46	3.367,86	3.404	100,72	100,7
110 Gatak	56.740	57.597	1,00	1,54	1,51	6,03	6,12	2.844,11	2.887	100,57	100,7
120 Kartasura	116.066	116.117	0,18	0,08	0,04	12,71	12,33	5.358,54	5.361	97,54	97,3
Kabupaten Sukoharjo	932.680	941.650	0,57	0,99	0,96	100,00	100,00	1.890,96	1.909	99,95	99,9

Sumber : BPS (Diolah)

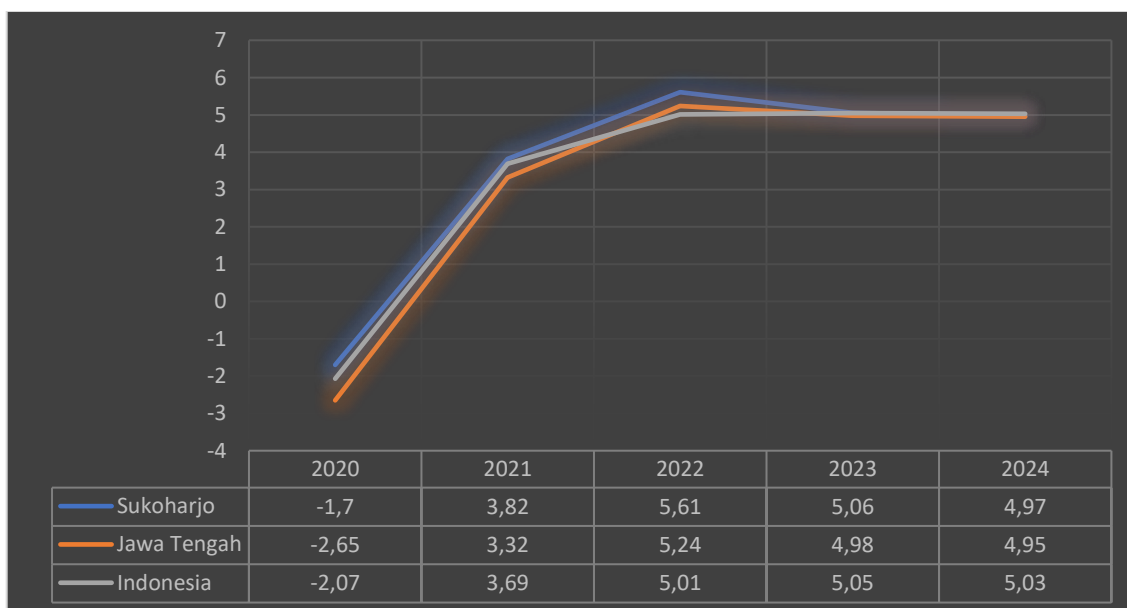
Catatan:

1. Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)
2. Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2024 (Pertengahan tahun/Juni)
3. Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 (Mei) dibandingkan dengan penduduk tahun 2020 (September)
4. Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2021 (Juni)
5. Luas provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Selama periode 2020–2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren yang positif dan relatif stabil meskipun sempat mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -1,70%, lebih baik dibandingkan Jawa Tengah (-2,65%) dan nasional (-2,07%). Selanjutnya, terjadi pemulihan signifikan pada 2021 dengan pertumbuhan 3,82% dan mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 5,61%. Meskipun terjadi penurunan pada 2023 (5,06%) dan 2024 (4,97%), laju pertumbuhan Sukoharjo tetap berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah (4,95%) dan nasional (5,03%) pada 2024. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Sukoharjo berhasil melakukan adaptasi terhadap tekanan eksternal global dan nasional serta menjaga momentum pemulihan ekonomi pascapandemi.



Sumber: BPS (data diolah)

Gambar 2.26 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Secara regional dalam lingkup wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten), kinerja ekonomi Sukoharjo tetap tergolong kompetitif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo sebesar 4,97% (2024), berada di atas Kabupaten Boyolali (4,64%) dan Klaten (4,93%), namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Wonogiri (5,11%), Karanganyar (5,39%), Sragen (5,54%), dan Kota

Surakarta yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,61%. Pola ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi berlangsung merata di kawasan Subosukawonosraten, dengan dinamika sektoral yang berbeda-beda antar daerah.

Tabel 2.12 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subosukawonosraten Tahun 2020-2024 (%)

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Boyolali	-1,2	4,63	6,33	5,63	4,64
Kabupaten Klaten	-1,17	3,82	5,90	5,70	4,93
Kabupaten Sukoharjo	-1,7	3,82	5,61	5,06	4,97
Kabupaten Wonogiri	-1,41	3,35	5,63	4,98	5,11
Kabupaten Karanganyar	-1,87	3,57	5,87	5,53	5,39
Kabupaten Sragen	-1,81	3,75	5,76	5,23	5,54
Kota Surakarta	-1,76	4,01	6,25	5,57	5,61

Sumber: BPS (data diolah)

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menunjukkan dinamika yang mencerminkan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi serta dampak tidak langsung lainnya yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan. Meskipun secara agregat laju pertumbuhan PDRB menurun tipis dari 5,06% (2023) menjadi 4,97% (2024), beberapa sektor mengalami pertumbuhan sangat tinggi. Sektor jasa perusahaan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,76%, meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil (0,47%), diikuti sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 9,24% dengan kontribusi signifikan sebesar 6,11%. Sektor-sektor lainnya seperti administrasi pemerintahan (8,20%), konstruksi (7,41%), dan jasa lainnya (6,51%) juga mencatat pertumbuhan yang kuat. Namun, terdapat sektor yang mengalami kontraksi, terutama sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang menurun menjadi sebesar 8,11%, menandakan masih adanya tekanan terhadap sektor pariwisata dan konsumsi masyarakat meskipun kontribusinya terhadap PDRB mencapai 4,05%. Secara keseluruhan, struktur perekonomian Sukoharjo menunjukkan pemulihan yang cukup baik dengan sektor jasa dan konstruksi sebagai penggerak utama, meskipun masih terdapat tekanan pada sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap kondisi eksternal.

Tabel 2.13 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo (persen), 2020–2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,94	3,58	0,89	2,68	1,34
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,21	1,56	-4,91	-5,41	5,89
C	Industri Pengolahan	-2,75	2,63	4,44	3,23	3,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,38	4,66	4,40	5,49	5,31
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,35	3,65	1,65	5,80	6,14
F	Konstruksi	-2,86	4,22	1,76	6,19	7,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,50	5,70	4,13	5,01	5,25
H	Transportasi dan Pergudangan	-31,75	3,83	66,99	6,34	5,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,27	5,07	14,74	10,65	8,11
J	Informasi dan Komunikasi	25,75	9,64	2,10	11,24	9,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,30	1,67	2,03	3,20	2,49
L	Real Estat	0,08	2,02	4,43	6,81	4,73
M,N	Jasa Perusahaan	-1,67	3,35	4,88	6,55	10,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-2,41	-0,80	2,15	5,05	8,20
P	Jasa Pendidikan	-2,64	1,49	2,38	5,70	5,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,27	0,06	1,23	5,27	6,10
R,S, T,U	Jasa Lainnya	-3,01	1,10	14,13	7,82	6,51
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK	-1,70	3,82	5,61	5,06	4,97

Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Sukoharjo, nilai total PDRB pada tahun 2024 mencapai Rp49,987,03 miliar atau sekitar Rp49,99 triliun, meningkat dari Rp46,82 triliun pada tahun sebelumnya. Struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 38,15 persen terhadap total PDRB. Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, tetap menjadi sektor kedua terbesar dengan kontribusi sebesar 17,22 persen. Pertumbuhan nilai PDRB juga didukung oleh peningkatan signifikan di sektor konstruksi dan transportasi-pergudangan yang menunjukkan pemulihan dan ekspansi infrastruktur dan logistik pasca-pandemi. Kenaikan kontribusi sektor informasi dan komunikasi (6,11%) serta jasa pendidikan dan kesehatan ikut berkontribusi terhadap dinamika struktur ekonomi Sukoharjo yang semakin mengarah pada sektor industri dan jasa bernilai tambah tinggi. Hal ini menandakan bahwa perekonomian daerah terus bergerak pada sektor-sektor yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar.

Tabel 2.14 Perkembangan Distribusi/Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024 (%)

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,75	8,65	8,31	8,30	8,14
B	Pertambangan dan Penggalian	0,43	0,42	0,38	0,34	0,33
C	Industri Pengolahan	39,10	38,98	38,74	38,32	38,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04
F	Konstruksi	6,71	6,86	6,77	6,89	6,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,01	17,28	17,11	17,14	17,22
H	Transportasi dan Pergudangan	2,37	2,39	3,85	4,07	4,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,55	3,59	3,91	3,94	4,05
J	Informasi dan Komunikasi	6,03	6,26	5,83	5,98	6,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,87	3,85	3,84	3,37	3,60
L	Real Estat	2,28	2,22	2,15	2,14	2,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	0,43	0,43	0,44	0,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,23	2,08	1,98	1,96	2,03
P	Jasa Pendidikan	4,52	4,38	4,122	4,04	4,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,10	1,03	1,02	1,02
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1,43	1,38	1,50	1,56	1,59
	Total Distribusi/Kontribusi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai PDRB ADHB	36.890,53	38.990,46	42.819,99	46.821,25	49.987,03

Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS (Diolah)

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran di Kabupaten Sukoharjo tahun 2020–2024, struktur ekonomi daerah ini menunjukkan pergeseran yang dinamis sebagai hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa perubahan perilaku konsumsi dan investasi domestik tercermin dari peningkatan signifikan pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang pada tahun 2024 mencapai Rp33,68 triliun, meningkat dari Rp31,52 triliun pada tahun sebelumnya, serta peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dari Rp10,39 triliun menjadi Rp11,21 triliun. Sementara itu, faktor eksternal seperti perkembangan teknologi dan globalisasi perdagangan juga turut mendorong peningkatan nilai ekspor neto barang dan jasa dari Rp1,74 triliun di tahun 2023 menjadi Rp2,10 triliun pada tahun 2024. Konsumsi oleh LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah

Tangga) dan Pemerintah juga tumbuh stabil masing-masing menjadi Rp696,84 miliar dan Rp2,19 triliun. Secara keseluruhan, total PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp49,99 triliun pada 2024, mencerminkan arah pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang positif pasca pandemi COVID-19, dengan struktur pengeluaran yang didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, menandakan daya beli masyarakat yang mulai pulih dan kegiatan produksi yang kembali membaik.

Tabel 2.15 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.431,00	26.339,52	29.021,65	31.519,50	33.683,08
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	435,38	457,82	523,32	577,80	696,84
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.971,59	1.974,51	2.027,18	2.141,85	2.186,59
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.684,87	9.224,99	9.744,97	10.388,89	11.209,88
Perubahan Inventori	102,49	116,17	135,86	148,35	110,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	265,20	877,46	1.327,65	1.744,86	2.100,58
PDRB / GRDP	36.890,53	38.990,46	42.780,63	46.520,85	49.987,03

Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS (Diolah)

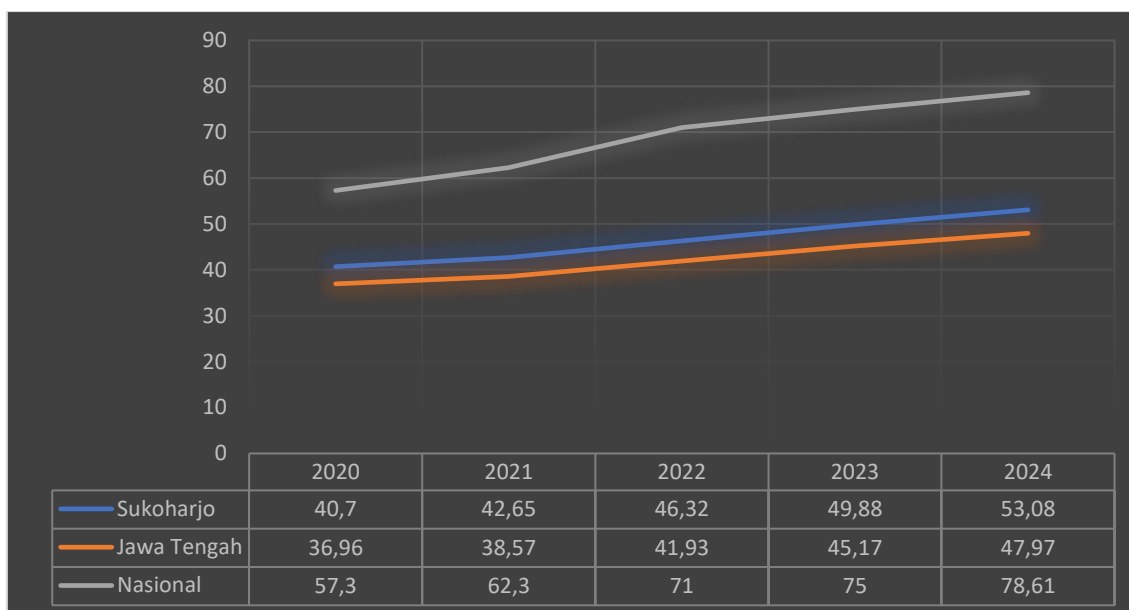
Laju inflasi Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 secara umum terkendali dengan baik, dengan rerata tahunan yang relatif stabil antara 1,5% hingga 3,2%, meskipun sempat melonjak drastis pada tahun 2022 hingga 7,03% akibat efek pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kenaikan signifikan pada tahun tersebut juga terjadi di tingkat provinsi (5,63%) dan nasional (5,51%), menunjukkan bahwa tekanan inflasi bersifat nasional akibat terganggunya rantai pasok dan lonjakan permintaan. Secara umum, pada tahun-tahun lainnya, laju inflasi Sukoharjo cenderung berada di atas provinsi dan nasional. Namun, pada tahun 2024 inflasi berhasil ditekan hingga 1,50%, lebih rendah dari inflasi provinsi (1,67%) dan nasional (1,57%), meskipun angka ini didasarkan pada pendekatan data inflasi Gabungan Kota Surakarta akibat keterbatasan data inflasi kabupaten.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.27 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sukoharjo tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. PDRB per kapita Sukoharjo meningkat dari Rp40,70 juta pada tahun 2020 menjadi Rp53,08 juta pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan yang stabil setelah sempat terdampak pandemi COVID-19, menunjukkan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Meskipun PDRB per kapita Sukoharjo tahun 2024 relatif jauh dari nasional sebesar Rp78,61 juta, namun berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp47,97 juta. Hal ini mencerminkan bahwa Sukoharjo memiliki daya saing dan kontribusi ekonomi yang baik di tingkat provinsi. Kenaikan PDRB per kapita Sukoharjo menunjukkan perbaikan dalam distribusi kesejahteraan ekonomi masyarakat.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.28 Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)

PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar **Rp53,08 juta**, dibandingkan dengan wilayah lain di kawasan Subosukawonosraten. Dimana Sukoharjo menempati posisi ke-3 tertinggi, namun Kota Surakarta tetap menjadi yang tertinggi dengan PDRB per kapita sebesar Rp122,53 juta, diikuti oleh Kabupaten Karanganyar (Rp53,36 juta), dan Sukoharjo berada tepat di bawahnya, namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sragen (Rp52,19 juta), Kabupaten Klaten (Rp42,74 juta), Kabupaten Boyolali (Rp41,69 juta), dan Kabupaten Wonogiri (Rp37,72 juta). Capaian ini menunjukkan bahwa posisi Sukoharjo cukup kompetitif di kawasan regional, dan telah melampaui rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp47,97 juta, meskipun masih jauh dibandingkan capaian nasional yang mencapai Rp78,61 juta.

Tabel 2.16 PDRB Per Kapita ADHB Subosukawonosraten Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Boyolali	30,84	32,62	35,94	39,20	41,69
Kabupaten Klaten	31,74	33,38	36,54	39,92	42,74
Kabupaten Sukoharjo	40,7	42,77	46,71	49,87	53,08
Kabupaten Wonogiri	28,01	29,14	31,88	35,14	37,72
Kabupaten Karanganyar	39,82	41,71	45,50	49,42	53,36
Kabupaten Sragen	38,83	40,75	44,63	48,69	52,19
Kota Surakarta	91,17	96,36	107,01	114,80	122,53

Sumber: BPS (Diolah)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 6,93% pada tahun 2020 menjadi 2,47% di tahun 2022, yang merupakan pencapaian terbaik dalam periode lima tahun terakhir, meskipun kembali meningkat menjadi 3,65% pada tahun 2024; secara keseluruhan TPT Sukoharjo cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Tengah (4,78%) dan nasional (4,91%) pada tahun yang sama, menunjukkan bahwa kinerja pasar tenaga kerja di Sukoharjo relatif lebih baik pasca pandemi COVID-19, namun tetap memerlukan perhatian khusus untuk menjaga tren penurunan tersebut agar berkelanjutan. Tutupnya sejumlah industri padat karya seperti perusahaan tekstil SRITEK yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di sektor manufaktur. Pemutusan hubungan kerja skala besar dan memberikan tekanan pada pasar kerja lokal, khususnya bagi pekerja berpendidikan rendah dan tidak terampil. Pemerintah daerah perlu merespons dengan perluasan lapangan kerja alternatif, pelatihan vokasi, dan peningkatan investasi sektor lain di luar tekstil.

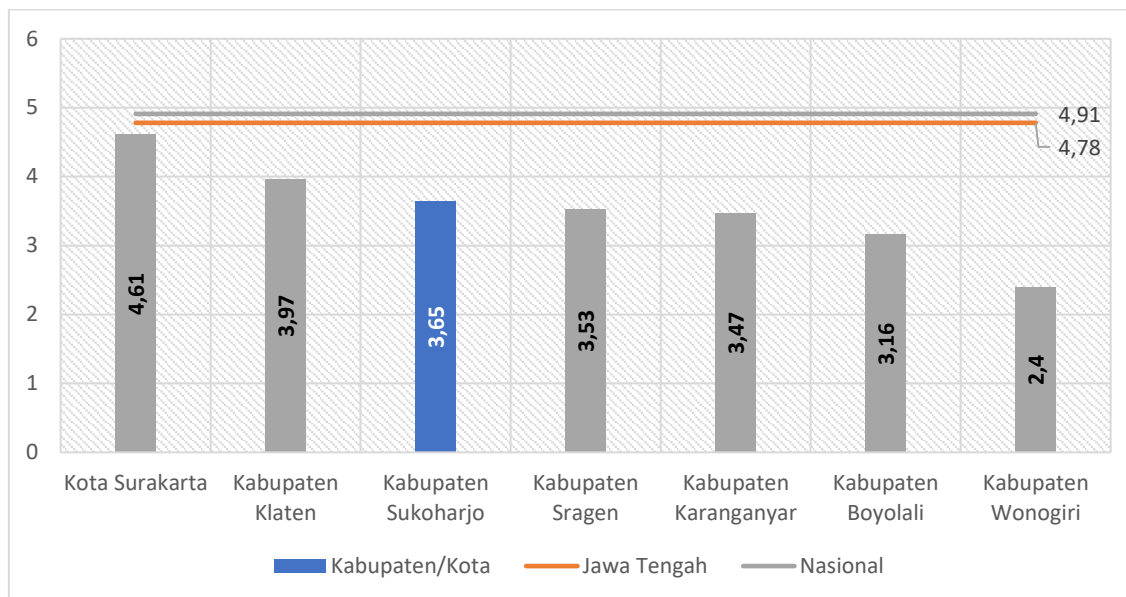


Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.29 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (%)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar 3,65%, berada di bawah rata-rata Jawa Tengah (4,78%) dan nasional (4,91%), serta menempati posisi menengah di antara wilayah Subosukowonosraten. Kabupaten Sukoharjo lebih rendah dibandingkan Kota Surakarta (4,61%) dan Kabupaten Klaten (3,97%), namun masih lebih tinggi dibanding Boyolali (3,16%), Karanganyar (3,47%), Sragen (3,53%), dan terendah di Wonogiri (2,4%), menunjukkan kinerja pasar kerja Sukoharjo cukup

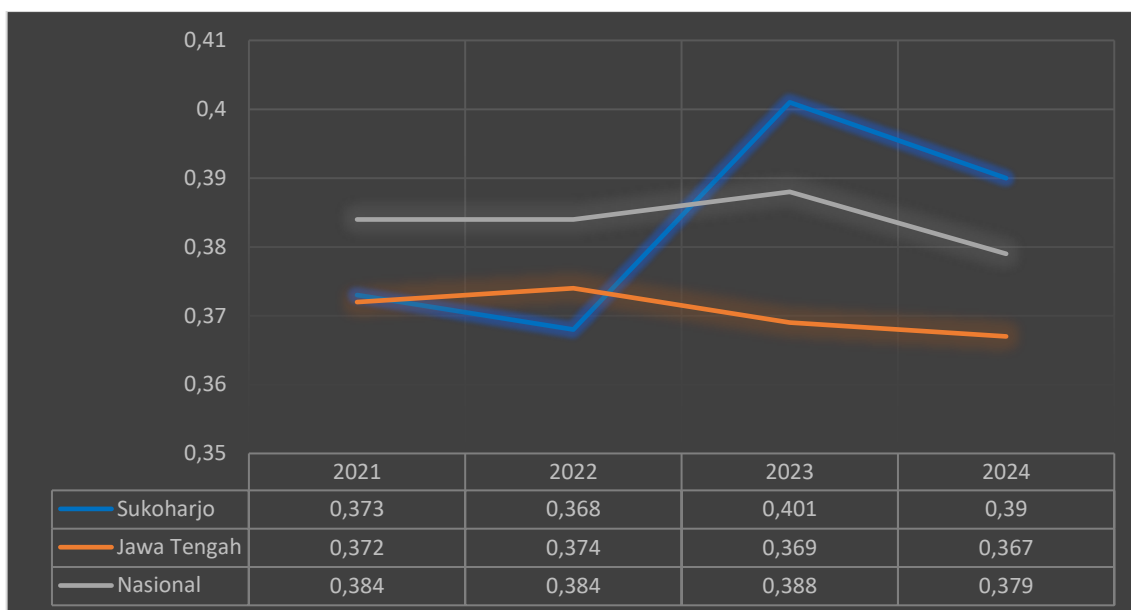
baik secara regional dan nasional, namun masih terdapat ruang peningkatan efisiensi penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan kabupaten sekitar yang lebih rendah TPT-nya.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.30 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Subosukowonosraten Tahun 2024 (%)

Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2021, Rasio Gini tercatat sebesar 0,373 dan mengalami penurunan menjadi 0,368 pada tahun 2022, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 0,401, angka tertinggi dalam periode empat tahun terakhir, yang mengisyaratkan adanya peningkatan kesenjangan pendapatan. Meskipun demikian, pada tahun 2024 Rasio Gini Sukoharjo menurun kembali menjadi 0,390, yang masih berada di atas rata-rata provinsi Jawa Tengah (0,367) dan nasional (0,379). Tren penurunan ketimpangan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan distribusi pendapatan.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.31 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2024 (Indeks)

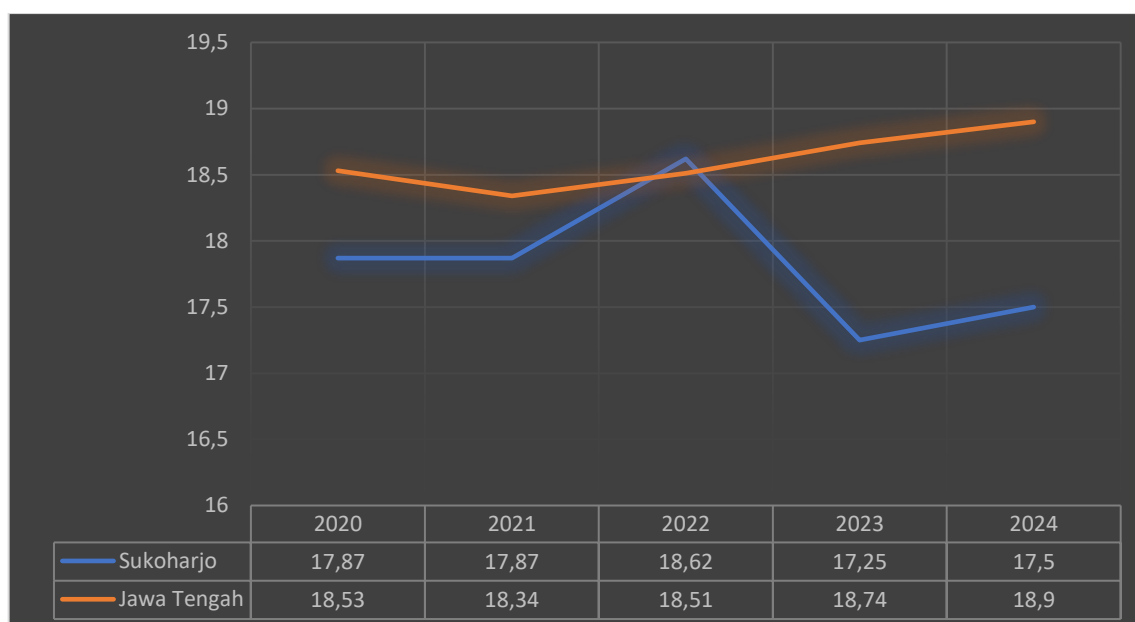
Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi ketimpangan pendapatan yang cukup dinamis dibandingkan kabupaten/kota lain di kawasan Subosukawonosraten. Pada tahun 2024, Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,390 merupakan salah satu yang tertinggi di antara kabupaten/kota sekitarnya, meskipun masih di bawah Kabupaten Klaten (0,437) dan Kota Surakarta (0,380). Dibandingkan daerah lain, seperti Sragen (0,309) dan Karanganyar (0,352), ketimpangan di Sukoharjo masih relatif lebih tinggi.

Tabel 2.17 Perbandingan Indeks Gini Subosukawonosraten Tahun 2021-2024 (Indeks)

Kabupaten/Kota	Indeks Gini (indeks)			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Boyolali	0,364	0,366	0,365	0,339
Kabupaten Klaten	0,351	0,364	0,406	0,437
Kabupaten Sukoharjo	0,373	0,368	0,401	0,390
Kabupaten Wonogiri	0,356	0,348	0,351	0,392
Kabupaten Karanganyar	0,387	0,360	0,389	0,352
Kabupaten Sragen	0,313	0,349	0,336	0,309
Kota Surakarta	0,379	0,419	0,383	0,380

Sumber: BPS (Diolah)

Distribusi pengeluaran penduduk menurut kriteria Bank Dunia untuk 40 persen penduduk berpenghasilan rendah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2020–2024, terlihat fluktuasi yang mencerminkan dinamika kesejahteraan kelompok terbawah secara ekonomi. Pada tahun 2020 dan 2021, angka distribusi pengeluaran tercatat stagnan di angka 17,87%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 18,62% pada tahun 2022, menunjukkan kelompok penduduk berpenghasilan rendah sempat mengalami perbaikan daya beli atau akses terhadap pengeluaran. Namun, kondisi tersebut menurun tajam menjadi 17,25% pada 2023 dan sedikit membaik menjadi 17,5% pada tahun 2024, menandakan kembali melemahnya distribusi pengeluaran bagi penduduk berpenghasilan rendah. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah di Kabupaten Sukoharjo cenderung berada di bawah provinsi, yang mengalami tren meningkat dari 18,34% (2021) menjadi 18,90% (2024).



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.32 Perkembangan Distribusi Pengeluaran Penduduk (40 persen penduduk berpenghasilan rendah) Menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2024 (%)

Distribusi pengeluaran penduduk 40 persen berpenghasilan terendah menurut kriteria Bank Dunia tahun 2020–2024, Kabupaten Sukoharjo menempati posisi rendah di antara wilayah Subosukawonosraten. Kabupaten Sukoharjo pada 2024 (17,50%), jika dibandingkan dengan Kabupaten Boyolali (20,55%) dan Kabupaten Sragen (21,12%), menunjukkan angka distribusi yang jauh lebih rendah, mengindikasikan bahwa proporsi pengeluaran oleh kelompok 40 persen

terbawah masih belum merata. Kota Surakarta (17,85%) lebih tinggi dari Sukoharjo. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo tingkat pemerataan kesejahteraan antarkelompok masyarakat masih belum optimal.

Tabel 2.18 Perbandingan Distribusi Pengeluaran Penduduk (40 persen penduduk berpenghasilan rendah) Menurut Kriteria Bank Dunia Subosukawonosraten Tahun 2021-2024 (%)

Kabupaten/Kota	Distribusi Pengeluaran Penduduk (40 persen penduduk berpenghasilan rendah) Menurut Kriteria Bank Dunia (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Boyolali	19,29	18,69	19,19	18,92	20,55
Kabupaten Klaten	20,13	19,59	19,17	17,44	16,15
Kabupaten Sukoharjo	17,87	17,87	18,62	17,25	17,5
Kabupaten Wonogiri	18,09	18,74	19,76	19,08	18
Kabupaten Karanganyar	20,03	18,06	19,24	18,48	19,14
Kabupaten Sragen	19,87	21,05	19,47	20,13	21,12
Kota Surakarta	17,23	17,22	15,5	18,34	17,85

Sumber: BPS (Diolah)

Selama periode 2020 hingga 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren penurunan secara konsisten, yang menandakan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin menurun dari 68.900 jiwa (7,68%) pada tahun 2020 menjadi 68.150 jiwa (7,47%) pada tahun 2024. Peningkatan persentase penduduk miskin sempat terjadi pada tahun 2021, mencapai 73.840 jiwa atau 8,23%, akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi dan meningkatnya kerentanan sosial. Namun, sejak tahun 2022 (7,61%) tren penurunan terus berlanjut, dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,58% (2023) dan 7,47% (2024).

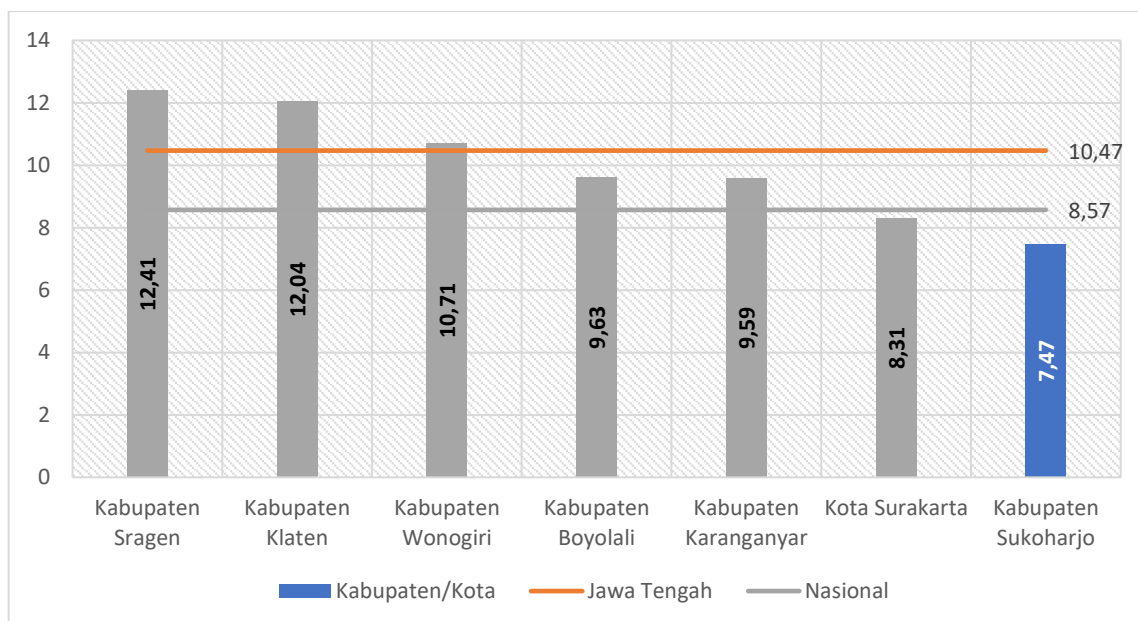
Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat Nasional, Kabupaten Sukoharjo secara konsisten memiliki persentase kemiskinan yang lebih rendah. Pada tahun 2024, persentase kemiskinan Jawa Tengah tercatat sebesar 10,47% dan Nasional sebesar 8,57%, jauh di atas capaian Kabupaten Sukoharjo. Capaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan, serta pemulihan ekonomi yang relatif lebih cepat di tingkat lokal.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.33 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Berdasarkan data tahun 2024, persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo menempati posisi paling rendah di wilayah Subosukawonosraten, dengan angka sebesar 7,47%, jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (10,47%) maupun Nasional (8,57%). Angka ini mencerminkan keberhasilan relatif Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menekan angka kemiskinan dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di wilayah Subosukawonosraten. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen tertinggi sebesar 12,41%, diikuti Kabupaten Klaten sebesar 12,04%, Wonogiri 10,71%, Boyolali 9,63%, Karanganyar 9,59%, dan Kota Surakarta 8,31%. Perbedaan ini mengindikasikan ketimpangan capaian pembangunan antarwilayah, khususnya dalam dimensi kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.



Sumber: BPS (Diolah)

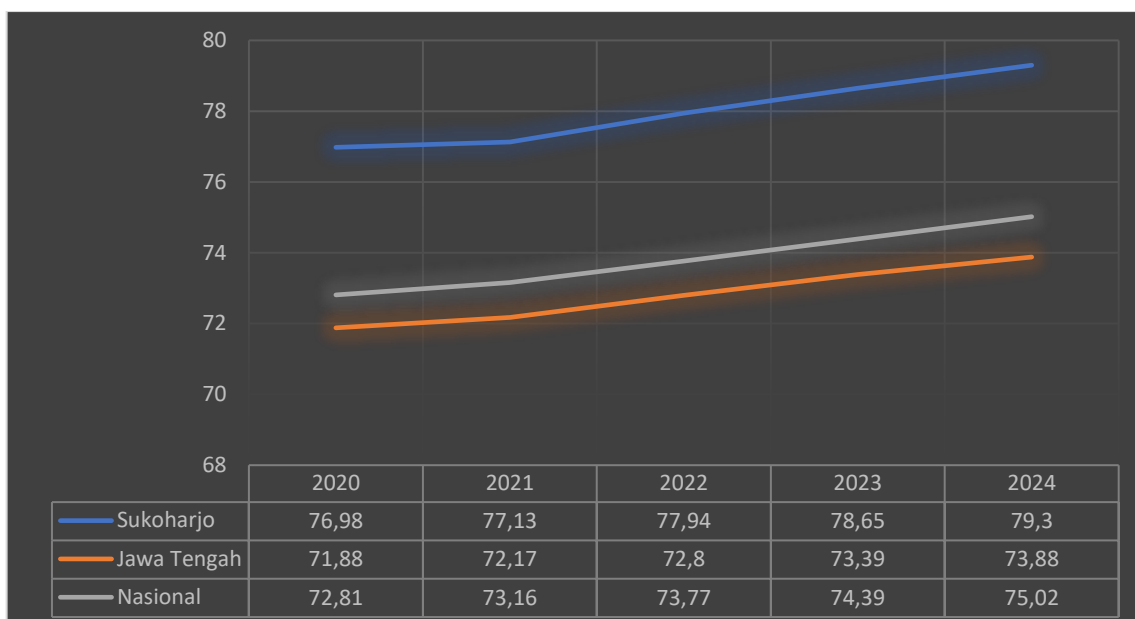
Gambar 2.34 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Subosukowonosraten Tahun 2024 (%)

Pada Maret dan September 2024, kondisi kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo mencerminkan dinamika yang kompleks dan memperlihatkan tantangan dalam dimensi garis kemiskinan. Garis kemiskinan Sukoharjo sebesar Rp501.693 per kapita per bulan pada Maret 2024 mengalami kenaikan 5,25% dari tahun sebelumnya, dan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (Rp507.001) namun masih di bawah rata-rata nasional (Rp582.932). Berdasarkan perbandingan antarkabupaten/kota dalam wilayah Subosukawonosraten, Kabupaten Sukoharjo berada di urutan ketiga tertinggi setelah Kota Surakarta (Rp638.102) dan Kabupaten Klaten (Rp505.826), mencerminkan biaya hidup yang relatif tinggi. Kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan masih berasal dari komoditas makanan (75,33% di kota dan 75,44% di desa), dengan beras sebagai komoditas utama (22,62% di kota dan 23,94% di desa), menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin dalam pengeluaran kebutuhan dasar pangan. Adapun kontribusi rokok kretek filter yang mencapai 7,18% di kota dan 5,80% di desa menjadi catatan penting karena menunjukkan adanya beban konsumsi non-esensial yang tinggi di kelompok rentan. Sebaliknya, kontribusi pengeluaran untuk sektor non-makanan seperti perumahan, bensin, dan listrik menunjukkan pola konsumsi dasar yang cukup merata antara perkotaan dan perdesaan, meskipun perumahan di desa (8,08%) sedikit lebih tinggi dibanding kota (6,58%).

Namun, kemiskinan tidak hanya dilihat dari garis kemiskinan, tetapi juga memperhatikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mencerminkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan

ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. P1 Sukoharjo meningkat dari 1,17 pada 2023 menjadi 1,21 pada 2024, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin jauh dari garis kemiskinan (semakin senjang), meskipun angkanya tetap lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (1,64) dan Nasional (1,46). Di wilayah Subosukawonosraten, Sukoharjo menempati posisi kedua terendah setelah Kota Surakarta (1,14). Sementara itu, Kabupaten Sragen dengan P1 tertinggi yaitu 2,42. Dari sisi keparahan (P2), Sukoharjo menunjukkan stabilitas yang baik, yaitu tetap berada di angka 0,30, lebih rendah dari Provinsi (0,37) dan Nasional (0,35). Angka ini menempatkan Sukoharjo pada posisi ketiga terendah setelah Surakarta (0,26) dan Klaten (0,27), mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin di Sukoharjo relatif rendah. Kabupaten Sragen kembali tertinggi dengan P2 sebesar 0,67. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun garis kemiskinan Kabupaten Sukoharjo tergolong tinggi, namun kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin dibandingkan sebagian besar wilayah lain, yang mencerminkan efektivitas program perlindungan sosial dan akses distribusi kesejahteraan di Kabupaten Sukoharjo semakin meningkat.

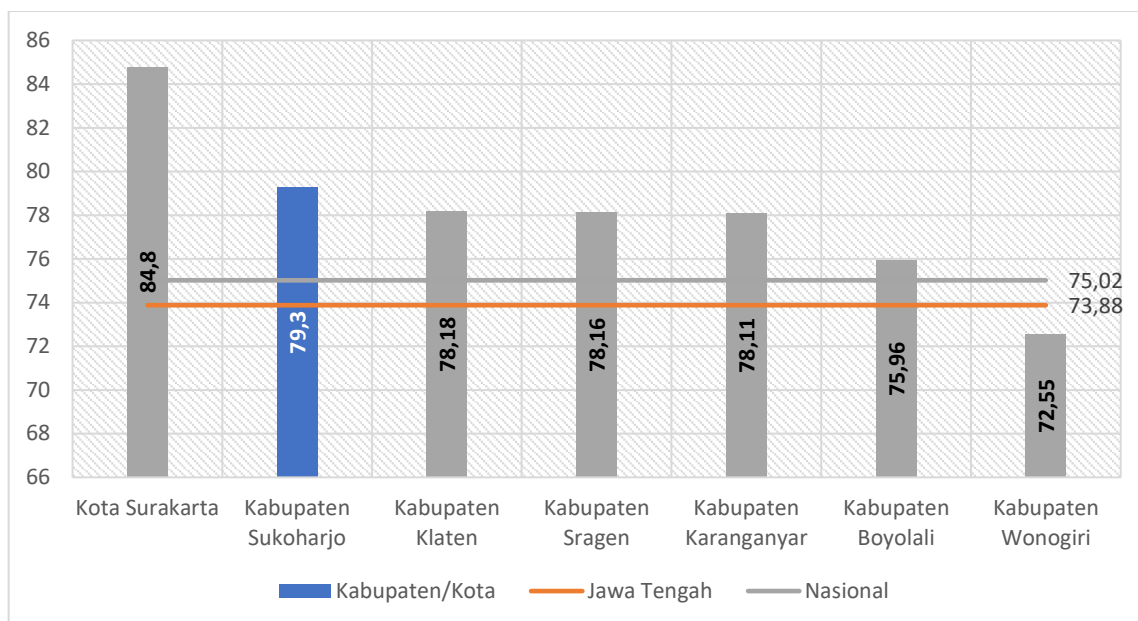
Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menunjukkan menuju kategori “sangat tinggi”. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang konsisten dari 76,98 pada tahun 2020 menjadi 79,30 pada tahun 2024, mendekati ambang batas kategori “sangat tinggi” menurut klasifikasi UNDP (≥ 80). Kinerja IPM Sukoharjo ini secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (73,88) maupun Nasional (75,02), menandakan bahwa kualitas pembangunan manusia di Sukoharjo relatif lebih maju dibandingkan wilayah sekitarnya, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun daya beli. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, terutama dalam peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan serta perbaikan kualitas hidup masyarakat.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.35 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Indeks)

Pada tahun 2024, Kabupaten Sukoharjo menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,3, yang menempatkannya sebagai kabupaten dengan IPM tertinggi kedua di wilayah Subosukawonosraten setelah Kota Surakarta (84,8). Capaian ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat Sukoharjo, serta berada di atas rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah (73,88) dan nasional (75,02). Dengan posisi ini, menunjukkan performa pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan kabupaten sekitarnya, yaitu Klaten (78,18), Sragen (78,16), Karanganyar (78,11), Boyolali (75,96) dan Wonogiri (72,55). Keunggulan ini menjadi indikasi bahwa strategi pembangunan di Sukoharjo terhadap kualitas hidup penduduknya semakin baik.

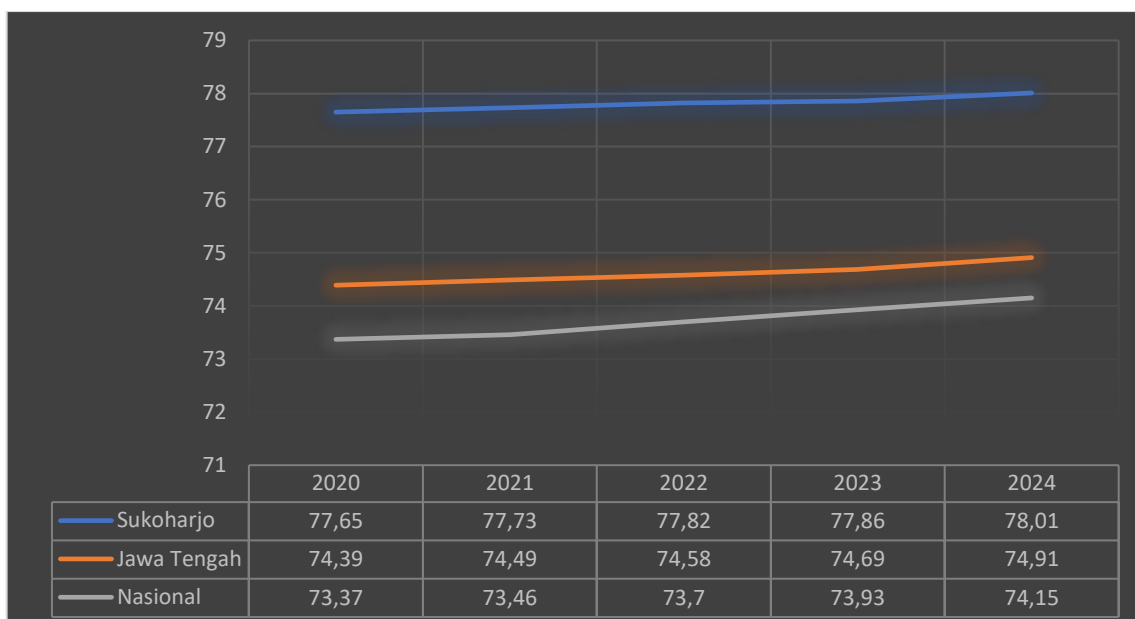


Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.36 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Subosukowonosraten Tahun 2024 (Indeks)

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

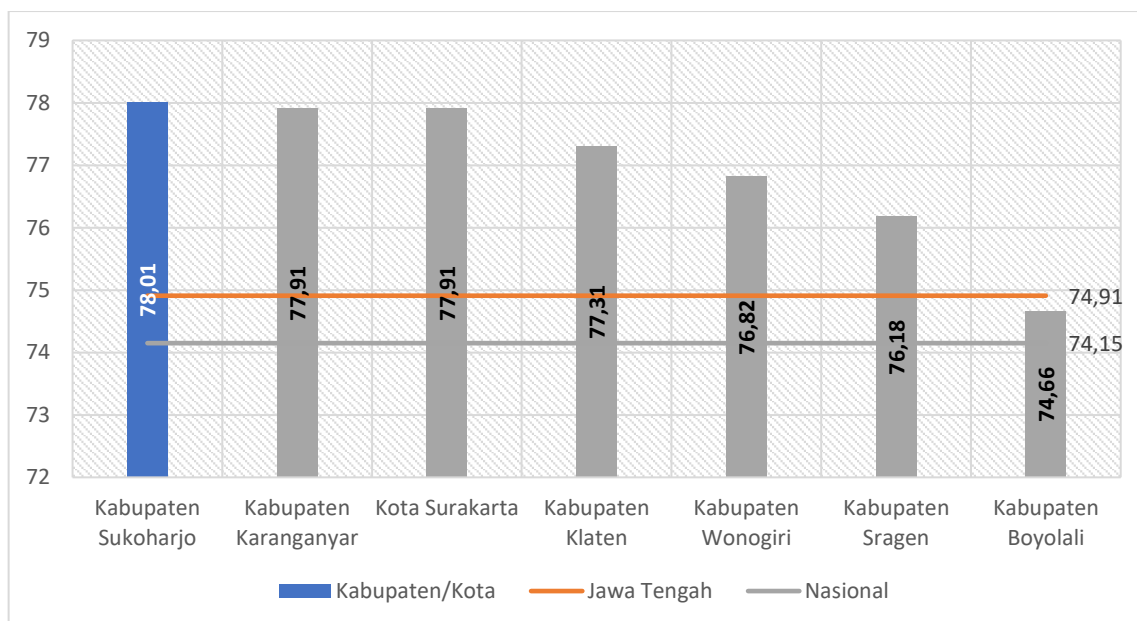
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 terus mengalami peningkatan positif, mencerminkan perbaikan kualitas hidup dan layanan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, AHH Sukoharjo mencapai 78,01 tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,91 tahun dan Nasional sebesar 74,15 tahun. Konsistensi tren kenaikan AHH dari 77,65 tahun pada 2020 menjadi 78,01 tahun pada 2024 menunjukkan bahwa masyarakat Sukoharjo memiliki kualitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang semakin baik menjadi fondasi penting dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.37 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

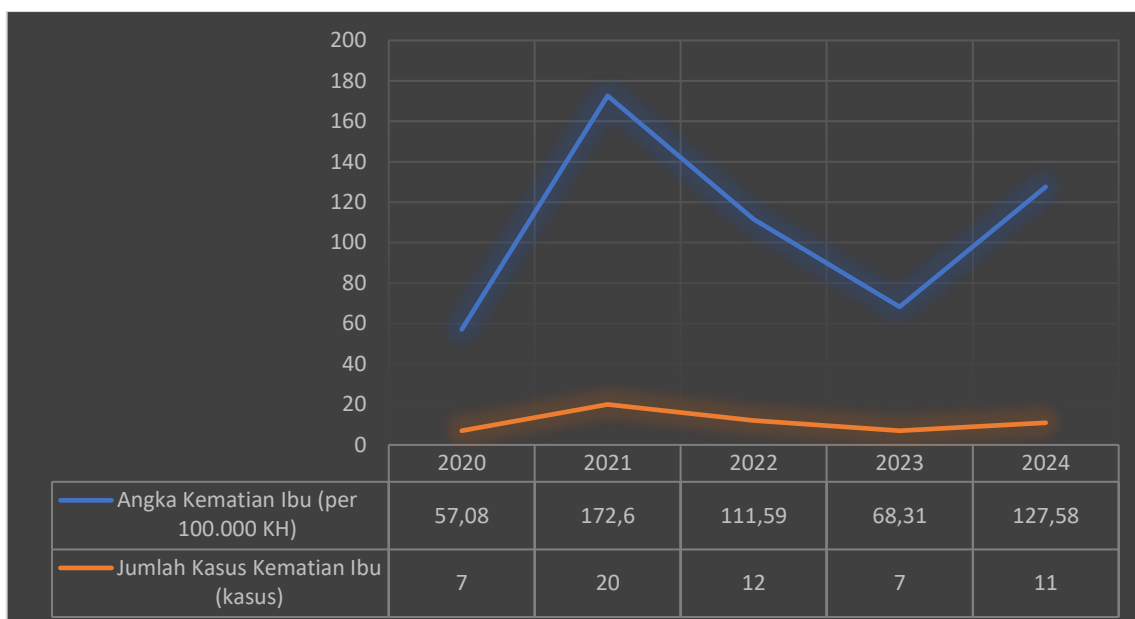
Pada tahun 2024, Kabupaten Sukoharjo mencatat angka harapan hidup (AHH) tertinggi di wilayah Subosukowonosraten, yakni sebesar 78,01 tahun, serta melampaui rata-rata Provinsi Jawa Tengah (74,91 tahun) maupun nasional (74,15 tahun). Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di kawasan ini, Sukoharjo lebih tinggi dibandingkan Karanganyar dan Surakarta (masing-masing 77,91 tahun), serta Boyolali (74,66 tahun) dan Sragen (76,18 tahun). Keunggulan ini menunjukkan bahwa penduduk Sukoharjo secara umum memiliki kualitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.38 Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Subosukowonosraten Tahun 2024 (Tahun)

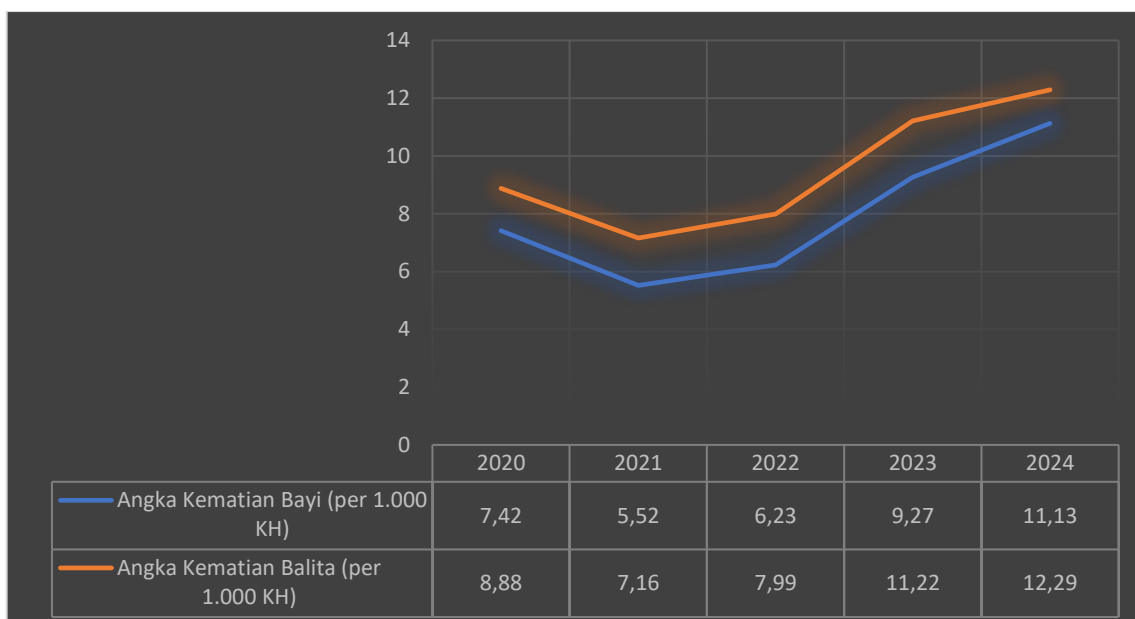
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi signifikan. Pada tahun 2020, AKI tercatat sebesar 57,08 per 100.000 kelahiran hidup (KH) dengan 7 kasus, lalu melonjak drastis menjadi 172,6 per 100.000 KH pada 2021 dengan 20 kasus. Meskipun terjadi penurunan pada 2022 dan 2023, yaitu masing-masing menjadi 111,59 dan 68,31 per 100.000 KH, kembali naik menjadi 127,58 per 100.000 KH pada 2024 atau menjadi 11 kasus. Kematian ibu di Kabupaten Sukoharjo dicatat berdasarkan domisili sesuai KTP, sehingga meskipun ibu beraktivitas di wilayah lain, kasus tetap tercatat di Sukoharjo. Mayoritas kematian terjadi pada masa nifas akibat kurangnya dukungan keluarga dalam perawatan pascamelahirkan dan keberlanjutan kondisi risiko tinggi selama kehamilan. Banyak kasus tidak terpantau tenaga kesehatan karena ibu menyembunyikan kehamilannya, termasuk pada kehamilan usia dini dan remaja belum menikah, sehingga tidak mendapat intervensi medis sejak awal. Selain itu, keterlambatan pengambilan keputusan klinis oleh keluarga dalam proses rujukan memperburuk kondisi. Fluktuasi angka kematian mencerminkan tantangan dalam deteksi dini kehamilan risiko tinggi, akses layanan kesehatan, dan kualitas penanganan persalinan di Kabupaten Sukoharjo.



Sumber: Dinas Kesehatan (diolah)

Gambar 2.39 Perkembangan Angka Kematian Ibu/AKI (Per 100.000 KH) dan Jumlah Kasus Kematian Ibu (Kasus) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Tren peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020 hingga 2024. AKB sempat mengalami penurunan dari 7,42 per 1.000 kelahiran hidup (KH) pada 2020 menjadi 5,52 pada 2021, namun kembali naik menjadi 11,13 pada 2024. Demikian pula dengan AKABA yang turun dari 8,88 pada 2020 menjadi 7,16 pada 2021, namun melonjak hingga mencapai 12,29 per 1.000 KH pada 2024. Peningkatan tajam pada dua tahun terakhir, khususnya tahun 2023 dan 2024, mengindikasikan adanya tantangan serius dalam upaya perlindungan terhadap kesehatan bayi dan balita. Tingginya angka kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) di Kabupaten Sukoharjo sebagian besar disebabkan oleh kondisi ibu hamil dengan KEK dan anemia yang belum tertangani secara optimal. Pendampingan masih minim, pemberian PMT lokal belum mencakup siklus penuh 120 hari, dan pembiayaan masih terbatas pada dana BOK tanpa dukungan tambahan. Pemantauan bayi risiko tinggi, khususnya BBLR, juga belum maksimal, padahal kematian bayi terbanyak berasal dari kasus BBLR dan kelainan kongenital. Ketidadaan pemantauan intensif pada minggu pertama kehidupan serta kebutuhan perawatan panjang bagi bayi dengan BBLSR < 2.000 gram turut memperburuk kondisi, sehingga memerlukan perhatian pada aspek pendanaan dan keberlanjutan layanan kesehatan.



Sumber: Dinas Kesehatan (diolah)

Gambar 2.40 Perkembangan Angka Kematian Bayi/AKB dan Angka Kematian Balita/AKABA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Per 1.000 KH)

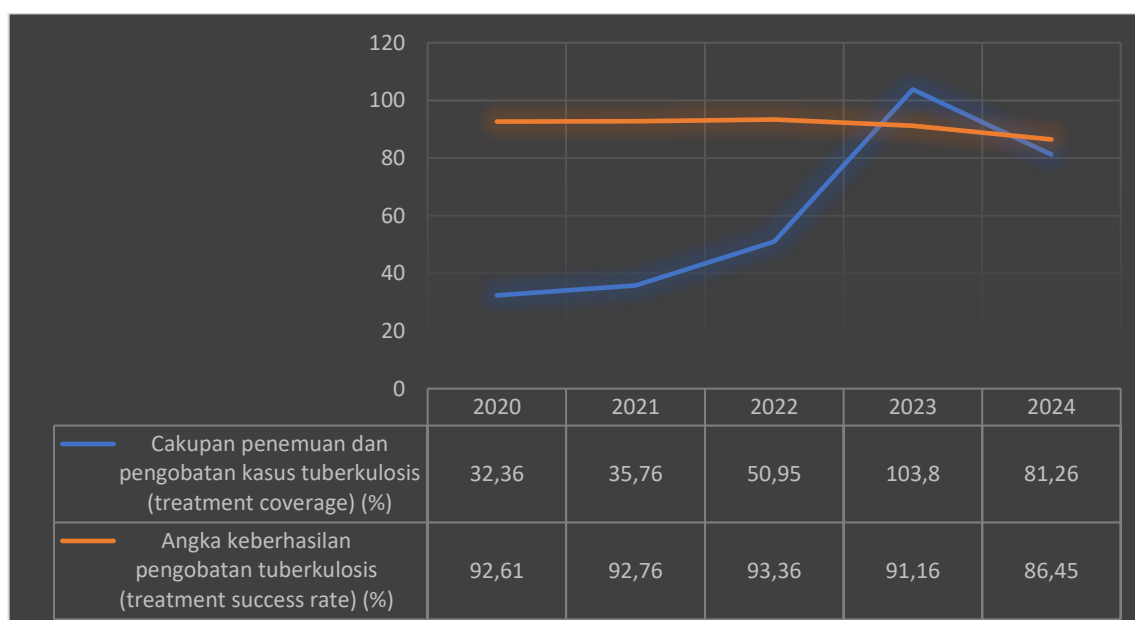
Dinamika prevalensi stunting, gizi kurang, dan gizi buruk pada balita di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024, yang mengindikasikan bahwa permasalahan gizi anak masih menjadi tantangan serius. Prevalensi stunting sempat turun pada 2023 menjadi 7,00% namun kembali meningkat menjadi 9,5% di 2024. Demikian pula, prevalensi balita gizi kurang meningkat dari 4,43% menjadi 5,1%, sementara prevalensi gizi buruk naik dari 0,17% menjadi 0,2%. Kenaikan ini mencerminkan lemahnya praktik pengasuhan pasca-ASI eksklusif akibat rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya PMBA, ketidakefektifan intervensi seperti PMT lokal dan F100 karena kepatuhan keluarga yang minim serta penolakan balita terhadap formula, kepedulian keluarga terhadap balita stunting masih kurang, serta kurangnya pemantauan pertumbuhan dan masih kuatnya persepsi keliru bahwa kondisi gizi buruk akan membaik tanpa intervensi.

Tabel 2.19 Perkembangan Prevalensi Stunting, Prevalensi Balita Gizi Kurang, dan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7,68	7,10	8,10	7,00	9,5
Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	4,4	4,5	5,95	4,43	5,1
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,07	0,07	0,11	0,17	0,2

Sumber: Dinas Kesehatan (Diolah)

Perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren yang meningkat signifikan dari 32,36% pada tahun 2020 menjadi 103,8% pada tahun 2023, sebelum menurun menjadi 81,26% pada tahun 2024. Sementara itu, angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) mengalami penurunan bertahap dari 93,36% pada tahun 2022 menjadi 91,16% pada tahun 2023, dan turun menjadi 86,45% di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam pengendalian TBC, khususnya dalam aspek kepatuhan pengobatan dan pemantauan pasien. Masih lemahnya kepatuhan pasien dan sistem pemantauan terapi, yang dipengaruhi oleh keterlambatan deteksi dini, penolakan atau penghentian pengobatan, efek samping obat, jarak akses layanan, serta ketidakteraturan pemantauan oleh petugas dan kader.

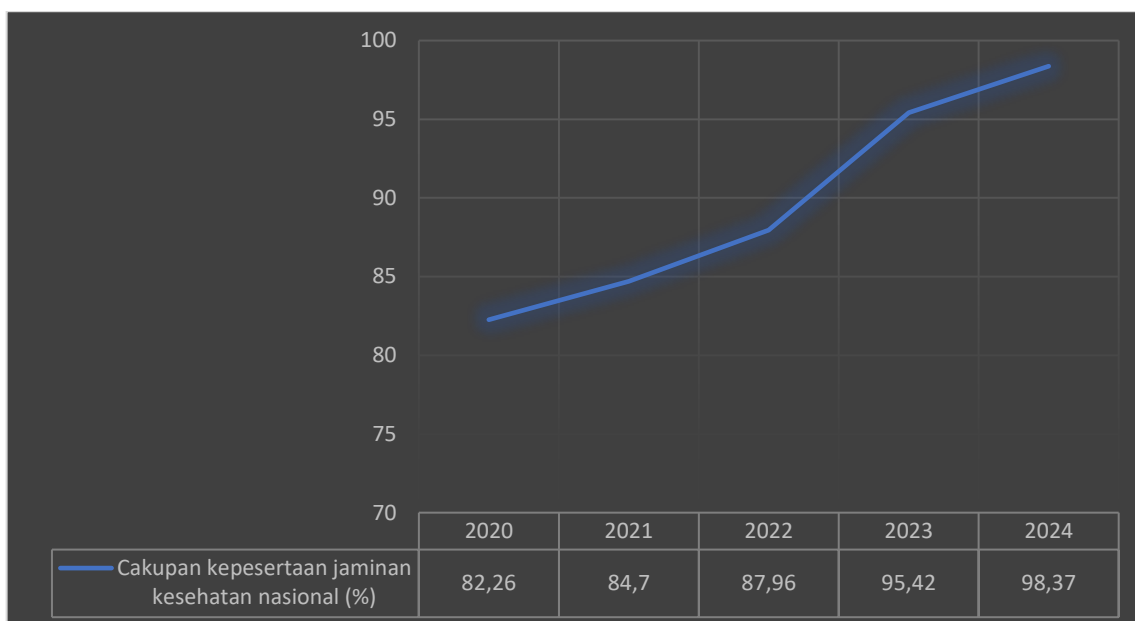


Sumber: Dinas Kesehatan (diolah)

Gambar 2.41 Perkembangan Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) dan Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari 82,26% pada tahun 2020 menjadi 98,37% pada tahun 2024, melampaui target minimal 95% yang ditetapkan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan dasar yang inklusif dan merata bagi seluruh penduduk, termasuk kelompok rentan seperti disabilitas, masyarakat miskin, kelompok terabaikan, serta menjunjung prinsip kesetaraan gender dan keadilan layanan; pencapaian ini mencerminkan

keberhasilan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong *universal health coverage*.



Sumber: Dinas Kesehatan (diolah)

Gambar 2.42 Perkembangan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan konsistensi dan sedikit peningkatan selama periode 2020–2024. Hanya jumlah Posyandu yang bertambah dari 1.193 menjadi 1.205 unit dan rasio Posyandu per 1.000 balita yang meningkat signifikan dari 22,54 pada 2023 menjadi 29,5 pada 2024, meskipun sempat mengalami penurunan. Sementara itu, jumlah Puskesmas tetap stagnan di angka 12 unit, begitu pula Puskesmas Keliling (79 unit), Poliklinik/PKD/Polindes (167 unit), yang tidak mengalami penambahan, dan Puskesmas Pembantu bertambah menjadi (50 unit) mencerminkan belum adanya ekspansi fasilitas primer dalam memenuhi kebutuhan layanan yang terus berkembang secara optimal. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk cenderung stabil di kisaran 1,31–1,34, namun rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami penurunan dari 1,10 pada 2023 menjadi 1,09 pada 2024, dengan jumlah rumah sakit yang tetap di angka 10 unit (1 RSUD dan 9 RS Swasta). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan Posyandu membaik, namun kapasitas dan distribusi layanan kesehatan primer dan rujukan belum mengalami ekspansi yang berpotensi menimbulkan beban pelayanan yang tinggi pada fasilitas yang ada terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang cepat.

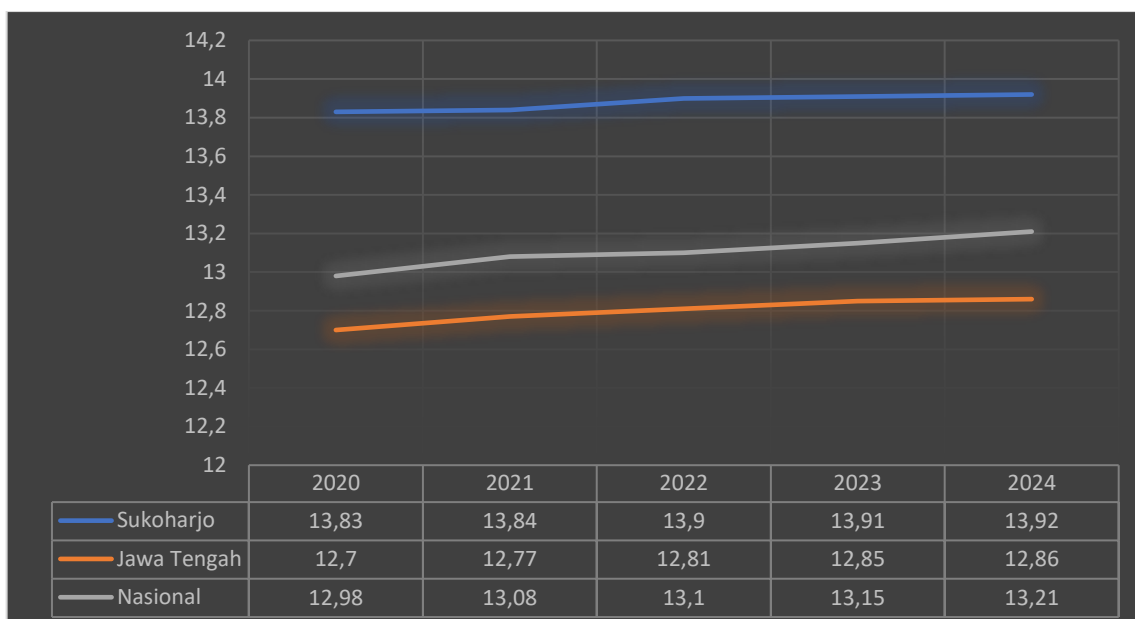
Tabel 2.20 Perkembangan Fasilitas Layanan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Posyandu per Satuan Balita	0,028	0,028	0,028	0,023	0,029
Rasio Posyandu per 1000 balita	28,13	28,21	27,70	22,54	29,5
Jumlah Posyandu	1.193	1.194	1.196	1201	1205
Rasio Puskesmas (Per 100.000 Penduduk)	1,32	1,34	1,33	1,32	1,31
• Jumlah Puskesmas	12	12	12	12	12
• Jumlah Puskesmas Keliling	79	79	79	79	79
• Jumlah Poliklinik/PKD /Polindes	167	167	167	167	167
• Jumlah Puskesmas Pembantu	47	47	47	47	50
• Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	226	226	226	226	226
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	1,10	1,11	1,11	1,10	1,09
• Jumlah RSUD	1	1	1	1	1
• Jumlah RS Swasta	9	9	9	9	9
• Jumlah RS AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
• Jumlah Seluruh RS	10	10	10	10	10

Sumber: Dinas Kesehatan (Diolah)

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

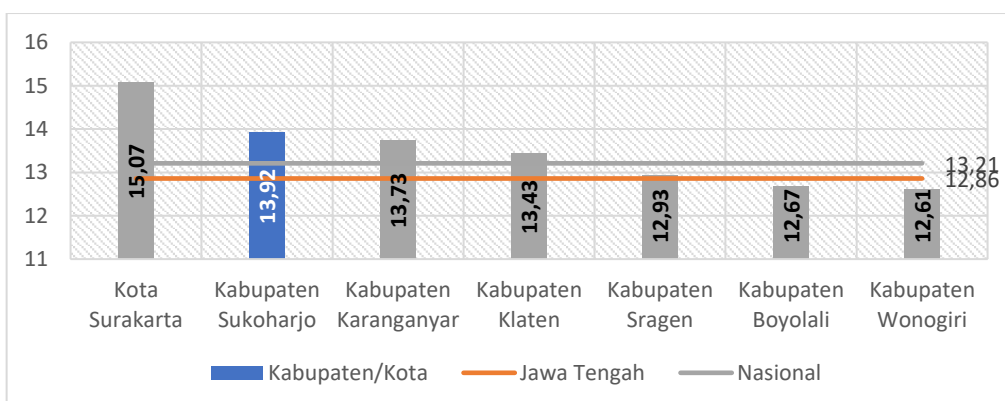
Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, mencapai 13,92 tahun pada tahun 2024, yang berarti anak usia 7 tahun di Sukoharjo diproyeksikan akan menempuh pendidikan hingga tahun kedua perguruan tinggi (diploma atau universitas); angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi Jawa Tengah (12,86 tahun) dan nasional (13,21 tahun), menempatkan Sukoharjo sebagai wilayah dengan kualitas pendidikan yang cukup baik dan hanya berada di bawah Kota Surakarta, mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan sistem pendidikan serta potensi peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.43 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024, menempati posisi kedua tertinggi di wilayah Subosukowonosraten setelah Kota Surakarta (15,07 tahun), serta melampaui rata-rata Provinsi Jawa Tengah (12,86 tahun) dan nasional (13,21 tahun). Posisi ini juga menunjukkan keunggulan Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar (13,73 tahun), Klaten (13,43 tahun), Sragen (12,93 tahun), Boyolali (12,67 tahun), dan Wonogiri (12,61 tahun), serta menandakan bahwa sistem pendidikan di Sukoharjo berkontribusi lebih dalam meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan formal bagi penduduk usia sekolah.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.44 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Subosukowonosraten Tahun 2024 (Tahun)

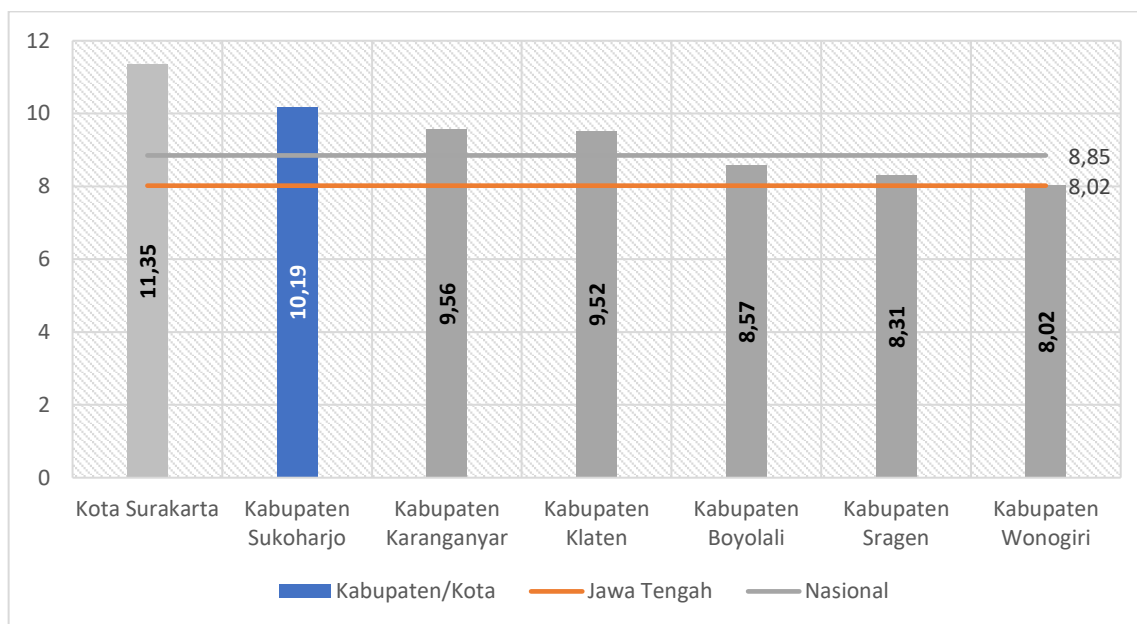
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan. Semula RLS penduduk usia 15 tahun ke atas dari 9,98 tahun pada 2022 menjadi 10,19 tahun pada 2024, mencerminkan kemajuan signifikan dalam pencapaian pendidikan formal dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 8,47 tahun dan nasional sebesar 9,92 tahun pada tahun yang sama. Capaian ini menegaskan bahwa secara konsisten Kabupaten Sukoharjo berada di atas rata-rata provinsi dan nasional dalam hal lama pendidikan yang berhasil ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas, serta mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah untuk menekan angka putus sekolah melalui pendidikan formal dan kesetaraan dalam mendukung keberlanjutan pendidikan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.45 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Kabupaten Sukoharjo dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas tertinggi pada tahun 2024 di wilayah Subosukowonosraten. RLS penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Sukoharjo tahun 2024, di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (8,47 tahun) dan nasional (9,92 tahun), serta tertinggi kedua setelah Kota surakarta (11,35 tahun) lebih tinggi dibandingkan seluruh kabupaten lainnya di wilayah Subosukowonosraten, yaitu Karanganyar (9,56), Klaten (9,52), Boyolali (8,57), Sragen (8,31), dan Wonogiri (8,02). Capaian ini menunjukkan keunggulan kompetitif dalam pengembangan akses dan mutu pendidikan di tingkat regional.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.46 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Subosukowonosraten Tahun 2024 (Tahun)

Capaian Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan signifikan, baik dalam aspek literasi membaca maupun numerasi pada jenjang SD dan SMP. Capaian literasi membaca untuk siswa SD meningkat dari 66,21% (2022) menjadi 84,59% (2024), sementara siswa SMP meningkat dari 81,65% menjadi 90,46% dalam periode yang sama, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sudah mampu memahami teks bacaan dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan. Capaian numerasi juga menunjukkan peningkatan, SD dari 40,46% menjadi 75,34% dan SMP dari 57,12% menjadi 84,93%, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi numerasi masih menjadi tantangan lebih besar dibanding literasi, karena menuntut kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matematika secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Data ini menggambarkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan mutu pendidikan melalui Rapor Pendidikan Kemendikbud mulai menunjukkan hasil positif.

Tabel 2.21 Perkembangan Hasil Asesmen Kompetensi Minimum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2024 (%)

Indikator	2022	2023	2024
Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang), dalam %			
a) Literasi Membaca			
- SD	66,21	75,58	84,59
- SMP	81,65	82,43	90,46
b) Numerasi			
- SD	40,46	60,17	75,34
- SMP	57,12	64,24	84,93

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diolah)

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sukoharjo pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang bervariasi antar kelompok usia, di mana APS usia 5–6 tahun mengalami kenaikan signifikan dari 40,48% (2020) menjadi 91,62% (2024) yang mencerminkan perbaikan akses dan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan usia dini, meskipun masih terdapat tantangan berupa minimnya kualitas dan fasilitas PAUD; pada kelompok usia 7–12 tahun, APS tetap tinggi di atas 96%, namun penurunan sejak tahun 2022 mengindikasikan belum optimalnya kualitas sarana prasarana SD/MI serta ketimpangan kualitas antar sekolah; sedangkan pada kelompok usia 13–15 tahun, APS menurun dari 88,11% (2023) menjadi 85,63% (2024) yang mengindikasikan tantangan lebih kompleks seperti keterbatasan sarana SMP/MTs, serta hambatan geografis pada wilayah pinggiran yang jauh dari sekolah. Meskipun APS di Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan, tantangan struktural seperti rendahnya kesadaran orang tua, keterbatasan fasilitas, dan hambatan geografis masih menghambat pemerataan dan keberlanjutan partisipasi sekolah, terutama pada jenjang PAUD dan SMP.

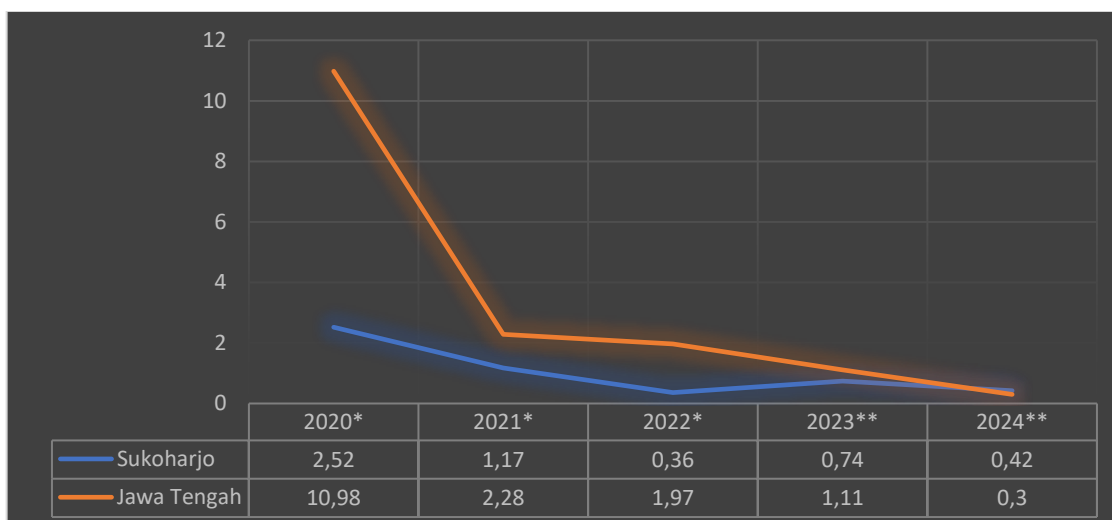
Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun, 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (%)	40,48	36,72	82,85	89,57	91,62
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun (%)	99,79	97,1	99,28	97,06	96,36
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun (%)	78,62	79,39	87,99	88,11	85,63

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diolah)

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sukoharjo mengalami **penurunan signifikan**, ditunjukkan dari 2,52% pada tahun 2020 menjadi hanya 0,42% pada tahun 2024, dengan titik terendah pada 2022 sebesar 0,36%, sebelum sedikit meningkat pada 2023 dan kembali turun di 2024. Tren penurunan yang signifikan juga terjadi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dari 10,98% pada 2020 menjadi hanya 0,30% pada 2024, menunjukkan keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan ekstrem baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, meskipun pencapaian Sukoharjo secara konsisten lebih baik dari rerata provinsi, yang mencerminkan efektivitas intervensi daerah, namun tetap diperlukan evaluasi keberlanjutan dan ketepatan program terutama karena data tahun 2023 dan 2024 bersumber dari estimasi Satgas P3KE, bukan BPS, sehingga validasi dan harmonisasi data menjadi aspek krusial dalam mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.



Sumber: Kemenko PMK, Surat No. B-464/33/D-I/KPS.01.00/02/2024 (Diolah)

Keterangan:

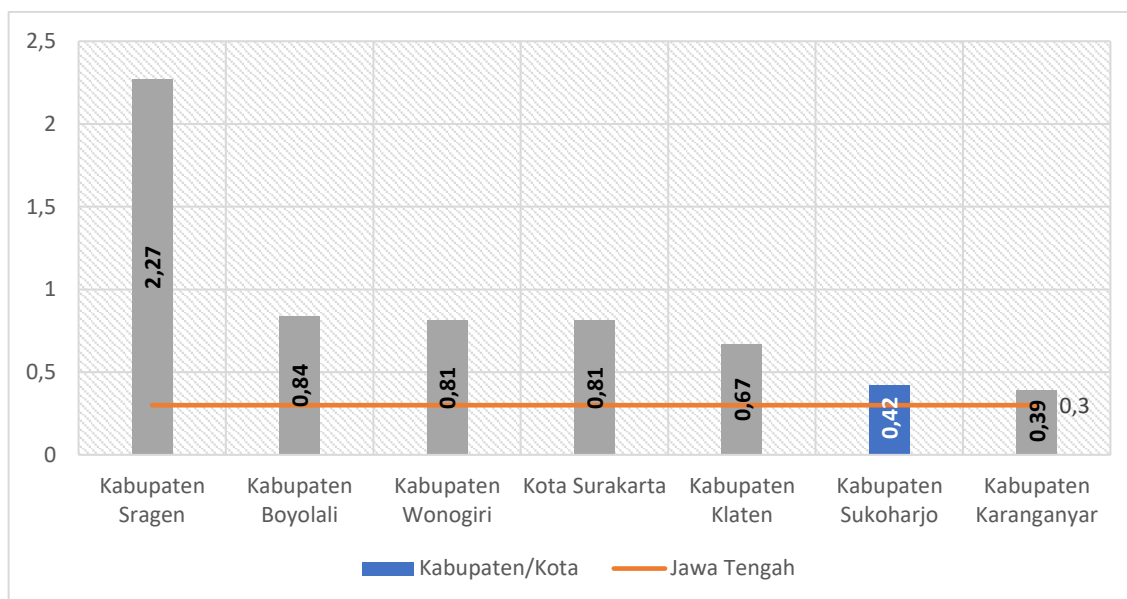
*) Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

**) Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Gambar 2.47 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Sukoharjo dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (%)

Kabupaten Sukoharjo mencatat tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,42% pada tahun 2024, yang berada sedikit di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,30%, namun masih tergolong rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah Subosukowonosraten, yaitu Kabupaten Sragen (2,27%), Boyolali (0,84%), Wonogiri (0,81%), dan Kota Surakarta (0,81%), serta lebih baik daripada Kabupaten Klaten (0,67%). Meskipun sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Karanganyar (0,39%), namun masih di atas target nasional yang menargetkan nol

persen, sehingga sehingga menunjukkan upaya lanjutan dalam menurunkan angka tersebut, terutama melalui integrasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang adaptif dan berbasis data mikro sasaran.



Sumber: Kemenko PMK, Surat No. B-464/33/D-I/KPS.01.00/02/2024 (Diolah)

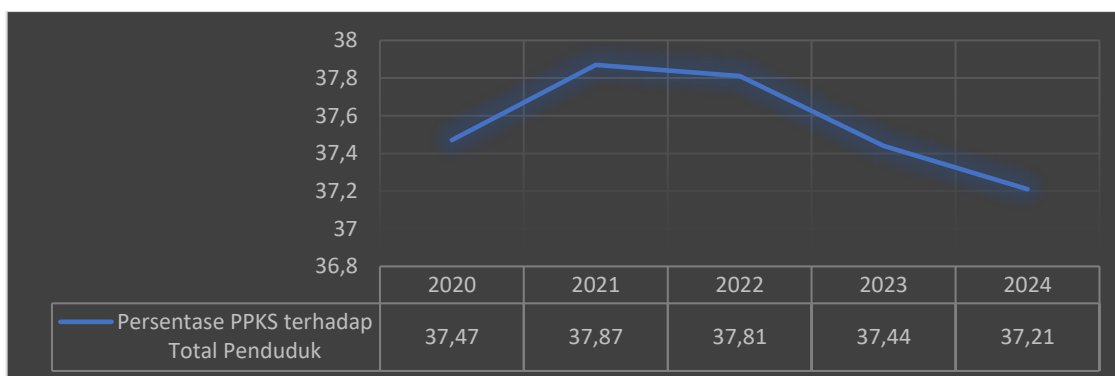
Keterangan:

*) Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

**) Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Gambar 2.48 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Subosukowonosraten Tahun 2024 (%)**

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap total penduduk di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024, yaitu meningkat dari 37,47% pada tahun 2020 menjadi puncaknya 37,87% pada 2021, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 37,21% pada 2024, dengan jumlah PPKS sebanyak 340.048 orang, yang mencerminkan hampir dua perlima dari total penduduk, menunjukkan bahwa isu kesejahteraan sosial masih menjadi tantangan serius. Fluktuasi angka ini menggambarkan bahwa data PPKS sangat dinamis, karena dapat dengan cepat berubah akibat beberapa faktor termasuk disabilitas baru, sementara di sisi lain proses pendataan belum sepenuhnya optimal akibat belum adanya sistem data yang terintegrasi antar-instansi. Meskipun sudah terdapat petugas data desa untuk melakukan pemutakhiran secara berkala, namun keterbatasan integrasi dan sistem informasi yang tidak real-time menyebabkan ketidaktepatan sasaran intervensi.



Sumber: Dinas Sosial (Diolah)

Gambar 2.49 Perkembangan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Berdasarkan data tahun 2020–2024, penanganan PPKS di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dari hanya 0,96% PPKS tertangani pada 2020 menjadi 23,28% pada 2024, sementara persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial cenderung menurun dari 29,07% pada 2022 menjadi 25,6% pada 2024, dan PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk kebutuhan dasar juga menurun dari 19,15% (2022) menjadi 16,38% (2024), menunjukkan efektivitas dan ketepatan sasaran PPKS masih menghadapi tantangan serius, meskipun penjangkauan langsung meningkat, antara lain disebabkan minimnya jumlah Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang bersertifikasi dibandingkan dengan beban penanganan PPKS, lemahnya integrasi sistem data, serta rendahnya motivasi sebagian penerima manfaat untuk mandiri karena ketergantungan terhadap bantuan.



Sumber: Dinas Sosial (Diolah)

Gambar 2.50 Perkembangan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sukoharjo relatif stabil dalam rentang 2020–2024, Namun, TPAK perempuan mengalami tren penurunan. TPAK bergerak dari 68,74% menjadi 68,21%, dengan penurunan kecil pada 2022 dan 2023. Namun TPAK perempuan mengalami tren penurunan dari 57,99% (2020) menjadi 56,92% (2024), mencerminkan adanya hambatan struktural dan sosial terhadap partisipasi perempuan di pasar kerja. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan tutupnya beberapa industri padat karya seperti SRITEK, sebelumnya menjadi akses penyerap tenaga kerja perempuan secara signifikan, sehingga berdampak langsung pada menurunnya partisipasi kerja perempuan, sekaligus mengindikasikan perlunya diversifikasi lapangan kerja yang ramah perempuan dan penguatan program pelatihan keterampilan berbasis gender.

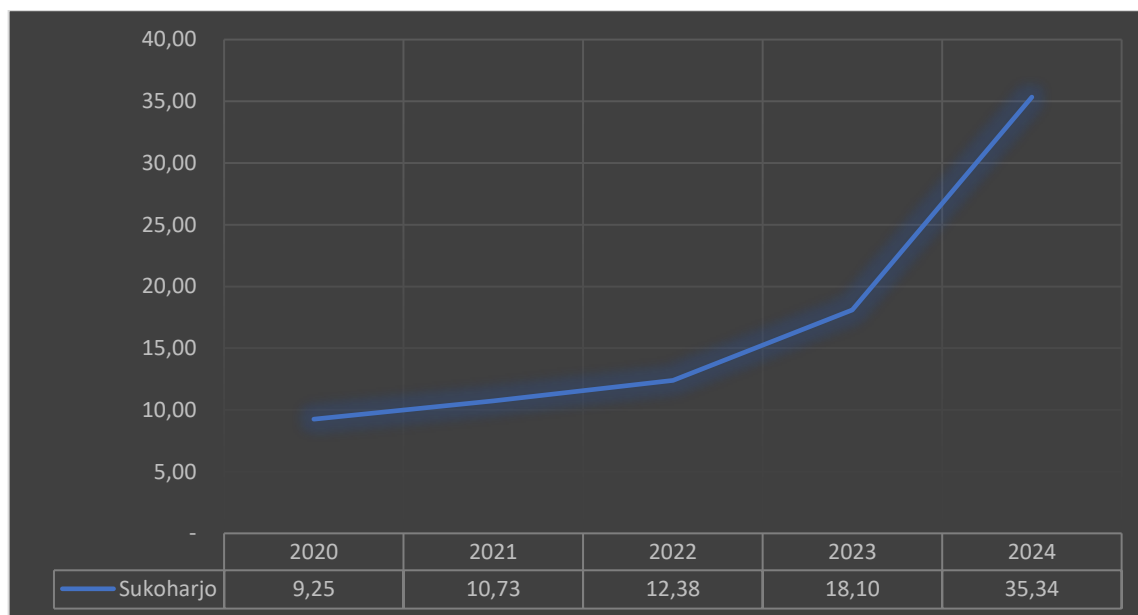


Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.51 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan TPAK Perempuan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, cakupan kepesertaan berada pada angka 9,25% dan mengalami peningkatan secara bertahap menjadi 10,73% pada 2021, 12,38% pada 2022, dan melonjak lebih signifikan menjadi 18,10% pada 2023. Kenaikan yang paling drastis terjadi pada tahun 2024, di mana cakupan kepesertaan mencapai 35,34%, yang mencerminkan adanya peningkatan kesadaran pekerja terhadap pentingnya perlindungan sosial, serta efektivitas intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Cakupan ini didefinisikan sebagai jumlah pekerja yang memiliki perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap jumlah penduduk pekerja usia produktif (15–65 tahun). Semakin tinggi cakupan ini menunjukkan semakin

baiknya perlindungan sosial terhadap risiko kerja seperti kecelakaan, penyakit akibat kerja, hingga kematian, yang manfaatnya mencakup santunan tunai, fasilitas reintegrasi pasar kerja, dan beasiswa anak pekerja. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan dalam sistem perlindungan tenaga kerja di daerah serta menunjukkan arah pembangunan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diolah)

Gambar 2.52 Perkembangan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

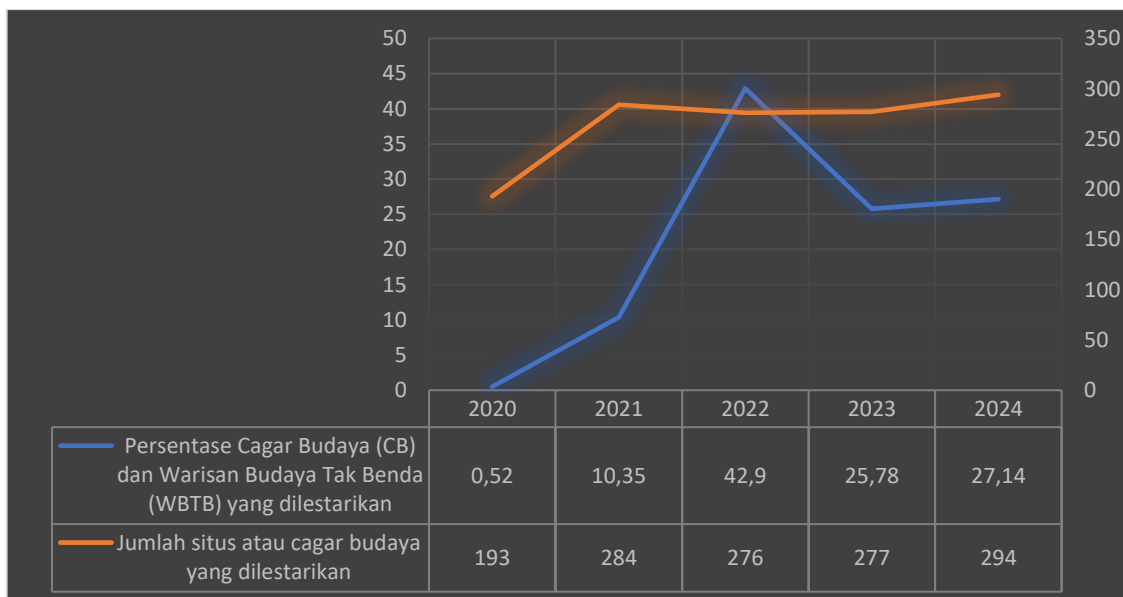
2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Upaya pelestarian budaya di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan dinamika yang cukup signifikan sepanjang periode 2020–2024. Jumlah situs atau cagar budaya yang dilestarikan mengalami peningkatan dari 193 pada tahun 2020 menjadi 294 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya komitmen daerah dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal dan meningkatkan jumlah objek pelestarian dari tahun ke tahun.

Namun demikian, perkembangan persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, hanya sebesar 0,52%, namun mengalami lonjakan tajam hingga 42,9% pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 (25,7%) dan sedikit meningkat kembali menjadi 27,14% pada tahun 2024. Fenomena ini dapat disebabkan oleh perbedaan mekanisme kurasi dan

penetapan warisan budaya, ketersediaan sumber daya pelestari, hingga prioritas program tahunan yang berubah sesuai konteks strategis pembangunan.

Pentingnya pelestarian budaya di Kabupaten Sukoharjo tidak hanya dilihat dari jumlah situs atau persentase semata, tetapi juga dari upaya membumikan nilai-nilai luhur budaya kepada masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kebudayaan yang menanamkan penghargaan terhadap budaya leluhur, menjaga keragaman dan identitas budaya, serta memperkuat ketahanan budaya masyarakat di tengah arus globalisasi.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diolah)

Gambar 2.53 Perkembangan Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTD) yang dilestarikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Perkembangan pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 mencerminkan adanya komitmen dan capaian signifikan dalam menjaga warisan leluhur dengan peningkatan jumlah situs yang dilestarikan, meskipun persentase pelestarian sempat fluktuatif, yang menggambarkan perlunya penguatan kelembagaan, strategi kebijakan yang berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur budaya lokal sebagai bagian integral dari ketahanan budaya daerah.

Cagar Budaya yang dimiliki daerah meliputi: Benda Cagar Budaya sebanyak 192 buah; Bangunan Cagar Budaya sebanyak 24 buah; Situs Cagar Budaya sebanyak 6 lokasi; dan Kawasan Cagar Budaya sebanyak 2 kawasan. Bahasa yang digunakan masyarakat Kabupaten Sukoharjo, menggunakan bahasa lokal (bahasa Jawa). Untuk kawasan wisata budaya meliputi:

- a. Wisata situs bersejarah meliputi: Patilasan Keraton Kartasura dan Keraton Pajang di Kecamatan Kartasura; Pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol; dan Peninggalan Pabrik Gula Gembongan, Peninggalan Benteng Singopuran, dan Pesanggrahan Kandang Menjangan di Kecamatan Kartasura;
- b. Wisata religi/ziarah meliputi: Makam Ki Ageng Purwoto Sidik dan makam Kyai Banyubiru di Kecamatan Weru; Makam Balakan dan makam Mbah Marbot/Sayyidiman di Kecamatan Bendosari; Makam Majasto di Kecamatan Tawang Sari; dan Makam Kyai Shirot dan makam Patih Pringgoloyo di Kecamatan Kartasura
- c. Wisata Benda Cagar Budaya di Univet, Kecamatan Bendosari.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan perlindungan terhadap benda cagar budaya dengan diterbitkan berbagai Surat Keputusan tentang Penetapan Cagar Budaya.

Tabel 2.23 Data Penetapan Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo

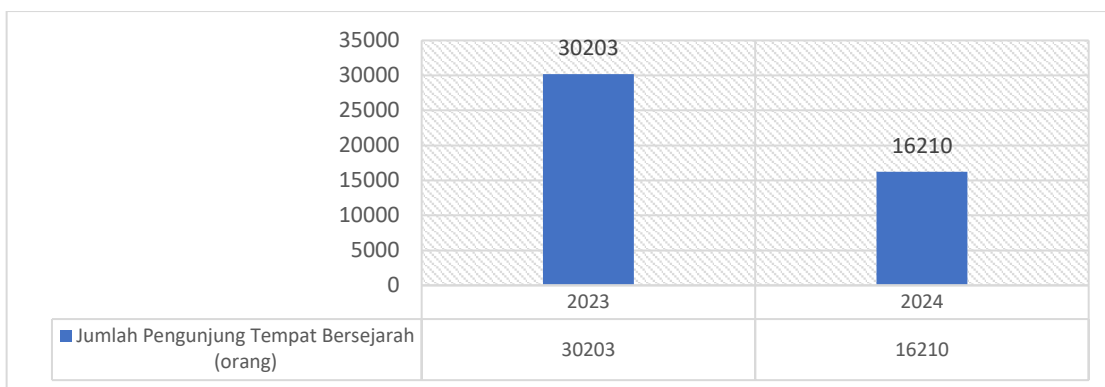
No	Nama Objek	Kategori	Jumlah	Ditetapkan Oleh	No dan Tanggal SK penetapan
1	Pesanggrahan Langenharjo	Bangunan	1	Menteri	PM.24PW.007/MKP/2007 26 Maret 2022
2	Benteng Kraton Kartasura	Situs	1	Bupati	646/270/2022 28 April 2022
		Bangunan	1	Bupati	646/270/2022 28 April 2022
		Struktur	6	Bupati	646/270/2022 28 April 2022
3	Benteng Baluwarti Sisi Timur	Struktur	1	Bupati	646//352/2022 5 Juli 2022
4	Candi Sirih	Situs	1	Bupati	646//352/2022 5 Juli 2022
		Struktur	5	Bupati	646//352/2022 5 Juli 2022
		Benda	8	Bupati	646//352/2022 5 Juli 2022
5	Pagar Dalam Singopuran	Struktur	1	Bupati	032/492/2022 18 Oktober 2022
6	Eks Pabrik Gula Gembongan	Situs	1	Bupati	646531//2022 21 November 2022
		Bangunan	10	Bupati	646531//2022 21 November 2022
		Struktur	3	Bupati	646531//2022 21 November 2022
7	Eks Kawedanan Bekonang	Bangunan	1	Bupati	646/587/2022 15 Desember 2022
8	Pesanggrahan Krapyak Giriwoyo	Situs	1	Bupati	646/592/2022 28 Desember 2022
9	Gapura Kwarasan	Bangunan	1	Bupati	646/558/2023 7 November 2023

No	Nama Objek	Kategori	Jumlah	Ditetapkan Oleh	No dan Tanggal SK penetapan
10	Gapura Madegondo	Bangunan	1	Bupati	646/562/2023 7 November 2023
11	Masjid Tiban (Al Barokah) Sumedangan	Bangunan	1	Bupati	646/580/2023 6 Desember 2023
12	Masjid Agung Jatisobo	Bangunan	1	Bupati	646/581/2023 6 Desember 2023
13	Gapura Makamhaji	Bangunan	1	Bupati	646/582/2023 6 Desember 2023
14	Gapura Grogol	Bangunan	1	Bupati	646/586/2023 6 Desember 2023
15	Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo	Bangunan	1	Bupati	646/592/2023 22 Desember 2023
16	Makam Sumedangan	Struktur	1	Bupati	646/594/2023 22 Desember 2023
Jumlah			49		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diolah)

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan komitmen yang kuat dalam pelestarian kebudayaan seiring dengan upaya pelestarian Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang terus meningkat sejak 2020 meskipun mengalami penurunan pada 2023–2024. Upaya pelestarian budaya melalui peningkatan jumlah objek cagar budaya yang telah ditetapkan sebanyak 49 objek hingga tahun 2023 dan penyusunan regulasi pelindungnya, seiring dengan upaya pelestarian Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang terus meningkat sejak 2020 meskipun mengalami penurunan pada 2023–2024.

Penurunan signifikan terjadi pada jumlah pengunjung tempat bersejarah dari 30.203 orang pada 2023 menjadi 16.210 orang pada 2024, mencerminkan dampak situasional seperti pandemi, penurunan promosi wisata, atau lemahnya konektivitas dan aksesibilitas lokasi, namun keseluruhan data tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya dasar hukum yang kuat, keberagaman objek warisan budaya seperti situs, bangunan, benda, dan struktur yang tersebar di berbagai kecamatan, serta dominasi budaya Jawa yang masih terjaga, Sukoharjo memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata budaya dan ekonomi kreatif yang berbasis pelestarian nilai-nilai budaya lokal secara berkelanjutan.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diolah)

Gambar 2.54 Perkembangan Pengunjung Tempat Bersejarah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (orang)

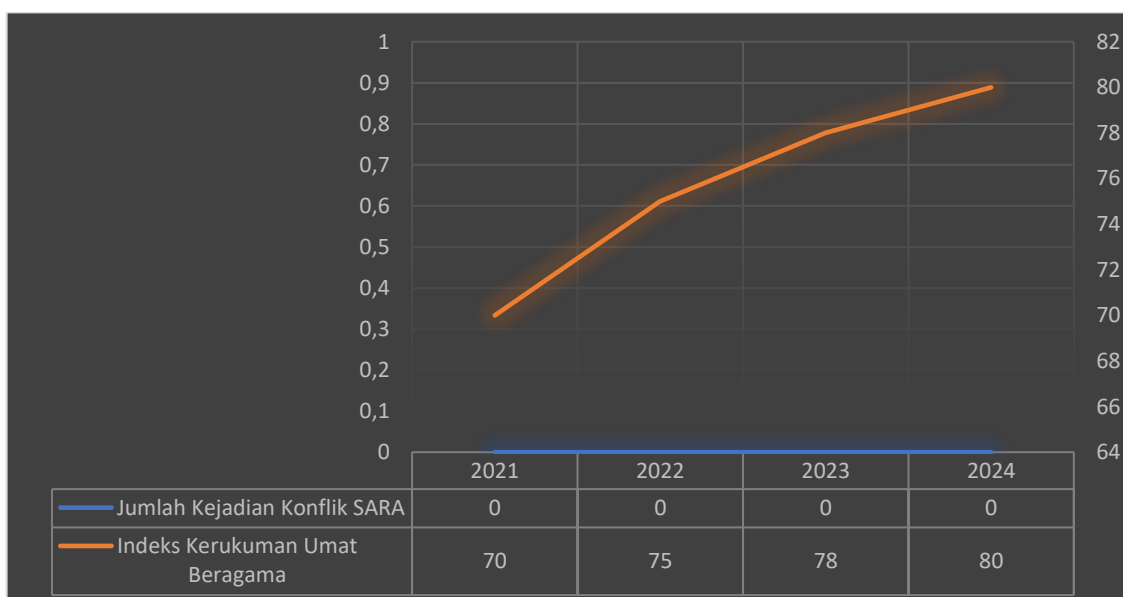
Tahun 2021-2024, menunjukkan tren positif dalam pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Sukoharjo, yang tercermin dari meningkatnya persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir, dari hanya 5,62% pada tahun 2021 menjadi 25,17% pada tahun 2024, yang menandakan adanya kebangkitan dan revitalisasi seni pertunjukan lokal, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya, serta dukungan pemerintah daerah dalam mendorong ruang ekspresi budaya melalui berbagai fasilitasi, pembinaan, dan event kesenian yang berkelanjutan sebagai bagian integral dari penguatan identitas budaya lokal dan pengembangan ekonomi kreatif.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diolah)

Gambar 2.55 Perkembangan Kelompok Kesenian yang Aktif Dalam Pertunjukan Kesenian Dalam 1 Tahun Terakhir Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Kondisi harmonis antarumat beragama di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021–2024 ditunjukkan dari nihilnya kejadian konflik SARA dan meningkatnya indeks kerukunan umat beragama dari skor 70 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2024, mengindikasikan keberhasilan strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat moderasi beragama melalui pendekatan kolaboratif lintas agama, penguatan forum kerukunan umat beragama (FKUB), serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam forum dialog, pendidikan toleransi, dan penguatan nilai-nilai kebhinekaan, yang semakin relevan dalam konteks keberadaan 216 organisasi masyarakat (22 Ormas Profesi, 24 Ormas Keagamaan, dan 170 Ormas Umum) serta 19 kasus konflik sosial pada tahun 2024 dengan tingkat penyelesaian konflik sebesar 84%, sehingga menunjukkan bahwa meskipun keragaman sosial dan dinamika organisasi masyarakat tinggi, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berhasil menciptakan dan mempertahankan iklim sosial yang kondusif melalui sistem deteksi dini, penanganan responsif, dan sinergi antar kelembagaan sosial-politik.



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Diolah)

Gambar 2.56 Perkembangan Kejadian Konflik SARA dan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2024

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024, dengan angka tertinggi sebesar 0,26 pada tahun 2022 dan terendah sebesar 0,145 pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, IKG Sukoharjo masih lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah (0,308) dan nasional (0,421) pada tahun 2024, yang

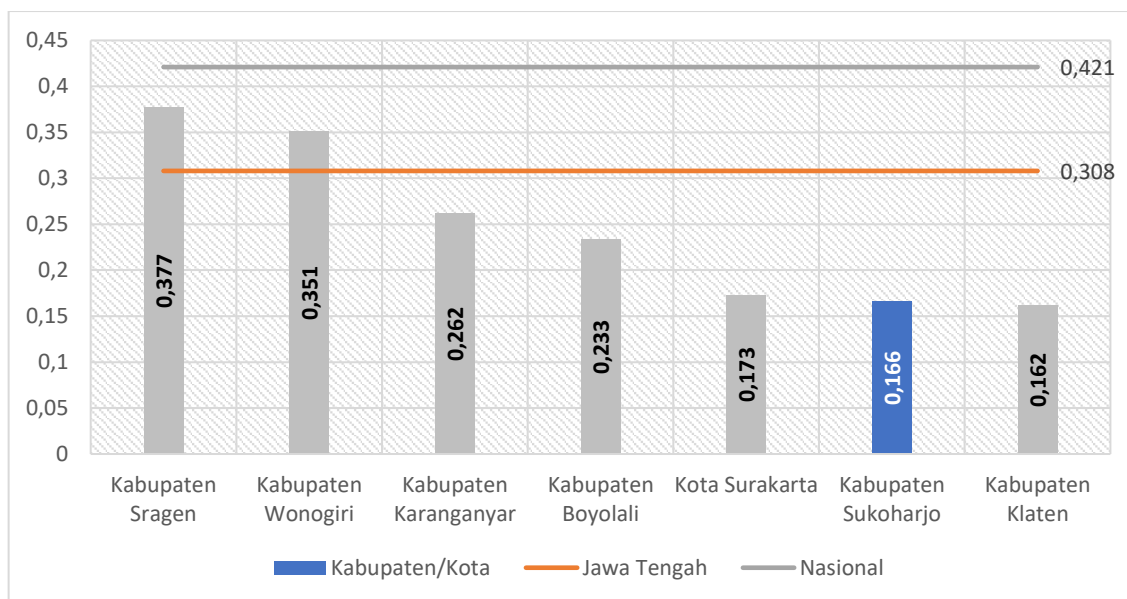
menunjukkan ketimpangan gender yang relatif lebih kecil di daerah ini. IKG sendiri berfungsi penting untuk mengidentifikasi dimensi ketimpangan, memonitor capaian kesetaraan gender, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah secara akuntabel. Nilai IKG yang menurun dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam intervensi kebijakan, namun fluktuasi yang terjadi menandakan bahwa masih terdapat ketidakstabilan dalam capaian kesetaraan gender, terutama dalam dimensi ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.57 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Indeks)

Meskipun nilai IKG Kabupaten Sukoharjo tergolong rendah dibandingkan rata-rata Jawa Tengah (0,308) dan nasional (0,421), hal ini perlu dipahami dalam konteks faktor-faktor struktural yang memengaruhi capaian tersebut. BPS (2025), ketimpangan gender merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh tradisi, sistem pendidikan, struktur ekonomi dan sosial, serta konteks sejarah lokal. Dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Subosukowonosraten, IKG Sukoharjo (0,166) lebih rendah dari Sragen (0,377), Wonogiri (0,351), dan Karanganyar (0,262), serta sedikit lebih tinggi dibanding Klaten (0,162) dan Surakarta (0,173), yang menunjukkan masih terdapat ketimpangan tetapi relatif kecil. Rendahnya IKG ini dapat mencerminkan peluang partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pasar tenaga kerja yang semakin terbuka di Sukoharjo, meskipun masih memerlukan intervensi kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di sektor formal, posisi kepemimpinan, serta pengambilan keputusan strategis.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.58 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Subosukowonosraten Tahun 2024 (Indeks)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020–2024, terlihat tren positif yang menunjukkan capaian pembangunan gender yang semakin setara. IPG Sukoharjo meningkat dari 96,49 (2020) menjadi 97,87 (2024), yang berarti kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin kecil dan mendekati kondisi ideal (nilai IPG = 100). Capaian ini secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rerata Provinsi Jawa Tengah (92,58–93,44) dan nasional (91,35–92,46) pada periode yang sama. Berdasarkan klasifikasi UNDP (2022), dengan selisih $|IPG-100|$ sebesar 2,13 pada tahun 2024, Sukoharjo berada dalam kategori *Kesetaraan Gender Tinggi*. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di daerah ini berjalan relatif seimbang dalam tiga dimensi dasar IPM, yaitu usia panjang dan hidup sehat (diukur dari angka harapan hidup), pendidikan (harapan dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita disesuaikan). Peningkatan ini mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.59 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Indeks)

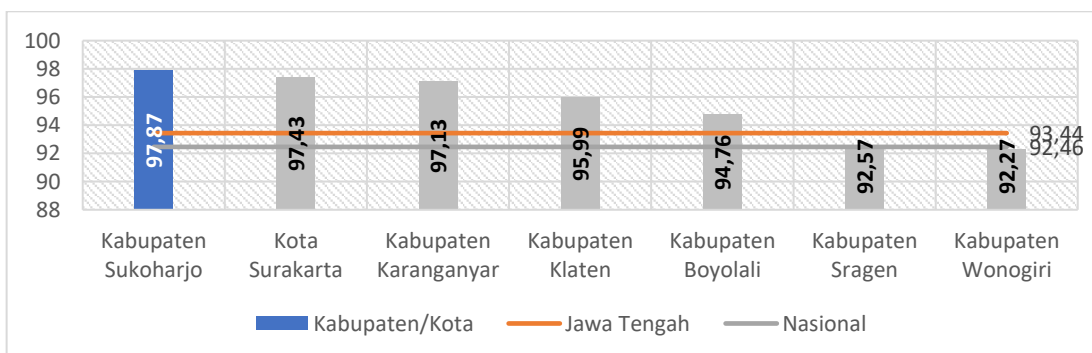
Kesenjangan pembangunan antar jenis kelamin tetap perlu menjadi perhatian dalam pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Meskipun Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,166 pada tahun 2024 yang jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah (0,308) dan nasional (0,421), serta menunjukkan percepatan capaian IPM perempuan yang konsisten mengungguli pertumbuhan IPM laki-laki selama 2013–2024 yang kemudian berdampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 96,49 pada tahun 2020 menjadi 97,87 pada tahun 2024, namun kesenjangan pembangunan antarjenis kelamin tetap perlu menjadi perhatian melalui kebijakan yang lebih akurat dan responsif gender, mengingat ketimpangan gender bersifat multidimensi, kontekstual, dan seringkali dipengaruhi oleh faktor struktural, budaya, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.60 Perkembangan IPG, IPM Lak-Laki dan IPM Perempuan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Indeks)

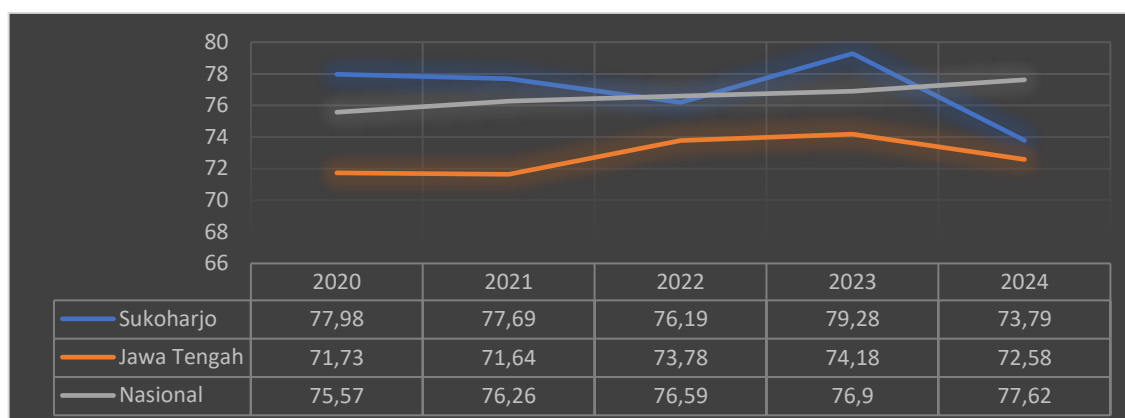
Kabupaten Sukoharjo mencatatkan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) tertinggi di wilayah Subosukowonosraten pada tahun 2024, yaitu sebesar 97,87, melampaui seluruh kabupaten/kota sekitarnya serta rata-rata Provinsi Jawa Tengah (93,44) dan nasional (92,46). Capaian tinggi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Sukoharjo sangat kecil, dan telah mendekati kesetaraan ideal (IPG mendekati angka 100). Jika dibandingkan, Kota Surakarta (97,43) dan Kabupaten Karanganyar (97,13) juga menunjukkan performa IPG yang relatif baik, sementara kabupaten lain seperti Boyolali (94,76), Klaten (95,99), Sragen (92,57), dan terutama Wonogiri (92,27) masih mencatatkan nilai IPG di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo telah berhasil dalam mendorong percepatan pembangunan manusia berbasis kesetaraan gender melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih inklusif terhadap perempuan, serta mengindikasikan efektivitas kebijakan afirmatif dan akses pelayanan publik yang merata antar jenis kelamin.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.61 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Subosukowonosraten Tahun 2024 (Indeks)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, IDG Sukoharjo berada di angka 77,98 dan sempat menurun menjadi 76,19 pada tahun 2022, namun mengalami peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai puncaknya di angka 79,28 pada tahun 2023, yang kemudian kembali turun menjadi 73,79 pada tahun 2024. Angka tersebut meskipun masih tergolong dalam kategori “Tinggi” ($60 \leq \text{IDG} < 80$) menurut klasifikasi BPS, namun menunjukkan adanya dinamika dalam upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sukoharjo. Bila dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah yang lebih stabil dan meningkat secara perlahan dari 71,73 (2020) menjadi 72,58 (2024), serta IDG nasional yang konsisten meningkat dari 75,57 menjadi 77,62 pada periode yang sama, maka terlihat bahwa IDG Sukoharjo sempat lebih unggul namun kemudian mengalami penurunan tajam pada 2024, bahkan berada di bawah IDG nasional. IDG Sukoharjo sempat menunjukkan pencapaian yang cukup baik, namun tren penurunan tahun terakhir menegaskan pentingnya penguatan kebijakan afirmatif dan pelibatan perempuan dalam sektor strategis pembangunan daerah.

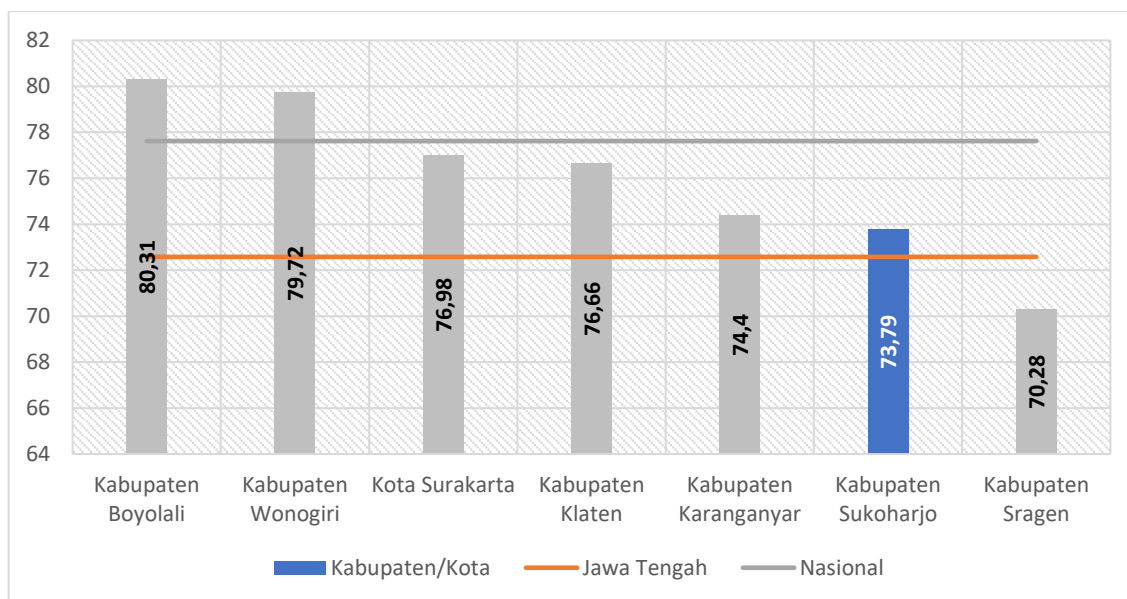


Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.62 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Indeks)

Pada tahun 2024, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sukoharjo (73,79) berada di bawah rata-rata nasional (77,62) dan menempati urutan ke-6 dari 7 kabupaten/kota di wilayah Subosukowonosraten. Meskipun IDG Sukoharjo masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (72,58), namun pencapaiannya lebih rendah dibandingkan Kabupaten Boyolali (80,31) dan Wonogiri (79,72) yang telah masuk kategori “Sangat Tinggi” ($\text{IDG} > 80$). Kota Surakarta (76,98), Kabupaten Klaten (76,66), dan Karanganyar (74,40) juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibanding Sukoharjo. Bahkan, hanya Kabupaten Sragen yang mencatat IDG lebih rendah dari Sukoharjo, yaitu sebesar 70,28. Hal ini mengindikasikan bahwa peran aktif perempuan di Kabupaten

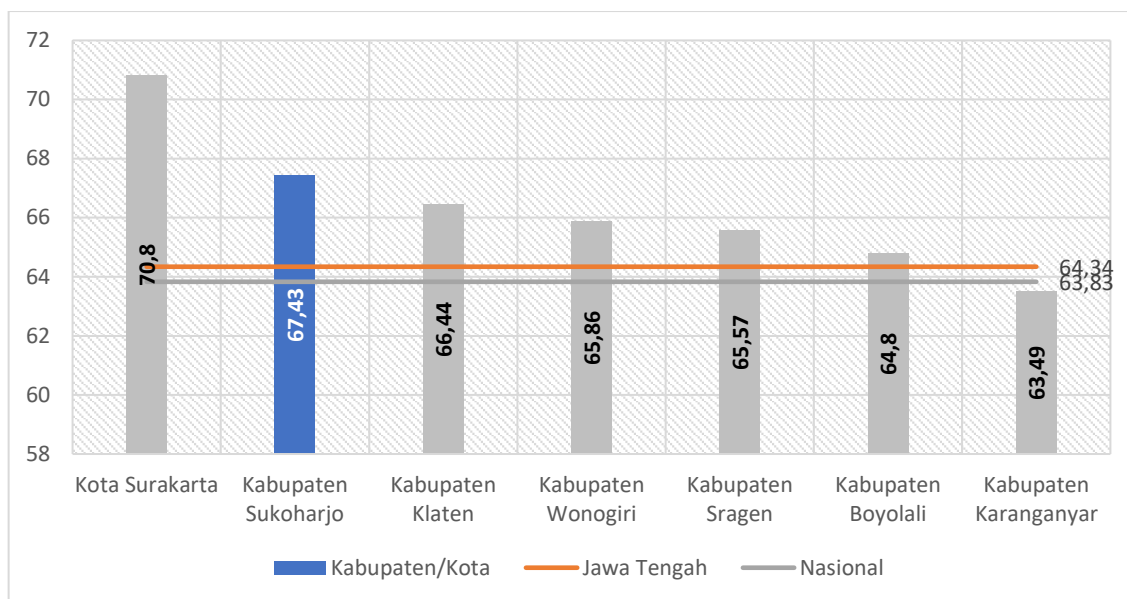
Sukoharjo dalam bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi masih perlu ditingkatkan secara signifikan.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.63 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Subosukowonosraten Tahun 2024 (Indeks)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Sukoharjo sebesar 67,43 pada tahun 2024 lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah (64,34) dan nasional (63,83), menandakan keberhasilan pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak baik dalam aspek sipil, kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan khusus. Namun jika dilihat dari rincian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 63,57 dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 82,80 juga menunjukkan bahwa perlindungan anak sudah cukup baik. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 tercatat sebesar 67,43, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (64,34) dan nasional (63,83), menempatkannya pada urutan kedua tertinggi di wilayah Subosukowonosraten setelah Kota Surakarta (70,80). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Klaten (66,44), Wonogiri (65,86), Sragen (65,57), Boyolali (64,80), dan Karanganyar (63,49), yang secara berturut-turut mencatatkan nilai IPA di bawah angka Sukoharjo. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki komitmen yang relatif baik dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan untuk mengoptimalkan pemenuhan seluruh kluster yang menjadi komponen IPA, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus.

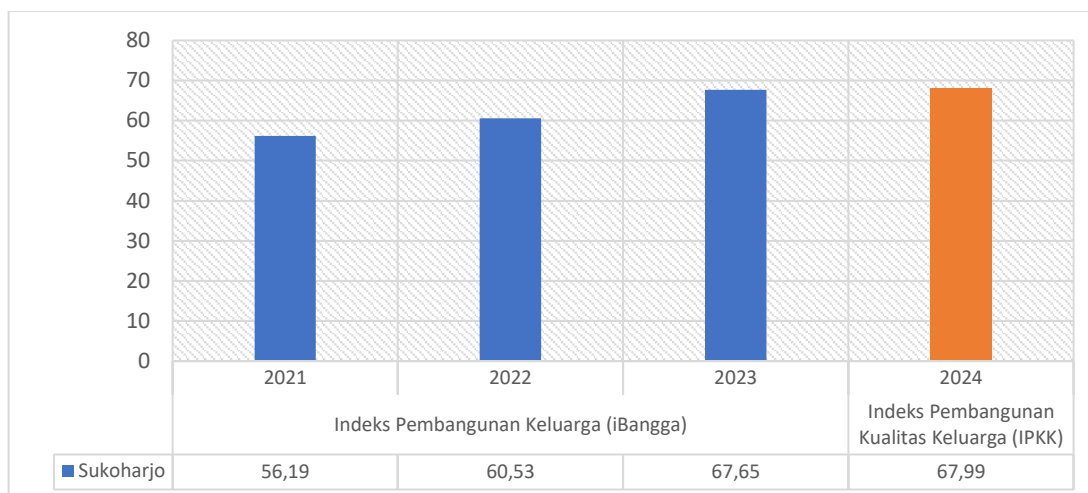


Keterangan: *) Data Tahun 2023

Sumber: Kementerian PP dan PA, Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Diolah)

Gambar 2.64 Perbandingan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Subosukowonosraten Tahun 2024* (Indeks)

Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, yakni dari 56,19 pada 2021 menjadi 60,53 pada 2022, dan melonjak ke angka 67,65 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan yang nyata dalam dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga sebagai indikator utama dalam pembangunan keluarga. Selanjutnya, pada tahun 2024, iBangga diintegrasikan menjadi Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) yang mencatat nilai sebesar 67,99. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan kualitas keluarga di Sukoharjo telah membuahkan hasil, baik melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan keluarga, penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga, maupun program pembangunan keluarga berencana yang inklusif.



Sumber: BKKBN, Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Diolah)

Gambar 2.65 Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2023 dan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 (Indeks)

Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan mulai tersedianya Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah perlu semakin memperhatikan peran strategis pemuda dan olahraga. Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren positif dan konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, dengan peningkatan signifikan dari 41,77% pada tahun 2021 menjadi 52,53% pada 2022, kemudian naik menjadi 54,66% pada 2023, dan mencapai 60,83% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan kemajuan dalam pembangunan kapasitas pemuda, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, partisipasi sosial, dan akses terhadap peluang ekonomi. Sementara itu, Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) baru mulai tersedia datanya pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 0,524, yang menunjukkan bahwa pengukuran pembangunan olahraga masih dalam tahap awal pengembangan. Data IPO ini dapat menjadi pijakan awal untuk memformulasikan kebijakan yang lebih fokus pada pengembangan ekosistem olahraga daerah, pembinaan atlet usia muda, dan peningkatan sarana prasarana olahraga yang inklusif.

Tabel 2.24 Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Tahun 2021-2024 (%)

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	41,77	52,53	54,66	60,83
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	-	-	-	0,524

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Diolah)

Perkembangan pembangunan keolahragaan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kemajuan positif dalam beberapa aspek selama periode 2019–2024, khususnya dalam jumlah klub olahraga yang meningkat signifikan dari 217 pada 2023 menjadi 279 pada 2024 serta jumlah organisasi/klub olahraga yang mencapai 37. Di sisi lain, jumlah atlet berprestasi mengalami fluktuasi dan justru menurun pada 2024 menjadi 173 orang dari 301 orang pada 2023, begitu pula jumlah prestasi olahraga yang turun menjadi 173 dari 301 pada tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah sarana berupa gedung olahraga menjadi 153 unit dan tingginya persentase organisasi pemuda yang aktif sebesar 88,89% menunjukkan adanya penguatan ekosistem keolahragaan yang inklusif dan partisipatif. Hal ini berkontribusi terhadap capaian awal Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar 0,524.

Tabel 2.25 Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 – 2024

No	Capaian Pembangunan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Klub Olahraga	202	217	217	217	217	279
2	Jumlah Gedung Olahraga	152	152	152	152	153	153
3	Jumlah Atlet Berprestasi	217	170	180	160	301	173
4	Jumlah Prestasi Olahraga	215	170	180	225	301	173
5	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	66	42	46	83	88,89	88,89
6	Jumlah Organisasi / Klub Olahraga	23	34	34	42	42	37

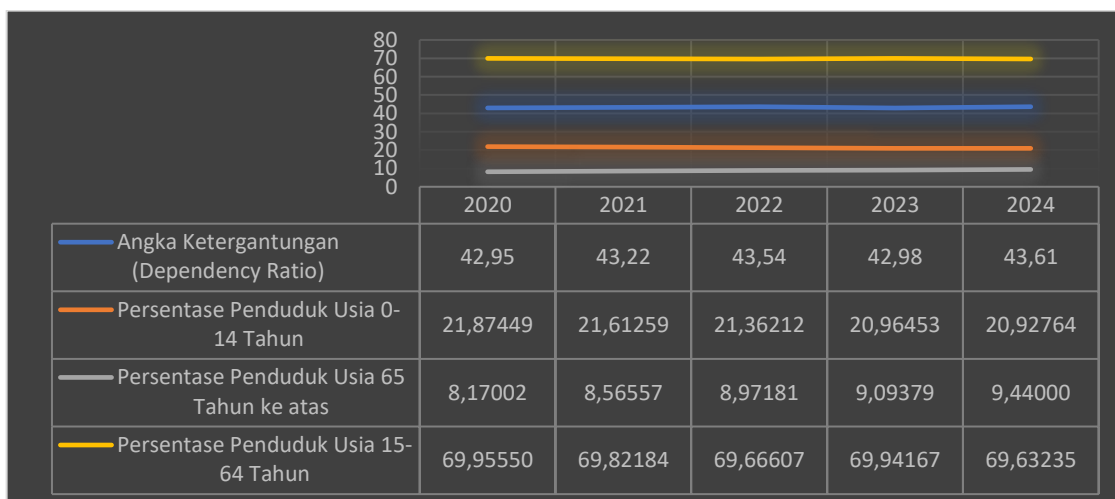
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Diolah)

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Struktur demografi Kabupaten Sukoharjo pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan angka ketergantungan (*dependency ratio*) berada pada kisaran 42,95 hingga 43,61. Hal ini mencerminkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) harus menanggung sekitar 43 penduduk usia non-produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas). Persentase penduduk usia produktif tetap mendominasi dengan proporsi di atas 69%, meskipun sedikit menurun dari 69,96% pada 2023 menjadi 69,63% pada 2024. Di sisi lain, proporsi penduduk usia 0–14 tahun cenderung menurun, dari 21,87% pada 2020 menjadi 20,93% pada 2024, menunjukkan adanya tren penurunan angka kelahiran atau transisi demografi awal. Sementara itu, proporsi penduduk lansia (65 tahun ke atas) mengalami peningkatan konsisten dari 8,17% pada 2020 menjadi 9,44% pada 2024, mengindikasikan arah menuju struktur penduduk menua (*ageing population*). Perubahan ini menuntut kebijakan adaptif

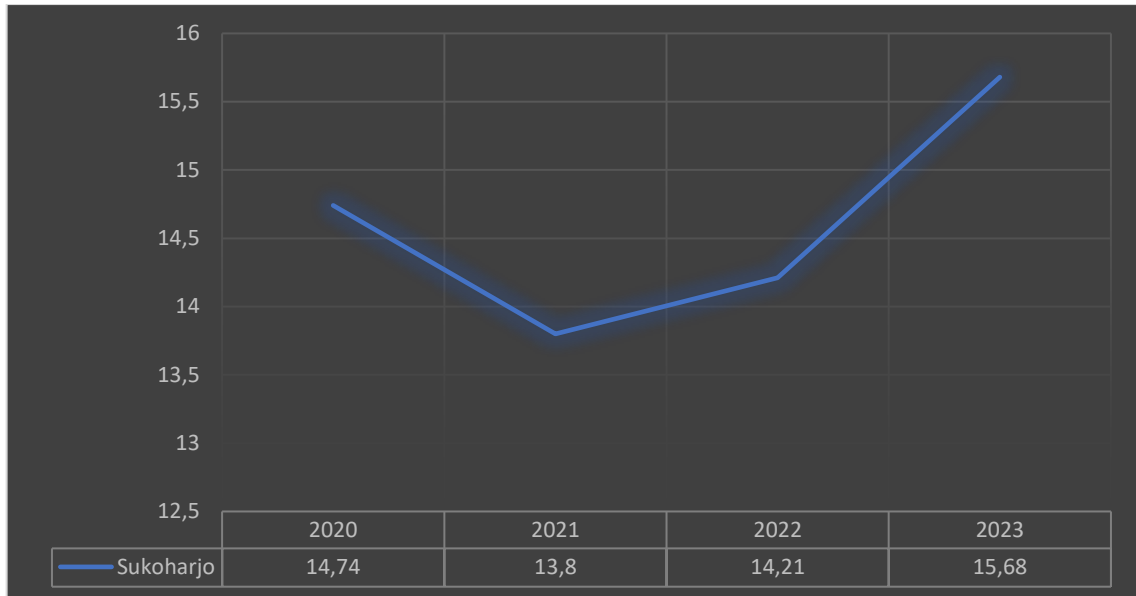
dalam pelayanan sosial, kesehatan lansia, ketenagakerjaan, serta pembangunan berkelanjutan yang berbasis bonus demografi dan kesiapan menghadapi struktur penduduk menua.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.66 Perkembangan Dependency Ratio, dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur 0-14 Tahun, 15-64 Tahun, dan 65 Tahun ke atas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

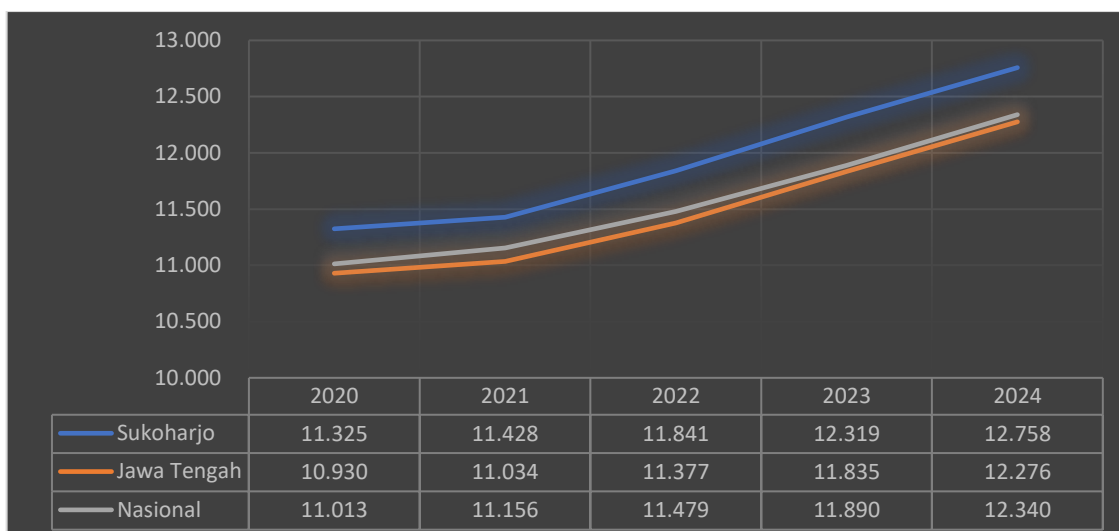
Perkembangan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Sukoharjo pada periode 2020–2023 menunjukkan tren fluktuatif namun diakhiri dengan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, proporsi ini tercatat sebesar 14,74%, kemudian menurun menjadi 13,80% pada tahun 2021. Namun demikian, tren ini mulai membaik pada tahun 2022 dengan capaian 14,21%, dan meningkat tajam menjadi 15,68% pada tahun 2023. Meskipun kewenangan penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan kewenangan pendidikan menengah berada di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota tetap memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan partisipasi pendidikan tinggi melalui dukungan tidak langsung, berupa penyediaan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi atau dari keluarga kurang mampu, meskipun dengan alokasi anggaran yang relatif terbatas. Di samping itu, pemerintah daerah juga dapat menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, serta mendorong terciptanya lingkungan pendukung seperti literasi pendidikan dan kesiapan akademik sejak jenjang dasar. Peningkatan jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi sangat penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendukung daya saing daerah, dan menunjang pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.67 Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2023 (%)

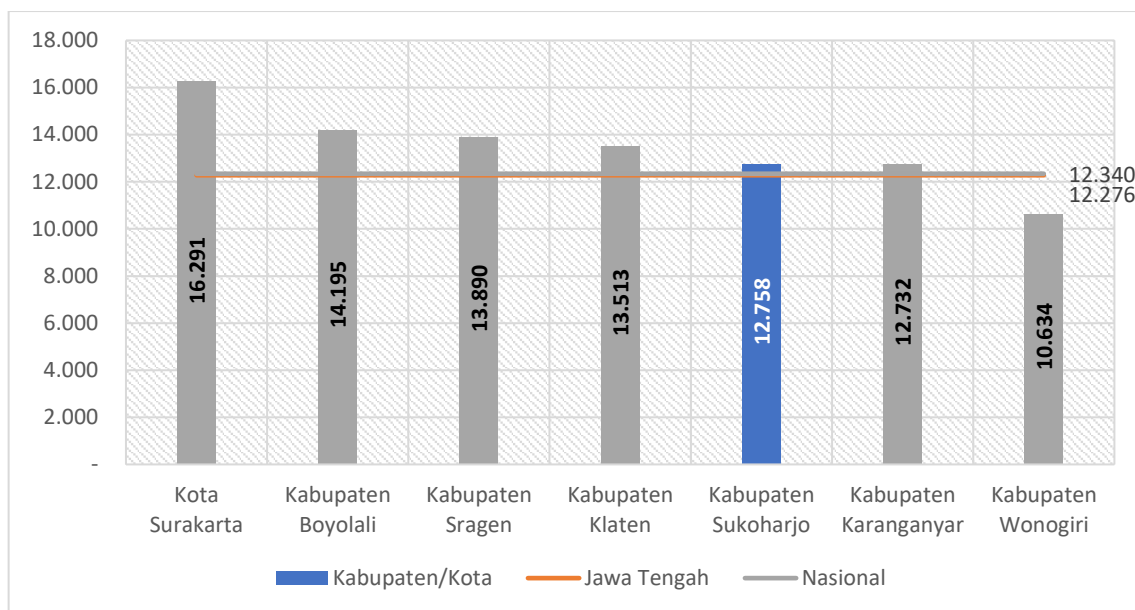
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari Rp11.325 ribu menjadi Rp12.758 ribu per orang per tahun. Angka ini tidak hanya lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (Rp12.776 ribu) tetapi juga melampaui capaian nasional (Rp12.340 ribu) pada tahun yang sama. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan daya beli masyarakat dan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai standar hidup layak di suatu wilayah. Kenaikan pengeluaran ini juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang stabil pada kisaran 5%, serta menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 7%, dan penurunan angka pengangguran pada kisaran 3%. Tren ini mengindikasikan perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo, serta memperkuat pencapaian tujuan pembangunan manusia yang lebih baik.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.68 Perkembangan Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Sukoharjo berada di atas Jawa dan Nasional, namun berada di peringkat bawah-menengah di kawasan Subosukowonosraten. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebesar Rp12.758 ribu/orang/tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (Rp12.276 ribu) dan juga di atas rata-rata nasional (Rp12.340 ribu). Namun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di kawasan Subosukowonosraten, posisi Sukoharjo masih berada di peringkat bawah-menengah. Pengeluaran per kapita tertinggi dicapai oleh Kota Surakarta dengan Rp16.291 ribu, diikuti oleh Kabupaten Boyolali sebesar Rp14.195 ribu dan Kabupaten Sragen sebesar Rp13.890 ribu. Kabupaten Sukoharjo berada sedikit di atas Kabupaten Karanganyar (Rp12.732 ribu) namun masih di bawah Klaten (Rp13.513 ribu). Disisi lain, Kabupaten Wonogiri menempati posisi terendah dengan nilai Rp10.634 ribu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran per kapita Sukoharjo berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, masih terdapat kesenjangan daya beli antar daerah dalam satu kawasan pengembangan ekonomi wilayah.

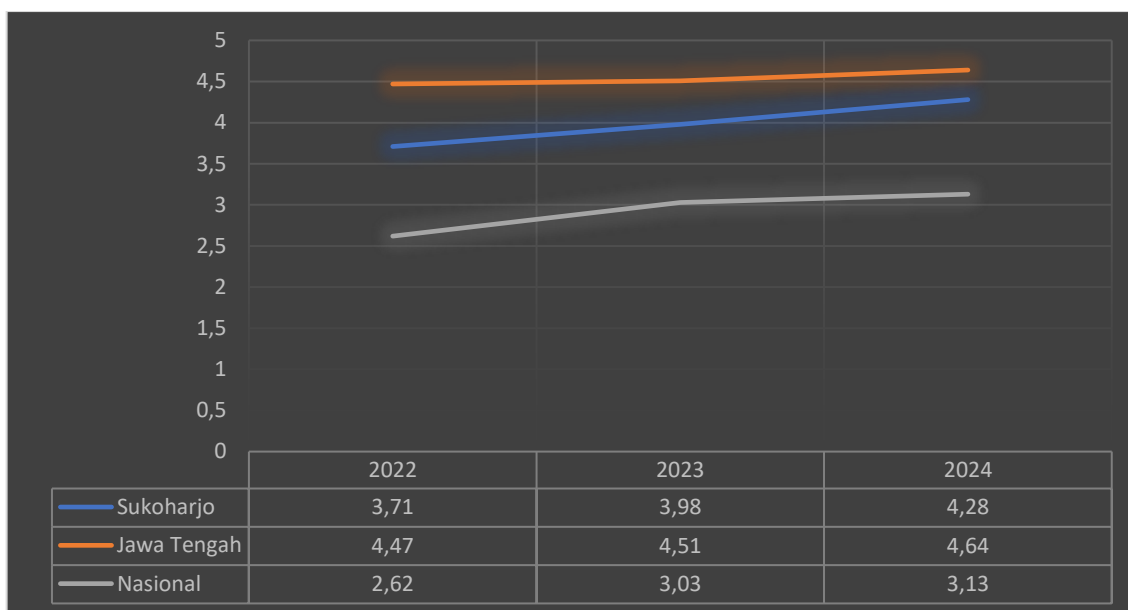


Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.69 Perbandingan Pengeluaran per kapita Disesuaikan Subosukowonosraten Tahun 2024 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas EKonomi

Kapabilitas inovasi yang merupakan Pilar ke 12 IDSD mengalami **kenaikan**, yaitu dari 3,71 pada tahun 2022 menjadi 4,28 pada tahun 2024. Meskipun masih di bawah rata-rata Jawa Tengah (4,64), namun tren peningkatannya lebih tajam dibandingkan rata-rata nasional maupun provinsi. Pilar ini menjadi kunci karena melibatkan tujuh indikator utama, termasuk publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, hingga aplikasi merek dagang. Kinerja positif kapabilitas inovasi menunjukkan adanya perbaikan pada sistem riset dan inovasi daerah, yang juga didukung oleh keberadaan tenaga kerja yang beragam serta pengembangan kluster industri. Strategi penguatan kapabilitas inovasi ini secara tidak langsung juga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi daerah, membuka peluang kolaborasi BUMD, UMKM, dan sektor pendidikan tinggi.



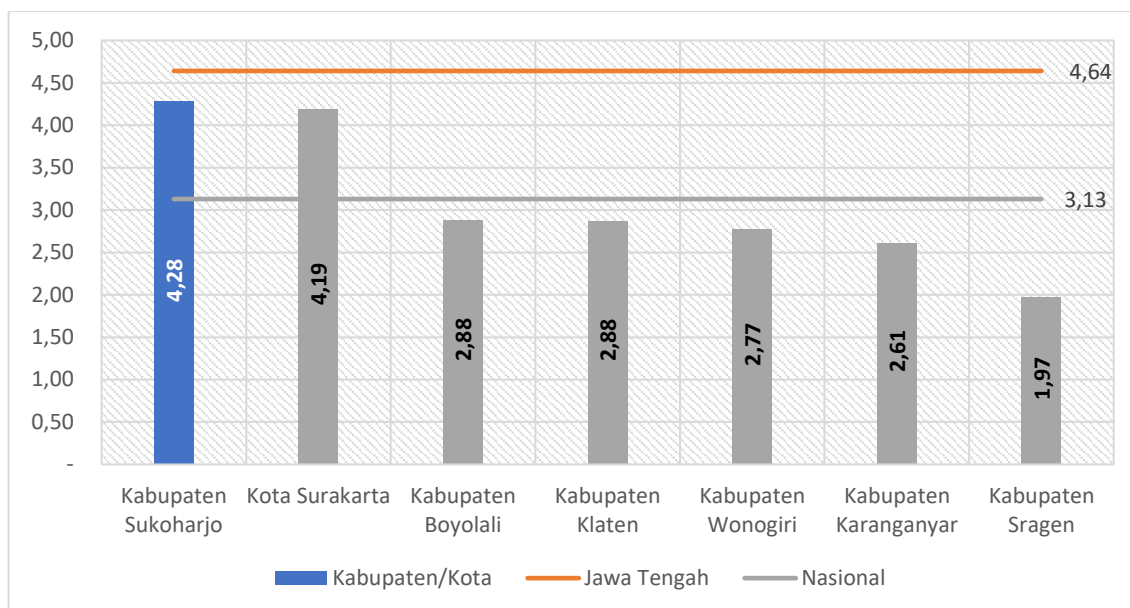
Sumber: BRIN (Diolah)

Gambar 2.70 Perkembangan Indeks Kapabilitas Inovasi (Pilar ke 12 dari IDSD) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2024 (Indeks)

Kabupaten Sukoharjo menempati peringkat tertinggi dalam hal Kapabilitas Inovasi (Pilar ke-12 IDSD) di antara seluruh kabupaten/kota di wilayah Subosukowonosraten tahun 2024.. Kapabilitas Inovasi (Pilar ke-12 IDSD) Kabupaten Sukoharjo tidak hanya melampaui rata-rata nasional (3,13), tetapi juga melampaui Kota Surakarta (4,19) yang selama ini dianggap sebagai pusat pertumbuhan regional. Sukoharjo yang unggul dalam pilar inovasi ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam mendorong aspek kolaborasi, diversifikasi pengetahuan, serta implementasi hasil riset ke dalam bentuk kekayaan intelektual dan bisnis baru. Capaian ini didukung oleh peningkatan signifikan dalam tujuh indikator utama yang mencakup: keanekaragaman tenaga kerja, pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Sementara itu, mayoritas kabupaten lain di Subosukowonosraten masih menunjukkan nilai indeks kapabilitas inovasi yang relatif rendah. Kabupaten Sragen mencatat angka paling rendah sebesar 1,97, disusul oleh Karanganyar (2,61) dan Wonogiri (2,77). Keunggulan Sukoharjo dalam aspek ini menunjukkan bahwa daerah telah berhasil memosisikan diri sebagai pionier inovasi regional. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan era ekonomi berbasis pengetahuan, penguatan pilar inovasi akan menjadi kunci dalam menciptakan transformasi struktural ekonomi lokal yang lebih tahan terhadap tekanan eksternal dan perubahan global. Dengan terus memperluas kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademisi, serta menjaga iklim inovasi yang produktif, Kabupaten Sukoharjo berpotensi besar menjadi pusat riset dan inkubasi

inovasi regional, yang akan memperkuat posisi daya saing ekonomi daerah secara menyeluruh.



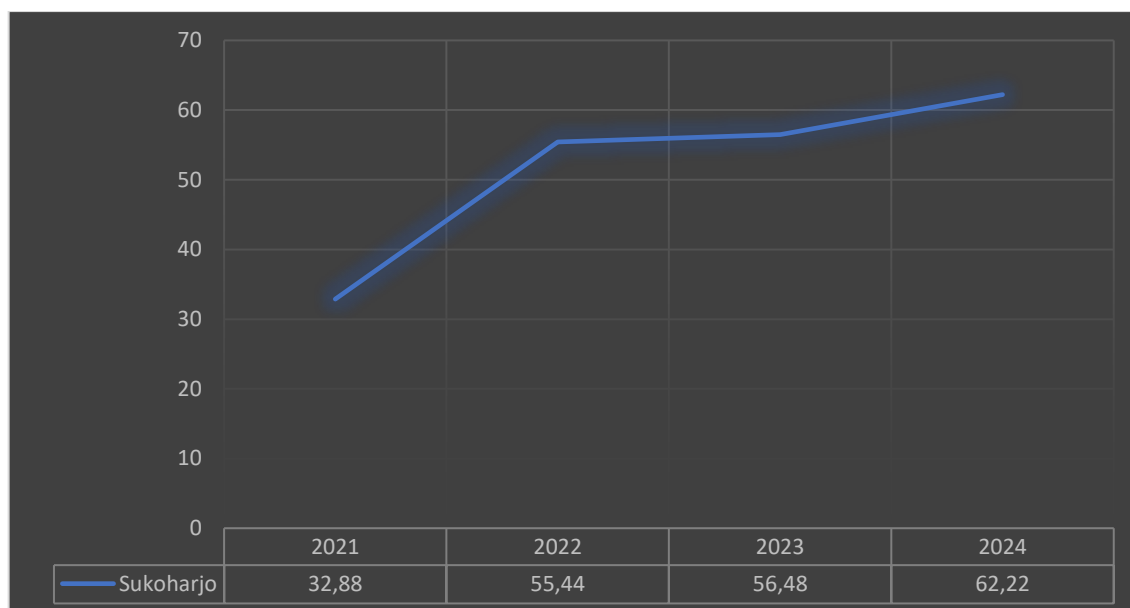
Sumber: BRIN (Diolah)

Gambar 2.71 Perbandingan Indeks Kapabilitas Inovasi (Pilar ke 12 dari IDSD) Subosukowonosraten Tahun 2024 (Indeks)

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren positif dalam penguatan kapasitas inovatifnya selama periode 2021–2024. Inovasi menjadi salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pembangunan. Perhitungan IID didasarkan pada dua aspek utama, yaitu: Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) sebesar 25,20% dari skor total, terdiri dari 3 variabel dan 15 indikator, dengan skor maksimum 63 poin; Satuan Inovasi Daerah (SID) sebesar 74,80% dari skor total, terdiri dari 5 variabel dan 21 indikator (20 indikator SID dan 1 indikator jumlah inovasi), dengan skor maksimum 187 poin. Total skor maksimum keseluruhan adalah 250 poin, yang kemudian dikonversikan ke dalam skala 0–100.

IID Kabupaten Sukoharjo meningkat signifikan dari 32,88 pada tahun 2021 menjadi 55,44 pada tahun 2022, kemudian mencapai 56,48 pada 2023 dan naik kembali menjadi 62,22 pada tahun 2024. Capaian ini menempatkan Sukoharjo dalam kategori "Inovatif", menurut klasifikasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang membagi skor IID ke dalam empat kategori, yaitu: Sangat Inovatif

(skor 65,01–100), Inovatif (40,01–65), Kurang Inovatif (0,01–40), dan Tidak Dapat Dinilai (0). Tren peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mendorong inovasi, baik dari sisi kebijakan, digitalisasi layanan publik, peningkatan efisiensi birokrasi, maupun pelibatan masyarakat dalam proses inovatif. Capaian nilai 62,22 yang mendekati batas atas kategori “Inovatif” juga mengindikasikan kesiapan Sukoharjo untuk masuk dalam kategori “Sangat Inovatif” pada tahun-tahun mendatang sehingga perlu akselerasi terhadap variabel-variabel inovasi yang belum optimal.



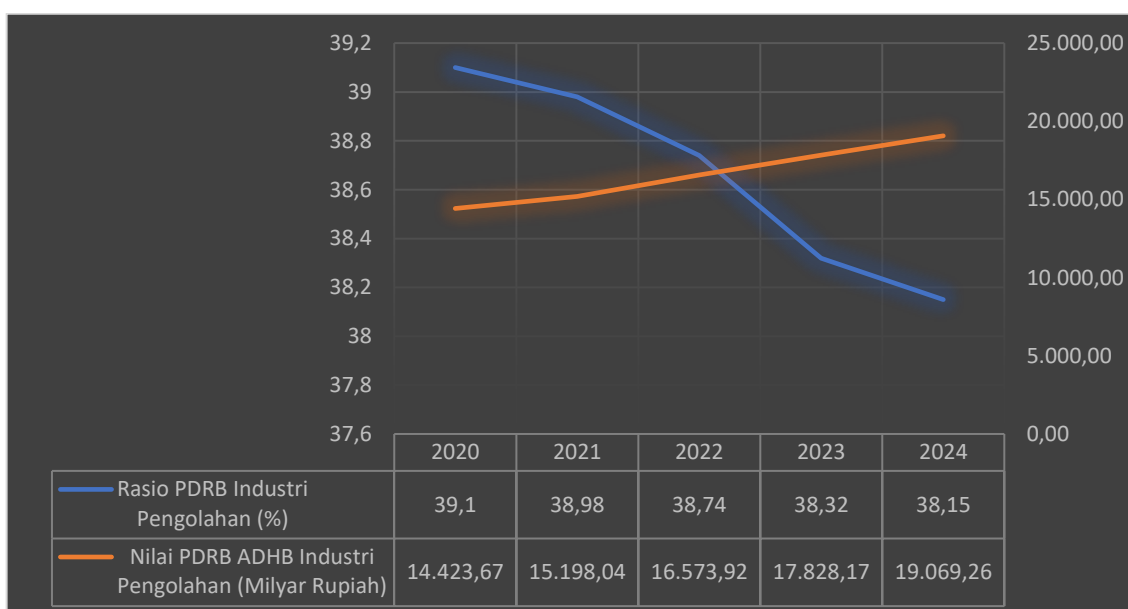
Sumber: Bapperida (Diolah)

Gambar 2.72 Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 (Indeks)

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor strategis dalam struktur ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang secara konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sektor industri pengolahan menunjukkan tren meningkat dari Rp14,42 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp19,07 triliun pada tahun 2024, namun rasio kontribusi sektor ini terhadap total PDRB menunjukkan penurunan dari 39,10% (2020) menjadi 38,15% (2024). Penurunan rasio ini menandakan bahwa meskipun output industri pengolahan mengalami pertumbuhan nominal, sektor-sektor lain tumbuh lebih cepat sehingga menyebabkan penurunan proporsi kontribusi relatif sektor ini. Fenomena ini dapat mencerminkan proses diversifikasi ekonomi daerah, namun juga dapat menjadi sinyal perlunya revitalisasi sektor industri pengolahan agar tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut klasifikasi BPS, industri pengolahan mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang mengubah bahan baku menjadi produk baru, baik melalui proses kimia, fisik, maupun mekanik. Sumber bahan baku berasal dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, hingga pertambangan, sehingga peran industri pengolahan juga berfungsi sebagai pengungkit keterkaitan antar sektor dalam sistem perekonomian regional. Selain itu, kegiatan maklon (manufaktur kontrak), transformasi manual, serta produksi berbasis kontrak turut memperluas definisi sektor ini dalam konteks ekonomi lokal Sukoharjo.

Tren penurunan kontribusi sektor pengolahan dalam rasio PDRB tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam konteks perencanaan pembangunan daerah dalam kebijakan industrialisasi, serta arah pembangunan sektor ini juga perlu mempertimbangkan dimensi lingkungan, efisiensi energi, serta nilai tambah berbasis kreativitas dan teknologi.



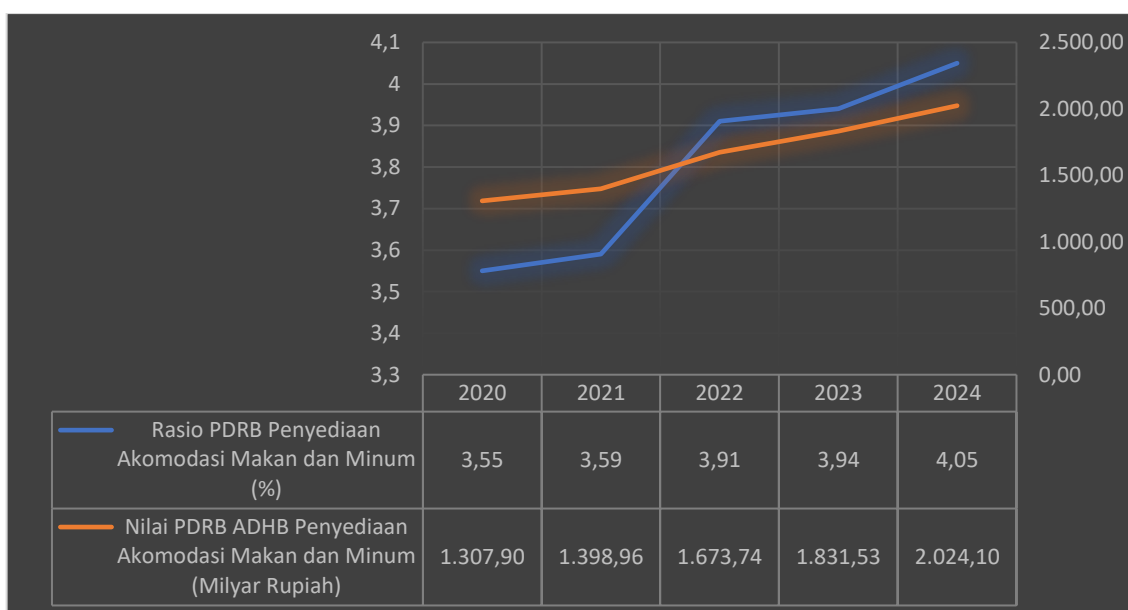
Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.73 Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode 2020 hingga 2024. Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat dari 3,55% pada tahun 2020 menjadi 4,05% pada tahun 2024. Kenaikan rasio ini mencerminkan peran yang semakin penting dari sektor ini dalam struktur ekonomi Kabupaten Sukoharjo. Sejalan dengan itu, nilai PDRB ADHB dari sektor ini juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari Rp1.307,90 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.024,10 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan nominal ini menunjukkan peningkatan permintaan dan

aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan layanan penginapan dan konsumsi makanan-minuman secara langsung oleh masyarakat maupun wisatawan.

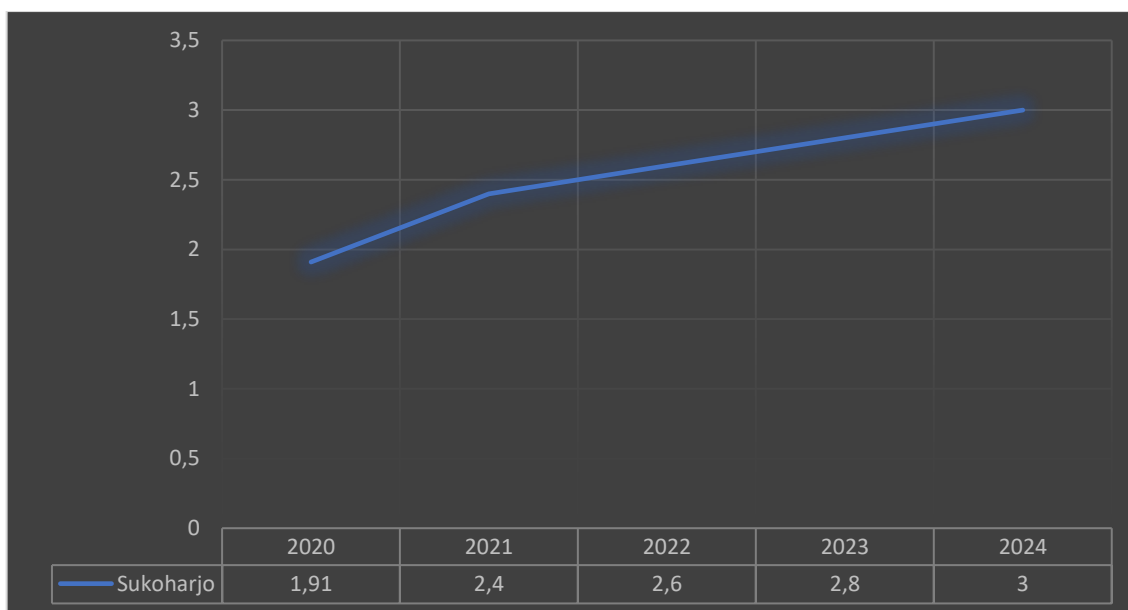
Secara sektoral, kategori ini mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek serta makanan dan minuman untuk konsumsi langsung, yang menjadi salah satu indikator vital dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pertumbuhan yang konsisten dalam lima tahun terakhir menunjukkan keberhasilan strategi pembangunan daerah dalam mengintegrasikan potensi wisata, UMKM kuliner, dan jasa pelayanan kepada publik.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.74 Perkembangan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Rasio kewirausahaan meningkat dari 1,91% pada tahun 2020 menjadi 3,00% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya jumlah pelaku usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja tetap melalui perekrutan buruh tetap di wilayah Sukoharjo. Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah orang yang berusaha dibantu oleh buruh tetap dengan total angkatan kerja daerah. Kriteria ini menyoroti kapasitas wirausaha lokal dalam membangun unit usaha berorientasi pertumbuhan dan keberlanjutan. Dalam interpretasinya, semakin besar rasio ini maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan tenaga kerja tetap di sektor wirausaha daerah, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi lokal dan mengurangi tekanan terhadap pengangguran terbuka.



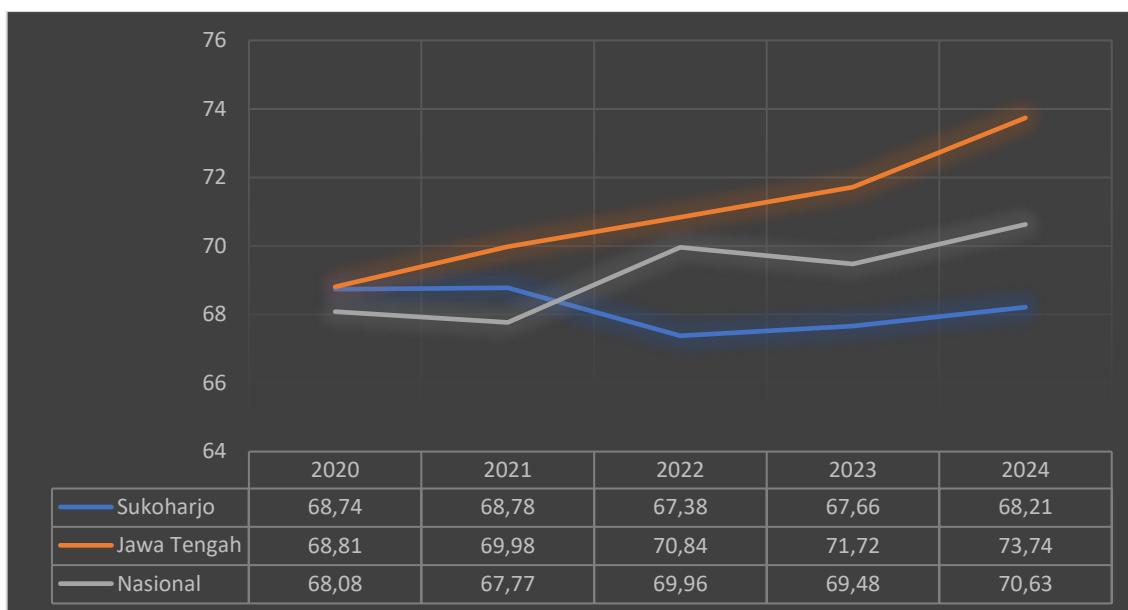
Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diolah)

Gambar 2.75 Perkembangan Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren yang relatif stagnan selama periode 2020 hingga 2024. TPAK merupakan indikator penting dalam menilai potensi tenaga kerja yang tersedia dalam suatu wilayah. Menurut BPS, TPAK adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini mencerminkan sejauh mana penduduk usia kerja aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Sukoharjo tercatat sebesar 68,74%, dan hanya mengalami sedikit fluktuasi dengan kecenderungan menurun hingga mencapai titik terendah pada 67,6% di tahun 2023, sebelum kembali naik menjadi 68,21% pada tahun 2024.

Sebaliknya, TPAK Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menunjukkan peningkatan dari 68,81% pada tahun 2020 menjadi 73,74% pada tahun 2024. Tren ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia kerja di tingkat provinsi yang aktif dalam pasar kerja. Di tingkat nasional pun terjadi peningkatan, meskipun tidak setajam Jawa Tengah, yakni dari 68,08% pada tahun 2020 menjadi 70,63% pada tahun 2024.

Perbedaan tren antara Kabupaten Sukoharjo dan rata-rata provinsi serta nasional dapat mengindikasikan adanya tantangan spesifik dalam aspek ketenagakerjaan lokal. Salah satu penyebab yang mungkin adalah struktur ekonomi lokal yang belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja usia produktif, rendahnya pertumbuhan sektor padat karya, serta keterbatasan akses angkatan kerja terhadap informasi atau kesempatan kerja.

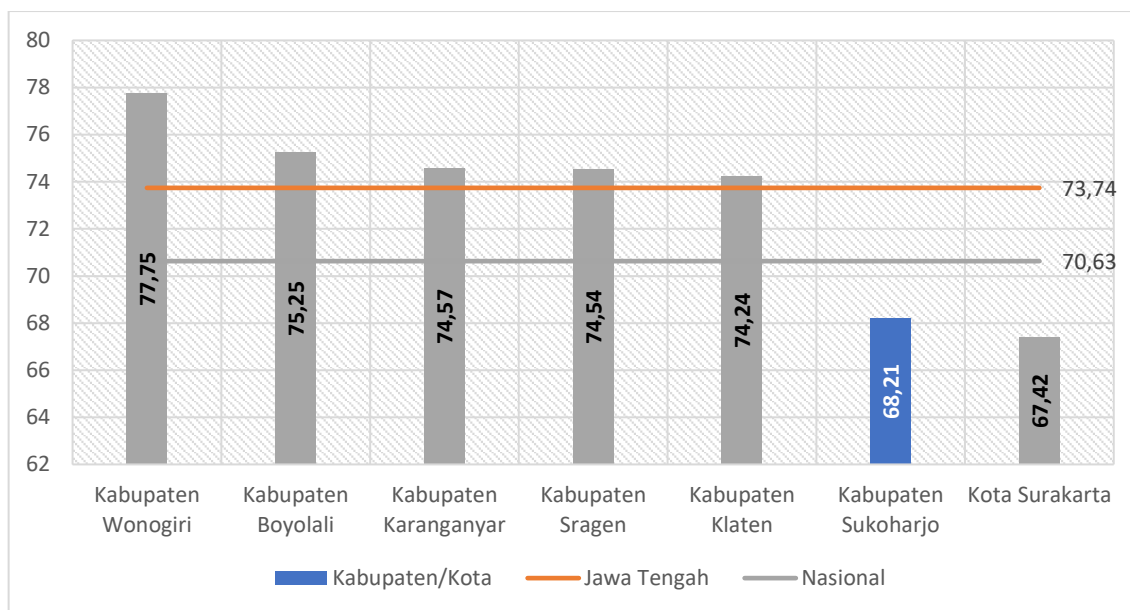


Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.76 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Pada tahun 2024, data TPAK menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,21%, yang menempatkannya sebagai wilayah dengan nilai TPAK terendah, yaitu TPAK Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 terendah di antara wilayah Subosukowonosraten, dan juga lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (73,74%) serta rata-rata nasional (70,63%). Bahkan, dibandingkan Kota Surakarta pun menunjukkan TPAK yang sedikit lebih rendah, yakni sebesar 67,42%, namun konteks kota biasanya memiliki struktur ketenagakerjaan yang berbeda dengan wilayah kabupaten.

Secara regional, Kabupaten Wonogiri mencatatkan TPAK tertinggi sebesar 77,75%, diikuti oleh Kabupaten Boyolali (75,25%), Karanganyar (74,57%), Sragen (74,54%), dan Klaten (74,24%). Rendahnya TPAK di Sukoharjo dapat menjadi indikasi adanya tantangan struktural dalam pasar kerja, serta rendahnya motivasi atau kesiapan angkatan kerja. Selain itu, pergeseran ke sektor jasa dan konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok usia muda dan perempuan.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.77 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Subosukowonosraten Tahun 2024 (%)

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Transformasi menuju ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Sukoharjo terus mengalami perkembangan dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Transformasi ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi, guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Aspek Data *Captive Power* Berizin dengan Kapasitas Lebih dari 500 kW, terlihat fluktuasi jumlah unit pembangkit dan kapasitas totalnya. Pada tahun 2020, terdapat 56 unit pembangkit dengan total kapasitas sebesar 36.143 kW, menurun drastis pada 2021 menjadi 5 unit dengan kapasitas 6.584 kW, dan nihil pada 2022. Namun, pada 2023 tercatat peningkatan kembali sebanyak 9 unit dengan kapasitas 16.008 kW. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa investasi dalam pembangkit tenaga mandiri masih dipengaruhi oleh faktor perizinan, kebijakan energi, dan kesiapan infrastruktur industri. Kedua, jumlah Desa Mandiri Energi di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan konsistensi dalam kategori inisiatif (43 desa) dan berkembang (9 desa) selama dua tahun berturut-turut (2022–2023). Meskipun belum ada desa yang masuk dalam kategori mapan, pencapaian ini menunjukkan langkah awal yang penting dalam menciptakan kemandirian energi berbasis komunitas.

Pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan terus dilakukan, terutama pada jenis pembangkit energi surya. Data menunjukkan penggunaan biogas masih mendominasi, meskipun turun dari 202 unit (2020) menjadi 186 unit (2023). Kapasitas biogas pun mengalami penurunan dari 804 m³

menjadi 758 m³. Penerapan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) rooftop tetap dipertahankan dengan peningkatan kapasitas dari 320,92 kWp (2020) menjadi 330,92 kWp (2023), serta pemasangan pompa air tenaga surya pertama kali dilakukan pada 2023 dengan kapasitas 12,32 kWp. Penerapan PJU Tenaga Surya (PJUTS) juga dipertahankan secara konsisten sebanyak 150 unit per tahun, dengan kapasitas 45.000 watt. Namun, pengembangan jenis energi terbarukan lainnya seperti PLTA, PLTM, PLTMH, dan panas bumi masih belum terealisasi, sehingga menunjukkan ruang yang besar untuk diversifikasi bauran energi terbarukan di masa depan. Rasio elektrifikasi Kabupaten Sukoharjo dalam periode 2020–2023 tercatat sangat tinggi dan stabil di atas 99,99%, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh wilayah sudah terjangkau oleh layanan listrik.

Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan komitmen dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan biru, meskipun masih diperlukan perluasan cakupan dan diversifikasi jenis energi terbarukan.

Tabel 2.26 Perkembangan Indikator Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2023

No	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Data Captive Power Berizin Dengan Kapasitas Lebih Dari 500 kW					
	• Jumlah Unit Pembangkit	56	5	0	9	
	• Kapasitas Otol (KW)	36143	6584	0	16008	
B.	Jumlah Desa Mandiri Energi					
	• Kategori Inisiatif			43	43	
	• Kategori Berkembang			9	9	
	• Kategori Mapan			0	0	
C.	Jumlah Infrastruktur Energi Baru Terbarukan					
1.	Jumlah Jenis Data					
	• Biogas			202	186	
	• PLTA			0	0	
	• PLTM			0	0	
	• PLTMH			0	0	
	• PLTS			0	0	
	• PLTS Ground Mounted			1	0	
	• PLTS Rooftop			51	53	
	• PJUTS			150	150	
	• Panas Bumi			0	0	
	• PLTSa			0	0	

No	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
	• Pompa Air Tenaga Surya			0	1	
2.	Kapasitas Jenis Data					
	• Biogas (m3)			804	758	
	• PLTA (kWp)			0	0	
	• PLTM (kWp)			0	0	
	• PLTMH (kVa)			0	0	
	• PLTS (kWp)			0	0	
	• PLTS Ground Mounted (kWp)			12,32	0	
	• PLTS Rooftop (kWp)			320,92	330,92	
	• PJUTS (watt)			45000	45000	
	• Panas Bumi (MW)			0	0	
	• PLTSa (MWp)			0	0	
	• Pompa Air Tenaga Surya (kWp)			0	12,32	
D.	Rasio Elektrifikasi	100	99,99	99,99	99,99	

Keterangan:

- 1) Data Captive Power Berizin Dengan Kapasitas Lebih Dari 500 kW: <https://data.jatengprov.go.id/dataset/data-captive-power-berizin-dengan-kapasitas-lebih-dari-500-kw-di-jawa-tengah>
- 2) Jumlah Desa Mandiri Energi: <https://data.jatengprov.go.id/dataset/c9b-jumlah-desa-mandiri-energi-di-jawa-tengah>
- 3) Jumlah Infrastruktur Energi Baru Terbarukan: <https://data.jatengprov.go.id/dataset/74f-jumlah-infrastruktur-energi-baru-terbarukan-di-jawa-tengah>
- 4) Rasio Elektrifikasi: <https://data.jatengprov.go.id/dataset/5e7-rasio-elektrifikasi-berdasarkan-kabupaten-kota-di-jawa-tengah>

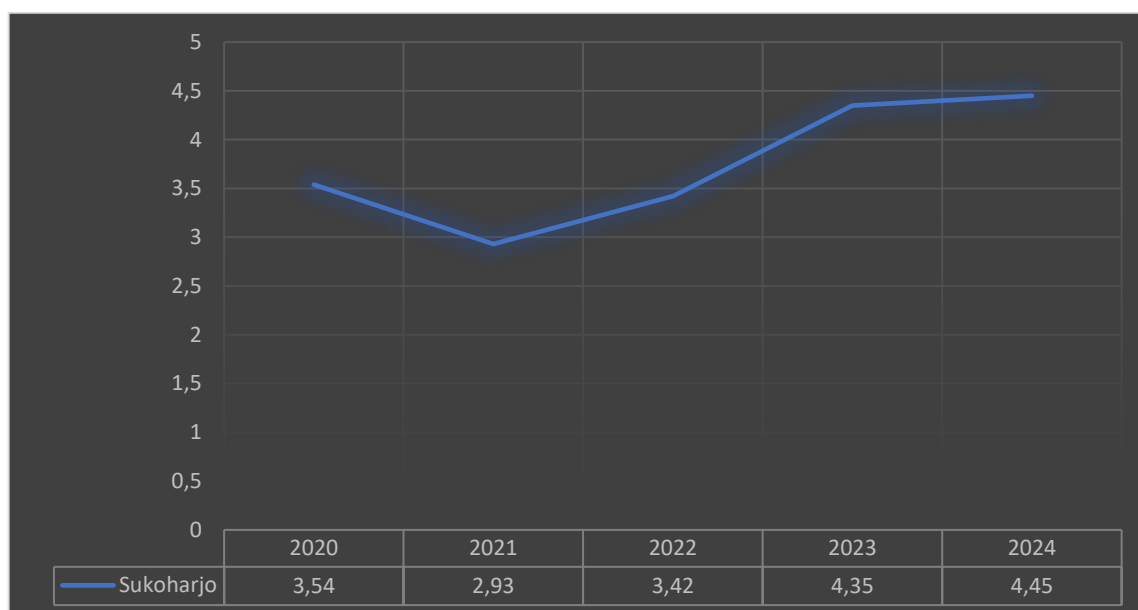
Sumber: Perangkat Daerah yang menangani urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Diolah)

2.1.3.4. Transformasi Digital

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus menunjukkan kemajuan dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang tercermin dari peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE mengalami fluktuasi pada awal periode namun meningkat secara konsisten dalam tiga tahun terakhir. Indeks SPBE tercatat sebesar 3,54 pada tahun 2020, sempat turun menjadi 2,93 pada 2021, dan kembali naik menjadi 3,42 (2022), 4,35 (2023), hingga mencapai 4,45 pada tahun 2024. Kenaikan ini tidak lepas dari peningkatan kinerja komunikasi dan informatika daerah yang tercermin dalam sejumlah indikator pendukung, yaitu Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki akses internet tetap stabil sebanyak 39 OPD dari tahun 2021 hingga 2024; Jumlah sistem informasi yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo terus bertambah dari 41 sistem (2020) menjadi 56 sistem (2024), menandakan transformasi digital dalam pelayanan publik berjalan progresif; Jumlah titik hotspot WiFi yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten meningkat dari 130 titik (2021) menjadi 138 titik (2024), mendukung akses informasi publik yang inklusif; Jumlah radio komunikasi yang aktif terjaga

secara konsisten sebanyak 2 unit dari 2020 hingga 2024; dan Cakupan jaringan fiber optik mulai dicapai pada tahun 2023 dengan cakupan penuh (100%), menunjukkan kesiapan infrastruktur digital daerah yang semakin memadai; serta Jumlah kecamatan yang terakses jaringan fiber optik meningkat signifikan dari tidak tersedia di tahun-tahun sebelumnya menjadi 12 kecamatan pada tahun 2023 dan 2024.

Kinerja tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memperluas cakupan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai bagian dari strategi transformasi digital daerah. Implementasi SPBE yang progresif mendukung integrasi sistem antar OPD, mempercepat layanan publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Peningkatan nilai SPBE yang hampir mencapai skor maksimal juga mencerminkan sinergi antara pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sistem informasi, dan perluasan akses komunikasi masyarakat, yang seluruhnya memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan digital di Kabupaten Sukoharjo.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diolah)

Gambar 2.78 Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Berikut tabel Perkembangan Indikator Kinerja komunikasi dan informatika Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024.

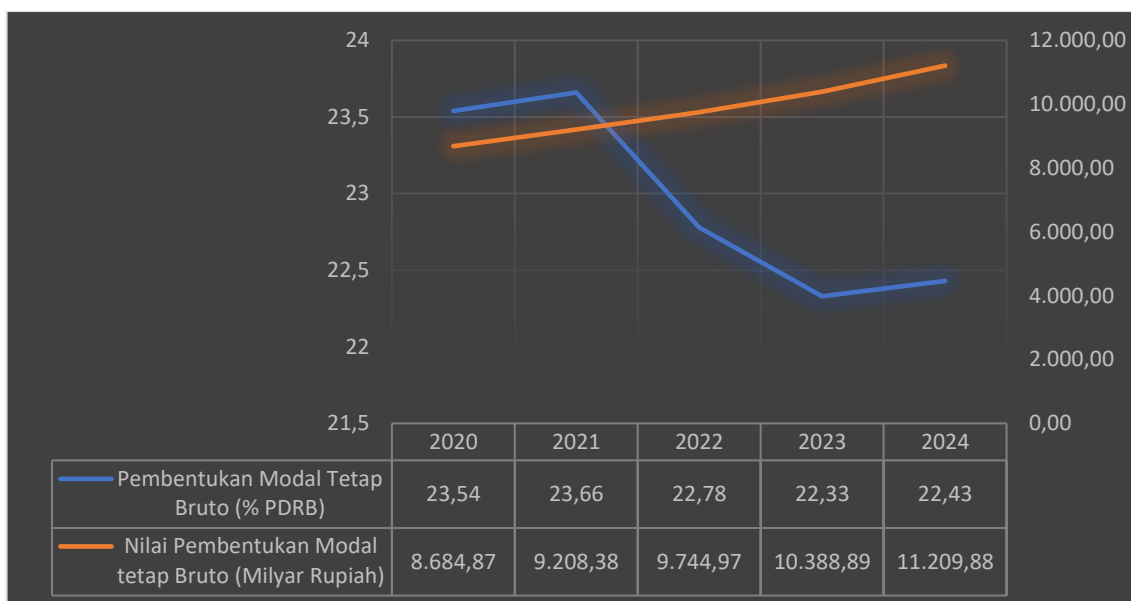
Tabel 2.27 Perkembangan Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah OPD yang memiliki akses internet	-	39	39	39	39
Jumlah sistem informasi yang ada	41	44	47	47	56
Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemkab	-	130	132	135	138
Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi	-	-	-	-	-
Jumlah radio komunikasi yang aktif	2	2	2	2	2
Cakupan Jaringan Fiber Optik	-	-	-	100	100
Jumlah Kecamatan yang terakses jaringan fiber optik	-	-	-	12	12

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diolah)

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

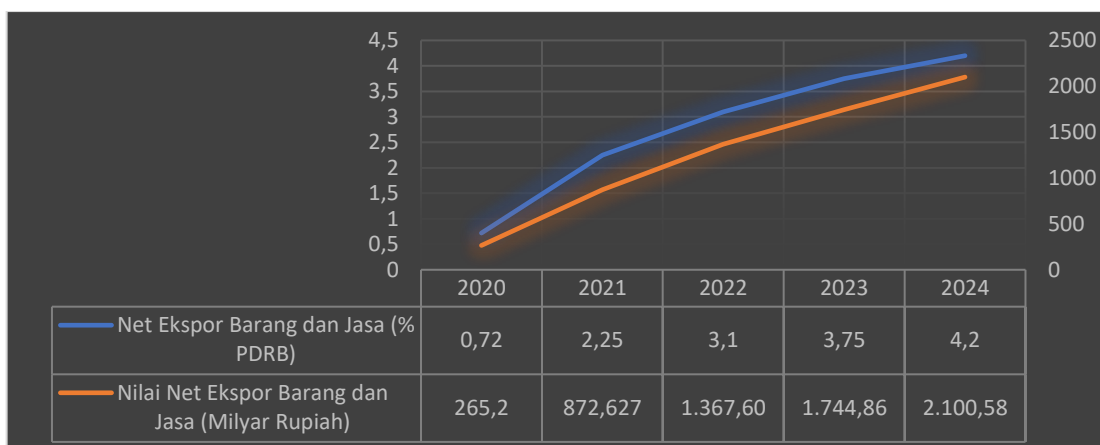
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 mencerminkan dinamika investasi fisik yang berperan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi PMTB terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami fluktuasi, di mana pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020 tercatat sebesar 23,54%, lalu meningkat tipis menjadi 23,66% pada 2021, namun mengalami penurunan tajam menjadi 22,78% (2022), 22,33% (2023), dan sedikit pulih ke angka 22,43% pada tahun 2024. Meskipun kontribusi terhadap PDRB menurun, namun nilai nominal PMTB dalam rupiah menunjukkan tren meningkat dari Rp8,684 triliun (2020) menjadi Rp11,209 triliun (2024), menandakan bahwa investasi fisik tetap tumbuh, hanya saja belum sebanding dengan pertumbuhan PDRB secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusi relatif PMTB terhadap PDRB menurun, namun secara absolut terdapat peningkatan kapasitas investasi daerah yang cukup menjanjikan, terutama untuk menopang agenda transformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur jangka menengah.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.79 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Perkembangan net ekspor barang dan jasa Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten, baik dari sisi kontribusinya terhadap PDRB maupun dari sisi nilai nominalnya. Pada tahun 2020, *net ekspor* tercatat hanya sebesar 0,72% terhadap PDRB atau senilai Rp265,2 miliar, namun pada tahun 2024 meningkat pesat menjadi 4,20% atau Rp2.100,58 miliar. Kenaikan ini mencerminkan kemampuan produksi daerah yang semakin kuat untuk memenuhi permintaan luar wilayah, baik domestik antar daerah maupun ekspor ke luar negeri. Meskipun data *net ekspor* antar daerah dalam PDRB dihitung secara tidak langsung melalui metode *cross-hauling* dan *commodity balance*, yaitu sebagai komponen penyeimbang yang memperhitungkan keseimbangan antara permintaan dan penyediaan setiap komoditas dalam Tabel Input-Output “*bayangan*”, namun peran komponen ini cukup signifikan dalam menggambarkan daya saing dan keterhubungan ekonomi Kabupaten Sukoharjo dengan wilayah lain. Net ekspor yang bernilai positif selama periode tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah produsen bersih (*net exporter*), di mana volume barang dan jasa yang dikirim ke luar wilayah lebih besar daripada yang diimpor, mencerminkan efisiensi produksi, daya saing sektor industri dan perdagangan, serta kemungkinan adanya surplus produksi lokal. Kinerja ini sekaligus menjadi sinyal positif bagi perencanaan pembangunan berbasis potensi unggulan dan penguatan konektivitas antarwilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.



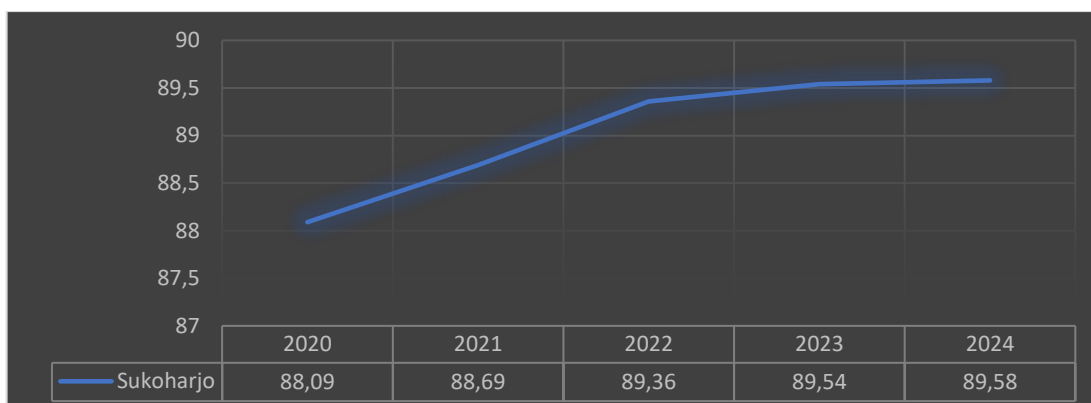
Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.80 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

2.1.3.6. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Persentase panjang jalan dengan kondisi permukaan mantap pada jalan kewenangan Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024, yaitu dari 88,09% pada tahun 2020 menjadi 89,58% pada tahun 2024. Indikator ini mencerminkan proporsi panjang jalan kabupaten/kota yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten/kota secara keseluruhan, berdasarkan penilaian visual dan IRI melalui aplikasi PKRMS sesuai ketentuan SE Menteri, SE Dirjen, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Kondisi jalan yang baik meningkat secara signifikan dari 141,04 km pada 2022 menjadi 343,41 km pada 2024, sementara panjang jalan dalam kondisi sedang menurun dari 399,70 km pada 2022 menjadi 200,89 km pada 2024. Penurunan pada kategori rusak ringan dan berat turut menunjukkan adanya perbaikan infrastruktur jalan, di mana jalan rusak ringan berkurang dari 63,51 km pada 2022 menjadi 50,53 km pada 2024, dan jalan rusak berat yang sempat naik menjadi 7,26 km pada 2023 akhirnya menjadi 12,74 km pada 2024. Secara total, panjang jalan yang tercatat tetap konsisten berada di kisaran 605–607 km, menandakan tidak adanya perubahan signifikan dalam total jaringan jalan, tetapi menunjukkan adanya peningkatan kualitas dari jaringan yang ada. Sementara itu, data infrastruktur jembatan menunjukkan dinamika yang fluktuatif, terutama pada kategori jembatan dengan kondisi baik yang menurun dari 160 unit pada 2020 menjadi hanya 2 unit pada 2024, sementara jumlah jembatan dalam kondisi sedang dan rusak ringan mengalami peningkatan, menandakan perlunya perhatian lebih pada aspek pemeliharaan jembatan. Secara keseluruhan, tren peningkatan persentase jalan mantap menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan upaya perbaikan infrastruktur jalan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, meskipun masih diperlukan perencanaan dan alokasi sumber daya yang lebih baik dalam hal perawatan jembatan agar kondisi infrastruktur secara

keseluruhan tetap optimal dan mendukung kelancaran konektivitas serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Diolah)

Gambar 2.81 Perkembangan Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Berikut tabel perkembangan infrastruktur jalan dan jembatan berdasarkan kondisi Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024.

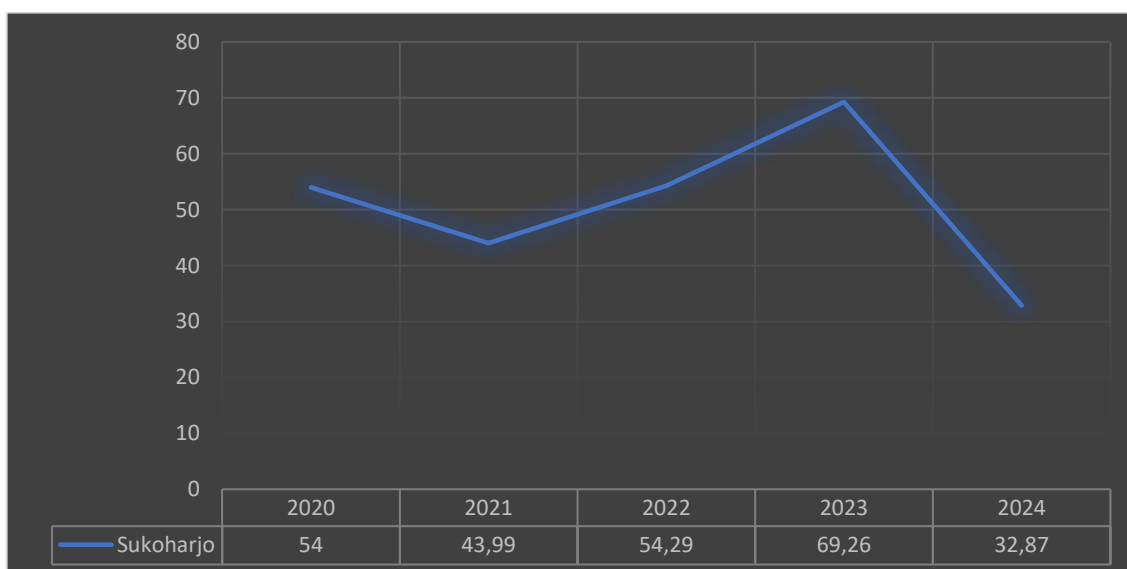
Tabel 2.28 Perkembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Infrastruktur Jalan					
• Kondisi Baik (km)	186,41	142,371	141,035	300,916	343,411
• Kondisi Sedang (km)	346,64	394,301	399,695	243,11	200,888
• Kondisi Rusak Ringan (km)	69,15	66,489	63,51	56,285	50,532
• Kondisi Rusak Berat (km)	2,92	1,96	0,88	7,259	12,739
• Total (km)	605,12	605,121	605,12	607,57	607,57
Infrastruktur Jembatan					
• Kondisi Baik (km)	160	1	4	4	2
• Kondisi Sedang (km)	4	0	4	3	61
• Kondisi Rusak Ringan (km)	0	162	155	155	91
• Kondisi Rusak Berat (km)	0	1	1	2	1
• Total (km)	164	164	164	164	155

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Diolah)

Perkembangan Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami penurunan dari 54 pada tahun 2020 menjadi 43,99 pada tahun 2021, lalu mengalami perbaikan menjadi 54,29 pada

tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 69,26, sebelum akhirnya turun tajam menjadi 32,87 pada tahun 2024. Indeks ini mengacu pada evaluasi kinerja sistem irigasi yang meliputi enam aspek utama menurut ePAKSI Ditjen SDA Kementerian PUPR, yaitu: kondisi prasarana fisik (maksimum 45 poin), produktivitas tanaman (15 poin), sarana penunjang (10 poin), organisasi personalia (15 poin), dokumentasi (5 poin), dan kondisi kelembagaan P3A (10 poin), dengan total nilai maksimal 100 poin. Penurunan tajam pada tahun 2024 mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pengelolaan irigasi, baik dari sisi infrastruktur maupun kelembagaan. Hal ini sejalan dengan penurunan kondisi saluran irigasi yang berada dalam kategori baik sebesar 19,41% pada tahun 2023 menjadi 29,58% pada tahun 2024, sementara kondisi sedang dan rusak ringan mengalami lonjakan, terutama kondisi sedang yang meningkat drastis dari 24,86% menjadi 55,94%. Secara umum, kinerja sistem irigasi di Kabupaten Sukoharjo belum konsisten dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif dalam perbaikan infrastruktur irigasi, penguatan kelembagaan pengelola irigasi (P3A), serta peningkatan kapasitas SDM pengelola. Keberlanjutan investasi pada sektor irigasi menjadi krusial untuk menjamin kestabilan suplai air bagi lahan pertanian dan mendukung produktivitas pertanian yang optimal.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Diolah)

Gambar 2.82 Perkembangan Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Angka)

Berikut tabel perkembangan infrastruktur saluran irigasi berdasarkan kondisi Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024.

Tabel 2.29 Perkembangan Infrastruktur Saluran Irigasi Berdasarkan Kondisi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jenis Saluran Irigasi					
• Irigasi Teknis Sekunder (meter)	121.773,67	121.773,67	121.773,67	121.773,67	121.773,67
• Irigasi Teknis Tersier (meter)	3.523,47	3.523,47	3.523,47	3.523,47	3.523,47
Kondisi Saluran Irigasi					
• Kondisi Baik (%)	-	19,29	28,57	19,41	29,58
• Kondisi Sedang (%)	-	50,04	35,71	24,86	55,94
• Kondisi Rusak Ringan (%)	-	24,70	25,71	49,85	3,30
• Kondisi Rusak Berat (%)	-	5,97	10,00	5,88	11,19

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Diolah)

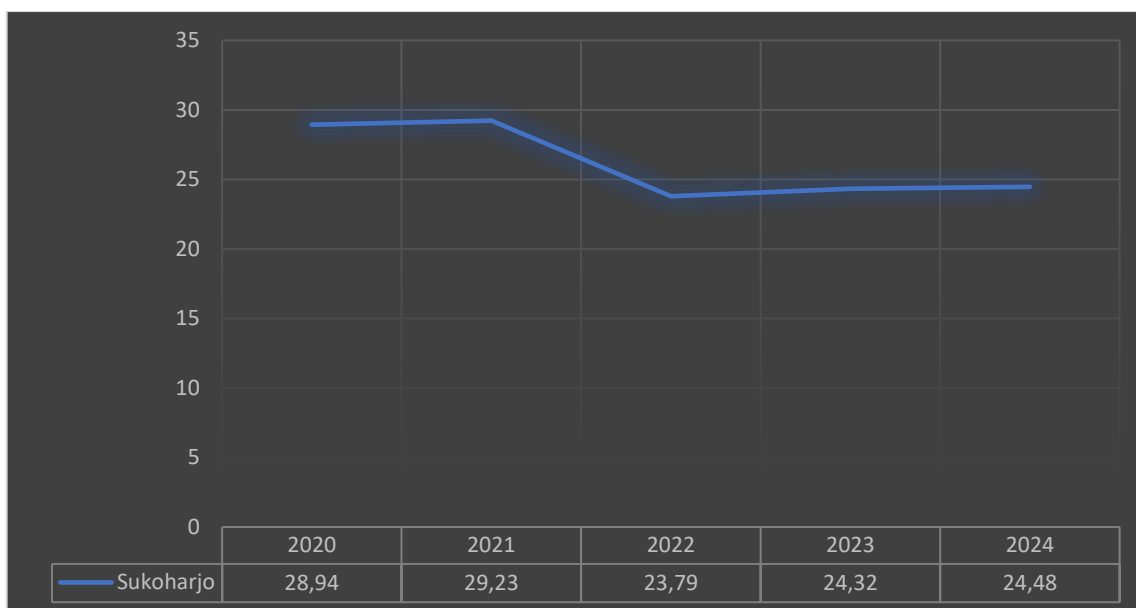
Kinerja penataan ruang di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan secara bertahap. Indikator rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan menunjukkan peningkatan yang relatif stabil, dari 25,47% pada tahun 2020 menjadi 26,68% pada tahun 2024, mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek legalitas bangunan dan penegakan tata ruang. Sementara itu, rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan citra satelit dan foto udara mengalami lonjakan dari 6,75% pada tahun 2020 menjadi 13,51% sejak tahun 2021 dan stabil hingga 2024, menandakan peningkatan perhatian terhadap pelestarian kawasan hijau. Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 45% pada tahun 2020 menjadi 65% pada tahun 2024, yang menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Selain itu, jumlah kecamatan yang terakses jaringan fiber optik mengalami peningkatan signifikan sejak 2023, yakni dari tidak tersedia (0) pada tahun-tahun sebelumnya menjadi 12 kecamatan pada tahun 2023 dan 2024, yang menggambarkan adanya perkembangan dalam infrastruktur digital dan keterhubungan wilayah. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola ruang secara berkelanjutan, meskipun masih diperlukan penguatan data spasial dan integrasi lintas sektor dalam pengambilan keputusan penataan ruang.

Tabel 2.30 Perkembangan Indikator Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	25,47	25,78	25,89	26,44	26,68
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (%)	6,75	13,51	13,51	13,51	13,51
Ketaatan terhadap RTRW (%)	45	50	55	60	65
Jumlah Kecamatan yang terakses jaringan fiber optik	-	-	-	12	12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Diolah)

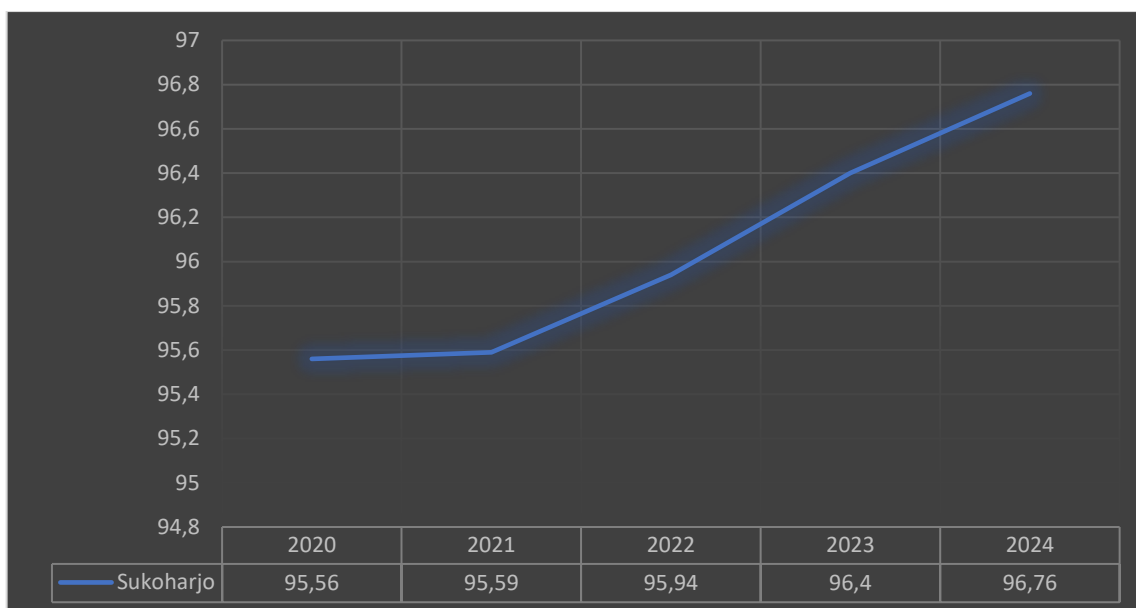
Akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2020–2024, yaitu kecenderungan menurun secara signifikan dari 29,23% pada tahun 2021 menjadi 23,79% pada tahun 2022, sebelum kemudian mengalami sedikit pemulihan hingga mencapai 24,48% pada tahun 2024. Penurunan tajam pada tahun 2022 menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan layanan air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi standar kualitas dan kontinuitas sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Fluktuasi ini menjadi perhatian penting dalam konteks peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar, mengingat indikator ini merupakan bagian dari pengukuran efektivitas pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan air minum yang layak bagi penduduknya. Akses air minum perpipaan bukan hanya menjadi indikator kesejahteraan, tetapi juga berpengaruh terhadap dimensi kesehatan masyarakat, efisiensi pengeluaran rumah tangga, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Diolah)

Gambar 2.83 Perkembangan Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

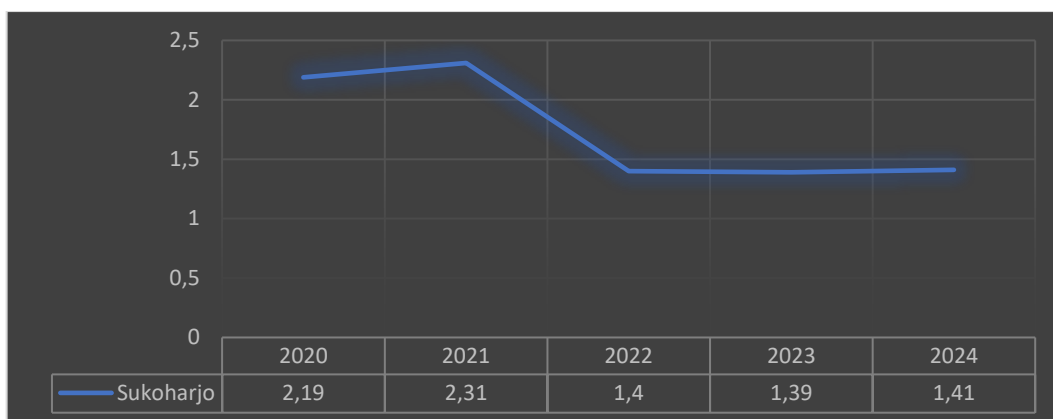
Rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan yang cukup konsisten sepanjang periode tahun 2020 hingga 2024. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak meningkat dari 95,56% pada tahun 2020 menjadi 96,76% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas perumahan dan pemenuhan standar hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Indikator ini dihitung berdasarkan pemenuhan empat kriteria pokok, yaitu ketahanan bangunan (*durable housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses terhadap air minum layak, serta akses terhadap sanitasi layak. Dengan meningkatnya akses terhadap hunian layak di Kabupaten Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa intervensi kebijakan perumahan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi backlog perumahan tidak layak dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dari sisi aksesibilitas terhadap tempat tinggal yang aman, sehat, dan manusiawi.



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Diolah)

Gambar 2.84 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

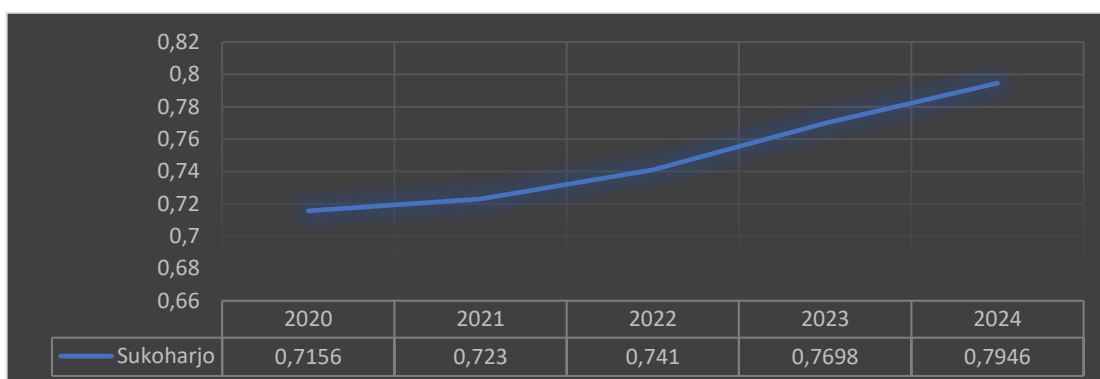
Perkembangan rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Sukoharjo pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun, yaitu capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 2,31%, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 1,4% pada tahun 2022 dan relatif stagnan hingga tahun 2024 di angka 1,41%. Secara operasional, sanitasi dikatakan aman apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot minimal sekali dalam lima tahun terakhir serta limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), atau rumah tersebut terhubung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Dengan tingkat pencapaian yang masih rendah di bawah 3% sepanjang lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam pemerataan layanan sanitasi aman di wilayah Sukoharjo, baik dari aspek infrastruktur, kesadaran masyarakat, maupun manajemen limbah domestik.



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Diolah)

Gambar 2.85 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

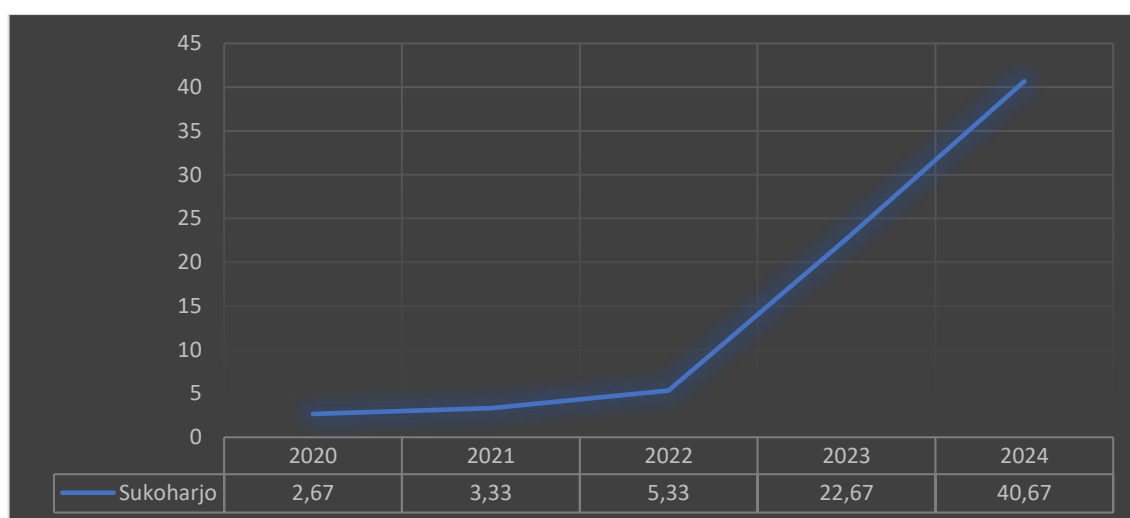
Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, di mana nilai indeks meningkat dari 0,7156 pada tahun 2020 menjadi 0,7946 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan yang signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi desa sebagai tiga dimensi utama yang membentuk IDM. Nilai IDM yang terus meningkat menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo secara konsisten berhasil mengelola potensi lokal desa, memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjaga kelestarian ekologi secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebijakan dan aktivitas pemberdayaan masyarakat desa juga telah berhasil memperkuat ketahanan sosial serta menciptakan keadilan dan pemerataan, sekaligus memanfaatkan sumber daya alam lokal secara bijak dan ramah lingkungan. Dengan demikian, peningkatan IDM ini bukan hanya mencerminkan kemajuan administratif, tetapi juga menegaskan efektivitas program pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat yang berakar pada modal sosial dan kearifan lokal.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Diolah)

Gambar 2.86 Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Indeks)

Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020 hingga 2024 mencerminkan transformasi yang signifikan dalam arah kebijakan pembangunan berbasis masyarakat. Pembangunan dan pemberdayaan desa di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan transformasi signifikan dalam arah kebijakan pembangunan berbasis masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya persentase desa mandiri secara signifikan, dari hanya 2,67% pada tahun 2020 menjadi 40,67% pada tahun 2024. Selain itu, capaian Indeks Desa Membangun (IDM) juga menunjukkan tren yang positif. Indeks Desa Membangun (IDM) sendiri disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Desa yang mencapai status desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai IDM di atas 0,8155.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Diolah)

Gambar 2.87 Perkembangan Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan sejumlah regulasi yang mendukung penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial desa. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Regulasi ini menjadi dasar pengelolaan BUMDes di tingkat desa, mencakup prinsip-prinsip dasar, tata kelola, mekanisme pendirian, kerja sama antar desa, pembinaan, serta pengawasan. Namun, seiring dinamika kebijakan dan kebutuhan penguatan kelembagaan ekonomi desa, Perda tersebut kemudian dicabut dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa yang termasuk di dalamnya pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Regulasi baru ini mengatur lebih rinci aspek permodalan, kepemilikan, unit usaha, pembagian hasil, pertanggungjawaban, pembinaan, serta pengembangan BUMDes dan

BUMDesma secara menyeluruh. Upaya regulatif tersebut berdampak positif terhadap perkembangan kelembagaan ekonomi desa. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah BUMDes di Kabupaten Sukoharjo, yakni dari 122 unit pada tahun 2020 menjadi 145 unit pada tahun 2024. Selain dari sisi kuantitas, kualitas kelembagaan BUMDes juga mengalami peningkatan signifikan, terlihat dari kenaikan jumlah BUMDes yang masuk dalam kategori berkembang dan maju, dari hanya 3 unit pada tahun 2020 menjadi 47 unit pada tahun 2024. Dalam aspek pemberdayaan sosial desa, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga menunjukkan konsistensi. Jumlah kelompok PKK aktif tetap berada pada tingkat 100% selama lima tahun terakhir. Selain itu, terdapat 167 desa binaan PKK, dengan program pembinaan yang dilakukan secara bertahap, mencakup 24 desa binaan setiap tahunnya.

Lebih lanjut, arah pembangunan desa juga diarahkan melalui pendekatan berbasis kawasan. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata, dan Seni Budaya. Kebijakan ini difokuskan untuk pengembangan wilayah Kecamatan Mojolaban pada periode 2020-2024, dengan empat desa prioritas yaitu Desa Wirun, Desa Laban, Desa Cangkol, dan Desa Dukuh. Pendekatan pembangunan kawasan ini mendukung strategi pembangunan desa yang bersifat tematik dan integratif. Konvergensi antara capaian IDM dan peningkatan jumlah desa mandiri menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa di Kabupaten Sukoharjo telah bergerak secara holistik. Pendekatan ini menyatukan penguatan di bidang ekonomi melalui pertanian dan usaha produktif, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pelestarian seni dan budaya lokal. Dengan demikian, Pembangunan dan pemberdayaan desa di Kabupaten Sukoharjo tidak hanya berhasil mendorong peningkatan status desa secara kuantitatif, tetapi juga menguatkan pondasi kemandirian desa secara sosial, ekonomi, dan ekologis.

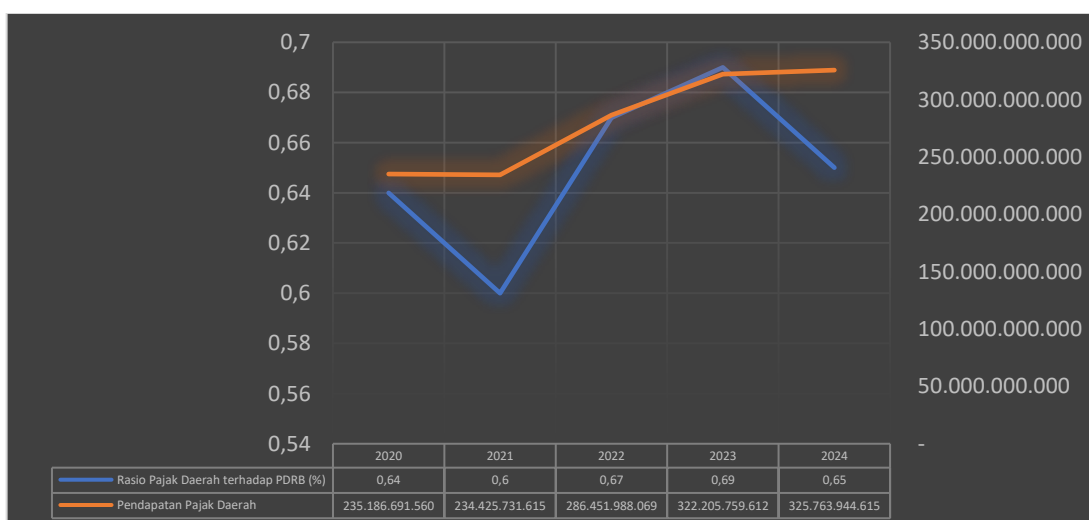
Tabel 2.31 Perkembangan Kelembagaan Ekonomi Desa dan Pemberdayaan Kelembagaan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kelembagaan Ekonomi Desa					
• Badan Usaha Milik Desa/BUMDes (unit)	122	131	131	145	145
• Penilaian BUMDes Tingkat Dasar (unit)	43	39	39	53	37
• Penilaian BUMDes Tingkat Tumbuh (unit)	76	82	82	82	61
• Penilaian BUMDes Tingkat Berkembang dan Maju (unit)	3	10	10	10	47
Pemberdayaan Kelembagaan Desa					
• Jumlah PKK	180	180	180	180	180
• Presentase PKK aktif	100	100	100	100	100
• Jumlah Kelompok Binaan PKK	-	24	24	24	24

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Diolah)

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,64%, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 0,60% pada 2021, sebelum meningkat menjadi 0,67% dan 0,69% masing-masing pada tahun 2022 dan 2023, serta kembali menurun ke 0,65% di tahun 2024. Penurunan tersebut terjadi meskipun secara nominal pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan, yakni dari Rp235,19 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp325,76 miliar pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan PDRB lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan pajak daerah pada periode tersebut. Secara konseptual, nilai rasio yang semakin tinggi menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal daerah karena pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan sumber pendapatan asli untuk mendanai pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer pusat.



Sumber: BPKPAD (Diolah)

Gambar 2.88 Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Perkembangan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 mencerminkan dinamika dalam pengelolaan aset dan kontribusi sektor keuangan daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Total dana pihak ketiga BUMD terhadap PDRB menunjukkan tren menurun secara konsisten, dari 25,53% pada tahun 2020 menjadi 24,72% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dananya di bank milik daerah atau adanya stagnasi dalam penghimpunan dana pihak ketiga oleh BUMD. Di sisi lain, indikator total kredit BUMD terhadap PDRB sempat meningkat dari 52,81% pada tahun 2020 menjadi puncaknya 69,68% di tahun

2023, namun mengalami penurunan tajam menjadi 22,45% pada tahun 2024, yang dapat mengindikasikan terjadinya kontraksi fungsi intermediasi keuangan daerah, baik akibat menurunnya kemampuan BUMD dalam menyalurkan pembiayaan, atau meningkatnya risiko pembiayaan yang menyebabkan kehati-hatian dalam ekspansi kredit. Indikator Return on Asset (ROA) BUMD yang merupakan ukuran efisiensi aset dalam menghasilkan laba bersih, menunjukkan fluktuasi dengan tren relatif stabil, yaitu meningkat dari 3,32% pada 2020 ke 4,38% di tahun 2021, lalu kembali turun menjadi 3,65% di tahun 2022, naik tipis menjadi 4,02% di 2023, dan kembali menurun menjadi 3,65% di 2024. Secara umum, ROA di atas 3% mencerminkan produktivitas yang cukup baik dalam konteks pengelolaan aset oleh BUMD, namun perlu dicermati fluktuasinya yang mengindikasikan ketidakstabilan kinerja laba bersih. Tren tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kinerja manajerial, optimalisasi aset, dan peningkatan daya saing BUMD agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap PDRB dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

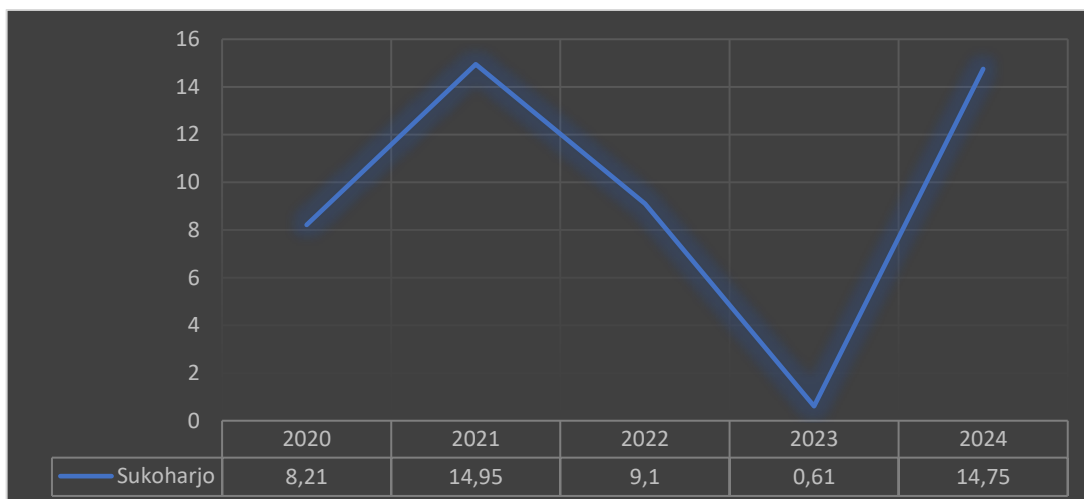
Tabel 2.32 Perkembangan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Dana Pihak Ketiga BUMD/PDRB (%)	25,53	25,17	24,80	24,84	24,72
Total Kredit BUMD/PDRB (%)	52,81	60,37	64,49	69,68	22,45
Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3,32	4,38	3,65	4,02	3,65

Sumber: Sekretariat Daerah (Diolah)

Perkembangan disparitas harga di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Disparitas harga, yang diukur sebagai selisih harga rata-rata komoditas bahan pokok antara tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, mengalami lonjakan dari 8,21% pada tahun 2020 menjadi 14,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan harga yang cukup tinggi antarwilayah, kemungkinan disebabkan oleh gangguan distribusi, perbedaan struktur pasar lokal, atau faktor eksternal seperti pandemi COVID-19. Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 9,1%, dan bahkan pada tahun 2023 disparitas harga menurun drastis hingga hanya 0,61%, yang mencerminkan peningkatan efisiensi distribusi, harmonisasi sistem logistik, dan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di wilayah kabupaten. Namun pada tahun 2024 disparitas harga kembali meningkat menjadi 14,75%, yang dapat mengindikasikan adanya tekanan biaya logistik, inflasi komoditas tertentu, atau ketidakseimbangan pasokan dan

permintaan di tingkat lokal. Semakin rendah nilai disparitas menunjukkan semakin baiknya integrasi pasar dan efisiensi distribusi antarwilayah, sehingga penurunan disparitas pada tahun 2023 menjadi indikator positif, sedangkan peningkatan kembali pada tahun 2024 memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mengendalikan disparitas harga untuk mewujudkan stabilitas ekonomi lokal yang berkelanjutan.



Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diolah)

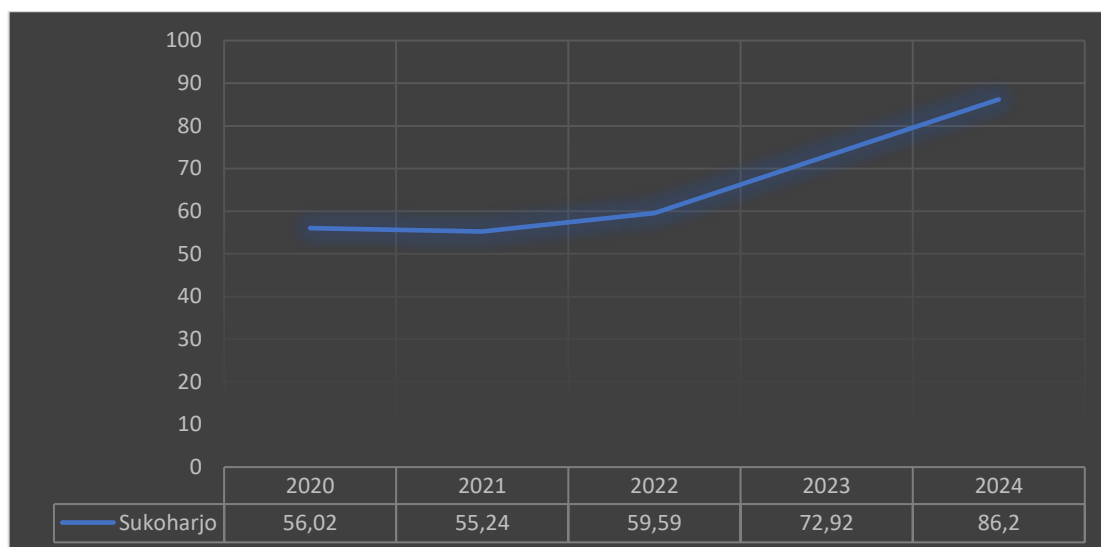
Gambar 2.89 Perkembangan Disparitas Harga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren yang konsisten meningkat selama periode 2020–2024, yaitu dari skor 56,02 pada tahun 2020 menjadi 86,2 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah daerah seiring dengan implementasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi mencakup dua dimensi utama, yaitu RB General dan RB Tematik. RB General difokuskan pada pencapaian dua sasaran strategis: (1) terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, serta (2) terbangunnya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Evaluasi terhadap sasaran pertama melibatkan indikator-indikator seperti penyederhanaan struktur organisasi, transformasi layanan digital, tingkat maturitas SPIP, serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sementara itu, sasaran kedua diukur melalui survei penilaian integritas (SPI), survei kepuasan masyarakat (SKM), indeks BerAKHLAK, serta elemen employer branding. Di tingkat pemerintah daerah, RB Tematik diarahkan untuk

mendukung penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, dan optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Keterlibatan berbagai perangkat daerah seperti perangkat daerah yang menangani urusan sekretariat daerah, komunikasi dan informatika, pengawasan, perencanaan pembangunan, kepegawaian, dan keuangan menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan reformasi ini. Peningkatan IRB Kabupaten Sukoharjo menjadi cerminan sinergi antara upaya pembenahan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital dan nilai-nilai budaya kerja ASN yang profesional, serta kesesuaian dengan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi hasil.

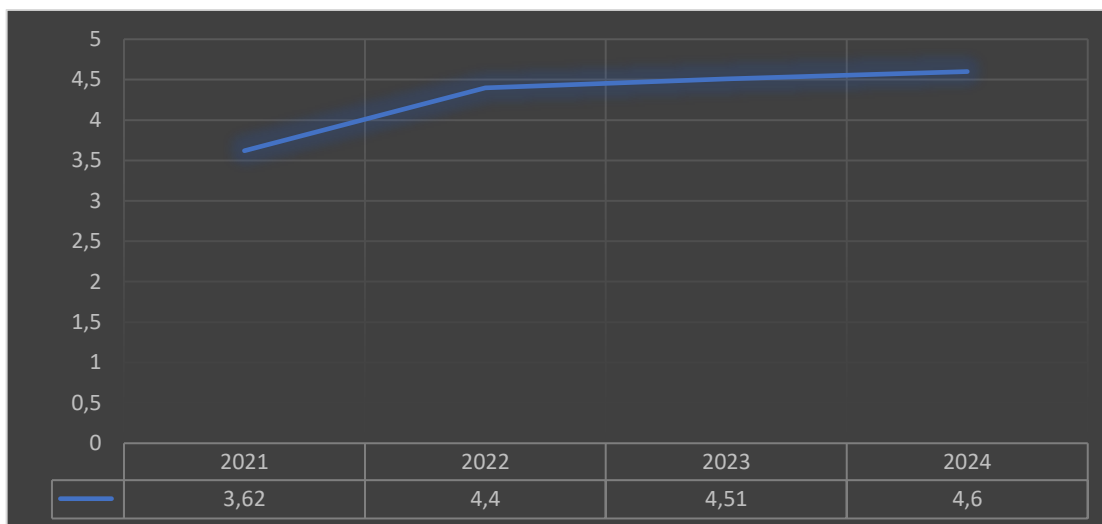


Sumber: Sekretariat Daerah (Diolah)

Gambar 2.90 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Indeks)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan kinerja penyelenggaraan layanan publik yang signifikan sepanjang periode 2021 hingga 2024. IPP dengan skor yang terus meningkat dari 3,62 pada tahun 2021, menjadi 4,4 pada tahun 2022, 4,51 pada tahun 2023, dan mencapai 4,6 pada tahun 2024. Berdasarkan metode penilaian yang digunakan oleh Kementerian PAN-RB, IPP mengukur kualitas layanan publik dari enam aspek penting, yaitu kebijakan pelayanan (30%), profesionalisme sumber daya manusia (18%), sarana prasarana pelayanan publik (15%), sistem informasi pelayanan publik (15%), konsultasi dan pengaduan (15%), serta inovasi (7%). Penilaian dilakukan terhadap Unit Pelayanan Publik. Hasil indeks ini menunjukkan bahwa kinerja layanan publik Kabupaten Sukoharjo telah mencapai kategori “Pelayanan Prima (A)” karena berhasil meraih nilai di atas 4,51 sejak tahun 2023. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas layanan dan memenuhi standar pelayanan publik nasional, tetapi juga merupakan hasil nyata dari reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas

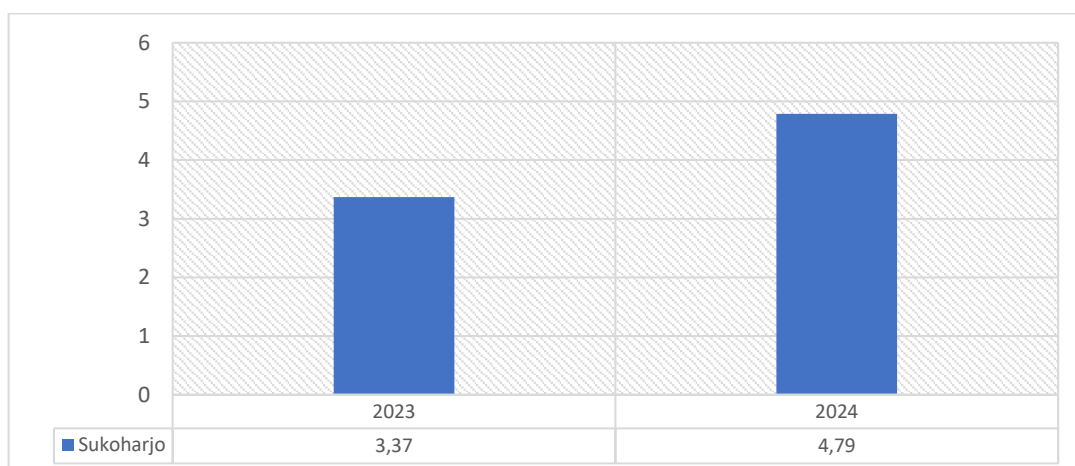
SDM, digitalisasi layanan, dan penguatan sistem pengaduan publik. Capaian ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Sukoharjo berhasil meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publiknya secara berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan strategis nasional dalam mempercepat reformasi birokrasi dan mendorong pelayanan publik yang responsif dan profesional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 9 Tahun 2023.



Sumber: Sekretariat Daerah (Diolah)

Gambar 2.91 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2024 (Indeks)

Perkembangan persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2023 ke 2024, yaitu dari 3,37% menjadi 4,79%. Peningkatan ini mencerminkan respons positif terhadap implementasi kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong transformasi digital administrasi kependudukan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP-el serta Identitas Kependudukan Digital. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah proses administrasi, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital. IKD sendiri dapat diakses melalui aplikasi khusus pada perangkat seluler yang berfungsi sebagai dompet digital untuk menyimpan dokumen kependudukan secara aman, sekaligus menjadi sistem *single sign-on* untuk berbagai layanan daring. Aktivasi IKD dilakukan dengan input data seperti NIK, email, nomor ponsel, dan verifikasi wajah, serta menekankan pentingnya sistem keamanan data melalui enkripsi dan mekanisme perlindungan digital. Penerapannya dilakukan secara bertahap mulai dari ASN, pelajar, mahasiswa, dan selanjutnya masyarakat umum. Meskipun capaian persentase kepemilikan IKD masih tergolong rendah, namun pertumbuhannya mengindikasikan adanya upaya progresif dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung program digitalisasi layanan kependudukan secara nasional.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diolah)

Gambar 2.92 Perkembangan Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2024 (%)

Perkembangan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif yang mencerminkan peningkatan kualitas administrasi kependudukan. Persentase anak usia 0–4 tahun yang memiliki akta kelahiran berada pada angka yang sangat tinggi dan stabil, dengan capaian 99,76% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 99,94% pada tahun 2024. Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan juga mengalami peningkatan signifikan dari 38,35% pada tahun 2020 menjadi 70,05% pada tahun 2024, yang menunjukkan efektivitas program pencatatan peristiwa penting. Adapun data kepemilikan akta kematian baru dapat ditampilkan secara utuh mulai tahun 2023, setelah sebelumnya tidak tersedia akibat proses perubahan sistem konsolidasi data secara nasional; pada tahun 2023 dan 2024 persentasenya telah mencapai 100%. Untuk indikator kepemilikan akta cerai, data yang tersedia hanya dari publikasi pusat, namun menunjukkan tren kenaikan, yaitu dari 63,76% pada tahun 2020 menjadi 80,4% pada tahun 2024. Sementara itu, capaian penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan peningkatan sangat signifikan, dari 46,91% pada tahun 2020 menjadi 83,89% pada tahun 2024, mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan efektivitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung tertib administrasi kependudukan sejak usia dini. Peningkatan capaian tersebut juga tidak lepas dari pemanfaatan teknologi digital, sosialisasi yang masif, serta integrasi layanan kependudukan dengan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2.33 Perkembangan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

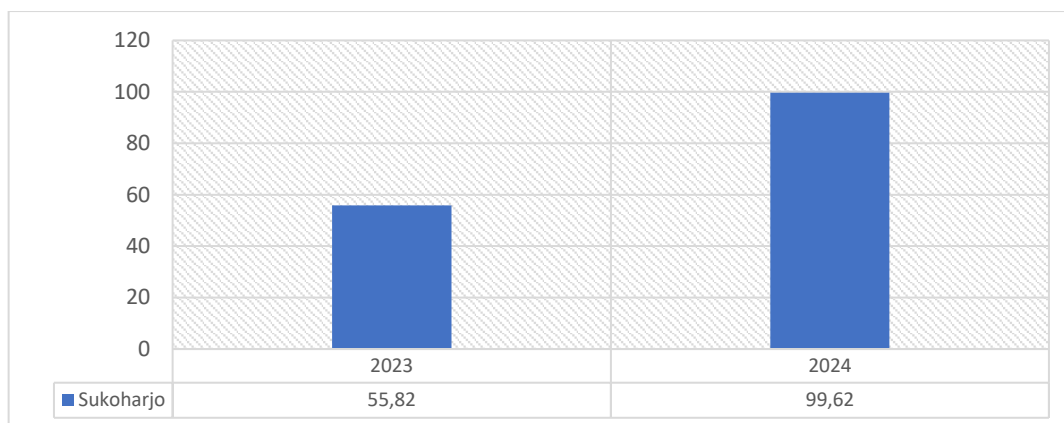
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran	99,76	99,87	99,94	99,93	99,94
Persentase penduduk yang memiliki akte perkawinan	38,35	44,44	57,17	63,38	70,05
Persentase kepemilikan akte kematian	*	*	*	100	100
Persentase penduduk yang memiliki akta cerai	63,76	67,07	75,64	78,25	80,4
Persentase penerbitan KIA	46,91	66,31	55,91	81,84	83,89

Keterangan: *) Data tidak tersedia akibat perubahan sistem data konsolidasi bersih publikasi dari Pemerintah Pusat

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diolah)

2.1.4.2. Hukum berkeadilan, keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

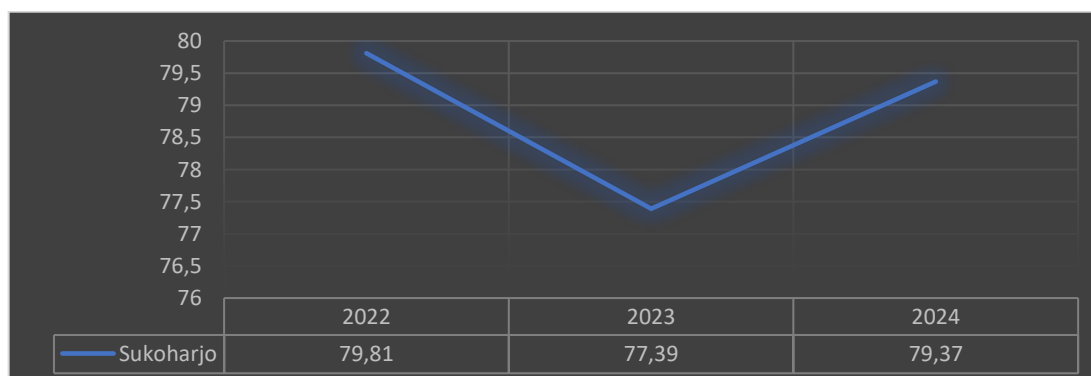
Perkembangan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu dua tahun terakhir. IRH pada tahun 2023 hingga 2024, menunjukkan peningkatan signifikan sebagai hasil dari komitmen daerah dalam mendorong transformasi regulasi hukum yang bersih, akuntabel, dan berkualitas. Nilai IRH Kabupaten Sukoharjo meningkat tajam dari 55,82 pada tahun 2023 menjadi 99,62 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut membawa Sukoharjo dari kategori “Cukup” (nilai 50–60) ke dalam kategori “Istimewa” (nilai >90–100), sebagaimana diatur dalam klasifikasi predikat menurut Kementerian Hukum dan HAM. Indeks Reformasi Hukum sendiri dihitung berdasarkan empat variabel utama, yakni (1) tingkat koordinasi harmonisasi regulasi antara daerah dan Kemenkumham (bobot 25%), (2) penguatan kompetensi ASN sebagai perancang produk hukum (25%), (3) kualitas hasil revidi re-regulasi dan de-regulasi produk hukum daerah (35%), dan (4) penataan database peraturan perundang-undangan (15%). Capaian luar biasa pada tahun 2024 ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor, membangun kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta menyusun regulasi yang efisien dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan nasional. Hal ini juga sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi Tematik dan General sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023, yang menempatkan penataan regulasi sebagai komponen penting dalam mendorong birokrasi yang adaptif dan berkinerja tinggi.



Sumber: Sekretariat Daerah (Diolah)

Gambar 2.93 Perkembangan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023-2024 (Indeks)

Peningkatan Indeks Integritas Nasional (IIN) yang terjadi pada 2024 menunjukkan semakin kecil risiko korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Indeks Integritas Nasional (IIN) merupakan salah satu instrumen pengukuran strategis dalam pemetaan risiko korupsi dan efektivitas upaya pencegahan korupsi oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk di Kabupaten Sukoharjo. Semakin tinggi nilai IIN, maka semakin baik capaian upaya pencegahan korupsi, serta semakin kecil risiko korupsi dalam organisasi pemerintahan. Berdasarkan data dari Survei Penilaian Integritas KPK RI, capaian Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 berada pada angka 79,81, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 77,39 pada tahun 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024 dengan capaian 79,37. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam efektivitas tata kelola pemerintahan dan integritas kelembagaan, serta pentingnya konsistensi dalam penguatan sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Namun pada 2024 yang meningkat menunjukkan adanya perbaikan upaya strategis dalam pencegahan korupsi dan peningkatan integritas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.



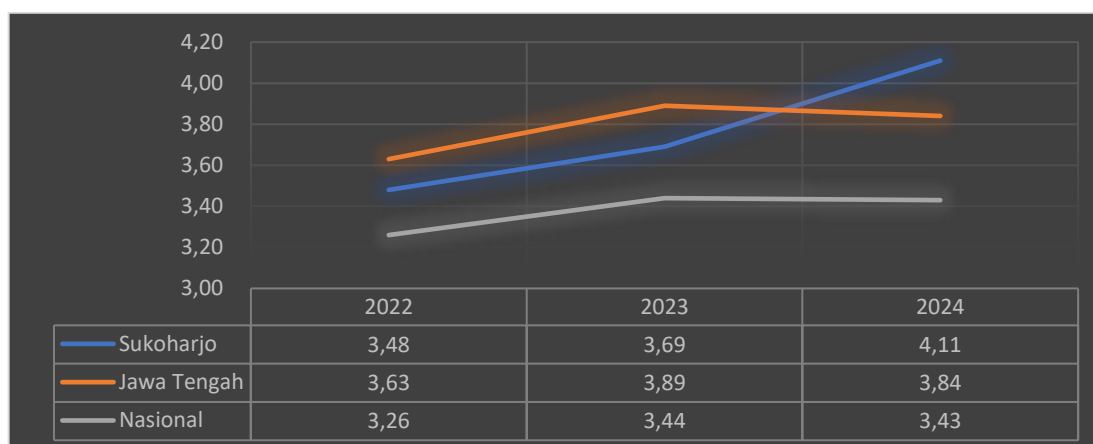
Sumber: Inspektorat (Diolah)

Gambar 2.94 Perkembangan Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2024 (angka)

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat ukur penting dalam menilai kapasitas dan potensi suatu daerah dalam bersaing secara ekonomi dan sosial, baik di tingkat nasional maupun global. IDSD tidak hanya merefleksikan produktivitas daerah, tetapi juga mencerminkan kesiapan daerah dalam merespons tantangan pembangunan, inovasi, dan transformasi digital. Penguatan IDSD juga merepresentasikan kemampuan daerah dalam mengembangkan lingkungan yang mendukung investasi, inovasi, dan keberlanjutan ekonomi. Berdasarkan *kerangka IDSD 2024*, indikator-indikator seperti kualitas institusi, adopsi TIK, kapasitas inovasi, serta ukuran dan efisiensi pasar menjadi kunci dalam pembentukan indeks. Dengan total 64 indikator yang tersebar pada 12 pilar, IDSD memberikan gambaran komprehensif terhadap kapasitas daerah dalam mendukung pembangunan inklusif dan berdaya saing.

IDSD Kabupaten Sukoharjo menunjukkan peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Nilai indeks meningkat dari 3,48 pada tahun 2022 menjadi 3,69 pada tahun 2023, dan melonjak menjadi 4,11 pada tahun 2024. Peningkatan IDSD Kabupaten Sukoharjo menempatkan Kabupaten Sukoharjo di atas rata-rata indeks Provinsi Jawa Tengah (3,84) maupun nasional (3,43) pada tahun 2024. Capaian tersebut mencerminkan penguatan daya saing lokal yang ditopang oleh kemajuan pada berbagai komponen. Hal ini sejalan dengan pendekatan IDSD 2024 yang mengadopsi kerangka kerja *Global Competitiveness Index (GCI)* dari *World Economic Forum (WEF)*, yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Pengukuran IDSD 2024 dilakukan melalui 12 pilar daya saing yang terklasifikasi ke dalam empat komponen utama: lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Capaian positif IDSD Sukoharjo tahun 2024 dapat dikaitkan dengan penguatan indikator pada pilar-pilar utama.



Sumber: BRIN (Diolah)

Gambar 2.95 Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2024 (Indeks)

Gambaran IDSD Kabupaten Sukoharjo tidak dapat dilepaskan dari komponen-komponen spesifik yang membentuknya. Berdasarkan kerangka IDSD 2024 yang disusun oleh BRIN, Indeks Daya Saing Daerah terdiri dari 12 pilar yang mencerminkan empat komponen utama: lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan nilai pada hampir seluruh pilar daya saing sepanjang tahun 2022 hingga 2024.

Pada komponen lingkungan pendukung, terlihat bahwa Pilar 1 (Institusi) meningkat dari 4,47 (2022) menjadi 4,84 (2024); Pilar 2 (Infrastruktur) mengalami kenaikan signifikan dari 1,61 (2022) ke 3,91 (2024); Pilar 3 (Adopsi TIK) stabil di atas 4,7; dan Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro) juga menunjukkan tren meningkat dari 3,27 menjadi 3,77. Kenaikan tajam pada Pilar 2 menandakan adanya peningkatan nyata dalam penyediaan dan kualitas infrastruktur dasar, termasuk transportasi, utilitas, dan infrastruktur digital. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

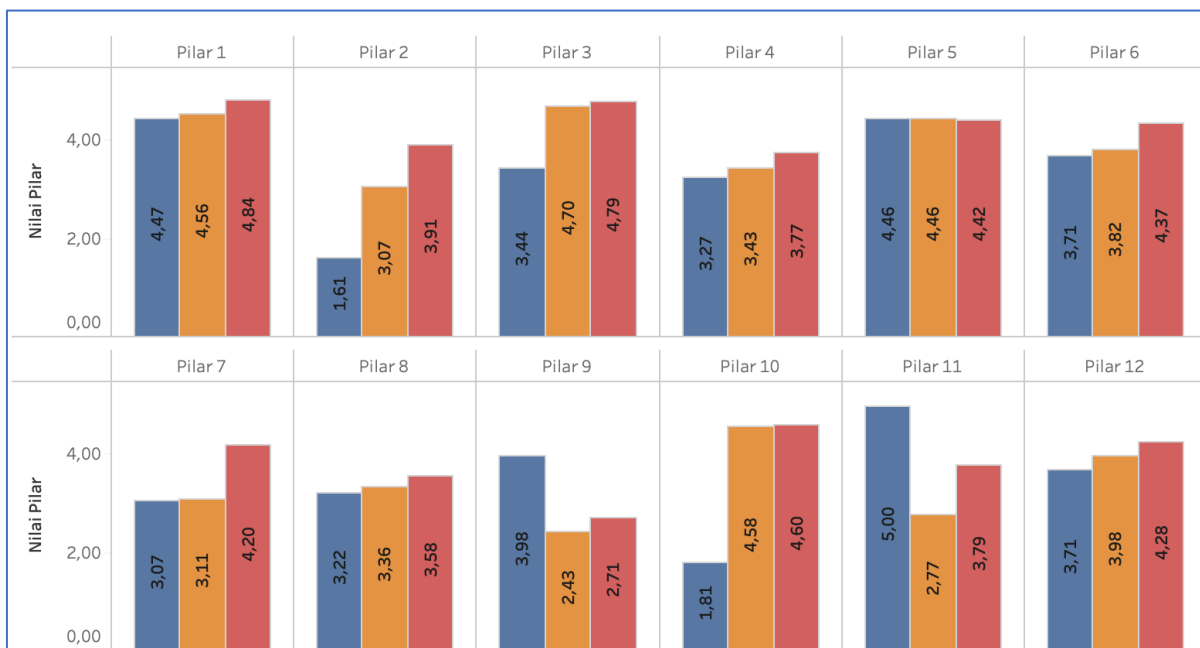
Pada komponen sumber daya manusia, yaitu Pilar 5 (Kesehatan) konsisten di angka 4,46–4,42; Pilar 6 (Keterampilan/ *Skilling*) meningkat dari 3,71 menjadi 4,37. Kinerja Pilar 6 menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja, termasuk pelatihan vokasional dan pendidikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Pada komponen pasar, terdapat dinamika, yaitu Pilar 7 (Pasar Produk) naik signifikan dari 3,07 ke 4,20; Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja) meningkat stabil dari 3,22 ke 3,58; Pilar 9 (Sistem Keuangan) justru menurun dari 3,98 (2022) menjadi 2,71 (2024); dan Pilar 10 (Ukuran Pasar) cukup stabil di kisaran 4,58–4,60. Penurunan drastis pada Pilar 9 patut menjadi perhatian, karena dapat mengindikasikan hambatan dalam akses keuangan atau rendahnya efisiensi sektor keuangan lokal, termasuk keterlibatan lembaga keuangan mikro maupun inklusi keuangan masyarakat.

Sementara itu, pada komponen ekosistem inovasi, yaitu Pilar 11 (Dinamika Bisnis) justru mengalami penurunan dari 5,00 menjadi 3,79; dan Pilar 12 (Kapasitas Inovasi) meningkat dari 3,71 ke 4,28. Tren tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam kapasitas dan budaya inovasi (Pilar 12), tetapi di sisi lain, dinamika bisnis atau kemudahan berusaha (Pilar 11) mengalami penurunan. Hal ini dapat menjadi indikator perlunya reformasi regulasi dan penyederhanaan perizinan guna mendukung kelangsungan dan pertumbuhan UMKM serta investasi lokal.

Secara keseluruhan, Kabupaten Sukoharjo mengalami penguatan yang merata pada sebagian besar pilar IDSD, terutama pada Pilar 2 (Infrastruktur), Pilar 6 (Keterampilan), Pilar 7 (Pasar Produk), dan Pilar 12 (Kapasitas Inovasi). Ke depan, perhatian khusus perlu diberikan pada pemulihan performa Pilar 9 dan

Pilar 11 agar ekosistem keuangan dan dunia usaha dapat mendukung daya saing secara berkelanjutan.



Sumber: BRIN (Diolah)

Keterangan:

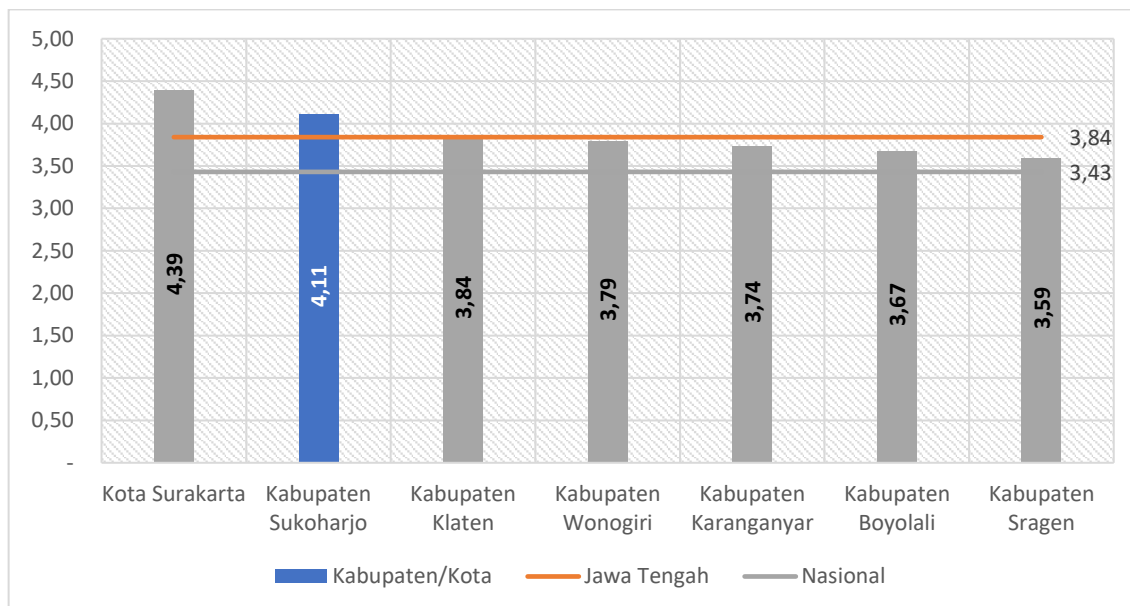


Gambar 2.96 Perkembangan 12 Pilar dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2024 (Indeks)

Dalam konteks regional, pencapaian IDSD Sukoharjo cukup efektif dalam meningkatkan daya saing melalui kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi potensi lokal. Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024, Kabupaten Sukoharjo memperoleh skor 4,11, yang berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (3,84) maupun rata-rata nasional (3,43). Dalam lingkup kawasan Subosukowonosraten, Sukoharjo menempati posisi kedua setelah Kota Surakarta (4,39), serta melampaui seluruh kabupaten lain di sekitarnya, seperti Klaten (3,84), Wonogiri (3,79), Karanganyar (3,74), Boyolali (3,67), dan Sragen (3,59).

Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi pembangunan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, khususnya dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Pendekatan pembangunan yang menekankan optimalisasi potensi lokal, baik dari sisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, maupun ekosistem inovasi terbukti mampu mendorong peningkatan daya saing daerah secara konsisten. Dengan mempertahankan dan memperkuat tren positif ini, Sukoharjo memiliki potensi

besar untuk tumbuh sebagai simpul pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Subosukowonosraten maupun sebagai pendorong daya saing Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.



Sumber: BRIN (Diolah)

Gambar 2.97 Perbandingan Indeks daya Saing Daerah (IDSD) Subosukowonosraten Tahun 2024 (Indeks)

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.4.4.1. Pendidikan

Perkembangan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang sangat positif. Kondisi ini mencerminkan komitmen daerah dalam meningkatkan akses pendidikan pada semua jenjang usia. Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) mengalami lonjakan signifikan dari 40,48% pada tahun 2020 menjadi 91,26% pada tahun 2024, menunjukkan perbaikan substansial dalam penyediaan layanan PAUD. Sementara itu, partisipasi anak usia 7–12 tahun dalam pendidikan dasar relatif stabil dengan angka yang sangat tinggi, berkisar antara 96% hingga 99%, mencerminkan universalitas akses pendidikan dasar yang hampir tercapai secara penuh. Demikian pula, tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun dalam pendidikan menengah pertama juga mengalami peningkatan kecil namun konsisten, dari 78,62% pada tahun 2020 menjadi 85,63% pada tahun 2024, menunjukkan keberlanjutan dari sistem pendidikan dasar ke tingkat selanjutnya. Indikator baru yang dicatat pada tahun 2024 adalah partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam

pendidikan kesetaraan, dengan capaian sebesar 40,79%, menandai langkah awal dalam mengintegrasikan pendekatan inklusif terhadap anak-anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan formal. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Sukoharjo berhasil memperluas cakupan dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh kelompok usia wajib belajar serta memperkuat peran pendidikan nonformal dalam menyasar kelompok yang rentan terputus dari sistem pendidikan reguler, sejalan dengan regulasi nasional yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 serta prinsip Sistem Dapodik dan basis data kependudukan.

Tabel 2.34 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	40,48	36,72	82,85	89,57	91,62
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,79	97,1	99,28	97,06	96,36
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	78,62	79,39	87,99	88,11	85,63
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	-	-	-	-	40,79

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.1.4.4.2. Kesehatan

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci (IKK) urusan kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan sesuai standar nasional. Capaian Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan pada tahun 2024 telah mulai dicatat sebesar 0,15, menandakan adanya penambahan kapasitas fasilitas layanan kesehatan rujukan. Di sisi lain, seluruh Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota telah terakreditasi 100% sejak 2020, mencerminkan kualitas layanan rujukan yang telah memenuhi standar mutu. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meningkat dari 96% di tahun 2020 menjadi stabil pada angka 100% sejak 2022, dan demikian pula ibu bersalin dan bayi baru lahir yang menerima pelayanan sesuai standar juga menunjukkan capaian maksimal sebesar 100% sejak awal periode pengamatan. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar meningkat dari 86% di tahun 2020 menjadi 100% sejak 2021. Prestasi luar biasa juga tercermin dalam indikator persentase anak usia pendidikan dasar

yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang melonjak dari 63% (2020) menjadi 92% (2021), lalu bertahan di angka 100% sejak 2022. Bahkan cakupan skrining kesehatan pada usia produktif (15–59 tahun), warga lanjut usia (di atas 60 tahun), dan penderita penyakit kronis seperti hipertensi serta diabetes mellitus juga menunjukkan lonjakan signifikan. Persentase warga usia 15–59 tahun yang mendapat skrining meningkat dari 42% menjadi 100% dalam kurun tiga tahun, sementara pada kelompok lanjut usia melonjak dari 76% (2020), 43% (2021), menjadi 100% sejak 2022. Penanganan penderita hipertensi dan diabetes mellitus juga memperlihatkan peningkatan pesat dari 42% dan 88% (2020) menjadi 100% dalam dua tahun terakhir. Demikian pula penanganan ODGJ berat melonjak dari 48% menjadi 100%, penanganan pasien TBC dari 24% ke 100%, dan pelayanan deteksi dini HIV dari 85% menjadi 100% pada tahun 2022 dan seterusnya.

Capaian tinggi pada berbagai indikator IKK urusan kesehatan mengindikasikan bahwa Kabupaten Sukoharjo tidak hanya berhasil memenuhi Standar Teknis Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2024, tetapi juga menunjukkan kemampuan dalam mewujudkan tata kelola sistem kesehatan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil. Konfirmasi validitas data dari sumber-sumber utama seperti Dinas Kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, RSUD, dan Puskesmas semakin memperkuat keandalan indikator yang dilaporkan. Hal ini menjadikan capaian kesehatan di Kabupaten Sukoharjo sebagai best practice dalam konteks pembangunan kesehatan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan populasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, investasi dalam infrastruktur layanan, serta peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang berkelanjutan, sebagai wujud nyata dari prinsip *universal health coverage (UHC)* di tingkat lokal.

Tabel 2.35 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	-	-	-	-	0,15
2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100
3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	96	96	100	100	100
4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100
5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100
6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	86	100	100	100	100
7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	63	92	100	100	100
8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	42	97	100	100	100
9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	76	43	100	100	100
10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	42	97	100	100	100
11. Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan	%	88	58	100	100	100
12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	48	20	100	100	100
13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	24	21	100	100	100
14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	85	71	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan

2.1.4.4.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam konteks Kabupaten Sukoharjo, evaluasi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan infrastruktur serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Salah satu indikator utama adalah rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota. Indikator ini mengalami tren penurunan dari 99,47% pada tahun 2020 menjadi 83,5% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga dan meningkatkan cakupan perlindungan

infrastruktur terhadap banjir, baik dari sisi kapasitas teknis, pendanaan pembangunan baru, maupun aspek pemeliharaan infrastruktur eksisting.

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai, belum menunjukkan capaian sama sekali selama periode 2020–2024. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan wilayah pantai di Kabupaten Sukoharjo, sehingga tidak relevan untuk diukur secara aktual, dan hanya dilaporkan sebagai keterangan nihil sesuai ketentuan pengisian dalam SILPPD. Pada aspek irigasi, rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi menunjukkan tren peningkatan dari 44% di tahun 2021 menjadi 69,3% di tahun 2023, meskipun sedikit menurun ke 65% di tahun 2024. Indikator ini mencerminkan efektivitas pembangunan, rehabilitasi, dan operasional jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal.

Akses terhadap air minum melalui SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) baik jaringan perpipaan maupun non-perpipaan menunjukkan peningkatan berkelanjutan dari 84,44% pada tahun 2020 menjadi 94,19% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan hasil nyata dari intervensi pemerintah daerah dalam memperluas akses air bersih yang aman dan layak kepada masyarakat. Di sisi lain, persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik meningkat signifikan dari 95,91% di tahun 2020 menjadi 99,79% pada tahun 2024, yang mencerminkan perbaikan layanan sanitasi berbasis rumah tangga, terutama pengelolaan limbah domestik melalui sarana seperti tangki septik, IPLT, atau IPALD.

Terkait tata bangunan, rasio kepatuhan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kabupaten/kota mengalami peningkatan kecil namun konsisten, dari 25,47% di tahun 2020 menjadi 26,97% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi perizinan bangunan sesuai peruntukan ruang dan standar teknis. Tingkat kemandirian jalan kabupaten/kota relatif stabil pada kisaran 88%–89%, dengan sedikit penurunan menjadi 88,3% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruas jalan dalam kondisi baik dan sedang, dan perawatan rutin masih mampu menjaga kinerja infrastruktur jalan tersebut.

Indikator yang menunjukkan angka 100% selama lima tahun berturut-turut adalah rasio tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dan rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Sukoharjo dalam menjamin kualitas konstruksi dan keselamatan kerja pada proyek infrastruktur daerah sesuai standar.

Dengan demikian, evaluasi terhadap IKK urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan kinerja sektoral. Evaluasi terhadap IKK urusan pekerjaan umum dan penataan ruang juga sebagai

instrumen akuntabilitas dan perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di tingkat daerah.

Tabel 2.36 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	%	99,47	92,52	83,57	83,93	83,5
2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	54	44	54,3	69,3	65
3. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	84,44	93,18	93,57	93,61	94,19
4. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,91	85,89	95,05	97,45	99,79
5. Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	25,47	25,78	25,89	26,44	26,97
6. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	88,09	88,68	89,35	89,54	88,30
7. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100
8. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.4.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam kerangka pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman terlihat adanya perkembangan signifikan pada lima indikator kinerja kunci (IKK Outcome) selama periode 2020 hingga 2024. Pertama, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana mengalami capaian yang konsisten dan maksimal, sebesar 100% selama empat tahun berturut-turut sejak 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas respon pemerintah daerah dalam memastikan penanganan hunian pascabencana secara tepat waktu dan sesuai target perencanaan.

Kedua, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi akibat program pemerintah daerah pada tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut terdapat kegiatan relokasi masyarakat yang difasilitasi sepenuhnya oleh pemerintah daerah, terutama dalam bentuk penyediaan tanah, bangunan, atau rumah hunian yang layak.

Ketiga, persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang berhasil ditangani menunjukkan dinamika yang menarik, dengan tren menurun dari 49,74% pada 2021 menjadi hanya 1,88% pada 2023, kemudian sedikit meningkat menjadi 4,22% pada 2024. Penurunan tajam ini mengindikasikan keberhasilan intervensi kawasan kumuh melalui program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman, baik berupa peremajaan, pemugaran, maupun penataan ulang kawasan. Penurunan drastis selama kurun waktu empat tahun menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan rumah individu, tetapi juga pada pendekatan kawasan yang lebih holistik.

Keempat, berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menggambarkan konsistensi upaya pemerintah dalam melakukan intervensi fisik terhadap hunian yang tidak memenuhi standar teknis minimum. Penurunan signifikan ditunjukkan dari angka 60,73% pada 2020 ke 57,92% pada 2024, dengan puncak penanganan pada tahun 2022 sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi rehabilitasi RTLH telah dilaksanakan secara masif pada tahun tersebut, yang sangat mungkin merupakan bagian dari program nasional ataupun stimulus anggaran daerah. Penurunan yang terjadi bersifat fluktuatif namun tetap mencerminkan keseriusan intervensi pemerintah terhadap perumahan rakyat yang belum memenuhi standar keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan ruang hidup.

Kelima, jumlah perumahan yang telah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) menunjukkan tren kenaikan bertahap setiap tahunnya, dari 8,08% pada 2021 menjadi 11,61% pada 2024. Indikator ini mencerminkan komitmen terhadap aspek keberlanjutan dan kenyamanan kawasan perumahan. Sebab, hunian tidak hanya dinilai dari bangunan rumah, tetapi juga dari keberadaan akses jalan, saluran drainase, fasilitas air bersih, listrik, dan fasilitas sosial umum lainnya. Meskipun peningkatannya bersifat gradual, tren positif ini mengindikasikan penguatan fungsi koordinatif antara pemerintah dan pengembang perumahan dalam pengelolaan PSU.

Dengan demikian, pencapaian IKK Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sukoharjo selama 2020–2024 mencerminkan sinergi yang solid antara perencanaan, regulasi, serta eksekusi kebijakan yang mengedepankan asas keadilan sosial dan pemenuhan hak dasar masyarakat akan hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat.

Tabel 2.37 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Kabupaten Sukoharjo 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	-	100	100	100	100
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	-	-	-	-	100
3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	16	49,74	35,93	1,88	4,22
4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	60,73	51,08	90	75,66	57,92
5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	-	8,08	8,78	10,48	11,61

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.1.4.4.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam konteks penyelenggaraan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo tahun 2020–2024, kinerja pemerintah daerah dalam merespons gangguan Trantibum dan perlindungan terhadap warga menunjukkan tren capaian yang progresif. Persentase penyelesaian gangguan Trantibum mengalami peningkatan dari 97,5% pada 2020 menjadi 98,51% pada 2024, mencerminkan peningkatan efektivitas penanganan laporan masyarakat. Penegakan Perda dan Perkada yang mengandung sanksi pun relatif stabil dengan capaian tertinggi sebesar 98,22% pada 2021, meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada tahun berikutnya. Dalam hal penyebaran informasi kebencanaan, seluruh warga negara yang ditargetkan telah memperoleh layanan informasi rawan bencana sejak 2020 hingga 2024, dan pada 2024 cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana meningkat signifikan mencapai 100% dari sebelumnya hanya 0,2% pada 2022. Selain itu, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana juga tercatat berhasil menjangkau 100% warga yang membutuhkan sejak 2022. Kemajuan juga terlihat dalam indikator pelayanan pemadam kebakaran, di mana persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mencapai 56% pada 2024, dan waktu tanggap rata-rata (response time) penanganan kebakaran tercatat 19,6 menit. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam membangun sistem

layanan publik yang responsif, tanggap bencana, dan berbasis data dalam mewujudkan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.38 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Ketentraman dan Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	97,5	98	98,82	98,33	98,51
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	-	98,22	96,95	97,82	96,96
3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	-	0,2	0,17	100
5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	-	-	100	100	100
6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	-	-	-	-	56
7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	-	-	-	-	19,6

Sumber: Satpol PP dan BPBD

2.1.4.4.6. Sosial

Berdasarkan data Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024, terlihat bahwa kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan sosial dasar menunjukkan pencapaian yang sangat optimal dan konsisten. Dua IKK, yaitu tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM), serta persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota. Kedua indikator tersebut tercatat dengan capaian 100% secara konsisten sejak tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan komitmen tinggi dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi hak dasar kelompok rentan dan penyintas bencana. Pencapaian indikator-indikator tersebut tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan sosial daerah sesuai Permensos Nomor 9 Tahun 2018, tetapi juga menggambarkan keberhasilan

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan inklusi sosial dan ketangguhan terhadap bencana secara berkelanjutan.

Tabel 2.39 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	-	100	100	100	100
2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial

2.1.4.4.7. Tenaga Kerja

Berdasarkan perkembangan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024, dinamika capaian pembangunan ketenagakerjaan di daerah ini menunjukkan pola kemajuan yang beragam dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah serta tantangan struktural yang masih harus diatasi. Pertama, persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) secara konsisten berada pada level 100% selama 2020-2023, menegaskan bahwa seluruh program teknis ketenagakerjaan telah selaras dengan dokumen perencanaan sektor, baik dalam aspek perencanaan pasokan dan permintaan tenaga kerja maupun neraca pengembangan kompetensi, meski pada 2024 menunjukkan 0% yang mengindikasikan tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja. Kedua, persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, baru mulai terukur pada 2024 dan masih sangat rendah (0,03%), menandakan bahwa agenda peningkatan mutu SDM melalui sertifikasi kompetensi formal harus dipacu, antara lain dengan memperluas skema pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan mempermudah akses pembiayaan sertifikasi. Ketiga, tingkat produktivitas tenaga kerja diperoleh dari rasio PDRB atas dasar harga konstan terhadap jumlah tenaga kerja menunjukkan tren kenaikan dari Rp55,53 juta per orang (2020) menjadi Rp65,45 juta (2024), merefleksikan perbaikan efisiensi ekonomi sekaligus dampak adopsi teknologi dan pergeseran struktur ekonomi daerah menuju sektor bernilai tambah lebih tinggi. Keempat, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) relatif stagnan di kisaran 67 % sepanjang 2020-2023 dan meningkat menjadi 70 % pada

2024, menunjukkan adanya respons korporasi terhadap regulasi pasar kerja yang lebih ketat namun masih menyisakan ruang perbaikan khususnya pada perusahaan berskala mikro-kecil. Terakhir, persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja (AK) menunjukkan fluktuasi, yaitu turun dari 67% (2020) ke 55% (2021), rebound ke 71% (2023), lalu melemah lagi ke 60% (2024). Fluktuasi ini menandakan bahwa integrasi job-matching berbasis information system serta sinergi dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) sekolah/BLK dan private job-platform masih perlu diperkuat. Secara keseluruhan, capaian IKK urusan tenaga kerja memperlihatkan bahwa Sukoharjo telah menempatkan fondasi kebijakan ketenagakerjaan yang relatif baik terutama pada aspek perencanaan dan produktivitas namun peningkatan kualitas tenaga kerja (sertifikasi) dan penguatan intermediasi pasar kerja perlu menjadi prioritas strategis.

Tabel 2.40 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1	1	1	1	0
2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	-	-	-	-	0,03
3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Orang	55.531	57.949	61.366	63.513	65.448
4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS (Ketenagakerjaan)	%	67	67	67	67	70
5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	67	55	67	71	60

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.1.4.4.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan responsif gender. Persentase anggaran responsif gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD, mencerminkan seberapa jauh prinsip pengarusutamaan gender telah diinternalisasi ke dalam kebijakan fiskal daerah. Dari capaian 2% pada tahun

2021, meningkat hingga 10,48% pada 2023 sebelum menurun kembali menjadi 4,82% pada 2024. Meskipun sempat menunjukkan progres signifikan, fluktuasi ini mengindikasikan belum konsistennya komitmen lintas perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang mengintegrasikan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait di Kabupaten Sukoharjo, menunjukkan pencapaian 100% secara konsisten selama periode 2020–2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan sistem rujukan dan layanan penanganan kekerasan terhadap anak, termasuk aspek pendampingan sosial, rehabilitasi, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial yang dilaksanakan sesuai standar layanan minimum. Namun demikian, rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) per 100.000 penduduk perempuan, menunjukkan tren fluktuatif. Dari angka 9,91 kasus pada tahun 2020, meningkat drastis menjadi 15,49 pada 2021, dan meskipun sempat menurun ke 12,68 pada 2022, rasio tersebut kembali naik ke kisaran 13,80 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi isu struktural yang kompleks di Kabupaten Sukoharjo. Secara keseluruhan, data IKK ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo telah mencatat capaian yang baik dalam aspek penanganan korban kekerasan anak dan peningkatan alokasi anggaran yang responsif gender.

Tabel 2.41 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

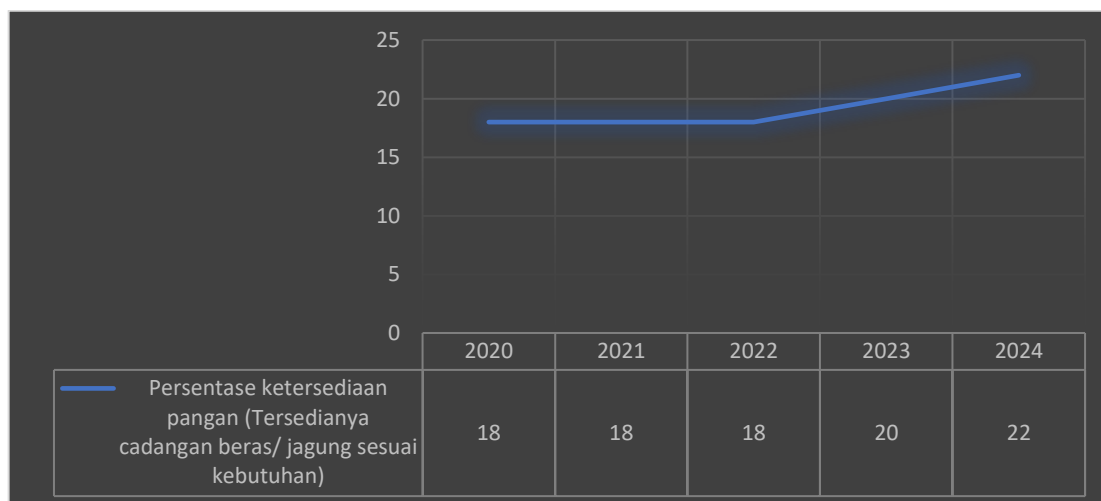
IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	-	2	4,34	10,48	4,82
2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 Penduduk perempuan	9,91	15,49	12,68	13,20	13,38

Sumber: Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.4.4.9. Pangan

Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024, terlihat bahwa persentase ketersediaan pangan dalam bentuk cadangan beras/jagung yang sesuai dengan kebutuhan daerah menunjukkan tren yang positif meskipun dengan dinamika moderat. Pada tahun 2020 hingga 2022, capaian persentase ketersediaan pangan bertahan di angka 18%, mencerminkan situasi stabil tetapi

belum optimal dalam hal penyediaan stok pangan strategis oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2023, persentase ini meningkat menjadi 20%, dan kembali mengalami peningkatan pada 2024 menjadi 22%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas manajemen cadangan pangan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang sejalan dengan upaya penguatan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketersediaan pangan Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan telah menunjukkan tren perbaikan yang signifikan menuju sistem ketahanan pangan daerah yang lebih tangguh dan adaptif.



Sumber: Dinas Pangan

Gambar 2.98 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

2.1.4.4.10. Pertanian

Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pertanian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja urusan pertanian mengalami dinamika yang signifikan, baik dari sisi perencanaan spasial maupun dalam penyediaan lahan untuk pembangunan dan masyarakat. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan izin lokasi, menunjukkan konsistensi sebesar 100% selama tahun 2020 hingga 2023, sebelum menurun menjadi 89,44% pada tahun 2024. Capaian ini merefleksikan komitmen yang kuat pemerintah daerah dalam memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan (KKPR), meskipun adanya penurunan terakhir dapat disebabkan oleh keterlambatan penyesuaian izin atau kompleksitas investasi di lapangan. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, yang sebelumnya tercatat 100% selama 2020–2021 dan kembali 100% pada 2023, namun pada tahun 2024 tercatat 0%. Hal ini mengindikasikan tidak adanya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum berdasarkan kebutuhan teknis dari perangkat daerah.

Sementara itu, ketersediaan lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal, selama empat tahun awal tahun 2020-2023 menunjukkan 100%, namun mengalami penurunan pada 2024 menjadi 77,85%, mengindikasikan menurunnya ketersediaan lahan strategis sesuai peruntukan. Ketersediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) dan tanah untuk masyarakat masih menunjukkan stagnasi dengan capaian 0% selama lima tahun berturut-turut. Ini mencerminkan tantangan struktural dalam redistribusi tanah, baik karena keterbatasan tanah negara yang layak dialokasikan maupun minimnya realisasi kebijakan reforma agraria di tingkat daerah. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi menunjukkan capaian optimal selama lima tahun berturut-turut sebesar 100%, Hal ini menjadi catatan positif bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki mekanisme resolusi konflik yang cukup efektif dan tertib administratif dalam menangani kasus-kasus pertanahan berskala kecil yang melibatkan perorangan atau lembaga tanpa dampak sosial luas.

Kinerja urusan pertanahan di Sukoharjo secara umum menunjukkan tata kelola spasial dan yuridis yang relatif baik, namun masih menghadapi hambatan dalam aspek distribusi tanah yang lebih adil dan dalam penyediaan lahan yang produktif bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.42 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	89,44
2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	86	100	0
3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100	100	100	100	77,85
4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	0	0
5. Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0	0	0	0	0
6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.4.11. Lingkungan Hidup

Berdasarkan data perkembangan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024, menunjukkan pembangunan bidang lingkungan hidup mengalami peningkatan bertahap meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam dimensi pengelolaan sampah dan kepatuhan pelaku usaha terhadap **regulasi lingkungan**. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan gabungan nilai dari indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan, menunjukkan tren positif dengan kenaikan dari angka 59,05 pada tahun 2020 menjadi 63,59 pada 2024. Capaian ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas lingkungan secara umum di Sukoharjo, sejalan dengan upaya peningkatan pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, dan pengurangan kerusakan lingkungan. Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota, juga menunjukkan peningkatan moderat dari 59,14% pada tahun 2021 menjadi 62,81% pada tahun 2024. Perbaikan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam implementasi kebijakan persampahan, meskipun belum mencapai tingkat ideal 100%, disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di lapangan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, serta minimnya inovasi teknologi daur ulang yang terintegrasi dengan sistem pelayanan publik daerah.

Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), serta peraturan perundang-undangan lingkungan hidup lainnya, menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, yaitu dari 11,36% pada tahun 2021, turun menjadi 8% pada 2022, lalu melonjak drastis menjadi 73,91% pada 2023, sebelum kembali menurun ke 47% pada 2024. Volatilitas ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha masih belum stabil, yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan rutin, ketidaksinkronan sistem pelaporan usaha, serta belum optimalnya penegakan sanksi administratif. Tingkat kesadaran dan tanggung jawab dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sangat penting sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan berbagai Permen LHK tentang pemantauan dan penegakan hukum lingkungan, seperti Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha/Kegiatan yang Wajib AMDAL dan UKL-UPL, untuk memastikan bahwa kegiatan usaha mempertimbangkan dampak lingkungan dan melakukan upaya pengelolaan serta pemantauan lingkungan. Selain itu, ada juga Permen LHK No. 15 Tahun 2019 yang mengatur tentang Baku Mutu Emisi dan Pemantauan Emisi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Termal, untuk mengendalikan pencemaran udara yang disebabkan oleh kegiatan industri. Permen LHK No. 93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018, yang kemudian diubah dengan Permen LHK No. 80 Tahun 2019, mengatur tentang pemantauan kualitas air limbah secara terus menerus dan dalam jaringan bagi usaha dan/atau kegiatan. Pemantauan

kualitas air limbah ini dilakukan untuk memastikan bahwa baku mutu air limbah yang ditetapkan terpenuhi. Serta Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup.

Dengan demikian, meskipun Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan arah positif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup secara umum, capaian ini belum sepenuhnya merata di seluruh aspek tata kelola lingkungan. Kinerja berkelanjutan di sektor ini akan sangat menentukan daya dukung ekosistem daerah dan kualitas hidup masyarakat jangka panjang di tengah tekanan pembangunan yang semakin meningkat.

Tabel 2.43 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	59,05	63,83	61,44	62,03	63,59
2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	-	59,14	56,41	60,78	62,81
3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	-	11,36	8	73,91	47

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

2.1.4.4.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024, menunjukkan progres yang konsisten dan signifikan dalam tata kelola administrasi kependudukan, seiring dengan peningkatan layanan dasar berbasis data penduduk. Perekaman KTP elektronik, menunjukkan capaian sangat tinggi sejak 2020 (96,82%) hingga 2024 (99,24%), yang menandakan bahwa sebagian besar penduduk usia 17 tahun ke atas telah tercakup dalam sistem identitas nasional, sebagaimana dipersyaratkan oleh UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini merefleksikan keberhasilan strategi jemput bola, kolaborasi dengan sekolah dan lembaga pendidikan, serta optimalisasi pelayanan perekaman di kecamatan dan desa.

Sementara itu, Persentase anak usia 0–17 tahun kurang satu hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), menunjukkan peningkatan dari 46,9% pada tahun 2020 menjadi 83,89% pada 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan kampanye literasi identitas anak dan integrasi pelayanan KIA dalam rangkaian layanan kelahiran, pendidikan, dan kesehatan anak. KIA sebagai dokumen identitas resmi bagi anak sangat penting untuk menjamin hak sipil dan perlindungan hukum, dan implementasinya diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Kemajuan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo cukup serius dalam mendorong inklusi administrasi penduduk sejak usia dini. Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–18 tahun, juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi, meskipun mengalami sedikit fluktuasi, yaitu dari 99,77% pada 2020 sempat turun menjadi 96,26% pada 2021, lalu kembali naik menjadi 98,86% pada 2024. Meskipun demikian tetap menunjukkan komitmen daerah dalam menjamin hak identitas hukum dasar bagi anak-anak, sebagaimana diwajibkan dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, stagnan pada angka 4 selama 2020–2023 dan meningkat menjadi 5 pada 2024. Meskipun secara absolut pertambahannya tampak kecil, peningkatan ini menandai adanya kemajuan dalam integrasi data kependudukan lintas sektor, yang sangat penting untuk mendukung perencanaan berbasis data (*data-driven policy*), efisiensi pelayanan publik, dan deteksi dini berbagai masalah sosial. Implementasi pemanfaatan data kependudukan ini mengacu pada UU No. 24 Tahun 2013 serta Permendagri No. 102 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 17 Tahun 2023 yang mengatur pemberian hak akses data.

Secara keseluruhan, capaian IKK urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kinerja yang relatif sangat baik dan mendekati universal coverage pada beberapa aspek penting, seperti KTP-el dan akta kelahiran. Capaian ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan akuntabel. Namun demikian, peningkatan pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh OPD masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperkuat, baik melalui penguatan kapasitas teknis, interoperabilitas sistem informasi, maupun perumusan kebijakan sektoral berbasis data demografis yang akurat dan mutakhir.

Tabel 2.44 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Perekaman KTP elektronik	%	96,82	99,62	97,68	99,8	99,24
2. persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	46,9	66,31	55,91	81,84	83,89
3. Kepemilikan akta kelahiran	%	94,25	96,60	98,65	98,78	98,86
4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	%	4	4	4	4	5

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.4.4.13. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kinerja pemberdayaan desa di Kabupaten Sukoharjo dapat diukur antara lain melalui Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024 menunjukkan progres yang sangat positif dan konsisten dalam lima tahun terakhir. Persentase pengentasan desa tertinggal sebesar 100% selama periode 2020 hingga 2024, mengindikasikan seluruh desa yang sebelumnya masuk dalam kategori tertinggal telah berhasil ditingkatkan statusnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa intervensi program pembangunan desa seperti penguatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur dasar, akses layanan publik, serta pembangunan ekonomi lokal telah berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah desa Kabupaten Sukoharjo.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan sebagai bagian dari sistem evaluasi kinerja daerah dan menjadi ukuran utama capaian kinerja daerah dalam melaksanakan urusan konkuren. Salah satu indikator yaitu persentase peningkatan desa berkembang menjadi desa maju dan desa mandiri, yang bertujuan untuk mendorong proses transformasi desa menuju kemandirian.

Selanjutnya, peningkatan status desa di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren yang sangat progresif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. pada tahun 2020, Sebagian besar desa di Kabupaten Sukoharjo berada pada kategori berkembang. Melalui intervensi program pemberdayaan yang berkelanjutan, desa-desa berkembang ini mengalami peningkatan status secara bertahap. Beberapa diantaranya lebih dulu naik menjadi desa maju, kemudian meningkat lagi menjadi desa mandiri. Secara rinci, persentase desa berkembang yang berhasil meningkat statusnya menjadi desa maju dan desa mandiri menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan. Pada tahun 2020 desa berkembang yang telah mencapai status desa mandiri baru mencapai 5,26% angka ini meningkat tajam menjadi 33,33% di tahun 2022, melonjak lagi mejadi 70,37% pada 2023, dan akhirnya mencapai 100% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan seluruh desa

yang berstatus berkembang pada awal periode ini telah mengalami peningkatan status, baik secara bertahap melalui fase desa maju maupun langsung menuju desa mandiri. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas program pemberdayaan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang secara konsisten memperkuat kapasitas desa, memfasilitasi Pembangunan berbasis potensi local, serta mendorong partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan desa, sebagaimana Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, namun ketentuan tersebut telah dicabut dengan Permendesa PDTT No. 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Peningkatan ini tidak terlepas dari kebijakan strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pendampingan desa, mendorong integrasi perencanaan berbasis data mikro (profil desa), serta penguatan sinergi antar sektor dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi.

Keberhasilan ini menegaskan bahwa Kabupaten Sukoharjo telah melampaui persoalan mendasar desa, seperti keterisolasian, ketergantungan fiskal, dan kesenjangan akses, serta berhasil masuk dalam fase konsolidasi pembangunan desa berkelanjutan. Dengan demikian, capaian IKK urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Sukoharjo menunjukkan tumbuhnya kemandirian desa sebagai fondasi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.45 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	100	100	100	100	100
2. Persentase peningkatan satatus desa mandiri	%	5,26	10	33,33	70,37	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.4.4.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024, menunjukkan perkembangan yang positif dan berkesinambungan dalam pengelolaan pembangunan kependudukan melalui program keluarga berencana. *Total Fertility Rate* (TFR) atau Angka Kelahiran Total, mengalami penurunan konsisten dari 1,89 pada tahun 2020 menjadi 1,33 pada 2024. TFR mengukur rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, sehingga mengindikasikan keberhasilan program KB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk secara bertahap. TFR di bawah angka 2,1 umumnya dianggap mendekati kondisi *replacement level fertility* dan sesuai dengan sasaran nasional

pengendalian penduduk. BKKBN dalam Laporan Kependudukan Indonesia 2024, *Replacement level fertility* yaitu *Total Fertility Rate* (TFR)=2.1 dan *Net Reproduction Rate* (NRR)=1. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi edukasi reproduksi, akses layanan KB yang lebih merata, dan kampanye perubahan perilaku dalam keluarga.

Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*), memperlihatkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2021 (54,62%), kembali meningkat hingga 69,3% pada 2023, namun menurun menjadi 67,57% pada 2024. Meski belum sepenuhnya stabil, tren mCPR yang relatif tinggi ini mengindikasikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaturan kehamilan sudah cukup baik dan menjadi pilar penting dalam pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk, serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan alat kontrasepsi di fasilitas layanan kesehatan dan preferensi metode KB, serta keterlibatan aktif kader dan penyuluh KB di lapangan.

Sementara itu, *unmet need* atau persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menunjukkan tren penurunan, dari 15,65% pada tahun 2020 menjadi 9,29% pada tahun 2024. Penurunan *unmet need* menandakan semakin kecilnya proporsi PUS yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan namun belum mendapatkan layanan kontrasepsi. Capaian ini mencerminkan perbaikan distribusi pelayanan KB, peningkatan akseptabilitas alat kontrasepsi, serta penguatan intervensi berbasis komunitas melalui kampanye dan konseling yang tepat sasaran. Indikator ini sangat penting karena berkorelasi langsung dengan pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan, penurunan risiko kematian ibu, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Secara umum, capaian Kabupaten Sukoharjo dalam urusan pengendalian penduduk dan KB menunjukkan arah kebijakan yang terkonsolidasi, berbasis data, dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat secara kontekstual.

Tabel 2.46 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,89	1,81	1,67	1,58	1,33
2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	68,05	54,62	63,89	69,3	67,57
3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	15,65	27,81	13,27	11,39	9,29

Sumber: Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.4.4.15. Perhubungan

Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan konektivitas transportasi dan efisiensi lalu lintas jalan dilihat dari **Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024**. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota, yang mengukur tingkat keterhubungan jaringan transportasi antarwilayah melalui moda angkutan jalan, sungai, dan penyebrangan, memperlihatkan kenaikan bertahap dari indeks 0,09 pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 0,39 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam jumlah trayek layanan angkutan umum yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan trayek di wilayah kabupaten, sesuai dengan pendekatan yang dirumuskan dalam perhitungan IK1 (angkutan jalan) dan IK2 (angkutan air/penyebrangan). Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui penambahan dan optimalisasi rute angkutan darat untuk menjamin mobilitas yang merata dan efisien antar wilayah.

Sementara itu, *V/C ratio (Volume/Capacity ratio)* di jalan kabupaten/kota mencerminkan tingkat efisiensi kinerja lalu lintas, ditunjukkan meningkat dari 0,43 pada 2020 menjadi 0,64 pada 2024. Secara teknis, nilai *V/C ratio* < 0,85 masih dianggap dalam kondisi baik, artinya kapasitas jalan masih mampu melayani arus lalu lintas yang ada tanpa mengalami kemacetan signifikan. Dengan demikian, meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan, kondisi lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo tetap dalam batas toleransi kapasitas jalan. Namun demikian, tren ini juga mengindikasikan bahwa ke depan perlu mengoptimalkan kebijakan manajemen lalu lintas, pelebaran jalan, peningkatan konektivitas jalan antar kewenangan, serta penyediaan moda transportasi publik yang layak untuk mengendalikan laju pertumbuhan volume kendaraan pribadi.

Capaian IKK urusan perhubungan secara umum mengindikasikan bahwa Sukoharjo telah memiliki arah kebijakan transportasi yang responsif terhadap tantangan mobilitas dan kebutuhan keterhubungan wilayah.

Tabel 2.47 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Rasio konektivitas kabupaten / kota	Indeks	0,09	0,09	0,12	0,38	0,39
2. V/C rasio di Jalan Kabupaten/kota	Angka	0,43	0,52	0,55	0,61	0,64

Sumber: Dinas Perhubungan

2.1.4.4.16. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024 menunjukkan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika yang cukup baik, khususnya dalam hal konektivitas perangkat daerah, digitalisasi pelayanan publik, serta penyebaran informasi kepada masyarakat. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo menunjukkan capaian sebesar 100% yang secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh perangkat daerah telah terfasilitasi oleh jaringan internet yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, baik melalui jaringan fiber optik maupun sambungan lainnya. Ketersediaan akses internet yang merata pada OPD menjadi prasyarat penting dalam mendukung transformasi digital dan efisiensi pelayanan publik.

Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, juga menunjukkan tren positif, yaitu dari 70% pada 2021, meningkat menjadi 85% pada tahun 2023 hingga 2024. Capaian ini menunjukkan keberhasilan digitalisasi layanan publik di Kabupaten Sukoharjo, di mana mayoritas layanan dari instansi pemerintah daerah telah diselenggarakan dalam platform daring (online) dan terintegrasi dalam sistem layanan terpadu. Hal ini memperkuat prinsip pelayanan publik yang mudah, cepat, dan akuntabel serta mengurangi ketergantungan pada layanan tatap muka konvensional. Implementasi layanan digital ini juga meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat tanpa batasan geografis yang signifikan.

Sementara itu, persentase masyarakat usia produktif (15–64 tahun) yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan serta program prioritas pemerintah daerah, menunjukkan capaian sebesar 68,51% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat dalam menyampaikan kebijakan, program pembangunan, serta layanan publik, yaitu lebih dari separuh populasi produktif telah terjangkau oleh sistem informasi publik, baik melalui media konvensional maupun digital seperti media sosial, portal resmi pemerintah, dan aplikasi layanan masyarakat..

Secara keseluruhan, capaian IKK urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 menunjukkan langkah maju yang penting dalam transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik, serta menunjukkan kapasitas sistem teknologi informasi dan komunikasi di daerah telah berkembang secara sistematis dan terarah.

Tabel 2.48 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	-	70	80	85	85
3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	-	-	-	-	68,51

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.4.4.17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Sukoharjo dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, yaitu peningkatan koperasi yang berkualitas dan peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha. Persentase koperasi yang berkualitas menunjukkan tren yang berfluktuasi, yaitu pada tahun 2020 sebesar 31,94%, kemudian menurun menjadi 23,44% pada tahun 2021. Selanjutnya terjadi pada tahun-tahun berikutnya, yaitu menjadi 26,1% pada tahun 2022 dan 27,13% pada tahun 2023, namun kembali menurun yang signifikan menjadi 14,45% pada tahun 2024. Kualitas koperasi diukur berdasarkan jumlah koperasi yang aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal satu kali dalam setahun dan menunjukkan peningkatan volume usaha serta aset. Penurunan tajam di tahun 2024 perlu menjadi perhatian serius karena menunjukkan kemungkinan adanya tantangan struktural dan administratif yang mempengaruhi kinerja kelembagaan koperasi.

Sementara itu, persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari hanya 2,47% pada tahun 2020 dan 2,83% pada tahun 2021, meningkat signifikan menjadi 10,71% pada tahun 2022, 15,44% pada tahun 2023, dan mencapai 16,69% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang mendorong pelaku usaha mikro untuk naik kelas menjadi wirausaha mandiri. Peningkatan ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan, kemudahan perizinan, serta akses

pembiayaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, capaian IKK urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencerminkan dinamika pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terus berkembang dalam tata kelola pemerintahan daerah.

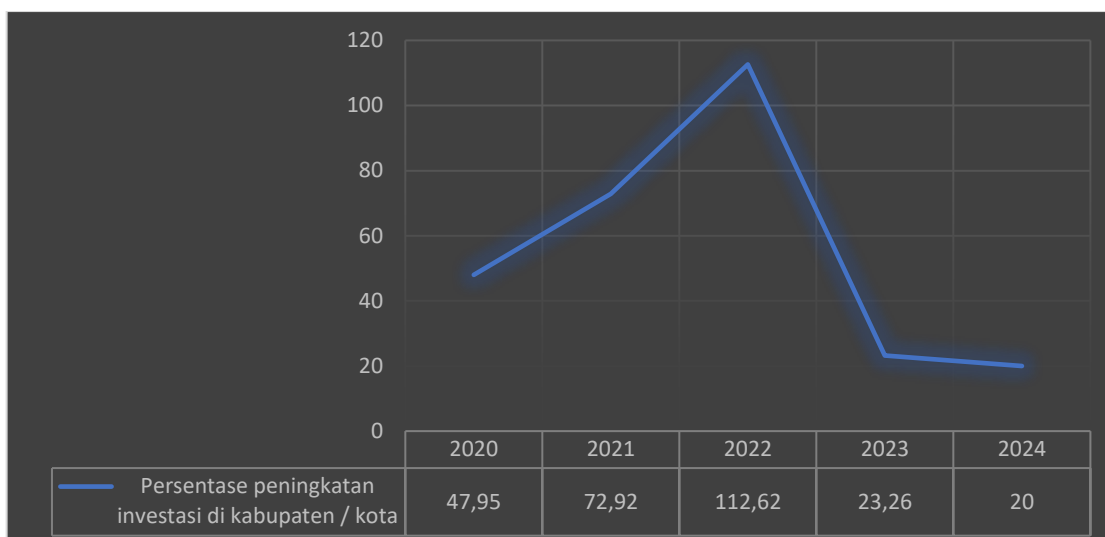
Tabel 2.49 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	31,94	23,44	26,1	27,13	14,45
2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	2,47	2,83	10,71	15,44	16,69

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

2.1.4.4.18. Penanaman Modal

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo tahun 2020–2024, menunjukkan dinamika investasi mengalami fluktuasi signifikan dari tahun ke tahun yang mencerminkan kompleksitas faktor yang memengaruhi iklim investasi daerah. Meskipun persentase peningkatan investasi di wilayah kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 berhasil mencapai sebesar 112,62%, capaian tersebut tidak berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Penurunan signifikan menjadi 23,26% pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 20% pada tahun 2024 menunjukkan adanya hambatan yang bersifat struktural maupun situasional. Kurangnya upaya promosi dan sosialisasi kepada calon investor menghambat optimalisasi peningkatan realisasi investasi. Selain itu persaingan kebijakan investasi antar daerah menjadi tantangan dalam mempertahankan daya saing Kabupaten Sukoharjo sebagai tujuan investasi. Di sisi lain, stabilitas ekonomi dan politik di daerah menjadi faktor pendorong yang penting dalam kepastian dan keterjaminan oleh investor. Namun demikian, faktor penghambat lainnya yang tak kalah penting, yaitu ketidakpastian regulasi lingkungan atau akses terhadap sumber daya alam menurunkan minat investor pada sektor-sektor strategis tertentu. Upaya peningkatan investasi di Kabupaten Sukoharjo memerlukan penguatan kebijakan afirmatif, reformasi regulasi yang ramah investasi, dan peningkatan kapasitas pelayanan perizinan serta promosi investasi secara proaktif dan berkelanjutan. Serta peningkatan kualitas data dan sistem pelaporan yang akurat sehingga pembangunan investasi berbasis bukti (*evidence-based policy*) dapat dijalankan secara optimal.



Sumber: DPMPSTP

Gambar 2.99 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

2.1.4.4.19. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam pembangunan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Sukoharjo, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) menunjukkan arah yang progresif namun tetap menghadapi tantangan struktural. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, yang didefinisikan sebagai proporsi pemuda usia 16–30 tahun (tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/SIAK) yang menjadi pelaku usaha dan terdaftar secara resmi di pemerintah daerah, menunjukkan kenaikan dari 20,05% pada 2021 menjadi 22,55% pada 2024. Kemajuan ini mencerminkan keberhasilan pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi lokal, meskipun tantangan terkait literasi bisnis dan akses terhadap permodalan masih perlu diatasi.

Selanjutnya, partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan juga menunjukkan peningkatan, dari 1,25% pada tahun 2021 menjadi 1,91% pada 2024. Indikator ini penting karena menggambarkan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial-politik, kebangsaan, dan pembangunan karakter. Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran berorganisasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial telah mulai menunjukkan hasil positif, meskipun tingkat partisipasi masih tergolong rendah sehingga perlu mengoptimalkan fasilitasi forum pemuda serta pendampingan kelembagaan.

Sementara itu, peningkatan prestasi olahraga, yang diukur melalui jumlah perolehan medali pada event olahraga tingkat nasional dan internasional oleh atlet yang dibina pemerintah daerah, menunjukkan lonjakan signifikan dari 27% pada 2021 menjadi 53% pada 2024. Capaian ini mencerminkan efektivitas pembinaan

dan pengembangan atlet, serta keberhasilan penyelenggaraan kompetisi-kompetisi lokal yang menjadi wahana seleksi dan pembinaan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kinerja IKK urusan Kepemudaan dan Olahraga menunjukkan tren yang positif, mencerminkan peran strategis Kepemudaan dan Olahraga dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.50 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	-	20,05	22,05	21,86	22,55
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	-	1,25	1,32	1,31	1,91
3. Peningkatan prestasi olahraga	%	-	27	54	37	53

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2.1.4.4.20. Statistik

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan statistik Kabupaten Sukoharjo tahun 2020–2024, menunjukkan kinerja perangkat daerah dalam memanfaatkan data statistik dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan daerah telah menunjukkan konsistensi dan keberhasilan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari capaian persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, masing-masing mencapai 100% secara konsisten selama lima tahun berturut-turut dari 2020 hingga 2024. Capaian 100% selama lima tahun ini menunjukkan bahwa seluruh OPD di Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan pendekatan berbasis data dalam merumuskan dan menilai efektivitas program-program pembangunan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang berbasis bukti dan hasil (*evidence-based policy*). Hal ini menjadi fondasi yang kuat dalam memastikan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah berlangsung secara rasional, terukur, dan akuntabel.

Tabel 2.51 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

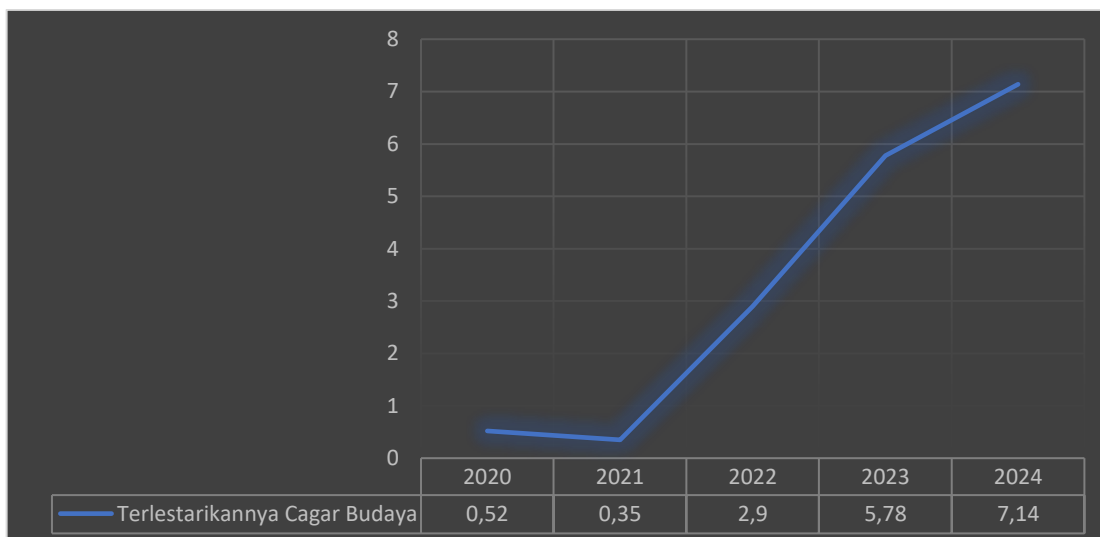
2.1.4.4.21. Persandian

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan persandian di Kabupaten Sukoharjo dalam periode 2020–2024, yaitu tingkat keamanan informasi pemerintah perlu menjadi perhatian. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga keamanan informasi melalui mekanisme evaluasi yang terstandar. Namun indikator ini selama tahun 2020 hingga 2024 belum terdapat pengukuran atau pencatatan resmi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Indikator ini sangat penting dalam era digitalisasi pemerintahan, di mana keamanan data menjadi prioritas utama. Hal ini menjadi tantangan dalam penerapan pengukuran indeks KAMI, baik dari sisi kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukung. Regulasi yang menjadi dasar pengukuran indikator ini adalah Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk memastikan sistem keamanannya sesuai standar nasional. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan penguatan dari segi kebijakan, teknis, dan sumber daya untuk mengimplementasikan pengukuran IKK ini secara efektif pada tahun-tahun mendatang, sebagai bagian dari upaya transformasi digital yang aman dan terpercaya di lingkungan pemerintahan daerah.

2.1.4.4.22. Kebudayaan

Perkembangan Indikator Kinerja kunci (IKK) pada urusan kebudayaan di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, khususnya dalam hal pelestarian cagar budaya. Persentase pelestarian cagar budaya mengalami peningkatan tajam, dari 0,52% pada tahun 2020 menjadi 7,14% pada tahun 2024. Kinerja ini mencerminkan adanya perhatian dan upaya serius dari pemerintah daerah dalam mempertahankan keberadaan cagar budaya sebagai bagian dari warisan sejarah dan identitas lokal. Kemajuan ini menandakan peningkatan

kapasitas kelembagaan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal, yang sekaligus dapat menjadi potensi daya tarik wisata budaya dan meningkatkan identitas kultural daerah di tengah arus modernisasi.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Gambar 2.100 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

2.1.4.4.23. Perpustakaan

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci (IKK) urusan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo tahun 2020–2024, terlihat adanya perkembangan signifikan dalam peningkatan literasi masyarakat yang ditunjukkan melalui dua indikator utama, yaitu nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan capaian sebesar 50 pada tahun 2021 yang kemudian meningkat menjadi 70,9 pada tahun 2024. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang juga menunjukkan peningkatan tajam dari 19,5 pada tahun 2021 menjadi 75,32 pada tahun 2024, mencerminkan keberhasilan Kabupaten Sukoharjo dalam membangun infrastruktur dan layanan perpustakaan yang mendukung peningkatan literasi. Capaian positif ini juga sejalan dengan implementasi regulasi seperti UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 24 Tahun 2014, dan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi yang memberikan dasar hukum dan arah strategis bagi pengembangan budaya baca dan literasi di daerah. Peningkatan yang konsisten ini menandakan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mendorong minat baca dan pembangunan literasi telah berjalan secara efektif dan

berkelanjutan, memperkuat posisi literasi sebagai fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Tabel 2.52 Perkembangan Indikator Kinerja kunci (IKK) Urusan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Indeks	-	50	51,4	52,32	70,90
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	19,5	65,51	67,85	75,32

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.4.4.24. Kearsipan

Perkembangan capaian indikator kinerja kunci (IKK) urusan Kearsipan di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 menunjukkan kemajuan signifikan dalam dua aspek penting: ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, serta tanggung jawab nasional sesuai amanat Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, serta keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat ketersediaan arsip meningkat tajam dari hanya sebesar 5,6% pada tahun 2020 menjadi 77,5% pada tahun 2024. Tren peningkatan juga ditunjukkan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip, yaitu dari hanya sebesar 2,5% pada tahun 2020 menjadi 43,33% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran serta penguatan tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, baik dari sisi teknis pengelolaan maupun pemenuhan regulasi nasional. Adapun regulasi utama yang menjadi dasar hukum pencapaian IKK urusan kearsipan, yaitu UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya Pasal 40 dan Pasal 59 yang secara tegas mengatur tentang pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari sistem administrasi negara.

Secara keseluruhan, peningkatan capaian IKK kearsipan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan sistem kearsipan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital, reformasi birokrasi, serta pelayanan publik yang berbasis data dan dokumentasi yang valid.

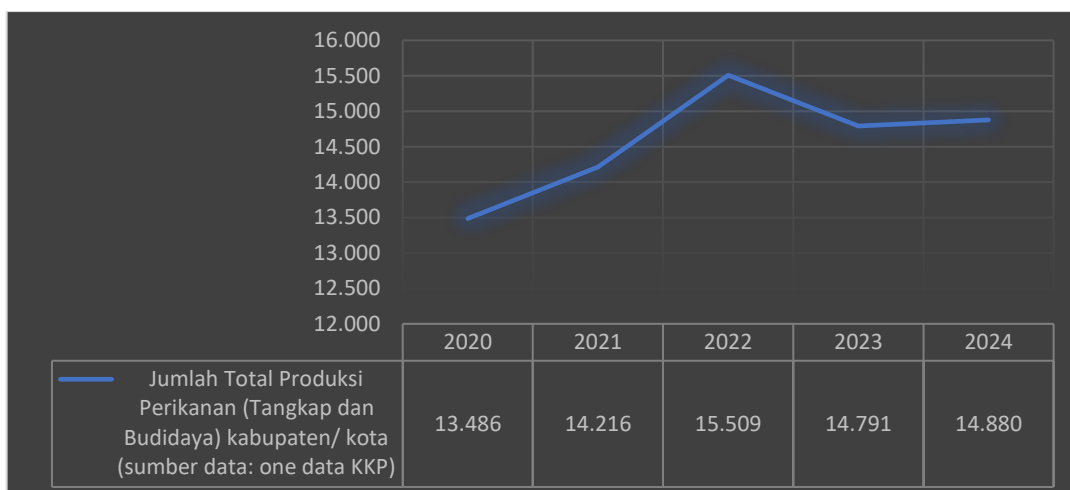
Tabel 2.53 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung-jawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	5,6	8,13	75	76,87	77,5
2. Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggung-jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	2,5	4,58	28	41,67	43,33

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.4.4.25. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan Indikator Kinerja kunci (IKK) dalam urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sukoharjo sepanjang periode 2020 hingga 2024 menggambarkan dinamika dalam pencapaian total produksi perikanan, baik dari subsektor tangkap maupun budidaya. Produksi perikanan menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2020 hingga 2022, yaitu dari 13.486 ton pada tahun 2020 meningkat menjadi 14.216 ton pada tahun 2021, dan mencapai sebesar 15.509 ton pada tahun 2022. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan menjadi 14.791 ton pada 2023, kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi 14.880 ton di tahun 2024. Pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan, baik dari sisi produksi maupun pembinaan pelaku usaha perikanan. Namun demikian, adanya fluktuasi seperti pada tahun 2023 menandakan perlunya perhatian lebih pada aspek dukungan infrastruktur, ketersediaan pakan, iklim usaha, serta stabilitas lingkungan produksi, baik untuk kegiatan tangkap maupun budidaya.



Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan

Gambar 2.101 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Ton)

2.1.4.4.26. Pariwisata

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sukoharjo dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan respons terhadap krisis dan pemulihan pasca-pandemi, serta efisiensi pengelolaan destinasi dan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan, menunjukkan fluktuasi yang sangat mencolok. Pada tahun 2020, sektor ini mengalami kontraksi drastis sebesar -87,52%, yang mengindikasikan dampak pandemi COVID-19 yang signifikan terhadap pergerakan wisatawan asing. Namun, terdapat pemulihan signifikan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 100%, meskipun selanjutnya stagnan dan kembali meningkat sedikit menjadi 2% pada tahun 2024. Di sisi lain, pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Sukoharjo menunjukkan tren positif yang lebih stabil, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024 mencapai 11,07% dari hanya 0,3% pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan pergeseran preferensi perjalanan domestik dan keberhasilan promosi wisata lokal.

Selain indikator kuantitas wisatawan, indikator kualitas layanan seperti tingkat hunian akomodasi turut menunjukkan tren peningkatan dari 0% pada tahun 2020 menjadi 2,76% pada tahun 2024. Hal ini menandakan pertumbuhan okupansi unit penginapan dan semakin meningkatnya daya tarik daerah sebagai destinasi. Dari sisi kontribusi ekonomi, sektor pariwisata memberikan kontribusi relatif stabil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, yakni dari 3,55% pada tahun 2020 ke 3,69% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa sektor ini mulai pulih dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah, meskipun peningkatannya tidak terlalu tajam.

Namun, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi yang lebih mencolok, yaitu pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 4,61%, menurun menjadi 2,97% pada 2021, lalu meningkat signifikan menjadi 7,66% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor ini sebagai penyumbang langsung PAD, melalui pajak dan retribusi yang berkaitan dengan pariwisata seperti hotel, restoran, hiburan, dan destinasi rekreasi, menjadi semakin vital dalam mendukung keuangan daerah.

Tabel 2.54 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-87,52	0	100	0,7	2
2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	0,3	1,63	1,79	1,81	11,07
3. Tingkat hunian akomodasi	%	0	0	2,59	2,68	2,76
4. Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	%	3,55	3,59	3,59	3,70	3,69
5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	4,61	2,97	5,69	7,64	7,66

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2.1.4.4.27. Pertanian

Dalam konteks urusan pertanian di Kabupaten Sukoharjo, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga produktivitas sekaligus memperkuat sistem kesehatan ternak. Produktivitas pertanian per hektar per tahun, bertujuan untuk mengukur tingkat produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan porang, menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, dimulai dari 68,71 Ku/Ha pada tahun 2020, menurun hingga 64,41 Ku/Ha pada tahun 2022, lalu mengalami peningkatan signifikan menjadi 70,59 Ku/Ha pada tahun 2024. Hal ini dapat mengindikasikan adanya dinamika dalam sistem produksi, baik dari segi teknologi budidaya, iklim, maupun dukungan infrastruktur dan kebijakan pertanian yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo.

Sementara itu, persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, yang menjadi refleksi dari kinerja sistem kesehatan hewan dan ketahanan peternakan terhadap ancaman wabah, menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022 tidak terdapat kasus yang dicatat, kemudian terjadi lonjakan negatif signifikan sebesar -95,45% pada tahun 2023, yang mungkin menandakan adanya peningkatan kasus karena telah dilakukan pencatatan/pendataan, sebelum akhirnya menurun signifikan sebesar 50% pada

tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam sistem surveilans dan respons cepat terhadap penyakit hewan menular, serta pentingnya implementasi kebijakan PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. Secara keseluruhan, pencapaian IKK urusan pertanian menggambarkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya menjaga produktivitas sekaligus memperkuat sistem kesehatan ternak sebagai bagian integral dari ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.55 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pertanian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ku/Ha	68,71	65,74	64,41	70,27	70,59
2. Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0	0	0	-95,45	50

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan

2.1.4.4.28. Perdagangan

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perdagangan di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian relatif stabil dan cukup positif. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) memperlihatkan konsistensi sebesar 100% setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Sukoharjo telah mematuhi peraturan perizinan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Permendag No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Keberhasilan ini tidak lepas dari sistem pelayanan perizinan yang telah terdigitalisasi dan tersentralisasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan didukung oleh intensifikasi pengawasan serta pembinaan.

Persentase kinerja realisasi pupuk bersubsidi menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Capaian tertinggi tercapai pada tahun 2022 dengan realisasi 100%, kemudian menurun menjadi 92,7% pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 95,78% di tahun 2024. Indikator ini merupakan proporsi realisasi penyaluran pupuk bersubsidi terhadap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yaitu dokumen yang disusun oleh kelompok tani dan disahkan pemerintah daerah. Kinerja ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan pupuk bersubsidi telah terpenuhi, meskipun masih terdapat tantangan dalam distribusi dan validasi RDKK. Dalam implementasinya, efektivitas realisasi ini sangat bergantung pada sistem pendataan yang akurat, koordinasi antar

pemangku kepentingan, serta ketersediaan logistik dan distribusi pupuk tepat waktu ke kelompok tani.

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah menunjukkan peningkatan, yaitu dari 79% pada 2020 menjadi 81,8% pada 2024. Indikator ini merupakan tolok ukur bagi efektivitas pengawasan dan penjaminan keakuratan alat ukur dalam transaksi perdagangan, yang bertujuan untuk melindungi konsumen serta menjamin kepastian hukum dalam jual beli. Ketentuan UTTP wajib tera yang beredar di masyarakat, yaitu Permendag No. 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal. Kinerja tera ulang yang konsisten meningkat mencerminkan efektivitas kegiatan pengawasan dan pelayanan tera yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, baik secara langsung di lapangan maupun melalui pelayanan terpadu. Namun demikian, capaian ini masih menyisakan ruang perbaikan dalam hal edukasi pedagang dan efisiensi pelayanan tera agar seluruh pelaku usaha dapat menjamin alat ukurnya sah dan valid. Secara keseluruhan, IKK urusan perdagangan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola perdagangan yang tertib hukum, transparan, dan melindungi kepentingan publik secara berkelanjutan.

Tabel 2.56 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100
2. Persentase kinerja realisasi pupuk	%	96	97,8	100	92,7	95,78
3. Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	79	80,3	79,6	81	81,8

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

2.1.4.4.29. Perindustrian

Perkembangan capaian indikator kinerja kunci (IKK) urusan Perindustrian di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam sejumlah aspek penting, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor industri sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKM), yaitu pada tahun 2020 mencapai 58,65%, mengalami peningkatan signifikan menjadi 84,85% pada tahun 2021, namun

kemudian menurun signifikan mencapai 21,31% pada tahun 2024. Penurunan tren ini dapat mencerminkan tantangan dalam mempertahankan momentum pertumbuhan IKM atau dampak dari perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi lokal.

Selanjutnya, persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 60,63%. Indikator ini mencerminkan sejauh mana daerah mampu merealisasikan target pembangunan industri sesuai lima sasaran pembangunan industri nasional, yang meliputi kontribusi sektor industri terhadap PDRB, ekspor industri, tenaga kerja industri, nilai investasi industri, dan sebaran industri berbasis tata ruang wilayah. Keberhasilan ini memerlukan perencanaan strategis yang matang dan konsistensi implementasi program kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Permenperin No. 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

Sementara itu, persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2023 sebesar 72,73% dan menurun menjadi 66,67% pada tahun 2024. Meskipun menurun, kinerja ini menunjukkan tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah terhadap ketentuan yang berlaku.

Dua indikator lainnya, yaitu persentase hasil pemantauan terhadap Izin Perluasan Industri (IPUI) dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) serta Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), tidak menunjukkan capaian karena bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini mencerminkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sektor perindustrian berdasarkan kerangka regulasi nasional.

Adapun IKK urusan perindustrian berikutnya, yaitu tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini, yang mencapai 76% pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 75% pada tahun 2024. Indeks ini dihitung berdasarkan dua komponen utama, yakni keterkinian informasi (berdasarkan waktu pelaporan 0–6 bulan dan 7–12 bulan) serta kelengkapan informasi (mencakup informasi produksi, bahan baku, energi, tenaga kerja, dan investasi). Ketersediaan data industri yang lengkap dan mutakhir merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan industri berbasis teknologi informasi seperti Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dan berperan penting dalam mendukung pengambilan kebijakan, promosi investasi, serta monitoring pembangunan industri secara berkelanjutan. Dengan demikian, indikator ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola data dalam urusan perindustrian. Secara keseluruhan, dinamika IKK urusan perindustrian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

Sukoharjo mencerminkan kombinasi antara pencapaian yang baik dan tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian.

Tabel 2.57 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perindustrian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	58,65	84,85	24,43	25,90	21,31
2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (RPIK)	%	-	-	-	-	60,63
3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	-	-	-	72,73	66,67
4. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	-	-	-	76	75

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.1.4.4.30. Transmigrasi

Pelayanan transmigrasi di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah target maupun realisasi pemberangkatan transmigran. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, capaian pemberangkatan transmigran masih berfluktuasi dengan tingkat realisasi yang relatif rendah. Pada tahun 2019, dari target 10 kepala keluarga (KK) hanya terealisasi 5 KK (50%), sementara pada tahun 2020 tidak dilaksanakan pemberangkatan sama sekali sebagai dampak dari antisipasi wabah pandemi *Covid-19*. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai kegiatan transmigrasi seperti penjajakan, pengecekan lokasi, pemberangkatan, dan pemodalan calon transmigran tidak dapat direalisasikan, sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.676/PKT.04.01/IV/2020 tentang Penundaan Transmigrasi Tahun 2020.

Pada tahun-tahun berikutnya, realisasi program transmigrasi di Sukoharjo mulai berjalan kembali meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Tahun 2021 dan 2022 masing-masing terealisasi sebesar 2 KK dari target 5 KK (40%), sedangkan tahun 2023 hanya 1 KK dari target 2 KK (50%), dan pada tahun 2024 tidak terlaksana karena kebijakan efisiensi anggaran daerah serta tidak diperolehnya kuota dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan program transmigrasi masih menghadapi tantangan, baik dari sisi kebijakan kuota, kesiapan calon transmigran, maupun keterbatasan dukungan pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta penyiapan calon transmigran yang lebih matang agar program transmigrasi dapat kembali berperan dalam pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.58 Perkembangan Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	10 KK	5 KK	50 %
2020	0 KK	0 KK	0 %
2021	5 KK	2 KK	20 %
2022	5 KK	2 KK	40 %
2023	2 KK	1 KK	50 %
2024	5 KK	0 KK	0 %

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.1.4.4.31. Sekretariat Daerah

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci (IKK) Unsur Pendukung Pemerintahan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo tahun 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi capaian kinerja yang signifikan. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya dan ditandatangani pada kuartal pertama, mengalami penurunan signifikan dari sebesar 14,68% pada tahun 2023 dan menjadi hanya 0,95% pada tahun 2024. Indikator ini bertujuan mengukur efisiensi pelaksanaan proyek infrastruktur besar yang seharusnya ditandatangani pada awal tahun agar proses pembangunan tidak tertunda dibandingkan nilai kontrak besar dalam 3 kuartal terhadap jumlah kontrak keseluruhan dalam setahun. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya keterlambatan perencanaan dan realisasi anggaran pembangunan infrastruktur.

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif, seperti *e-purchasing*, tender cepat, dan tender umum, menunjukkan tren meningkat signifikan dari 5,14% pada 2023 menjadi 76,76% pada 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sebagaimana didukung oleh regulasi Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kompetitifnya pelaksanaan pengadaan

sangat penting karena memastikan pemilihan penyedia yang kompeten dan efisien dari segi harga dan kualitas.

Selanjutnya, rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan menunjukkan pergeseran yang cukup dinamis, yaitu pada tahun 2021 mencapai sebesar 96,36%, namun turun signifikan menjadi 27,28% pada 2022, dan naik kembali menjadi 46,15% pada tahun 2024. Rasio yang naik mengindikasikan alokasi anggaran pemerintah daerah telah didukung dengan mekanisme pengadaan yang akuntabel dan sesuai aturan meningkat.

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta produk usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-Koperasi) pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah juga memperlihatkan peningkatan yang signifikan, yaitu angka negatif sebesar -30% pada tahun 2022 yang menunjukkan penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya, namun mengalami peningkatan menjadi 25,15% pada tahun 2023 dan mencapai 69,71% pada tahun 2024. Capaian ini selaras dengan kebijakan nasional dalam memperkuat perekonomian lokal melalui pemanfaatan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM.

Dari keseluruhan IKK Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, menunjukkan beberapa capaian yang masih fluktuatif, namun tren peningkatan pada indikator kompetisi pengadaan dan penggunaan produk lokal menjadi penanda positif adanya penguatan sistem pengadaan daerah yang lebih akuntabel dan inklusif. Hal ini juga mencerminkan respons pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional serta peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan barang/jasa, yang pada akhirnya akan berdampak pada efisiensi belanja daerah dan penguatan ekonomi lokal.

Tabel 2.59 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	-	-	-	14,68	0,95
2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	-	11,66	10,25	5,14	76,76
3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	-	96,36	27,28	33,16	46,15
4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	-	-	-30	25,15	69,71

Sumber: Sekretariat Daerah

Kinerja pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik. Capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus mengalami peningkatan dari 60,07 pada tahun 2020 menjadi 66,94 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Demikian pula, nilai komponen perencanaan dalam SAKIP meningkat dari 19,81 menjadi 21,9, menunjukkan perbaikan dalam kualitas dokumen perencanaan kinerja yang semakin terintegrasi dengan sasaran strategis daerah.

Selain itu, penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa daerah juga menunjukkan hasil yang positif. Indeks Tata Kelola Pengadaan meningkat signifikan dari 0 pada tahun 2020 menjadi 77,49 pada tahun 2024, menandakan adanya transformasi sistem pengadaan menuju praktik yang lebih efisien, transparan, dan berbasis digital. Hal ini sejalan dengan implementasi kebijakan *e-government* dan penerapan sistem informasi pengadaan yang mendukung efisiensi penggunaan anggaran. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pun mencatat perkembangan menggembirakan, dari 56,02 pada tahun 2020 menjadi 86,20 pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan semakin kuatnya budaya kerja profesional, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pengendalian internal dan inovasi birokrasi.

Sementara itu, dari sisi Indeks Pelayanan Publik, terjadi peningkatan dari 3,62 pada tahun 2020 menjadi 4,6 pada tahun 2024, yang menandakan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan responsif. Capaian ini didukung oleh peningkatan koordinasi antarperangkat daerah serta penerapan sistem pelayanan digital yang lebih terintegrasi. Pada aspek pendukung lainnya, kontribusi lembaga daerah terhadap perekonomian juga menunjukkan peningkatan kinerja, seperti rasio total dana pihak ketiga BUMD terhadap PDRB yang meningkat dari 55,82% pada tahun 2023 menjadi 99,62% pada tahun 2024, menunjukkan peran BUMD yang semakin signifikan dalam mendukung perekonomian daerah. Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Daerah memperlihatkan arah yang positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional menuju pencapaian visi RPJPD/ dukungan pencapaian Indikator Utama Pembangunan.

Tabel 2.60 Perkembangan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. SAKIP	Nilai	60,07	61,77	63,58	65,04	66,94
2. Komponen perencanaan dalam SAKIP	%	19,81	20,2	20,55	21,52	21,9
3. Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	0	25,29	57,9	71,85	77,49
4. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	56,02	55,24	59,59	72,92	86,2
5. Indeks Pelayanan Publik (angka)	Angka	NA	3,62	4,4	4,51	4,6
6. Indeks Reformasi Hukum (angka)	Angka	NA	NA	NA	55,82	99,62
7. Total Dana Pihak Ketiga BUMD/PDRB (%)	%	25,53	25,17	24,80	24,84	24,72
8. Total Kredit BUMD/PDRB (%)	%	52,81	60,37	64,49	69,68	22,45
9. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	3,32	4,38	3,65	4,02	3,65

Sumber: Sekretariat Daerah

2.1.4.4.32. Sekretariat DPRD

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung kelembagaan DPRD telah berjalan dengan baik dan konsisten selama periode 2020–2024. Seluruh indikator kinerja yang diukur melalui ketersediaan dokumen perencanaan tahunan DPRD dan integrasi program kerja DPRD dalam dokumen perencanaan daerah menunjukkan capaian “ada” setiap tahun, menandakan keberlanjutan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengawasan, pembentukan peraturan daerah, dan penganggaran. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara kelembagaan, DPRD Sukoharjo memiliki sistem dukungan administrasi dan perencanaan yang relatif stabil dan mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan fungsi kedewanan.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD dalam penyusunan dan integrasi dokumen perencanaan masih menghadapi sejumlah kendala baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, permasalahan utama yang diidentifikasi adalah masih kurang efektifnya koordinasi antaralat kelengkapan DPRD dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta keterbatasan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang perencanaan dan penganggaran. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya integrasi antara program kerja DPRD dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD, serta dokumen anggaran Sekretariat DPRD.

Dari sisi eksternal, dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan penganggaran turut memengaruhi pelaksanaan program kerja DPRD, khususnya dalam hal kesesuaian jadwal dan mekanisme penyusunan dokumen. Meski demikian, terdapat pula faktor pendorong berupa adanya kebijakan nasional dan daerah yang mendorong keterpaduan antara fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD dengan perencanaan pembangunan daerah. Ke depan, peningkatan koordinasi internal, penguatan kapasitas SDM perencana, serta penyesuaian terhadap regulasi terbaru perlu menjadi fokus agar Sekretariat DPRD dapat semakin optimal dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dan meningkatkan kualitas tata kelola lembaga perwakilan rakyat daerah.

Tabel 2.61 Perkembangan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada
2. Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada
3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Sekretariat DPRD

2.1.4.4.33. Perencanaan

Kondisi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kinerja yang relatif baik dan konsisten meningkat selama periode pelaksanaan RPJMD 2021–2026. Hal ini tercermin dari capaian persentase target kinerja tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) yang berada di atas 100% sejak tahun 2022. Setelah berada pada angka 80% di tahun awal pelaksanaan, capaian meningkat signifikan menjadi 118,46% pada tahun 2022, 112,06% pada tahun 2023, dan 108,04% pada tahun 2024. Kinerja ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah mampu melebihi target perencanaan, menandakan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang berorientasi hasil (*outcome oriented*).

Capaian positif ini juga sejalan dengan peningkatan persentase kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah terhadap target kinerja perangkat daerah, yang menunjukkan tingkat konsistensi pelaksanaan program di masing-masing OPD. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dari 109,06% di tahun 2022 menjadi 96,71%, kinerja tersebut masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan. Penurunan kecil ini dapat diartikan sebagai proses penyesuaian terhadap dinamika fiskal dan kebijakan nasional yang berdampak pada realokasi anggaran dan prioritas program.

Selain itu, tingkat keselarasan antara RKPD dan RPJMD juga menunjukkan konsistensi yang baik, dengan peningkatan dari 75% pada tahun 2020 menjadi 100% sejak tahun 2023 hingga 2024. Hal ini menandakan bahwa seluruh perangkat daerah telah menyusun dokumen perencanaan tahunan yang sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan dan sasaran RPJMD. Keselarasan tersebut mencerminkan kuatnya koordinasi perencanaan antara Bapperida dengan perangkat daerah, serta efektivitas mekanisme musrenbang dan forum perangkat daerah sebagai instrumen integrasi perencanaan. Dengan capaian ini, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo telah berjalan efektif, adaptif terhadap perubahan kebijakan, dan semakin berorientasi pada hasil pembangunan yang terukur.

Tabel 2.62 Perkembangan Pelayanan Unsur Penunjang Perencanaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase capaian target kinerja tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)	%	80	98,04	118,46	112,06	108,04
2. Persentase capaian kinerja tujuan dan sasaran PD terhadap target kinerja tujuan dan sasaran PD	%	84	92	109,06	106,34	96,71
3. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	75	90	95	100	100

Sumber: Bapperida

2.1.4.4.34. Keuangan

Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Unsur Penunjang Keuangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam aspek kredibilitas anggaran, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), manajemen aset, hingga efisiensi pengeluaran. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD menunjukkan penurunan signifikan dari 13,35% pada tahun 2020 menjadi hanya 1,17% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan akurasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja, dengan nilai deviasi yang semakin kecil mendekati target ideal, yang didasarkan pada formulasi rasio absolut antara nilai anggaran dan realisasi belanja. Demikian pula, deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD menunjukkan fluktuasi, namun relatif stabil pada kisaran 38–54% di sebagian besar tahun, mengindikasikan tantangan dalam merencanakan pendapatan daerah secara presisi.

Di sisi lain, manajemen aset daerah terlihat sangat baik dengan seluruh instrumen *asesment* (apakah ada daftar aset tetap, manual penyusunan daftar, proses inventarisasi tahunan, serta pencatatan nilai aset dalam laporan anggaran) telah terjawab “Ya” secara konsisten sejak 2020 hingga 2024, menunjukkan tata kelola aset yang telah terstandarisasi dan sesuai ketentuan dalam dokumen SIIPPD. Pada aspek pengelolaan kas (cash management), terdapat tren positif dengan penurunan rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD dari 15,98% di tahun 2020 menjadi 7,71% di tahun 2024. Indikator ini mencerminkan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahunan dan minimnya dana yang tidak terserap. Sementara itu, rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan berkisar stabil pada kisaran 15–18%, yang merepresentasikan komitmen daerah dalam menjaga efisiensi belanja pegawai non-prioritas. Rasio PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah relatif stabil di angka 23–25%, mencerminkan kapasitas pengumpulan pajak yang cukup baik, meskipun masih dapat ditingkatkan.

Indikator efisiensi lain yang penting adalah rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) terhadap total belanja APBD, yang meningkat dari 63,41% pada tahun 2020 menjadi 67,4% pada tahun 2024. Rasio ini menunjukkan efisiensi dalam alokasi anggaran di luar belanja transfer seperti bantuan sosial dan hibah. Terakhir, opini laporan keuangan oleh BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Sukoharjo selama lima tahun berturut-turut berada pada level WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), menegaskan bahwa aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan telah dijaga secara konsisten. Serta menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam implementasi Perpres No. 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,

sehingga pencapaian IKK urusan keuangan ini mencerminkan kinerja tata kelola fiskal yang semakin efektif, kredibel, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.63 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Unsur Penunjang Keuangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Budget Execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	13,35	7,03	3,79	1,23	1,17
2. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	41,34	53,99	38,35	46,09	42,39
3. Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya
4. Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	15,98	15,12	13,54	10,99	7,71
5. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	15,63	16,05	18,21	17,04	16,79
6. Rasio PAD	%	23,01	24,93	24,58	24,86	24,7
7. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	63,41	67,31	69,16	65,43	67,4
8. Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKPAD

2.1.4.4.35. Kepegawaian

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Unsur Penunjang Kepegawaian Kabupaten Sukoharjo pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika dalam kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Rasio pegawai berpendidikan tinggi terhadap pegawai berpendidikan menengah/dasar menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2020 (38,61%) ke tahun 2022 (80,90%), sebelum mengalami penurunan pada tahun 2023 (77,05%) dan tahun

2024 (76,28%). Meskipun menurun, hal ini mencerminkan adanya komitmen dalam peningkatan kapasitas intelektual ASN melalui pendidikan formal yang lebih tinggi.

Rasio pegawai fungsional terhadap total ASN (tanpa guru dan tenaga kesehatan), juga mengalami peningkatan dari 3,06% pada tahun 2020 menjadi sebesar 46,99% di tahun 2023, meskipun menurun menjadi 41,94% pada tahun 2024. Pegawai fungsional adalah pegawai yang telah dilantik ke dalam jabatan yang memiliki fungsi dan tugas spesifik berdasarkan kompetensi, menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai memprioritaskan penempatan ASN dalam jabatan-jabatan berbasis keterampilan teknis tertentu. Indikator ini penting karena mencerminkan tingkat profesionalisasi ASN di luar jabatan struktural.

Sementara itu, Rasio jabatan fungsional yang telah bersertifikat kompetensi, menunjukkan perkembangan yang lebih fluktuatif, yaitu pada tahun 2022 sebesar 15,79% ASN telah memiliki sertifikat kompetensi. Namun menurun drastis pada tahun 2023 menjadi 5,04%, sebelum meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 8,22%. Fluktuasi ini bisa mencerminkan tantangan dalam proses sertifikasi, baik dari sisi kesiapan individu ASN, kuota pelatihan, maupun dukungan kebijakan. Sertifikasi ini menjadi penting karena merupakan bentuk pengakuan atas kompetensi teknis ASN dalam menjalankan tugas spesifik sesuai jabatan fungsionalnya.

IKK urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan menunjukkan kondisi kuantitatif kepegawaian, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan kepegawaian daerah yang berorientasi pada profesionalisme, peningkatan kapasitas individu, serta optimalisasi ASN dalam jabatan yang relevan dengan keahliannya. Dengan demikian, capaian indikator-indikator tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur kinerja kepegawaian, melainkan juga refleksi atas efektivitas implementasi kebijakan nasional dalam konteks lokal Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.64 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Unsur Penunjang Kepegawaian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	38,61	38,45	80,90	77,05	76,28
2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	3,06	12	12,89	46,99	41,94
3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	15,79	5,04	8,22

Sumber: BKPSDM

2.1.4.4.36. Pendidikan dan Pelatihan

Kondisi kapasitas aparaturnya Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kebutuhan penguatan kompetensi yang konsisten dan merata di seluruh jenjang jabatan. Data pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan dalam lima tahun terakhir memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada Diklatpim Tingkat II dan III yang sempat mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu. Sebagai contoh, Diklatpim Tingkat II hanya diikuti 3 peserta pada 2020, menurun menjadi 2 peserta pada 2021, dan bahkan tidak terlaksana pada 2022 sebelum kembali meningkat pada 2023. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih terstruktur untuk memastikan kesinambungan pengembangan kompetensi pimpinan daerah.

Di sisi lain, pelaksanaan Diklatpim Tingkat III dan IV relatif lebih stabil namun masih menghadapi variasi jumlah peserta yang cukup tajam. Diklatpim Tingkat III, misalnya, meningkat dari 2 peserta pada 2020, melonjak menjadi 8 peserta pada 2021, kemudian naik kembali pada 2023 dan 2024. Untuk Diklatpim Tingkat IV, tren peningkatan terlihat pada 2022 dan 2023, masing-masing mencapai 32 dan 30 peserta, menunjukkan adanya kebutuhan besar untuk mempersiapkan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi kepemimpinan memadai. Pola ini mengindikasikan kebutuhan perencanaan yang terukur dalam pengembangan SDM aparaturnya agar penjenjangan karier lebih jelas dan sesuai standar kompetensi.

Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional juga memperlihatkan dinamika yang mencerminkan kebutuhan peningkatan kompetensi berbasis spesialisasi. Diklat Teknis Fungsional, misalnya, mengalami peningkatan yang signifikan dengan 214 peserta pada 2020 dan melonjak menjadi 238 peserta pada 2024, menunjukkan komitmen untuk memperkuat kemampuan teknis ASN agar selaras dengan tuntutan pelayanan publik. Sementara itu, Diklat Pra Jabatan Gol II dan III menunjukkan peningkatan pada tahun-tahun tertentu, terutama pada 2022, ketika peserta mencapai masing-masing 164 dan 251 orang. Secara keseluruhan, tren ini menegaskan perlunya strategi pengembangan kompetensi ASN yang lebih sistematis, adaptif, dan berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan umum di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.65 Perkembangan Pelayanan Unsur Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

No	Jenis Diklat	Nama Diklat	2020	2021	2022	2023	2024
A	Diklat Struktural						
1	Struktural	Diklatpim Tk II	3	2	0	2	-
2	Struktural	Diklatpim Tk III	2	8	5	30	30
3	Struktural	Diklatpim Tk IV	30	0	32	30	30
B	Diklat Fungsional						
4	Fungsional	Diklat Teknis Fungsional	214	30	2	192	238
5	Fungsional	Diklat Pra Jabatan Gol II	60	-	164	-	2
6	Fungsional	Diklat Pra Jabatan Gol III	352	-	251	1	2

Sumber: BKPSDM

2.1.4.4.37. Pengawasan

Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) unsur penunjang Pengawasan di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengawasan internal. IKK untuk mengukur efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, yakni tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tingkat Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2020 hingga 2024, kedua IKK secara konsisten menunjukkan capaian pada level 3. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah telah berada pada tahap yang cukup matang dan kapabel dalam pelaksanaan fungsi pengendalian dan audit internal. Secara konseptual, Maturitas SPIP bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian internal telah mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan. Evaluasi dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri yang menjadi dasar penetapan level SPIP.

Maturitas SPIP level 3 menandakan sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan baik dan didokumentasikan dalam laporan yang tertuang di aplikasi SIPP dan dokumen resmi lainnya. Sementara itu, kapabilitas APIP merefleksikan kemampuan satuan pengawasan internal untuk melaksanakan kegiatan pengawasan secara independen dan obyektif dengan mengedepankan kualitas serta efektivitas hasil pengawasan. Kapabilitas APIP level 3 mencerminkan bahwa institusi pengawasan telah menjalankan peran yang memadai dan memiliki proses pengawasan yang terdokumentasi dan dilaksanakan secara sistematis. Proses evaluasi dan penetapan tingkat kapabilitas APIP dilakukan juga oleh BPKP berdasarkan hasil penilaian mandiri dan konfirmasi melalui dokumen resmi yang dikirimkan oleh instansi terkait. IKK urusan pengawasan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah, serta menunjukkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengawasan internal demi mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tabel 2.66 Perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Unsur Penunjang Pengawasan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

IKK Outcome	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3
2. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Daerah

2.1.4.4.38. Kewilayahan

Kondisi pelayanan publik berbasis kewilayahan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan kualitas yang relatif merata antar kecamatan. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh kecamatan yang secara umum mengalami kenaikan selama periode 2020–2024. Pada awal periode, sebagian besar kecamatan masih berada pada kisaran nilai 75–85, namun pada tahun 2024 hampir seluruh kecamatan telah mencapai nilai di atas 85, yang mengindikasikan meningkatnya persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Peningkatan kinerja pelayanan kewilayahan tersebut terlihat cukup konsisten di hampir semua kecamatan, meskipun dengan laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Bendosari, dan Tawangsari mencatat nilai IKM tertinggi pada tahun 2024 dengan skor di atas 90, menunjukkan kinerja pelayanan publik yang sangat baik. Sementara itu, kecamatan lain seperti Weru, Bulu, Mojolaban, dan Baki juga menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan keberhasilan

upaya standardisasi pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan antarwilayah, terutama pada kecamatan yang mengalami fluktuasi nilai IKM pada tahun-tahun tertentu. Variasi ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan beban pelayanan, kapasitas sumber daya manusia, serta tingkat pemanfaatan teknologi pelayanan publik. Ke depan, diperlukan penguatan pembinaan dan pengawasan pelayanan di tingkat kecamatan, peningkatan digitalisasi layanan, serta penerapan inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat agar kualitas pelayanan kewilayahan di Kabupaten Sukoharjo semakin merata dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tabel 2.67 Perkembangan Pelayanan Umum Unsur Kewilayahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kecamatan Weru	76,46	78,40	86,52	86,79	89,02
2	Kecamatan Bulu	75,28	80,66	84,33	86,63	86,92
3	Kecamatan Tawangsari	81,16	84,75	88,33	88,80	89,14
4	Kecamatan Sukoharjo	87	85,10	87,55	88,22	91,26
5	Kecamatan Nguter	80	88,89	90,51	90,17	90,22
6	Kecamatan Bendosari	78	89,68	84,98	90,77	90,88
7	Kecamatan Polokarto	81,18	86,48	87,54	88,19	88,23
8	Kecamatan Mojolaban	76,96	80,03	87,25	87,39	88,45
9	Kecamatan Grogol	87	79,60	87,64	87,76	88,02
10	Kecamatan Baki	80	80,77	84,69	86,27	89,72
11	Kecamatan Gatak	85	81,95	89,08	85,14	85,75
12	Kecamatan Kartasura	82,61	81,95	85,30	87,08	83,70

Sumber: Sekretariat Daerah

2.1.4.4.39. Pemerintahan Umum

Kondisi penyelenggaraan unsur pemerintahan umum di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan dinamika sosial kemasyarakatan yang semakin berkembang dan beragam. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kurun waktu 2020–2024, baik ormas berbasis profesi, agama, maupun ormas umum. Jumlah ormas umum mengalami peningkatan signifikan dari 124 pada tahun 2020 menjadi 170 pada tahun 2024, sementara ormas berbasis profesi dan agama juga menunjukkan tren peningkatan. Perkembangan ini menggambarkan tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berorganisasi serta peran aktif warga dalam mendukung pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Selain dinamika organisasi kemasyarakatan, partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi juga menunjukkan capaian yang relatif baik. Pada tahun 2024, tingkat partisipasi warga dalam pemilihan umum tercatat sebesar 82 persen, yang mencerminkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Tingkat partisipasi ini menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sekaligus menunjukkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, dinamika sosial yang berkembang juga diikuti oleh tantangan dalam menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat. Data menunjukkan adanya kasus konflik bernuansa SARA yang berfluktuasi, dengan 19 kasus pada tahun 2022, menurun menjadi 6 kasus pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 19 kasus pada tahun 2024. Namun demikian, Indeks Kerukunan Umat Beragama menunjukkan tren peningkatan dari 70 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat potensi konflik sosial, upaya pembinaan, dialog lintas agama, dan penguatan moderasi beragama yang dilakukan pemerintah daerah dan unsur terkait telah memberikan dampak positif dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.68 Perkembangan Pelayanan Umum Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perkembangan Jumlah Ormas						
1.a	Ormas Berdasarkan Profesi	Ormas	10	10	16	16	22
1.b	Ormas Berdasarkan Agama	Ormas	21	21	21	22	24
1.c	Ormas Umum	Ormas	124	140	154	160	170
2	Partisipasi warga dalam pemilu	%	N/A	N/A	N/A	N/A	82
3	Jenis Kasus/Konflik bernuansa SARA	Kasus	N/A	N/A	19	6	19
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	N/A	70	75	78	80

Sumber: Badan Kesbangpol

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Mendasarkan pada Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, dijelaskan tentang Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Berikut gambaran mengenai kinerja Keuangan masa lalu Kabupaten Sukoharjo.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan merupakan salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, setelah operasional penggunaan anggaran langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu ciri *good governance* penyelenggaraan keuangan daerah adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Dalam penggunaan anggaran bukan hanya kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan

dengan ekonomis, efektif dan efisien, namun juga penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kinerja keuangan masa lalu dapat dilihat dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

2.2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam PP 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami perkembangan yang positif, yaitu meningkat dari sebesar Rp.2,04 Triliun pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp. 2,24 triliun pada tahun 2024. Secara rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 hingga tahun 2024 pada angka 1,02%. Dilihat dari rata-rata pertumbuhannya selama lima tahun terakhir, pendapatan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan dengan rata-rata sebesar 36,08%. Secara rinci realisasi dan pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut.

Tabel 2.69 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN DAERAH	2.040.394.761.328	2.119.633.370.538	2.014.818.262.391	2.160.890.181.591	2.241.420.563.371
1.1	Pendapatan Asli Daerah	469.540.567.890	528.354.094.902	495.282.321.890	537.102.489.624	553.602.937.171
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	235.186.691.560	234.425.731.615	286.451.988.069	322.205.759.612	325.763.944.615
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.773.376.084	18.364.680.507	19.616.594.010	24.160.662.224	61.113.222.225
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	33.757.900.228	34.782.214.740	39.098.713.731	39.448.230.309	42.298.309.636
1.1.4	Lain-lain PAD yang disahkan	183.822.600.018	240.781.468.040	150.115.026.080	151.287.837.479	124.427.460.695
1.2	Pendapatan Transfer	1.495.933.253.438	1.520.527.625.636	1.516.005.336.404	1.622.132.296.967	1.687.817.626.200
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.495.933.253.438	1.345.610.639.075	1.317.912.105.404	1.419.781.256.696	1.475.220.471.981
1.2.3	Transfer Antar Daerah	0	174.916.986.561	198.093.231.000	202.351.040.271	212.597.154.219
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	74.920.940.000	70.751.650.000	3.530.604.097	1.655.395.000	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	74.920.940.000	2.997.000.000	3.530.604.097	1.655.395.000	0
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0	67.754.650.000	0	0	0

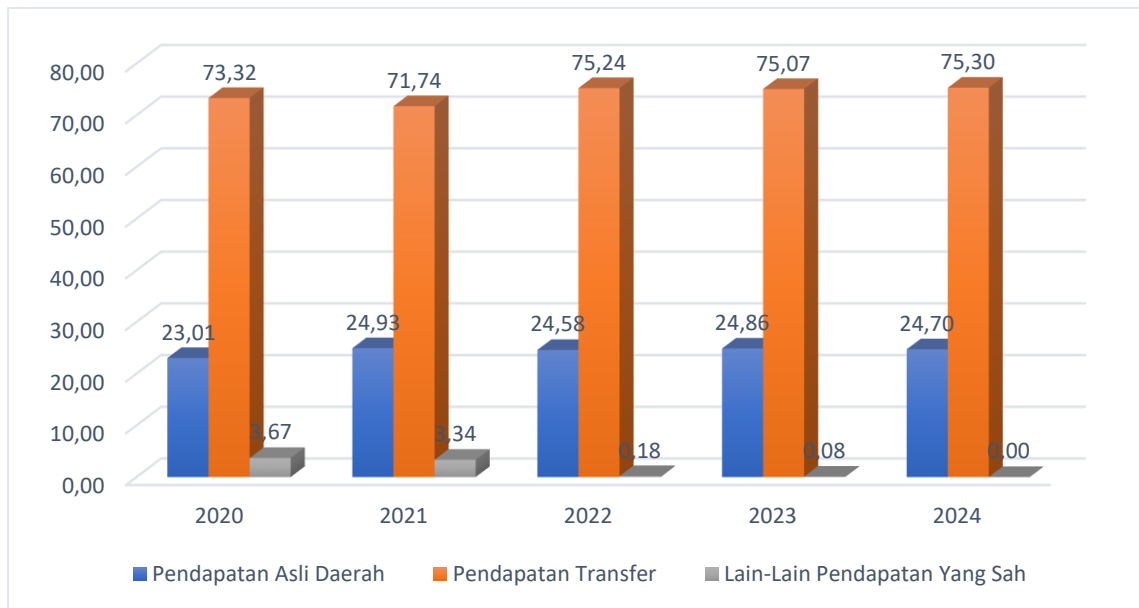
Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Tabel 2.70 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
1	Pendapatan Daerah	(4,82)	3,88	(4,94)	7,25	3,73	1,02
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2,35	12,53	(6,26)	8,44	3,07	4,03
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	(10,38)	(0,32)	22,19	12,48	1,10	5,02
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	(12,01)	9,49	6,82	23,16	152,95	36,08
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	49,06	3,03	12,41	0,89	7,22	14,52
1.1.4	Lain-lain PAD yang disahkan	18,89	30,99	(37,66)	0,78	(17,75)	(0,95)
1.2	Pendapatan Transfer	(7,23)	1,64	(0,30)	7,00	4,05	1,03
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	(7,23)	0 (10,05)	(2,06)	7,73	3,90	(1,54)
1.2.3	Transfer Antar Daerah	0	0	13,25	2,15	5,06	4,09
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3,41	(5,56)	(95,01)	(53,11)	(100,00)	(50,06)
1.3.1	Pendapatan Hibah	3,41	(96,00)	17,80	(53,11)	(100,00)	(45,58)
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Proporsi pendapatan Daerah di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan jenis pendapatan daerahnya, masih didominasi oleh Pendapatan Transfer hampir di atas angka 70% di tiap tahunnya, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil yaitu di bawah 25%. Dapat dikatakan bahwa kemandirian Kabupaten Sukoharjo masih tergolong Rendah, karena Pendapatan Daerahnya masih tergantung oleh dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah. Selengkapnya proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Gambar 2.102 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun 2020-2024 (%)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

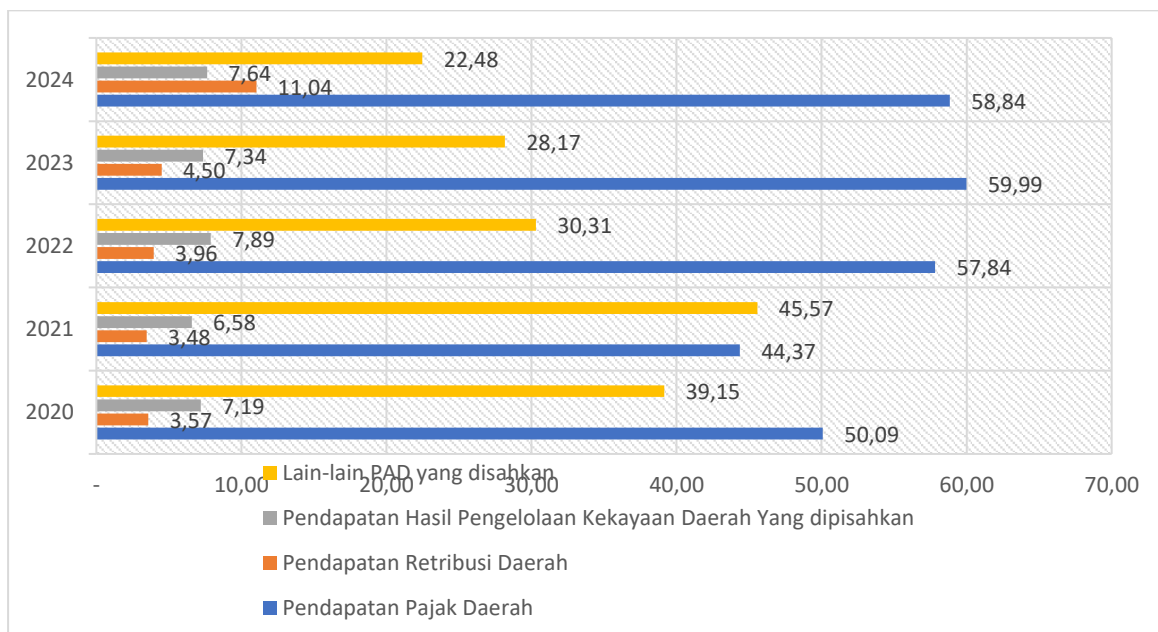
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo mengalami perkembangan yang cukup positif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pada tahun 2020 PAD Sukoharjo sebesar Rp. 469.540.567.890,00 meningkat menjadi sebesar Rp. 528.354.094.902,00 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 495.282.321.890,00, namun kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 553.602.937.171,00 hingga tahun 2024 seperti terlihat pada grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Gambar 2.103 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Rp)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah. Secara proporsi Pendapatan Pajak Daerah mendominasi dari pada Pendapatan Asli Daerah lainnya pada tahun 2024 sebesar 58,84%, kemudian disusul oleh Lain-lai PAD yang disahkan sebesar 22,48%, pendapatan retribusi sebesar 11,04% dan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 7,64%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

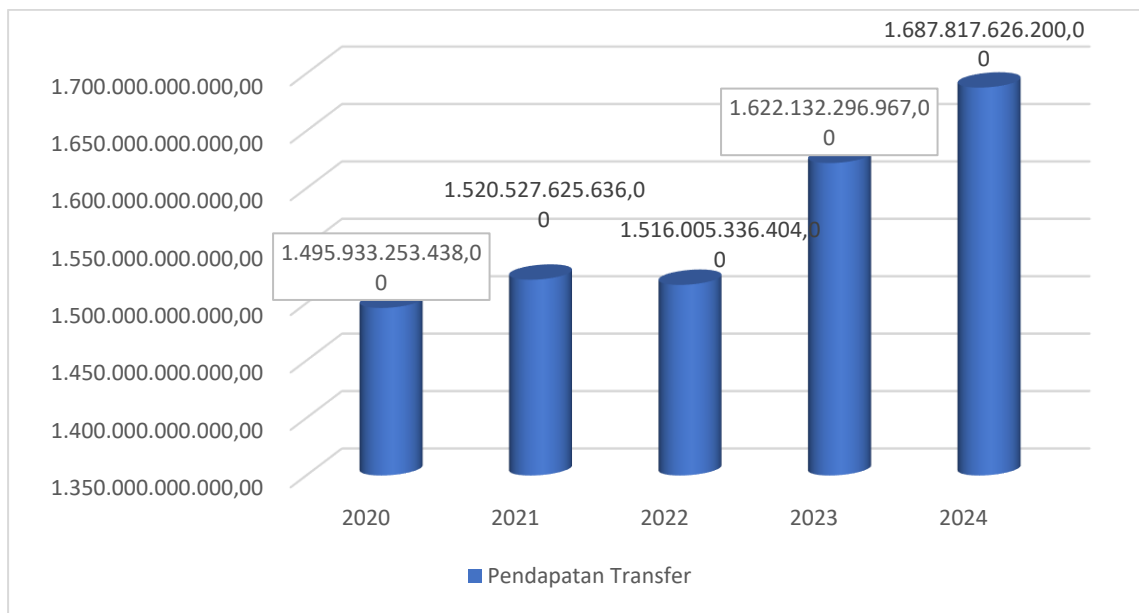


Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Gambar 2.104 Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Jenis PAD Tahun 2020-2024 (%)

b. Pendapatan Transfer

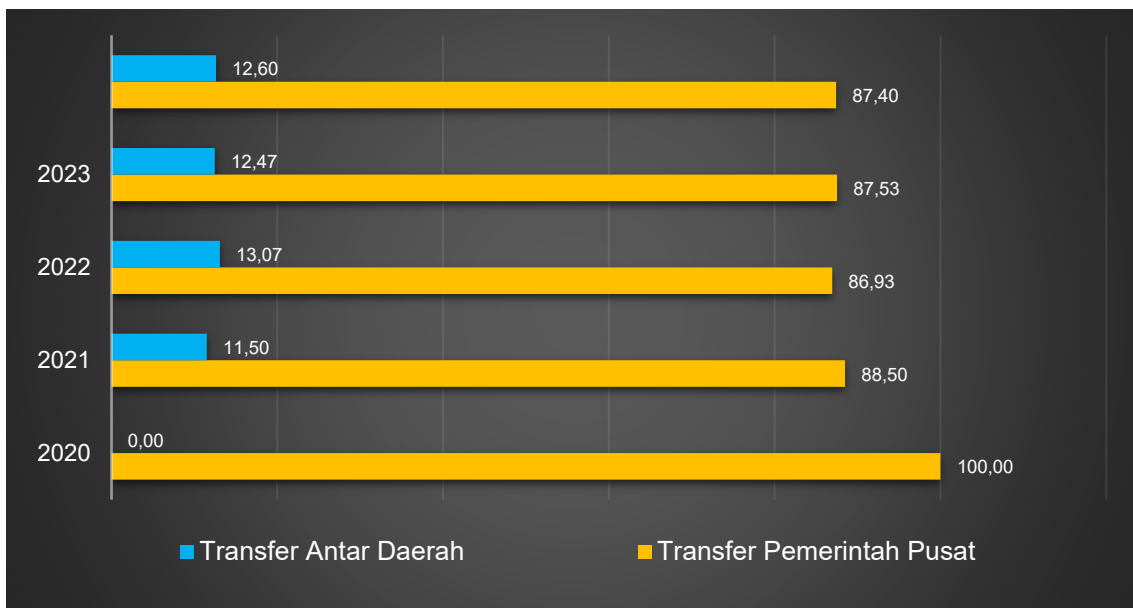
Pendapatan transfer di Kabupaten Sukoharjo mengalami perkembangan yang fluktuasi pada periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 namun cenderung meningkat, pada tahun 2021 pendapatan transfer sebesar Rp1.520.527.625.636,00 turun menjadi sebesar Rp1.516.005.336.404,00 pada tahun 2022, kemudian kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.687.817.626.200,00. Selengkapnya dapat dilihat grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Gambar 2.105 Pendapatan Transfer Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Pendapatan Transfer Kabupaten Sukoharjo berasal dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dan Transfer Antar Daerah. Secara proporsi pendapatan Transfer ini masih didominasi oleh Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) secara rata-rata di atas 85% selama lima tahun terakhir, sedangkan yang bersumber dari Transfer antar daerah di bawah 15%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Gambar 2.106 Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024 (%)

c. Pendapatan Lain-lain Yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan cukup signifikan pada periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, pada tahun 2020 pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp74.920.940.000,00 menurun menjadi sebesar Rp. 1.655.395.000,00 pada tahun 2023, dan di tahun 2024 Rp0, pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Sukoharjo ini bersumber dari Pendapatan Hibah. Selengkapnya dapat dilihat grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Gambar 2.107 Pendapatan lain-lain yang Sah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Rp)

2.2.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

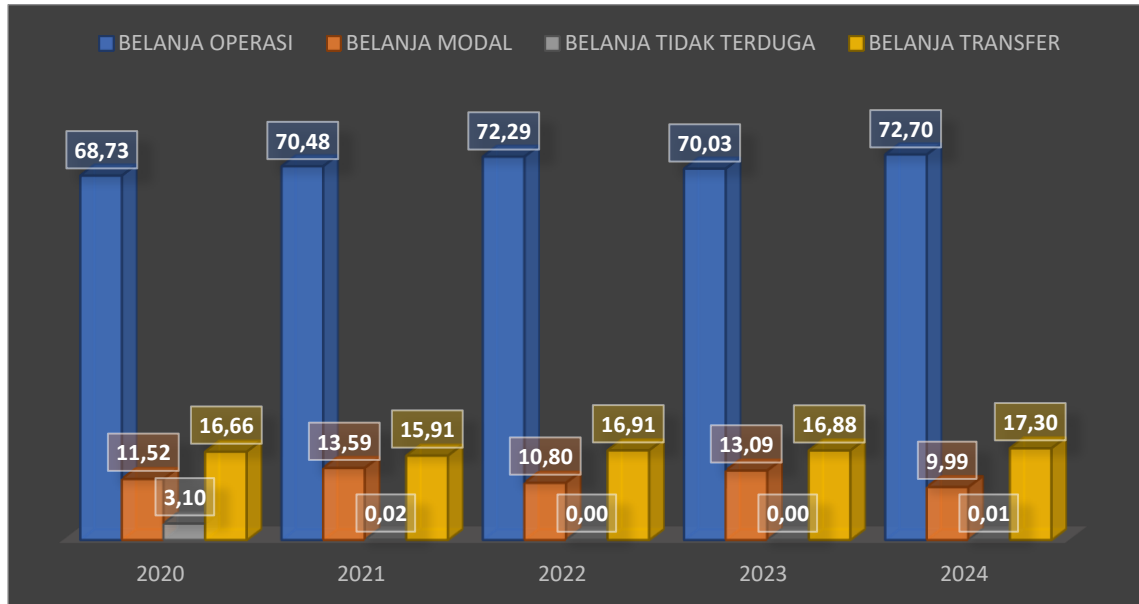
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang meningkat, dari sebesar Rp2,07 triliun pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp2,35 triliun pada tahun 2024. Rerata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020-2024 sebesar 2,23% dimana pertumbuhan paling besar yaitu belanja tidak terduga sebesar 75,51%. Komponen Belanja Daerah Sukoharjo meliputi belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Selengkapnya belanja daerah Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.71 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
2	Belanja Daerah	2.073.080.966.909	2.089.455.558.854	2.042.027.804.977	2.235.426.792.478	2.350.492.492.454	2,24
2.1	Belanja Operasi	1.424.856.112.004	1.472.694.410.236	1.476.279.908.868	1.565.378.114.470	1.709.135.538.150	3,76
2.1.1	Belanja Pegawai	838.548.756.755	830.659.026.029	824.229.915.680	827.872.956.836	911.823.685.254	0,74
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	490.000.647.249	575.798.113.836	588.004.129.525	634.798.969.751	672.311.280.676,00	6,57
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	624.509.495	704.788.792	580.074.513	632.535.549,00	1,40
2.1.5	Belanja Hibah	71.383.208.000	48.541.701.076	61.033.159.330	98.941.813.370	107.657.436.671,00	42,13
2.1.6	Bantuan Sosial	24.923.500.000	17.071.059.800	2.307.915.541	3.184.300.000	16.710.600.000,00	75,09
2.1.7	Bantuan Keuangan						
2.2	Belanja Modal	238.738.380.776	283.872.873.485	220.460.177.459	292.716.698.008	234.714.674.156	(4,47)
2.2.1	Belanja Tanah	56.852.726.056	57.390.168.126	14.666.775.507	2.612.595.129	0	48,82
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	78.305.886.096	66.022.615.391	43.732.158.456	71.363.929.617	57.057.488.669,00	(2,39)
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	32.626.619.100	68.356.082.100	57.712.175.084	114.282.812.756	68.487.478.404,00	17,73
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.354.103.100	88.714.959.040	98.571.813.860	99.142.721.002	104.768.565.884,00	(1,29)
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.599.046.424	3.389.048.828	5.777.254.552	5.314.639.504	4.401.141.199,00	(9,27)
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0
2.3	Belanja Tidak Terduga	64.214.838.529	405.163.533	53.657.650	40.890.000	250.222.728	75,51
2.4	Belanja Transfer	345.271.635.600	332.483.111.600	345.234.061.000	377.291.090.000	406.392.057.420	3,86
2.4.1	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	23.123.358.000	20.319.837.000	27.436.569.000	24.698.997.000	37.331.519.000	11,81
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	322.148.277.600	312.163.274.600	317.797.492.000	352.592.093.000	369.060.538.420	3,41
	Surplus/Defisit	(32.686.205.581)	30.177.811.684	(27.209.542.586)	(74.536.610.887)	(109.071.929.083)	(70,28)

Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Proporsi belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo paling mendominasi yaitu Belanja Operasi dengan rasio sebesar hampir rerata di atas 65%, kemudian disusul oleh Belanja Transfer dengan kontribusi rerata 15-17% lebih, disusul Belanja Modal yang masih cukup sedikit yaitu di bawah 15% dan belanja tidak terduga rerata di bawah 1%. Seperti terlihat pada grafik berikut.



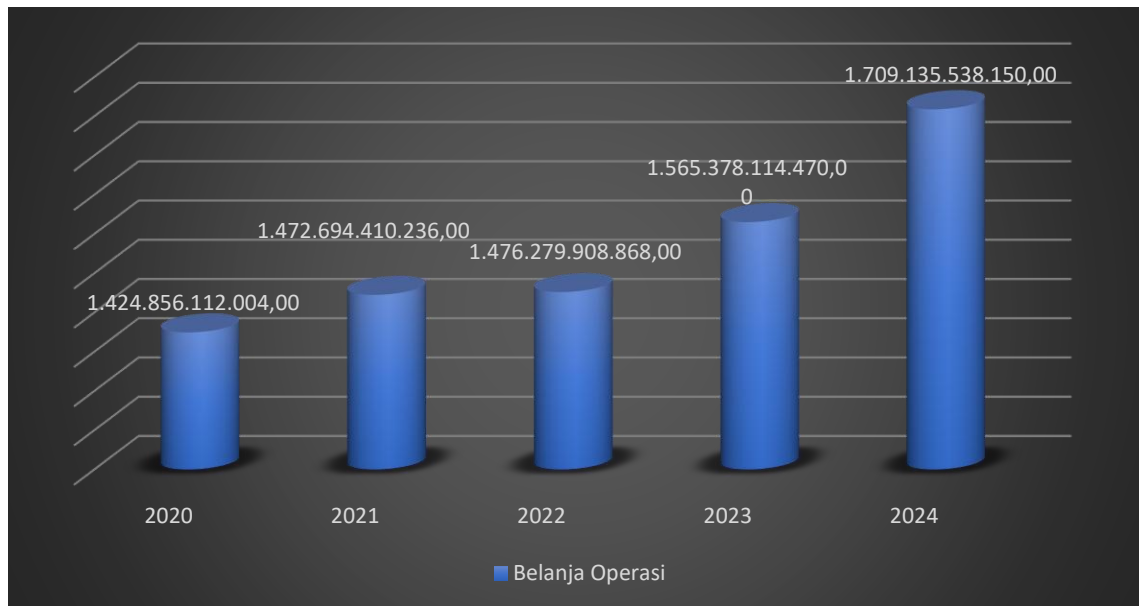
Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Gambar 2.108 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024

Kondisi belanja Kabupaten Sukoharjo berdasarkan jenis belanja selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

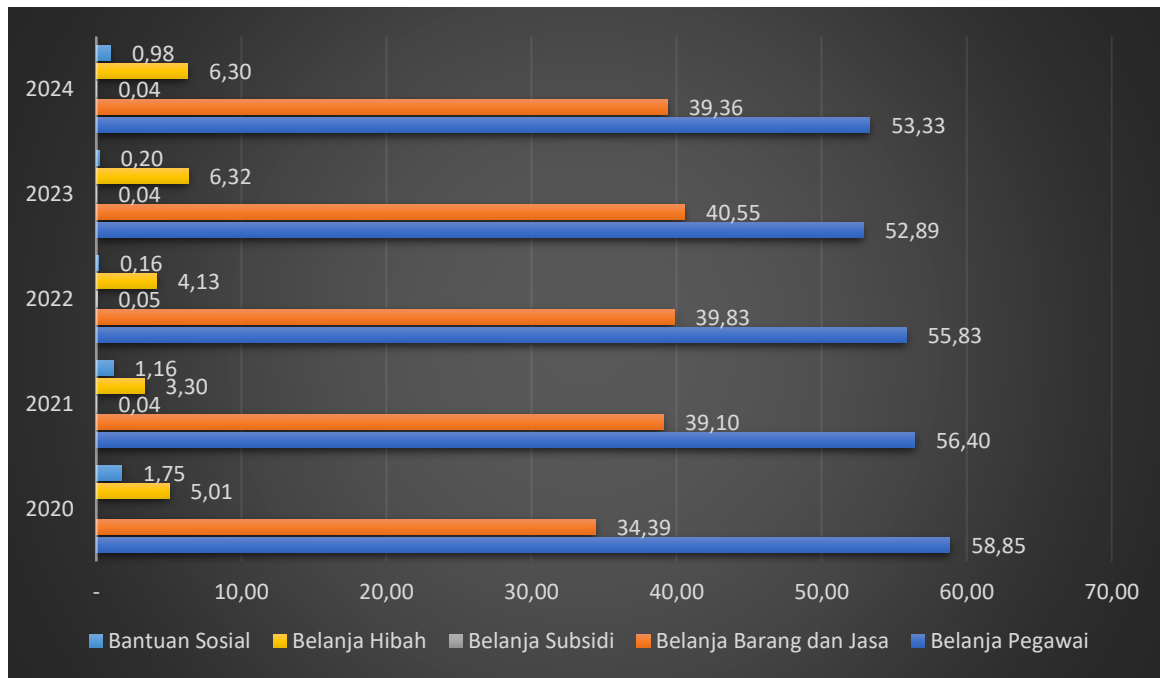
Belanja operasi Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2020 belanja operasi sebesar Rp1,42 triliun menjadi Rp1,70 triliun pada tahun 2024, artinya selama lima tahun tersebut peningkatan belanja operasi sebesar Rp283 miliar atau meningkat sebesar 3,74%. Seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Gambar 2.109 Belanja Operasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Belanja Operasi di Kabupaten Sukoharjo pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024 terdiri dari belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja operasi secara proporsi didominasi oleh belanja pegawai dengan persentase tiap tahunnya mengalami penurunan dari sebesar 58,85% di tahun 2020 turun menjadi sebesar 53,35% pada tahun 2024. Kemudian disusul oleh belanja Barang dan Jasa yang perkembangannya cenderung meningkat dari sebesar 34,39% di tahun 2020 menjadi 39,34% pada tahun 2024. Belanja Hibah fluktuasi dengan persentase sebesar 3-6% selama tahun 2020-2024. Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah cukup rendah rerata di bawah 2%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Gambar 2.110 Proporsi Belanja Operasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

b. Belanja Modal

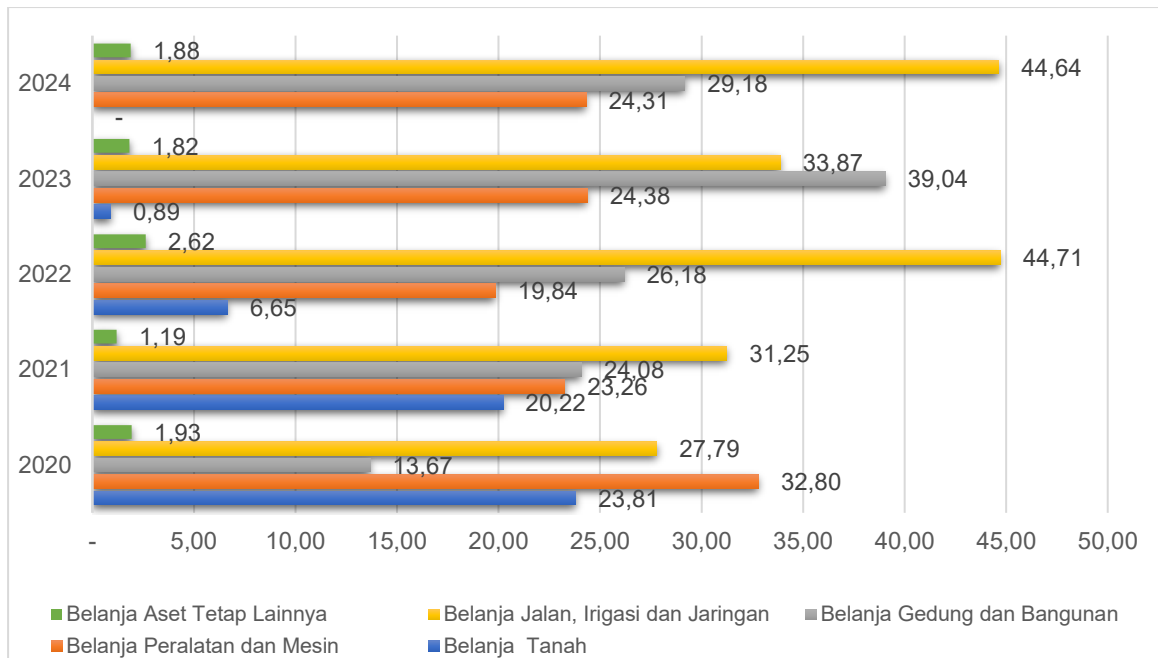
Belanja Modal Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu mengalami Fluktuasi, pada tahun 2020 belanja modal sebesar Rp238,73 miliar naik menjadi Rp292,71 miliar pada tahun 2023, terjadi penurunan di tahun 2024 menjadi sebesar Rp234,71 miliar. Dilihat perkembangannya selama periode 2020 hingga tahun 2024 perkembangan belanja modal cenderung menurun dengan rerata penurunan sebesar -4,47%. Seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Gambar 2.111 Belanja Modal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Rp)

Belanja Modal di Kabupaten Sukoharjo pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024 terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal secara proporsi mengalami perubahan dimana pada tahun 2020 proporsi terbesar merupakan belanja Peralatan dan Mesin dengan persentase 32,80% sedangkan pada tahun 2024 proporsi terbesar yaitu Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan sebesar 44,64% disusul Belanja Gedung sebesar 29,18%, Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 24,31 dan Belanja Aset tetap lainnya sebesar 1,88%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Gambar 2.112 Proporsi Belanja Modal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak terduga Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan, pada tahun 2020 belanja tidak terduga sebesar Rp64,21 miliar turun menjadi hanya sebesar Rp250,22 juta pada tahun 2024. Belanja tidak terduga ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Pada tahun 2020 belanja tidak terduga di Kabupaten Sukoharjo cukup besar, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 merupakan puncak dari pandemi Covid-19 sehingga hampir diseluruh daerah di Indonesia mengambil kebijakan peningkatan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi COVID 19.



Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Gambar 2.113 Belanja Tidak Terduga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 belanja transfer sebesar Rp345,27 miliar meningkat menjadi sebesar Rp406,39 miliar pada tahun 2024 atau naik sebesar Rp61,12 miliar dengan rerata pertumbuhan selama lima tahun sebesar 3,86%. Belanja Transfer Kabupaten Sukoharjo terdiri dari belanja Transfer/bagi hasil ke Desa dan Bantuan Keuangan.



Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Gambar 2.114 Belanja Transfer Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Rp)

2.2.1.3. Pembiayaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan Daerah dalam waktu tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang cenderung menurun, dari sebesar Rp420.458.357.396,00 pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar Rp299.638.209.105,00 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan Daerah selama tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar -7,31%, yang bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan rerata pertumbuhan sebesar -3,50% dan Pencairan Dana cadangan.

Kinerja pengeluaran pembiayaan Daerah dalam waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung menurun dari sebesar Rp29.318.552.621,00 pada tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp16.000.000.000,00 pada tahun 2024. Rerata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan Daerah sebesar 17,85%, dengan proporsi Pembentukan Dana Cadangan tumbuh sebesar 197,57%, dan Penyertaan Modal Daerah tumbuh sebesar -0,70%. Secara rinci Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 hingga tahun 2024 terlihat pada tabel berikut.



Tabel 2.72 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
3	Pembiayaan Daerah						
3.1	Penerimaan	420.458.357.396	358.453.599.194	361.683.602.117	335.172.798.126	299.638.209.105	(7,32)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	420.458.357.396	358.453.599.194	361.683.602.117	304.412.025.326	233.237.051.521,00	(3,50)
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	30.760.772.800	66.401.157.584	115,86
3.2	Pengeluaran	29.318.552.621	26.836.457.124	30.062.024.205	27.399.135.718	16.000.000.000	(17,85)
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	2.094.552.621	1.848.466.542	21.562.024.205	20.389.135.718	-	197,57
3.2.3	Penyertaan Modal Daerah	27.224.000.000	24.987.990.582	8.500.000.000	7.010.000.000	16.000.000.000	(0,70)
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	391.139.804.775	331.617.142.070	331.621.577.912	307.773.662.408	283.638.209.105	(6,04)
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	358.453.599.194	361.794.953.754	304.412.035.326	233.237.051.521	174.566.280.022	(15,64)

Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

2.2.1.4. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

a. Perkembangan Neraca Daerah

Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami perkembangan yang cenderung meningkat, pada tahun 2020 Aset yang dimiliki sejumlah Rp5.674.969.987.939,30 terjadi peningkatan secara jumlah hingga tahun 2024 menjadi sebesar Rp6.662.893.411.699,68. Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Properti Investasi, Dana Cadangan dan Aset Lainnya, di mana Aset Tetap mendominasi jumlah aset daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sukoharjo. Dari sisi kewajiban mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2020 sebesar Rp23.208.394.593,50 meningkat menjadi Rp41.424.816.501,83 pada tahun 2021, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp5.345.454.364,00. Kewajiban Daerah didominasi oleh Utang Jangka Pendek Lainnya.

Ekuitas pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami perkembangan yang semakin meningkat pada tahun 2020 ekuitas sebesar Rp5.647.261.503.416,30 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp6.657.547.957.335,68 hingga tahun 2024. Selengkapnya Neraca Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020-2024 sebagai berikut.



Tabel 2.73 Neraca Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aset					
1.1	Aset Lancar	420.181.017.196,73	461.226.134.848,98	374.993.047.151,56	288.337.308.251,89	221.424.063.639,23
1.1.1	Kas	358.623.692.613,00	361.695.528.715,00	304.417.049.540,00	233.237.051.521,00	173.834.847.953,00
1.1.2	Piutang	36.786.493.957,48	50.694.796.167,18	37.604.343.414,89	31.222.453.416,83	20.548.113.600,25
1.1.3	Persediaan	24.770.830.626,25	48.835.809.966,80	32.971.654.196,67	23.877.803.314,06	26.309.670.016,98
1.2	Investasi Jangka Panjang	320.737.951.724,29	348.371.523.790,20	354.152.888.372,24	359.801.785.397,07	375.801.785.397,07
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	0	0
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	320.737.951.724,29	348.371.523.790,20	354.152.888.372,24	359.801.785.397,07	375.801.785.397,07
1.3	Aset Tetap	4.863.395.534.480,79	5.421.230.275.921,55	5.628.924.230.834,93	5.784.279.124.527,73	6.046.244.674.267,73
1.3.1	Tanah	2.782.002.677.561,00	3.186.715.948.987,00	3.411.643.619.370,00	3.450.664.317.539,00	3.456.731.662.567,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	591.849.062.492,44	662.699.069.146,60	702.907.480.487,65	772.453.788.806,65	829.514.277.475,65
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.209.096.702.063,91	1.258.462.813.445,14	1.206.123.528.541,14	1.313.293.217.771,14	1.408.276.596.186,14
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.554.971.636.885,19	1.676.519.491.262,19	1.826.771.835.378,02	1.934.811.694.717,02	2.039.580.260.601,02
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	97.798.459.916,47	99.250.439.029,95	103.313.867.099,95	108.464.736.643,95	112.865.877.842,95
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.285.635.626,00	22.836.562.972,00	15.160.086.483,00	21.421.505.140,00	21.421.505.140,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.377.608.640.064,22	-1.485.254.048.921,33	-1.636.996.186.524,83	-1.816.830.136.090,03	-1.822.145.505.545,03
1.4	Properti Investasi	0,00	0,00	27.431.546.428,00	26.943.921.521,00	0,00
1.4.1	Tanah			6.067.345.028,00	6.067.345.028,00	
1.4.2	Gedung dan Bangunan			26.191.945.948,00	26.191.945.948,00	
1.4.3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi			-4.827.744.548,00	-5.315.369.455,00	
1.5	Dana Cadangan	53.362.303.919,00	55.210.770.461,00	76.772.794.666,00	66.401.157.584,00	0,00
1.5.1	Dana Cadangan	53.362.303.919,00	55.210.770.461,00	76.772.794.666,00	66.401.157.584,00	
1.6	Aset Lainnya	17.293.180.618,49	12.289.943.045,00	22.203.731.027,23	23.861.205.395,65	19.422.888.395,65
1.6.1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	755.137.500,00	755.137.500,00	1.444.925.646,52	1.444.925.646,52	0,00
1.6.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	21.453.113.187,00	17.190.006.194,00	19.657.235.885,00	22.229.630.168,00	22.229.630.168,00
1.6.3	Aset Tidak Berwujud	5.566.519.374,00	1.166.855.501,00	3.755.109.937,00	7.035.134.335,00	6.993.657.335,00
1.6.4	Aset Lain-lain	-4.915.070.068,51	-5.655.200.649,00	-5.101.297.496,29	-6.036.190.285,87	-6.036.190.285,87
1.6.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-5.566.519.374,00	-1.166.855.501,00	-2.230.134.487,00	-5.614.596.468,00	-5.573.119.468,00
1.6.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			4.677.891.542,00	4.802.302.000,00	-5.573.119.468,00
1.6.7	Treasury Deposit Facility (TDF)	755.137.500,00	755.137.500,00	1.444.925.646,52	1.444.925.646,52	363.985.000,00
Jumlah Aset Daerah		5.194.655.435.894,62	5.674.969.987.939,30	6.298.328.648.066,73	6.484.478.238.479,96	6.662.893.411.699,68
2	Kewajiban					
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	27.708.484.523,00	41.424.816.501,83	16.781.858.558,91	18.122.791.670,50	5.345.454.364,00
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	47.552.887,00	11.926.598,00	5.024.214,00	-	-
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	-



No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	
2.1.4	Pendapatan Dibayar Dimuka	5.234.260.229,00	5.111.093.084,83	4.499.957.788,91	5.487.871.791,50	5.345.454.364,00
2.1.5	Utang Beban	13.632.800.157,00	27.507.925.569,00	12.276.876.556,00	12.634.919.879,00	
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.793.871.250,00	8.793.871.250,00	-	-	
Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban		23.208.394.593,50	27.708.484.523,00	41.424.816.501,83	16.781.858.558,91	5.345.454.364,00
3	Ekuitas Dana	5.647.261.503.416,30	6.256.904.261.564,90	6.467.696.379.921,05	6.531.501.711.006,84	6.657.547.957.335,68
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas		5.674.969.987.939,30	5.194.655.435.894,62	5.674.969.987.939,30	6.298.329.078.066,73	6.662.893.411.699,68

Perkembangan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo secara rerata tahun 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 5,18%. Dimana penyumbang terbesar merupakan Aset Tetap. Sedangkan kondisi Aset lancar cenderung mengalami penurunan di mana rata-rata penurunan sejak tahun 2020 sebesar -14,09%, di mana aset lancar menurun cukup signifikan pada tahun 2023 hingga sebesar -23,21%. Kondisi Investasi Jangka panjang mengalami peningkatan dengan rerata meningkat selama lima tahun sebesar 5,44%, sedangkan untuk Aset Tetap meningkat rerata sebesar 6,92%, sedangkan Properti Investas dan Dana Cadangan juga mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -50% dan -13,38%, sedangkan Aset Lainnya mengalami peningkatan yang paling signifikan dengan rerata sebesar 9,84%.

Kewajiban Daerah mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -10,62%. Sementara Ekuitas Dana meningkat rerata sebesar 5,26%. Selengkapnya pertumbuhan Neraca Daerah sebagai berikut.

Tabel 2.74 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
1	Aset						
1.1	Aset Lancar	(15,19)	9,77	(18,70)	(23,11)	(23,21)	(14,09)
1.1.1	Kas	(14,80)	0,86	(15,84)	(23,38)	(25,47)	(15,73)
1.1.2	Piutang	(31,43)	37,81	(25,82)	(16,97)	(34,19)	(14,12)
1.1.3	Persediaan	18,53	97,15	(32,48)	(27,58)	10,18	13,16
1.2	Investasi Jangka Panjang	10,86	8,62	1,66	1,60	4,45	5,44
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	10,86	8,62	1,66	1,60	4,45	5,44
1.3	Aset Tetap	11,99	11,47	3,83	2,76	4,53	6,92
1.3.1	Tanah	20,52	14,55	7,06	1,14	0,18	5,73
1.3.2	Peralatan dan Mesin	13,70	11,97	6,07	9,89	7,39	8,83
1.3.3	Gedung dan Bangunan	2,34	4,08	(4,16)	8,89	7,23	4,01
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,57	7,82	8,96	5,91	5,41	7,03
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	4,95	1,48	4,09	4,99	4,06	3,66
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	47,31	332,05	(33,61)	41,30	-	84,93
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	11,33	7,81	10,22	10,99	0,29	7,33
1.4	Properti Investasi				(1,78)	(100,00)	(50,00)
1.4.1	Tanah					(100,00)	(50,00)
1.4.2	Gedung dan Bangunan				10,10	(100,00)	(44,95)
1.4.3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi					(100,00)	(50,89)
1.5	Dana Cadangan	4,09	3,46	39,05	(13,51)	(100,00)	(13,38)
1.5.1	Dana Cadangan	4,09	3,46	39,05	(13,51)	(100,00)	(13,38)
1.6	Aset Lainnya	8,62	(28,93)	80,67	7,46	(18,60)	9,84
1.6.1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah						
1.6.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	91,35	-		18,27
1.6.3	Aset Tidak Berwujud	12,43	(19,87)	14,35	13,09		4,00
1.6.4	Aset Lain-lain	(25,21)	(79,04)	221,81	87,35	(0,59)	40,86
1.6.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	25,52	15,06	(9,79)	18,33	-	9,82
1.6.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(25,21)	(79,04)	91,12	151,76	(0,74)	27,58
1.6.7	Treasury Deposit Facility (TDF)				2,66	(92,42)	(44,88)

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
	Jumlah Aset Daerah	9,25	10,98	2,96	1,00	1,73	5,18
2	Kewajiban						
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	19,39	49,50	(59,49)	7,99	(70,50)	(10,62)
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	(85,70)	(74,92)	(57,87)			(72,83)
2.1.2	Utang Bunga						
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
2.1.4	Pendapatan Dibayar Dimuka	(5,20)	(2,35)	(11,96)	21,95	(2,60)	(0,03)
2.1.5	Utang Beban	59,25	101,78	(55,37)	2,92	(100,00)	1,72
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya						
	Kewajiban Jangka Panjang						
	Jumlah Kewajiban	19,39	49,50	(59,49)	7,99	(70,50)	(10,62)
3	Ekuitas Dana	9,20	10,80	3,37	0,99	1,93	5,26
	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	9,25	10,98	2,96	1,00	1,73	5,18

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukoharjo

b. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas diukur dengan rasio lancar dengan kondisi di Kabupaten Sukoharjo cenderung menurun, pada tahun 2020 sebesar 15,16 turun pada tahun 2024 menjadi sebesar 13,14. Rasio cepat (*Rasio Quick*) juga mengalami penurunan dari sebesar 14,27 pada tahun 2020 turun menjadi 11,48 pada tahun 2024. Sedangkan cash rasio juga mengalami penurunan dari sebesar 12,94 pada tahun 2020 menjadi 9,95 pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75 Hasil Analisis Likuiditas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

No.	Rasio Likuiditas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar = Aset lancar dibagi kewajiban lancar.	15,16	11,13	22,35	15,91	13,14
2	Rasio cepat = (Aset Lancar dikurangi Persediaan) dibagi Kewajiban Lancar	14,27	9,96	20,38	14,59	11,48
3	Cash Ratio = (Kas + Setara Kas) dibagi Kewajiban Lancar	12,94	8,73	18,14	12,87	9,95

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukoharjo, diolah

c. Rasio Solvabilitas

Rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Sukoharjo, selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan dari sebesar 0,00491 menjadi sebesar 0,00268. Sedangkan Rasio Utang (Kewajiban) terhadap Aset selama kurun waktu 2020 hingga tahun 2024 juga mengalami penurunan dari sebesar 0,00488 menjadi sebesar 0,00267. Hasil analisis *Debt to Assets Ratio (DAR)* dan *Debt to Equity Ratio (DER)* menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa aset Daerah Kabupaten Sukoharjo mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten

Sukoharjo, dilihat dari kinerja neraca Daerah, sangat sehat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76 Analisis Rasio Solvabilitas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

No.	Rasio Solvabilitas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Utang (kewajiban) terhadap Ekuitas = Total Utang (kewajiban) dibagi Ekuitas (Modal)	0,00491	0,00662	0,00259	0,00277	0,00268
2	Rasio Utang (Kewajiban) terhadap Aset = Total Utang atau Kewajiban dibagi Total Aset	0,00488	0,00658	0,00259	0,00277	0,00267

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukoharjo, diolah

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Kebijakan ini juga bermuatan tentang proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Adapun secara terinci kebijakan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Sebagai berikut:

2.2.2.1. Analisis Fiskal Daerah

Beberapa analisis fiskal daerah untuk memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah diuraikan berikut ini.

a. Rasio Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapasitas fiskal ini digunakan oleh Kemenkeu RI untuk a) mempertimbangkan dalam pengusulan daerah penerima Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam Negeri dan/atau pinjaman luar negeri atau hibah luar Negeri dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal (*pre-financing*), b) penentuan besaran dana pendampingan oleh pemerintah daerah jika di persyaratkan, c) pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah, d) pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat, e) pertimbangan dalam pemberian persetujuan pembentukan dana abadi daerah, f) pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja kementerian/lembaga

dalam rangka sinergi pendanaan, g) pertimbangan dalam penyelarasan pemenuhan belanja wajib infrastruktur, dan h) penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkeu No. 65 th 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten/Kota dihitung melalui rumusan sebagai berikut:

$$KFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{[pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu]}{dengan penjabaran sebagai berikut:}$$

$$KFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{[PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DD + ADD + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]}{}$$

Keterangan:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$	= Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
PAD	= pendapatan asli daerah;
TKD	= transfer ke daerah;
PTAD	= pendapatan transfer antar daerah;
LLPS	= lain-lain pendapatan daerah yang sah;
SiLPA	= sisa lebih perhitungan anggaran;
OTSUS	= dana otonomi khusus;
DTI	= dana tambahan infrastruktur;
DD	= dana desa;
ADD	= alokasi dana desa;
BP	= belanja pegawai;
BBH	= belanja bagi hasil;
BB	= belanja bunga;
PUD	= pembiayaan utang daerah.

Sedangkan cara perhitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{Belanja Pegawai_{kabupaten/kota-i}}$$

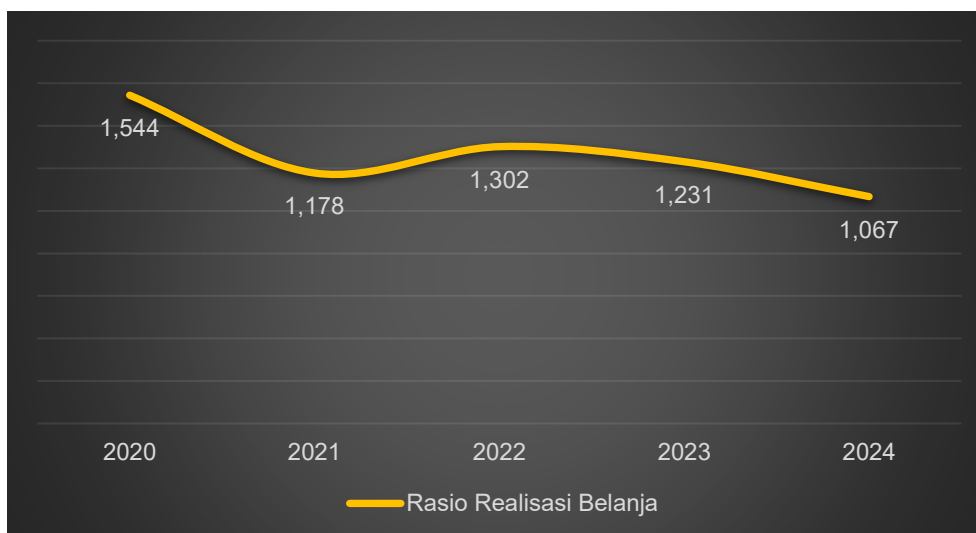
Keterangan:

$RKFD_{kabupaten/kota-i}$	= Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
$KFD_{kabupaten/kota-i}$	= Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
$Belanja Pegawai_{kabupaten/kota-i}$	= Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang RFKD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 0,905$	Sangat rendah
$0,905 \leq RKFD < 1,141$	Rendah
$1,141 \leq RKFD < 1,378$	Sedang
$1,378 \leq RKFD < 1,615$	Tinggi
$1,615 \leq RKFD$	Sangat Tinggi

Dari hasil perhitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sukoharjo pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024, terjadi penurunan Rasio kapasitas fiskal Daerah yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,544 (kategori Tinggi) turun menjadi sebesar 1,067 (kategori Rendah) pada tahun 2024. Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sukoharjo masih tergolong Rendah, artinya kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo juga masih rendah.



Sumber: Kemenkeu

Gambar 2.115 Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

b. Rasio/Derajat Kemandirian/Desentralisasi Fiskal Daerah (Kemandirian Keuangan Daerah)

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian daerah dihitung dari rasio PAD dengan total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar. Namun demikian, peningkatan rasio ini dapat bermakna negatif jika sumber PAD adalah pendapatan bunga yang menunjukkan besarnya dana pemerintah daerah yang disimpan di bank dan tidak dibelanjakan.

Rasio/Derajat Kemandirian/Desentralisasi Fiskal Daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat pada tahun 2020 dari 23,01% meningkat menjadi 24,93% pada tahun 2021, namun menurun hingga menjadi sebesar 24,70% pada tahun 2024. Dari data tersebut terlihat ada kecenderungan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.77 Derajat Kemandirian Keuangan Daerah

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	469.540.567.890	528.354.094.902	495.282.321.890	537.102.489.624	553.602.937.171
Total Pendapatan Daerah	2.040.394.761.328	2.119.633.370.538	2.014.818.262.391	2.160.890.181.591	2.241.420.563.371
Rasio/Derajat Kemandirian/Desentralisasi Fiskal Daerah	23,01	24,93	24,58	24,86	24,70

Sumber : Hasil Analisis

2.2.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Sukoharjo bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan Daerah. Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir (2020-2024) cenderung meningkat. Secara proporsi, belanja operasi mendapatkan porsi belanja paling besar, dikarenakan dalam struktur belanja Operasi terdapat belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dengan persentase yang relatif besar.

a. Proporsi Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja

Analisis realisasi belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan anggaran Belanja Daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase realisasi belanja sebesar 86,71% meningkat menjadi 95,39% pada tahun 2024. Secara keseluruhan perkembangan realisasi belanja terhadap anggaran belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo selama periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 rata-rata sebesar 91,40%, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78 Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran Belanja Daerah	2.390.898.929.000	2.356.534.359.600	2.247.989.969.902	2.343.181.628.063	2.463.984.324.894
Realisasi Belanja Daerah	2.073.080.966.909	2.089.455.558.854	2.042.027.804.977	2.235.426.792.478	2.350.492.292.454
Persentase	86,71	88,67	90,84	95,40	95,39

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2024

b. Proporsi Belanja Pegawai

Semakin membaiknya kualitas belanja daerah bisa juga dilihat dari semakin menurunnya porsi Belanja Pegawai, sehingga terjadi

peningkatan Belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dapat meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat mendorong roda perekonomian daerah dan kualitas pelayanan publik. Proporsi belanja pegawai Kabupaten Sukoharjo menunjukkan penurunan pada periode tahun 2020 hingga tahun 2023, dari sebesar 40,45% pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 37,03% pada tahun 2023 namun mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 38,79%. Perkembangan rasio belanja pegawai terhadap total belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79 Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	838.548.756.755	830.659.026.029	824.229.915.680	827.872.956.836	911.823.685.254
Realisasi Belanja Daerah	2.073.080.966.909	2.089.455.558.854	2.042.027.804.977	2.235.426.792.478	2.350.492.292.454
Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	40,45	39,75	40,36	37,03	38,79

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2025

c. Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya proporsi belanja modal terhadap belanja daerah keseluruhan. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Proporsi belanja modal Kabupaten Sukoharjo menunjukkan penurunan dari sebesar 11,3652 pada tahun 2020 menjadi sebesar 9,99% pada tahun 2024. Perkembangan rasio belanja modal terhadap total belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.80 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Modal	238.738.380.776	283.872.873.485	220.460.177.459	292.716.698.008	234.714.674.156
Realisasi Belanja Daerah	2.073.080.966.909	2.089.455.558.854	2.042.027.804.977	2.235.426.792.478	2.350.492.292.454
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	11,52	13,59	10,8	13,09	9,99

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2025

2.2.2.3. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali, atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya untuk menutup defisit anggaran Daerah. Analisis ini diperlukan untuk menentukan kebijakan pembiayaan daerah dimasa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan Daerah dengan melihat kebijakan pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Pada tahun 2020 Pembiayaan Daerah mengalami defisit sebesar Rp62 miliar, kemudian mengalami penurunan tahun 2022 defisit sebesar Rp57,27 miliar dan 2024 kembali mengalami defisit sebesar Rp125,07 miliar.

Tabel 2.81 Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sukoharjo 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pendapatan Daerah	2.040.394.761.328	2.119.633.370.538	2.014.818.262.391	2.160.890.181.591	2.241.420.563.371
Dikurangi:					
Belanja Daerah	2.073.080.966.909	2.089.455.558.854	2.042.027.804.977	2.235.426.792.478	2.350.492.492.454
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	29.318.552.621	26.836.457.124	30.062.024.205	27.399.135.718	16.000.000.000
Surplus/Defisit riil	-62.004.758.202	3.341.354.560	-57.271.566.791	-101.935.746.605	-125.071.929.083

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2025

Komposisi penutup defisiit Riil Anggaran Kabupaten Sukoharjo pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dan Pencairan Dana Cadangan. Selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2.82 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sukoharjo 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	420.458.357.396	358.453.599.194	361.683.602.117	304.412.025.326	233.237.051.521
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	30.760.772.800	66.401.157.584

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2025

Dengan analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur dengan melihat gambaran mengenai komposisi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada periode sebelumnya.

Realisasi SiLPA berasal dari beberapa komponen antara lain Pelampauan Penerimaan PAD, Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Transfer, Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya, Kewajiban

kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan. Secara rinci perhitungan analisa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Kabupaten Sukoharjo 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.83 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sukoharjo 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	420.458.357.396		358.453.599.194		420.458.357.396		358.453.599.194		233.237.051.521	
Pelampauan Penerimaan PAD	(126.817.017.890)	(30,16)	(107.725.996.302)	(30,05)	(126.817.017.890)	(30,16)	(107.725.996.302)	(30,05)	(66.967.341.528)	-28,71
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	18.405.445.602	4,38	10.762.236.364	3,00	18.405.445.602	4,38	10.762.236.364	3,00	15.574.515.780	6,68
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	15.681.382.960	3,73	399.150.000	0,11	15.681.382.960	3,73	399.150.000	0,11	0	0

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

2.2.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo selama periode waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai berikut.



Tabel 2.84 Proyeksi Pendapatan, Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2030 (Rupiah)

No	Uraian	Baseline 2025	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan Daerah	2.129.806.028.009	2.173.828.594.258	2.206.291.297.216	2.238.233.700.880	2.248.318.180.960	2.276.717.909.585
1.1	Pendapatan Asli Daerah	562.314.237.237	563.438.865.711	569.073.254.000	577.609.353.000	586.273.493.000	595.067.596.000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	355.012.627.000	356.012.627.000	359.012.627.000	363.012.627.000	367.512.627.000	371.262.627.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	113.938.009.694	113.939.000.000	114.573.000.000	114.973.000.000	116.137.000.000	116.337.000.000
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	42.607.000.568	42.730.238.711	43.230.627.000	44.366.726.000	44.866.866.000	47.750.969.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang disahkan	50.756.599.975	50.757.000.000	52.257.000.000	55.257.000.000	57.757.000.000	59.717.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.567.491.790.772	1.548.681.889.283	1.552.553.594.000	1.560.316.362.000	1.568.117.944.000	1.579.878.828.000
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.461.945.350.000	1.443.945.350.000	1.446.745.350.000	1.451.508.118.000	1.455.508.000.000	1.464.508.000.000
1.2.3	Transfer Antar Daerah	105.546.440.772	104.736.539.283	105.808.244.000	108.808.244.000	112.609.944.000	115.370.828.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0
2	Belanja Daerah	2.212.806.028.009	2.266.828.594.258	2.246.291.297.216	2.273.233.700.880	2.281.318.180.960	2.306.717.909.585
2.1	Belanja Operasi	1.714.144.721.791	1.737.307.697.706	1.705.626.848.000	1.716.363.544.000	1.712.942.599.000	1.721.446.424.000
2.1.1	Belanja Pegawai	963.076.119.041	963.952.931.983	946.952.933.000	948.300.000.000	948.800.000.000	949.550.000.000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	696.629.948.677	724.062.254.650	721.062.254.000	729.500.000.000	724.000.000.000	729.500.000.000
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	756.864.073	756.864.073	756.864.000	763.544.000	763.544.000	763.550.000
2.1.5	Belanja Hibah	46.336.790.000	40.600.947.000	31.600.947.000	32.000.000.000	33.000.000.000	33.500.000.000



No	Uraian	Baseline 2025	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
2.1.6	Bantuan Sosial	7.345.000.000	7.934.700.000	5.253.850.000	5.800.000.000	6.379.055.000	8.132.874.000
2.2	Belanja Modal	161.633.619.072	195.020.896.552	204.664.449.216	217.755.299.880	218.183.889.960	229.271.485.585
2.2.1	Belanja Tanah	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	46.806.135.762	45.706.135.762	44.761.000.000	46.706.000.000	46.506.000.000	48.506.000.000
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	38.132.881.000	42.112.319.216	42.112.300.000	42.241.314.000	43.441.314.000	45.684.000.000
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.299.080.500	104.006.919.764	114.650.628.216	125.307.985.880	124.426.743.960	131.271.485.585
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.340.521.810	3.140.521.810	3.140.521.000	3.500.000.000	3.809.832.000	3.810.000.000
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0
2.3	Belanja Tidak Terduga	6.971.212.146	3.500.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	330.056.475.000	331.000.000.000	332.000.000.000	335.114.857.000	345.191.692.000	351.000.000.000
2.4.1	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	27.206.562.000	28.000.000.000	28.250.000.000	28.000.694.000	32.000.694.000	33.500.694.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	302.849.913.000	303.000.000.000	303.750.000.000	307.114.163.000	313.190.998.000	317.499.306.000
	Surplus/Defisit	-83.000.000.000	-93.000.000.000	-40.000.000.000	-35.000.000.000	-33.000.000.000	-30.000.000.000
3	Pembiayaan Daerah						
3.1	Penerimaan	100.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	100.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah						
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						



No	Uraian	Baseline 2025	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
3.1.4	Pencairan Dana Cadangan						
3.2	Pengeluaran	17.000.000.000	7.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	17.000.000.000	20.000.000.000
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						
3.2.2	Pembentukan Dana Cadangan						
3.2.3	Penyertaan Modal Daerah	17.000.000.000	7.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	17.000.000.000	20.000.000.000
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah						
	Pembiayaan Netto	83.000.000.000	93.000.000.000	40.000.000.000	35.000.000.000	33.000.000.000	30.000.000.000
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0	0

2.2.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.85 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersifat Wajib dan Mengikat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Pegawai	963.076.119.041	963.952.931.983	946.952.933.000	948.300.000.000	948.800.000.000	949.550.000.000
Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
Belanja Bagi Hasil	27.206.562.000	28.000.000.000	28.250.000.000	28.000.694.000	32.000.694.000	33.500.694.000
Pengeluaran Pembiayaan	17.000.000.000	7.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	17.000.000.000	20.000.000.000
Jumlah	1.007.282.681.041	998.952.931.983	985.202.933.000	991.300.694.000	997.800.694.000	1.003.050.694.000

Dari perolehan data diatas dapat dihitung kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun kedepan 2025-2030. Dirinci pada tabel berikut.

Tabel 2.86 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Daerah	2.129.806.028.009	2.112.120.754.994	2.121.626.848.000	2.137.925.715.000	2.154.391.437.000	2.174.946.424.000
Total Penerimaan Pembiayaan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Total Pendapatan	2.229.806.028.009	2.212.120.754.994	2.171.626.848.000	2.187.925.715.000	2.204.391.437.000	2.224.946.424.000
Dikurangi						
Belanja Wajib mengikat	1.007.282.681.041	998.952.931.983	985.202.933.000	991.300.694.000	997.800.694.000	1.003.050.694.000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.222.523.346.968	1.213.167.823.011	1.186.423.915.000	1.196.625.021.000	1.206.590.743.000	1.221.895.730.000

Mendasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, terdapat amanat baru tentang Opsen PKB, BBnKB dan MBLB. Opsen adalah tambahan tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Perubahan ini mulai berlaku pada 5 Januari 2025, dengan tujuan mendukung Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Daerah. Kabupaten Sukoharjo pada awal tahun 2025 telah memasukan Opsen tersebut kedalam komponen PAD, sehingga diperoleh proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 26,68% tahun 2025 dan terus meningkat menjadi 27,36% pada tahun 2030. Kabupaten Sukoharjo perlu untuk terus mendorong terciptanya kemandirian perekonomian Daerah melalui peningkatan kinerja pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan Daerah perlu terus dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, kemampuan Masyarakat serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Selain komponen dari PAD, sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo masih sangat tergantung dengan Transfer Keuangan Daerah (TKD) terutama dari sumber Transfer Pemerintah Pusat. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memberikan dampak pada belanja kementerian/Lembaga termasuk yang dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo sesuai kewenangannya. Kriteria pembatasan dan efisiensi belanja pada tahun 2025 tersebut diperkirakan akan dilaksanakan pula pada pola belanja tahun berikutnya. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi proyeksi belanja pada tahun 2026-2030.

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2026-2030 utamanya diarahkan pada pencapaian tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu “Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat” yang juga mendukung implementasi Visi pembangunan jangka menengah daerah periode 2025-2029. Adapun struktur belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai ASN termasuk belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS, dengan memperhitungkan jumlah pegawai yang pension serta penyesuaian tambahan penghasilan Pegawaiii.

- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat. Belanja barang dan Jasa diantaranya digunakan untuk operasional pelayanan Rumah Sakit, penyelenggaraan Pendidikan, jaminan Kesehatan Masyarakat miskin dan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.
 - c. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman, namun Kabupaten Sukoharjo tidak memproyeksikan/memiliki Pokok Hutang pada tahun 2026-2030.
 - d. Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk dukungan pelaksanaan pilkada serentak, partai politik, instansi vertikal dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga.
 - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah

dan batas minimal kapitalisasi asset. Belanja Modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana termasuk yang sifatnya multi years (tahun jamak).

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan keperluan mendesak meliputi :

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah pada RPJMD 2025-2029 diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3.3. Alternatif Sumber Pembiayaan Lainnya

Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam era otonomi saat ini dituntut untuk dapat mandiri dalam menyelenggarakan keuangan daerahnya. Akan tetapi, daerah masih sering dihadapkan dengan adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu masih ada kesenjangan pendanaan yang dilihat dari tingginya kebutuhan pendanaan pembangunan dibandingkan dengan ketersediaan dana pembangunan dari pemerintah. Kebutuhan investasi penyediaan infrastruktur layanan publik daerah yang cukup besar untuk mendorong pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mengurangi ketimpangan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik masih sangat tinggi, namun ketersediaan APBD masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendanaannya, dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta alternatif pendanaan lain seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang sebaiknya dipenuhi dari sumber dana non pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dituntut untuk dapat berinovasi dalam pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif selain dari APBD dan APBN.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengamanatkan implementasi Sinergi Pendanaan serta Pembiayaan Utang Daerah melalui pemanfaatan pinjaman daerah, obligasi dan/atau sukuk daerah, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyediaan infrastruktur. Adapun beberapa skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan diantaranya adalah hibah, pinjaman daerah, KPBU, BUMD, BLUD, CSR, Filantropi, Ziswaf (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) dan skema pendanaan lainnya. Penggunaan pendanaan alternatif pada pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pendanaan daerah dalam mengelola pelayanan publik, meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur layanan publik di

daerah, serta meningkatkan potensi pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo disajikan berdasarkan 4 (empat) aspek pembangunan yang merupakan permasalahan pembangunan daerah dan sifatnya *crosscutting issues*, bukan permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berdasarkan 4 (empat) aspek pembangunan yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing serta aspek pelayanan umum.

2.3.1.1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

a. Penurunan kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya dampak perubahan iklim

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam hal adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan. Meskipun terjadi peningkatan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 63,59, nilai ini masih tergolong kategori sedang dan belum mencerminkan kondisi lingkungan yang aman dan berkelanjutan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 53,72 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 32,67, yang menandakan pencemaran air serta degradasi lahan yang tinggi akibat urbanisasi dan aktivitas industri.

Risiko bencana akibat perubahan iklim juga meningkat, tercermin dari Indeks Risiko Bencana (IRB) yang walau menurun dari 93,2 (2020) menjadi 64,18 (2024), masih dalam kategori sedang, serta Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang hanya mencapai 0,63. Lebih dari 70% wilayah Kabupaten Sukoharjo dikategorikan sangat rendah dalam fungsi pengaturan iklim, terutama di wilayah padat penduduk seperti Baki, Gatak, Grogol, dan Kartasura. Sementara itu, wilayah seperti Bulu dan sebagian Polokarto memiliki kawasan hijau penyerap karbon yang lebih baik.

Dari sisi mitigasi, tren penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) cukup signifikan, dari 4.600,07 Gg CO₂ eq (2019) menjadi 1.358,46 Gg CO₂ eq (2024), meskipun sektor pertanian dan kehutanan justru menunjukkan peningkatan proporsi emisi atau penurunan efektivitas sebagai penyerap karbon.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam penguatan indikator lingkungan, Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi permasalahan struktural dalam pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi. Permasalahan ini utamanya berasal dari lemahnya daya dukung ekologis wilayah permukiman, rendahnya tutupan vegetasi, serta belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Diperlukan intervensi berbasis ekoregion, penguatan kelembagaan, serta inovasi tata kelola untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan peningkatan ketahanan wilayah terhadap krisis iklim jangka panjang.

b. Volume timbunan sampah yang terus meningkat belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan

Permasalahan timbunan sampah yang tinggi dan belum optimalnya pengelolaan menjadi tantangan utama Kabupaten Sukoharjo dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selama periode 2020–2024, volume timbunan sampah menunjukkan tren fluktuatif dan terus meningkat, dengan dominasi berasal dari sektor rumah tangga dan non-industri. Pada tahun 2024, volume harian mencapai 2.291,18 m³/hari, dan secara tonase mencapai 133.804,91 ton/tahun, di mana hanya 79,07% yang berhasil dikelola melalui mekanisme pengurangan, daur ulang, dan proses akhir, sedangkan sisanya sekitar 20,93% belum terkelola secara optimal. Ketidakterkelolaan ini berdampak langsung pada penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah, peningkatan emisi gas rumah kaca, serta potensi banjir akibat saluran yang tersumbat.

Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mojorejo sudah hampir penuh dengan tingkat keterisian 99,5% dari kapasitas 900.000 m³, menandakan urgensi pembangunan TPA baru atau perluasan fasilitas yang ada. Meski telah tersedia 14 unit TPS 3R dan 244 bank sampah, kapasitasnya masih belum maksimal akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum terintegrasinya sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPS/TPA. Sementara itu, kontribusi ekonomi sirkular juga belum optimal karena proses konversi sampah menjadi produk bernilai tambah (kompos, pakan ternak, upcycle) hanya mencapai 16,42 ton/tahun, jauh di bawah potensi idealnya.

Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan sistem pengelolaan sampah yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas pengolahan, perluasan TPS 3R dan bank sampah di seluruh desa dan kelurahan, edukasi, insentif, serta perubahan perilaku masyarakat berbasis prinsip 3R. Tanpa pengelolaan yang memadai, lonjakan volume sampah akan terus mengancam kualitas lingkungan dan memperlambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.

c. Pengendalian alih fungsi lahan dan implementasi RTRW belum berjalan secara optimal

Pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo belum berjalan efektif dan belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mengakibatkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Lemahnya aspek pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo diperlukan advokasi penyelenggaraan penataan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo mengenai unsur pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu sanksi, perizinan, dan ketentuan insentif-disinsentif. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki kewenangan penuh terhadap arah pembangunan ke depan, sehingga pelaksanaan RTRW harus diwujudkan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia akan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan instrumen yang lebih spesifik, seperti zoning regulation. Zoning regulation yang merupakan instrumen pengendalian mikro. Zoning regulation dilegalkan melalui Peraturan maupun Keputusan Bupati sebelum dilakukan pembentukan dalam Peraturan Daerah. Selain itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi integrasi pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo (RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah) secara berkala, seiring dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya kebutuhan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

d. Ketahanan pangan masih belum optimal

Meskipun Kabupaten Sukoharjo mencatat capaian positif dalam peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari 88,76 pada tahun 2020 menjadi 90,93 pada tahun 2024, namun ketahanan pangan daerah belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) yang berada pada angka 8,05% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi energi pangan minimum, yang dapat berdampak pada kualitas kesehatan dan produktivitas sumber daya manusia. Masalah ini diperparah oleh distribusi pangan yang belum merata, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Diversifikasi pangan juga belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, sehingga ketergantungan pada komoditas pokok seperti beras masih tinggi, sementara akses terhadap sumber pangan bergizi dan berprotein belum merata. Selain itu, daya beli masyarakat terhadap pangan sehat masih rendah, yang menunjukkan bahwa aspek keterjangkauan

ekonomi menjadi kendala nyata dalam upaya pemenuhan gizi seimbang. Tantangan lain yang turut memengaruhi ketahanan pangan adalah dinamika alih fungsi lahan pertanian, konversi lahan menjadi permukiman atau industri, serta risiko bencana iklim dan cuaca ekstrem yang berdampak terhadap fluktuasi produksi pangan, seperti yang terlihat dari penurunan produksi padi dari 399.793 ton pada tahun 2023 menjadi 340.997 ton pada 2024, dan penurunan produksi jagung dari 21.964 ton (2023) menjadi 18.494 ton (2024). Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi intervensi yang lebih holistik, baik dari aspek peningkatan produksi, penguatan distribusi, maupun pengembangan sistem logistik pangan yang adaptif dan inklusif. Dengan demikian, meskipun tren ketahanan pangan menunjukkan arah yang membaik, masih dibutuhkan kebijakan strategis dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pangan yang cukup, bergizi, dan aman secara berkelanjutan.

e. Belum seimbangnya struktur demografi dengan upaya pemenuhan kebutuhan sosial dasar secara merata dan berkelanjutan

Permasalahan ketidakseimbangan struktur demografi dan pelayanan sosial dasar di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan data tahun 2024, penduduk usia produktif (15–64 tahun) mendominasi struktur demografi sebesar 69,63%, menandakan potensi bonus demografi yang signifikan. Namun, potensi ini perlu diiringi dengan kesiapan daerah dalam menyediakan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan layanan pendidikan serta pembinaan karakter yang memadai bagi generasi muda. Rasio ketergantungan penduduk non-produktif (usia 0–14 dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif mencapai 43,61%, menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif harus menanggung sekitar 43 orang usia non-produktif. Hal ini menandakan beban tanggungan yang cukup besar dan potensi tekanan terhadap kapasitas pelayanan sosial dasar, terutama apabila tidak ditunjang oleh kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang tanggap dan adaptif. Di sisi lain, proporsi penduduk lanjut usia (lansia) terus meningkat dari 8,17% pada tahun 2020 menjadi 9,44% pada tahun 2024, memperkuat tren menuju struktur penduduk menua (*ageing population*). Fenomena ini perlu direspon oleh sistem layanan kesehatan dan sosial yang memadai, seperti rumah ramah lansia, Posyandu Lansia aktif di setiap wilayah, maupun ketersediaan tenaga kesehatan spesialis geriatri. Ketimpangan ini diperparah oleh persebaran penduduk yang belum merata, dimana kepadatan tertinggi di Kecamatan Kartasura (5.361 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Bulu (794 jiwa/km²), serta laju pertumbuhan penduduk yang moderat sebesar 0,96% per tahun. Oleh karena itu, meskipun struktur demografi saat ini relatif stabil dan dapat dikatakan menguntungkan, namun tanpa didukung oleh peningkatan

kualitas pelayanan dasar yang adaptif dan sistem perlindungan sosial yang inklusif, potensi bonus demografi dapat berubah menjadi beban pembangunan. Strategi antisipatif diperlukan untuk memastikan kualitas hidup penduduk usia produktif tetap produktif dan penduduk lansia tetap berdaya serta terlindungi, demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo..

2.3.1.2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kondisi perekonomian daerah belum menunjukkan stabilitas yang memadai

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Sukoharjo yang ditunjukkan oleh ketergantungan pada sektor tertentu, serta ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Meskipun Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang cukup signifikan pascapandemi COVID-19, namun kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan stabilitas dan keberlanjutan struktur ekonomi daerah. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 4,97%, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (4,95%) dan nasional (4,93%). Capaian ini menunjukkan potensi pertumbuhan, namun masih dibayangi oleh ketergantungan tinggi terhadap sektor industri pengolahan (38,15% dari total PDRB) serta sektor perdagangan besar dan eceran (17,22%). Keterbatasan kontribusi dari sektor-sektor potensial lain seperti pertanian dalam arti luas termasuk perikanan, serta jasa pendidikan, mencerminkan struktur ekonomi yang belum inklusif dan masih rentan terhadap fluktuasi eksternal maupun disrupsi rantai pasok global.

Distribusi hasil pembangunan dan kesejahteraan juga menunjukkan ketimpangan yang cukup nyata. Rasio Gini Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 tercatat sebesar 0,390, naik dari tahun sebelumnya (0,368) dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (0,367) maupun nasional (0,379). Ini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih tinggi. Ketimpangan ini juga diperkuat oleh data distribusi pengeluaran penduduk menurut kriteria Bank Dunia untuk 40% kelompok berpenghasilan rendah, yang menunjukkan angka 17,50% pada tahun 2024. Angka ini tidak hanya lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (18,90%), tetapi juga menunjukkan penurunan tajam dari tahun sebelumnya, mencerminkan berkurangnya daya beli atau akses kelompok miskin terhadap konsumsi. Jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Subosukawonosraten, Sukoharjo menempati posisi yang relatif rendah, berada di bawah Boyolali (20,55%), Sragen (21,12%), maupun Surakarta (17,85%).

Dari sisi kapasitas produksi dan daya serap tenaga kerja, meskipun PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 mencapai Rp53,08 juta menempati peringkat ke-3 tertinggi di wilayah Subosukawonosraten, namun belum diiringi dengan peningkatan efisiensi dalam penyerapan tenaga kerja di semua sektor. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,65%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan juga lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah (4,78%) dan nasional (4,91%). Peningkatan TPT ini utamanya terjadi di sektor padat karya seperti tekstil dan garmen yang terdampak relokasi dan penutupan industri akibat tekanan pasar global. Ini mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, terutama pekerja dengan pendidikan rendah atau tanpa keterampilan memadai.

Secara keseluruhan, berbagai indikator makroekonomi dan sosial Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 menampilkan gambaran pemulihan ekonomi yang menjanjikan, namun masih dihadapkan pada sejumlah persoalan struktural, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, dominasi sektor ekonomi tertentu, serta belum meratanya kesejahteraan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang lebih strategis dan transformatif, termasuk diversifikasi ekonomi lokal, penguatan sektor produktif berbasis desa, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta perluasan perlindungan sosial. Upaya ini menjadi krusial dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Sukoharjo.

b. Upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat belum berjalan secara optimal

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya optimal meskipun telah menunjukkan sejumlah indikator perbaikan. Meskipun Kabupaten Sukoharjo menunjukkan sejumlah kemajuan dalam indikator kesejahteraan, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya optimal, baik secara struktural, spasial, maupun sektoral. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sukoharjo meningkat menjadi 79,30 (2024), mendekati klasifikasi “sangat tinggi”, namun belum menembus ambang tersebut, dan belum diiringi pemerataan pada seluruh dimensi kesejahteraan, khususnya daya beli. Kabupaten Sukoharjo menempati peringkat kedua tertinggi IPM di Subosukowonosraten setelah Kota Surakarta (84,8), namun indikator lainnya menunjukkan tantangan yang nyata.

Persentase penduduk miskin menurun menjadi 7,47% (2024) atau sebanyak 68.150 jiwa, angka yang memang lebih baik dibanding Provinsi Jawa Tengah (10,47%) dan nasional (8,57%), tetapi belum mencerminkan

keberhasilan spasial karena kantong-kantong kemiskinan tetap eksis, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas, akses pelayanan publik minim, serta kegiatan ekonomi produktif yang belum berkembang. Ketimpangan antarwilayah juga mencolok bila dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Sragen (12,41%) dan Klaten (12,04%). Disamping itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Sukoharjo masih tercatat 0,42% (2024) meskipun menunjukkan penurunan, serta lebih tinggi dari beberapa kabupaten/kota lain seperti Karanganyar (0,39%) dan Klaten (0,67%). Posisi relatif tersebut, menunjukkan bahwa posisi Sukoharjo yang relatif lebih baik belum cukup untuk mengangkat ekosistem regionalnya secara keseluruhan. Garis kemiskinan Sukoharjo sebesar Rp501.693 per kapita/bulan (2024) lebih rendah dari provinsi dan nasional, namun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 1,17 menjadi 1,21, mengindikasikan meningkatnya jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tetap 0,30, relatif rendah namun belum menunjukkan perbaikan nyata dalam ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin.

Permasalahan kesejahteraan juga dapat dilihat dari konteks sosial, sebanyak 37,21% penduduk Sukoharjo tahun 2024 tergolong Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau sekitar 340.048 jiwa, dan hanya 23,28% di antaranya yang memperoleh layanan sosial, serta 16,38% yang menerima bantuan kebutuhan dasar, menyisakan 13,28% PPKS yang belum terjangkau oleh program apapun, mencerminkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) stagnan pada angka 68,21%, bahkan TPAK perempuan menurun dari 57,99% (2020) menjadi 56,92% (2024), menunjukkan belum teratasinya hambatan struktural dan kultural dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Sementara itu, meski kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan meningkat signifikan dari 9,25% (2020) menjadi 34,37% (2024), cakupan ini masih terbatas dan belum menjangkau kelompok informal, pekerja rentan, serta perempuan pekerja. Permasalahan kesejahteraan masyarakat juga tampak dari dinamika spasial dan ketimpangan distribusi yang belum sepenuhnya teratasi oleh pendekatan pembangunan yang selama ini lebih bersifat sektoral dan berbasis rata-rata.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menekankan transformasi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan yang berbasis data mikro dan spasial, dengan pendekatan multisektor dan kontekstual, serta kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan seperti lansia miskin, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, buruh migran, dan masyarakat pedesaan tertinggal. Pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi data kemiskinan, meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran program sosial, serta mendorong pemberdayaan

komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya target penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk, dan menciptakan transformasi ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

c. Pemenuhan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia belum optimal

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan capaian yang positif, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek pendidikan, meskipun *Harapan Lama Sekolah* (HLS) tahun 2024 telah mencapai 13,92 tahun dan *Rata-rata Lama Sekolah* (RLS) mencapai 10,19 tahun, serta lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Namun capaian ini masih menunjukkan keterbatasan pada akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi. Ketimpangan infrastruktur pendidikan antarwilayah, terutama di daerah perdesaan, serta belum meratanya kualitas layanan pendidikan turut menjadi penghambat peningkatan kualitas SDM. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 5–6 tahun memang meningkat tajam hingga 91,62% pada tahun 2024, namun untuk usia 13–15 tahun justru menurun menjadi 85,63%, yang menandakan masih adanya permasalahan keberlanjutan pendidikan formal terutama pada jenjang SMP. Di sisi lain, meskipun capaian *Asesmen Kompetensi Minimum* (AKM) meningkat signifikan, seperti literasi membaca siswa SMP mencapai 90,46% dan numerasi 84,93%, hal ini masih belum merata dan belum cukup untuk menutup kesenjangan kualitas pendidikan yang ada.

Sementara itu, pada aspek kesehatan, capaian Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 78,01 tahun pada tahun 2024 juga mencerminkan tren positif dalam pembangunan kesehatan. Namun demikian, sejumlah indikator menunjukkan tantangan serius. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2024 sebesar 127,58 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 12,29 per 1.000 kelahiran hidup mengindikasikan masih adanya persoalan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama di masa nifas, akibat keterlambatan deteksi dini dan penanganan klinis yang belum optimal. Selain itu, prevalensi stunting balita meningkat kembali menjadi 9,5% di tahun 2024 setelah sempat turun menjadi 7% pada 2023, sedangkan prevalensi gizi buruk mencapai 0,2%. Pelayanan kesehatan dasar juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan dan ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan, seperti jumlah rumah sakit per satuan penduduk yang justru mengalami penurunan dari 1,10 pada 2023 menjadi 1,09 pada 2024, serta masih stagnannya jumlah Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu. Meskipun cakupan kepesertaan JKN

meningkat hingga 98,37% dan menunjukkan komitmen universal health coverage, penurunan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis dari 93,36% (2022) menjadi 86,45% (2024) memperlihatkan tantangan dalam efektivitas pengobatan dan kepatuhan pasien.

Kondisi ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa meskipun indikator makro di bidang kesehatan dan pendidikan menunjukkan perbaikan, namun kualitas dan pemerataan layanan dasar belum sepenuhnya mendukung peningkatan SDM secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan melalui perluasan akses, peningkatan kualitas layanan, serta pengurangan kesenjangan wilayah, sebagai fondasi utama menuju SDM unggul dan daya saing daerah yang berkelanjutan.

d. Pencapaian kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, serta pembangunan kepemudaan, olahraga, dan keluarga belum optimal dalam mendukung pembangunan SDM yang holistik dan inklusif

Upaya pembangunan sumber daya manusia yang holistik dan inklusif di Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi tantangan serius dalam memastikan keadilan sosial bagi kelompok rentan, terutama perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Meskipun tren capaian indeks-indeks strategis seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan arah yang relatif positif, data tahun 2024 masih mencerminkan adanya ketimpangan struktural. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 97,87, melampaui seluruh kabupaten/kota sekitarnya serta rata-rata Provinsi Jawa Tengah (93,44) dan nasional (92,46), masih menunjukkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan meskipun sangat kecil, dan telah mendekati kesetaraan ideal (IPG mendekati angka 100). IKG Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 tercatat sebesar 0,166 serta lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah (0,308) dan nasional (0,421), namun tetap menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, pekerjaan layak, dan posisi kepemimpinan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam ruang publik dan ekonomi menjadi indikator penting bahwa kesetaraan gender masih memerlukan intervensi afirmatif yang terstruktur. Sementara itu, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga menunjukkan penurunan dari 79,28 pada 2023 menjadi 73,79 pada 2024, menjadikan Sukoharjo berada di bawah rata-rata nasional (77,62) dan hanya menempati peringkat keenam dari tujuh kabupaten/kota di wilayah Subosukowonosraten. Ini menegaskan bahwa tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam sektor strategis, terutama di bidang ekonomi, politik, dan sosial, masih belum merata dan inklusif. Hak penyandang disabilitas juga belum sepenuhnya terakomodasi secara adil. Masih terbatasnya infrastruktur dan layanan publik yang inklusif, minimnya aksesibilitas

terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta rendahnya kesadaran publik tentang hak disabilitas menunjukkan bahwa inklusi belum menjadi norma dalam praktik pembangunan daerah. Demikian pula dengan penduduk lansia, yang jumlahnya pada 2024 telah mencapai 9,44% dari total populasi, masih menghadapi keterbatasan dalam akses layanan kesehatan geriatrik, kegiatan sosial produktif, serta sistem perlindungan sosial yang adaptif.

Di sisi lain, perlindungan terhadap anak mengalami kemajuan namun tetap menghadapi tantangan. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebesar 67,43 memang lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah (64,34) dan nasional (63,83), namun berbagai aspek seperti pemenuhan hak sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan khusus masih memerlukan penguatan, terutama untuk menjangkau anak-anak dari kelompok miskin, disabilitas, dan komunitas marginal.

Lebih jauh, meskipun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) meningkat tajam dari 41,77 (2021) menjadi 60,83 (2024), dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) telah mulai tersedia (0,524 pada 2024), peran strategis pemuda dan olahraga belum optimal dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan SDM unggul. Belum optimalnya perolehan prestasi olahraga dan fluktuasi jumlah atlet menunjukkan masih perlunya penguatan sistem pembinaan dan ekosistem olahraga daerah yang inklusif.

Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan perlunya mengotimalkan sinergitas intervensi kebijakan lintas sektor dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar kelompok rentan secara berkeadilan. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial masih menjadi hambatan dalam mewujudkan SDM unggul yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih integratif dan berbasis data untuk memastikan bahwa seluruh penduduk, tanpa terkecuali, memperoleh manfaat setara dari pembangunan daerah, sekaligus menjawab komitmen Kabupaten Sukoharjo terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

e. Pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, serta penguatan moderasi beragama dan kerukunan sosial belum optimal dalam membentuk SDM berkarakter

Upaya pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat berkarakter yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, menjunjung tinggi keluhuran adat istiadat, serta menjaga kerukunan sosial dalam harmoni kebhinekaan, telah menunjukkan capaian yang baik sepanjang periode 2020–2024. Namun demikian, masih terdapat

sejumlah tantangan yang menandakan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya optimal dan perlu diperkuat secara berkelanjutan.

Dari sisi pelestarian budaya, jumlah situs atau cagar budaya yang dilestarikan meningkat menjadi 294 situs (2024). Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal. Akan tetapi, meskipun terdapat peningkatan jumlah situs, persentase pelestarian Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) justru mengalami fluktuasi signifikan dan sedikit meningkat menjadi 27,14% (2024). Fluktuasi ini mencerminkan belum optimalnya kesinambungan strategi pelestarian budaya, baik dalam aspek kelembagaan, mekanisme kurasi dan penetapan warisan budaya, maupun ketersediaan sumber daya manusia pelestari budaya.

Sementara itu, minat dan partisipasi masyarakat terhadap kesenian tradisional menunjukkan tren positif yang patut diapresiasi. Persentase kelompok kesenian yang aktif menyelenggarakan pertunjukan meningkat menjadi 25,17% (2024). Meskipun demikian, angka ini masih menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok kesenian belum aktif secara berkelanjutan, menandakan perlunya fasilitasi, dukungan pembinaan, dan pengembangan ekosistem seni budaya yang lebih kuat untuk menopang ekspresi dan regenerasi kesenian lokal sebagai bagian dari pembangunan karakter dan ekonomi kreatif daerah.

Lebih jauh, kondisi kerukunan antarumat beragama di Sukoharjo mencatat pencapaian yang baik, dengan nihilnya kejadian konflik SARA dari 2021 hingga 2024. Indeks kerukunan umat beragama juga meningkat dari 70 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2024. Namun, keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang kompleks, seperti meningkatnya jumlah organisasi masyarakat hingga 216 organisasi, serta adanya 19 kasus konflik sosial (2024), meskipun sebagian besar terselesaikan (84%), tetap mencerminkan kerentanan terhadap disrupsi sosial di tengah keberagaman. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam menjaga iklim sosial-politik yang kondusif di masa mendatang.

Di sisi lain, penurunan signifikan terjadi pada jumlah pengunjung tempat bersejarah dari 30.203 orang pada tahun 2023 menjadi hanya 16.210 orang pada 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelestarian dan pengembangan nilai budaya tidak hanya bergantung pada jumlah situs, tetapi juga pada sejauh mana nilai budaya tersebut dimaknai dan diakses masyarakat melalui ruang publik dan sektor pariwisata. Penurunan ini juga menjadi indikasi belum optimalnya promosi, konektivitas lokasi, hingga daya tarik pariwisata berbasis budaya.

Tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sosial budaya pada era saat ini terbilang cukup sulit, yaitu dampak negatif pemanfaatan teknologi

informasi. Terdapat anomali yang terjadi, pada satu sisi akses terhadap teknologi (media sosial, dan perangkat elektronik) mudah untuk didapatkan sebagai sarana belajar sosial-budaya dan upaya promosi budaya, promosi produk usaha, namun pada sisi lain kemunculan media sosial juga sering kali menimbulkan potensi konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Kemudahan memiliki dan mengakses gawai dan media sosial yang terinstal di dalamnya menjadi tren di kalangan masyarakat, dampak negatif lainnya adalah konten-konten asing dari mancanegara dapat diakses dan terpampang mudah di media sosial yang berdampak pada generasi muda yang lebih menyukai gaya hidup dan budaya asing, menggunakan bahasa asing, memfavoritkan makanan asing, sementara kegemaran melestarikan budaya lokal mulai menurun, dan hanya dilakukan oleh sekelompok organisasi atau komunitas saja. Tergerusnya budaya lokal serta menjamurnya berbagai budaya asing dalam jangka panjang dapat menghilangkan budaya lokal yang berdampak buruk terhadap kehidupan bangsa dan negara.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, meskipun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan komitmen dalam memperkuat nilai-nilai kebudayaan dan keberagaman, namun upaya pelestarian nilai budaya luhur, pembangunan karakter masyarakat, dan harmoni sosial masih menghadapi tantangan strategis baik dari aspek keberlanjutan, partisipasi masyarakat, kelembagaan, maupun keterhubungan lintas sektor. Oleh karena itu, perlu penguatan strategi pembangunan karakter yang lebih holistik dan integratif, dengan menempatkan budaya, seni, dan nilai-nilai keagamaan sebagai pilar pembangunan yang sejajar dengan dimensi ekonomi dan infrastruktur, sehingga harmoni kebhinekaan dapat dijaga secara berkelanjutan.

2.3.1.3. Permasalahan Aspek Daya Saing

a. Kualitas dan kapasitas SDM dalam mendukung daya saing daerah belum optimal

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul yang inklusif dan berdaya saing tinggi merupakan pilar utama dalam meningkatkan daya saing daerah dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Di Kabupaten Sukoharjo, berbagai capaian telah diraih dalam aspek kependudukan dan pembangunan SDM selama periode 2020–2024, namun berbagai tantangan masih perlu mendapatkan perhatian serius. Secara demografis, struktur usia penduduk Sukoharjo menunjukkan dominasi usia produktif dengan angka ketergantungan (dependency ratio) yang relatif stabil pada kisaran 42,95 hingga 43,61. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif masih harus menanggung sekitar 43 penduduk usia non-produktif.

Meskipun proporsi penduduk usia produktif mencapai lebih dari 69%, tren penurunan proporsi usia muda (0–14 tahun) menjadi 20,93% (2024), serta peningkatan proporsi lansia menjadi 9,44%, mencerminkan transisi demografi yang mengarah pada struktur masyarakat menua (ageing population). Hal ini menuntut strategi pembangunan SDM yang tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas, daya tahan kesehatan, dan ketahanan karakter masyarakat di tengah tantangan perubahan zaman.

Di aspek pendidikan, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Sukoharjo tercatat sebesar 15,68 persen pada tahun 2024. Meski angka ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (14,21 persen pada 2022 dan 13,80 persen pada 2021), namun capaian tersebut masih belum mencerminkan penetrasi pendidikan tinggi yang optimal, terlebih dalam menghadapi tuntutan revolusi industri dan transformasi ekonomi digital. Akses pendidikan berkualitas juga masih terkendala oleh faktor ekonomi keluarga, keterbatasan sarana, dan masih rendahnya ketersediaan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau di seluruh wilayah.

Sementara itu, dari aspek ekonomi, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp12.758 ribu/orang/tahun. Angka ini memang berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (Rp12.276 ribu) dan nasional (Rp12.340 ribu), namun masih menempatkan Sukoharjo pada posisi bawah-menengah di kawasan Subosukowonosraten. Kabupaten Sukoharjo tertinggal dari Kota Surakarta (Rp16.291 ribu), Boyolali (Rp14.195 ribu), dan Sragen (Rp13.890 ribu). Hal ini mencerminkan masih adanya kesenjangan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dapat berimplikasi pada keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan bergizi, perumahan layak, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan daya beli yang relatif belum merata, kesenjangan ini dapat memperlemah produktivitas masyarakat dan menghambat terciptanya SDM unggul yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan SDM di Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi hambatan baik dari sisi akses maupun kualitas. Pemerintah Daerah perlu merancang kebijakan yang lebih inklusif dan afirmatif, dengan memperluas jangkauan akses pembangunan yang berkualitas dan terjangkau, serta mendorong penguatan gizi, ketahanan keluarga, dan pembinaan karakter generasi muda. Di saat yang sama, strategi pembangunan SDM harus diarahkan untuk memperkuat kesiapan adaptasi terhadap tantangan struktur demografi, revolusi industri 4.0, serta pembangunan berkelanjutan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang unggul secara intelektual, sehat secara

jasmani dan rohani, serta berdaya saing tinggi di tengah dinamika global dan regional.

b. Dukungan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah belum optimal

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan memerlukan dukungan dari sektor iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi lokal yang kokoh. Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan tren positif dalam penguatan kapasitas inovatif daerah. Indeks Kapabilitas Inovasi (Pilar ke-12 dari Indeks Daya Saing Daerah/IDSD) mengalami peningkatan dari 3,71 pada tahun 2022 menjadi 4,28 pada tahun 2024, melampaui rata-rata nasional (3,13) dan bahkan mengungguli Kota Surakarta (4,19). Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan ekosistem riset dan kolaborasi, termasuk pemanfaatan kekayaan intelektual, aplikasi merek dagang, dan belanja riset. Namun demikian, capaian ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (4,64) sehingga perlu diwaspadai adanya potensi stagnasi pengembangan inovasi apabila tidak diikuti oleh langkah-langkah strategis lanjutan dalam memperluas diseminasi dan dampak inovasi ke sektor-sektor ekonomi produktif.

Di sisi lain, inovasi belum sepenuhnya termanifestasi dalam peningkatan produktivitas sektor-sektor utama ekonomi lokal. Data menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi kontributor utama PDRB Kabupaten Sukoharjo mengalami tren penurunan kontribusi terhadap total PDRB, dari 39,10% (2020) menjadi 38,15% (2024), meskipun nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sektor ini meningkat dari Rp14,42 triliun (2020) menjadi Rp19,07 triliun (2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan nilai sektor pengolahan belum optimal dalam mendorong diversifikasi ekonomi daerah dan transformasi struktural yang lebih luas. Demikian pula, sektor akomodasi dan makan-minum memang menunjukkan pertumbuhan positif, dari kontribusi sebesar 3,55% (2020) menjadi 4,05% (2024), namun kontribusinya terhadap lapangan kerja tetap terbatas dan belum signifikan menyerap tenaga kerja usia produktif secara merata.

Masalah krusial juga tampak pada dimensi ketenagakerjaan. Meskipun rasio kewirausahaan meningkat dari 1,91% (2020) menjadi 3,00% (2024), yang menunjukkan tumbuhnya pelaku usaha lokal, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) justru mengalami tren stagnan, bahkan pada 2024 tercatat sebesar 68,21%, terendah di antara seluruh wilayah Subosukowonosraten. Angka ini juga lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jawa Tengah (73,74%) dan nasional (70,63%), serta mengindikasikan tantangan struktural pada sisi pasokan tenaga kerja, termasuk minimnya motivasi kerja, keterbatasan akses informasi

ketenagakerjaan, dan dominasi peran rumah tangga di kalangan perempuan usia produktif.

Dengan demikian, meskipun terdapat capaian positif di bidang inovasi dan nilai tambah sektor tertentu, keterhubungan antara inovasi, produktivitas sektor riil, dan pemberdayaan tenaga kerja usia produktif masih belum sepenuhnya optimal. Tantangan utama terletak pada bagaimana Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mampu memperkuat sinergi antar dimensi iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi dengan ketahanan ekonomi lokal berbasis pertanian dalam arti luas termasuk perikanan serta UMKM, dalam rangka menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan TPAK, serta mengakselerasi transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan belum optimal

Transformasi digital merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis. Dalam konteks Kabupaten Sukoharjo, capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan tren peningkatan signifikan mencapai 4,45 pada tahun 2024. Nilai ini mendekati skor maksimal, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pemerintahan digital yang adaptif. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek transformasi digital yang masih menunjukkan keterbatasan dalam menjamin pemerataan layanan dan produktivitas birokrasi secara menyeluruh. Meskipun jumlah sistem informasi daerah meningkat signifikan dari 41 sistem (2020) menjadi 56 sistem pada tahun 2024, dan jumlah titik hotspot WiFi yang difasilitasi meningkat dari 130 titik (2021) menjadi 138 titik (2024), jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet tetap stagnan di angka 39 OPD sejak 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memperluas jangkauan digital yang merata di seluruh unit kerja pemerintahan.

Di sisi lain, cakupan jaringan fiber optik memang telah mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, dengan peningkatan akses di 12 kecamatan. Akan tetapi, tidak semua kecamatan dan wilayah terpencil mendapatkan layanan informasi yang memadai karena belum tersedia media penyebaran informasi resmi yang dapat dimanfaatkan secara luas, sebagaimana terlihat dari indikator jumlah media penyebaran informasi yang tidak tercatat selama lima tahun terakhir. Selain itu, jumlah radio komunikasi yang aktif stagnan di angka dua unit sejak tahun 2020, menunjukkan masih terbatasnya media komunikasi alternatif yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama pada kondisi darurat atau daerah dengan keterbatasan akses digital.

Permasalahan lainnya terletak pada optimalisasi integrasi sistem antar perangkat daerah. Meskipun indikator SPBE menunjukkan perbaikan yang positif, keberlanjutan dan keselarasan sistem informasi antar perangkat daerah belum sepenuhnya terwujud, mengingat transformasi digital bukan hanya sebatas perluasan infrastruktur, namun juga menyangkut integrasi, interoperabilitas sistem, dan literasi digital aparatur yang merata. Dengan demikian, meskipun transformasi digital Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kemajuan, namun perlu memperkuat aspek pemerataan, pemanfaatan informasi publik, serta kesinambungan sistem agar mampu membentuk birokrasi produktif dan pelayanan publik berkualitas secara inklusif dan berkelanjutan.

d. Kontribusi investasi fisik dan net ekspor daerah terhadap pertumbuhan ekonomi belum optimal

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan elemen krusial dalam mendukung strategi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif, terlebih dalam konteks Kabupaten Sukoharjo yang memiliki basis ekonomi lokal berbasis industri kecil, pertanian, dan UMKM. Data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Sukoharjo periode 2020–2024 mencerminkan dinamika investasi fisik yang cukup signifikan, meskipun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami fluktuasi. Pada awal pandemi tahun 2020, PMTB menyumbang 23,54% terhadap PDRB, kemudian sedikit naik menjadi 23,66% pada 2021, tetapi menurun drastis menjadi 22,78% pada 2022 dan mencapai titik terendah 22,33% pada 2023, sebelum sedikit pulih ke angka 22,43% pada 2024. Walaupun secara persentase terhadap PDRB cenderung menurun, nilai nominal PMTB justru menunjukkan pertumbuhan yang progresif dari Rp8,684 triliun (2020) menjadi Rp11,209 triliun pada tahun 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa investasi fisik masih tumbuh secara absolut, namun belum sepenuhnya sebanding dengan peningkatan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan secara luas. Kondisi tersebut mengindikasikan tantangan dalam mendorong investasi yang mampu memperkuat basis produksi lokal, menciptakan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja, dan memberdayakan pelaku usaha kecil serta pertanian modern secara optimal.

Selain itu, kinerja net ekspor barang dan jasa juga menunjukkan tren yang menggembirakan secara nominal maupun kontribusinya terhadap PDRB. Dari hanya 0,72% atau sekitar Rp265,2 miliar pada tahun 2020, net ekspor Sukoharjo meningkat tajam menjadi 4,20% atau sekitar Rp2.100,58 miliar pada tahun 2024. Lonjakan ini mencerminkan peningkatan daya saing sektor produksi lokal dalam memenuhi permintaan luar wilayah, baik ke provinsi lain maupun ke luar negeri. Namun demikian, meskipun kinerja ekspor meningkat, sebagian besar pergerakan ekspor masih didorong oleh

industri berskala besar, sementara keterlibatan pelaku ekonomi lokal, seperti UMKM dan sektor pertanian, masih relatif terbatas dalam rantai pasok ekspor tersebut. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengaitkan peningkatan kinerja investasi dan ekspor tersebut dengan perluasan manfaat ekonomi bagi pelaku ekonomi lokal dan angkatan kerja produktif. Hal ini mencakup pentingnya mendorong hilirisasi produk lokal, fasilitasi akses pasar ekspor bagi UMKM, serta peningkatan kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha produktif agar dapat bersaing secara regional dan global.

Dengan demikian, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Sukoharjo dalam aspek integrasi ekonomi domestik dan global adalah bagaimana menjamin bahwa dinamika pertumbuhan investasi dan ekspor yang positif dapat menjadi pendorong utama transformasi struktur ekonomi lokal, bukan hanya dari sisi angka makroekonomi, tetapi juga dari sisi ketahanan ekonomi masyarakat, keterlibatan sektor UMKM dan pertanian modern, serta peningkatan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang menghubungkan capaian makro (investasi dan ekspor) dengan strategi ekonomi kerakyatan yang mampu memperluas partisipasi ekonomi masyarakat secara inklusif dan berkeadilan.

e. Pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial belum optimal dalam memperkuat peran kawasan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 telah menunjukkan sejumlah capaian yang positif, namun juga menyisakan tantangan strategis dalam upaya menjadikan kawasan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap telah meningkat signifikan menjadi 89,58%, yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas konektivitas antarwilayah. Panjang jalan dalam kondisi baik meningkat drastis menjadi 343,41 km, dan jalan rusak ringan serta berat masing-masing menurun menjadi 50,53 km dan 12,74 km. Namun demikian, terdapat penurunan signifikan pada panjang jalan dalam kondisi sedang sebesar 200,89 km (2024). Sementara itu, infrastruktur jembatan menunjukkan dinamika yang fluktuatif, terutama jembatan dengan kondisi baik menurun drastis dari 160 unit (2020) menjadi hanya 2 unit (2024), menunjukkan tantangan dalam aspek pemeliharaan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah secara menyeluruh.

Di sektor irigasi, Indeks Kinerja Sistem Irigasi mengalami fluktuasi menjadi 32,87 pada tahun 2024. Meskipun terdapat peningkatan pada kondisi saluran irigasi dalam kategori baik sebesar 29,58%, namun kategori

saluran rusak berat meningkat menjadi 11,19% pada tahun yang sama. Hal ini menandakan belum stabilnya kualitas infrastruktur pendukung pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan.

Selain itu, kinerja penataan ruang menunjukkan kecenderungan membaik secara bertahap, antara lain ditunjukkan oleh peningkatan ketaatan terhadap RTRW menjadi 65% serta peningkatan rasio ruang terbuka hijau publik, meski masih di bawah standar minimal nasional. Meningkatnya jumlah kecamatan yang terakses jaringan fiber optik dari 0 menjadi 12 kecamatan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi indikator awal keberhasilan integrasi infrastruktur digital di wilayah tersebut, namun hal ini juga memerlukan kelanjutan investasi dan penguatan sistem layanan publik yang inklusif.

Sementara itu, indikator pelayanan dasar masih menunjukkan ketimpangan. Akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan berada pada angka 24,48% tahun 2024, dan akses terhadap sanitasi aman stagnan pada angka 1,41%, menunjukkan masih rendahnya cakupan layanan sanitasi dasar yang aman. Di sisi lain, capaian akses hunian layak meningkat menjadi 96,76%, menunjukkan keberhasilan intervensi pemerintah daerah dalam sektor perumahan, namun capaian ini belum sepenuhnya paralel dengan pemenuhan air dan sanitasi layak yang menjadi elemen kunci dalam mewujudkan penurunan kawasan permukiman kumuh.

Dari sisi pembangunan desa, Indeks Desa Membangun (IDM) meningkat menjadi 0,7946, dan persentase desa mandiri melonjak menjadi 40,67%, menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, capaian kelembagaan desa seperti penilaian BUMDes yang berkembang dan maju baru mencapai 47 unit pada 2024, dan hanya sebagian kecil kelompok binaan PKK yang aktif (11,19%), mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas dan kesinambungan kelembagaan sosial dan ekonomi desa untuk mendukung daya saing kawasan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, tantangan utama dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo perlu memastikan kesinambungan, ketepatan sasaran, dan efisiensi pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang tidak hanya terkonsentrasi pada capaian fisik semata, namun juga memastikan pemerataan kualitas layanan dasar dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa, serta tetap menjaga daya dukung lingkungan hidup. Permasalahan ini menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

f. Kemandirian fiskal, kinerja BUMD, dan pengendalian disparitas belum optimal dalam mendukung stabilitas ekonomi makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam konteks penguatan ketahanan ekonomi lokal berbasis pertanian dan UMKM yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Namun demikian, kondisi aktual menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi makro di daerah ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Pertama, dari aspek kemandirian fiskal, meskipun pendapatan pajak daerah secara nominal mengalami peningkatan menjadi Rp325,76 miliar pada tahun 2024, namun rasio pajak daerah terhadap PDRB mengalami fluktuasi dan cenderung stagnan, yakni hanya berada pada kisaran 0,60% hingga 0,69%, bahkan menurun kembali menjadi 0,65% (2024). Hal ini menandakan bahwa laju pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan, yang dapat menghambat kapasitas fiskal daerah dalam mendanai pembangunan secara mandiri. Kedua, performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi daerah juga mengalami tekanan. Total dana pihak ketiga terhadap PDRB terus menurun menjadi 24,72% (2024), dan indikator total kredit BUMD terhadap PDRB mengalami penurunan signifikan menjadi 22,45% (2024). Penurunan ini dapat mengindikasikan kontraksi fungsi intermediasi keuangan dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMD. Selain itu, indikator efisiensi BUMD yang diukur melalui ROA juga mengalami fluktuasi dan stagnasi, kembali berada pada angka 3,65% di tahun 2024, menunjukkan perlunya optimalisasi manajerial dan peningkatan daya saing BUMD untuk menopang pembiayaan lokal. Ketiga, meskipun laju inflasi Kabupaten Sukoharjo pada 2024 berhasil ditekan hingga 1,5%, serta lebih rendah dibandingkan provinsi (1,67%) dan nasional (1,57%), namun kondisi disparitas harga justru menunjukkan anomali yang menjadi perhatian. Setelah mengalami penurunan drastis hingga hanya 0,61% pada 2023, disparitas harga antarwilayah kembali melonjak tajam menjadi 14,75% pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan pasokan dan permintaan komoditas, tekanan biaya logistik, dan lemahnya integrasi pasar daerah. Ketidakstabilan disparitas harga ini berpotensi mengganggu kelancaran distribusi pangan dan kestabilan harga kebutuhan pokok, yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga rentan dan pelaku UMKM. Jika tidak ditangani secara strategis, kombinasi antara lemahnya kemandirian fiskal, penurunan kinerja BUMD, serta fluktuasi disparitas harga dapat melemahkan ketahanan ekonomi daerah dan menghambat penciptaan lapangan kerja produktif. Oleh karena itu, penguatan stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas pendapatan asli

daerah, reformasi BUMD yang berorientasi produktivitas, serta penguatan tata kelola distribusi dan logistik komoditas untuk menjamin kestabilan harga antarwilayah secara berkelanjutan.

2.3.1.4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

a. Implementasi reformasi birokrasi belum optimal dalam tata kelola pemerintahan

Transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2024 menunjukkan progres yang menggembirakan, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan untuk menciptakan birokrasi yang benar-benar tangkas, adaptif, dan berorientasi hasil. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan skor Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menjadi 86,2 pada tahun 2024, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berbasis digital. Meskipun capaian tersebut patut diapresiasi, tantangan tetap muncul pada aspek pemanfaatan teknologi dan sistem digital dalam layanan publik secara menyeluruh. Indeks Pelayanan Publik (IPP) juga menunjukkan perbaikan signifikan, menjadi 4,6 pada tahun 2024, namun belum seluruh perangkat daerah menunjukkan konsistensi kualitas layanan secara merata, terutama dalam hal responsivitas, efisiensi, dan kepuasan masyarakat.

Di sisi lain, meskipun terjadi peningkatan dalam kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari 3,37% pada 2023 menjadi 4,79% pada 2024, angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP secara keseluruhan. Hal ini menandakan masih terbatasnya adopsi transformasi digital oleh masyarakat, serta kurangnya literasi digital dan sosialisasi program IKD. Pelayanan administrasi kependudukan juga menunjukkan progres positif, seperti cakupan akta kelahiran anak usia 0–4 tahun yang mencapai 99,94% dan peningkatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) hingga 83,89% pada tahun 2024. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan keterjangkauan layanan administrasi kependudukan di seluruh wilayah, terutama pada kelompok rentan dan masyarakat terpencil.

Oleh karena itu, meskipun arah kebijakan menuju birokrasi digital telah menunjukkan hasil positif, realisasi strategi *memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital* masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi belum meratanya digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta perlunya peningkatan kompetensi ASN dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan publik. Kondisi ini memerlukan strategi yang lebih tajam dan operasional untuk memperkuat

sinergi antara regulasi, inovasi digital, serta peningkatan integritas dan profesionalitas birokrasi agar target transformasi pemerintahan berbasis digital dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan

b. Reformasi hukum dan integritas birokrasi belum berkesinambungan dalam mendukung profesionalitas aparatur

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis perlu dioptimalkan penegakan hukum yang berkeadilan dan ketahanan terhadap ancaman korupsi menjadi fondasi utama reformasi birokrasi. Data tahun 2024 menunjukkan capaian signifikan pada Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Sukoharjo yang melonjak tajam dari skor 55,82 pada tahun 2023 ke 99,62 pada tahun 2024, mengangkat status klasifikasinya dari kategori “Cukup” menjadi “Istimewa” menurut klasifikasi Kemenkumham. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Sukoharjo dalam membangun koordinasi lintas sektor yang efisien dan mendorong peran aktif ASN dalam menyusun regulasi hukum yang bersih, akuntabel, dan berkualitas.

Namun demikian, capaian tersebut masih menghadapi tantangan krusial dalam hal keberlanjutan dan konsistensi penguatan integritas birokrasi. Hal ini tercermin dari fluktuasi Indeks Integritas Nasional (IIN) berdasarkan Survei Penilaian Integritas KPK RI, yang sempat menurun dari 79,81 pada tahun 2022 menjadi 77,39 pada tahun 2023, sebelum kembali naik tipis ke 79,37 pada tahun 2024. Meskipun terjadi perbaikan, tren fluktuatif ini mengindikasikan perlunya sistem pengawasan internal dan mekanisme deteksi dini korupsi yang lebih tangguh serta pendekatan berbasis data untuk penguatan integritas kelembagaan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan strategis mengenai bagaimana pemerintah daerah dapat menjaga keberlanjutan kualitas regulasi hukum yang telah dicapai, sekaligus meminimalisasi risiko korupsi yang menggerus kepercayaan publik dan menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Lebih jauh, meskipun penguatan reformasi hukum telah sejalan dengan transformasi digital dan nilai-nilai birokrasi modern, masih terdapat kebutuhan untuk mengoptimalkan integrasi sistem informasi hukum daerah, harmonisasi regulasi vertikal-horisontal, serta peningkatan kualitas SDM ASN perancang regulasi di tingkat daerah. Keterbatasan dalam manajemen basis data peraturan, kurang optimalnya pelibatan publik dalam proses legislasi daerah, dan belum meratanya pemahaman tentang deregulasi dan simplifikasi regulasi di seluruh perangkat daerah juga menjadi permasalahan yang harus segera ditangani.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam aspek hukum dan tata kelola integritas di Kabupaten Sukoharjo saat ini adalah bagaimana memastikan keberlanjutan reformasi hukum yang telah dicapai melalui koordinasi regulatif yang adaptif, efisien, dan digital, sekaligus mengatasi

fluktuasi integritas birokrasi dengan membangun sistem pengawasan yang konsisten, transparan, dan akuntabel secara menyeluruh. Permasalahan ini menjadi sangat relevan dalam konteks pencapaian birokrasi yang produktif dan layanan publik yang transparan dan berkualitas sebagaimana dicanangkan dalam strategi pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.

c. Kesenjangan antarpilar IDSD masih terjadi dan berpotensi melemahkan daya saing daerah secara menyeluruh

Meskipun Kabupaten Sukoharjo mencatatkan capaian positif dalam peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan skor mencapai 4,11 pada tahun 2024—melampaui rata-rata Jawa Tengah (3,84) dan nasional (3,43)—namun capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan daya saing daerah yang kokoh dan berimbang secara menyeluruh pada setiap komponennya. Data IDSD tahun 2024 mengindikasikan bahwa masih terjadi kesenjangan yang cukup tajam antar pilar, terutama pada Pilar 9 (Sistem Keuangan) dan Pilar 11 (Dinamika Bisnis) yang justru mengalami penurunan signifikan. Nilai Pilar 9 anjlok dari 3,98 (2022) menjadi hanya 2,71 (2024), sedangkan Pilar 11 menurun drastis dari 5,00 menjadi 3,79. Penurunan ini mengindikasikan lemahnya penguatan kelembagaan sistem keuangan dan ekosistem usaha lokal, serta belum optimalnya dukungan regulasi yang adaptif dan kemudahan berusaha, khususnya untuk sektor UMKM dan startup digital.

Selain itu, meskipun terjadi peningkatan pada beberapa pilar seperti Infrastruktur (Pilar 2), Keterampilan (Pilar 6), dan Kapasitas Inovasi (Pilar 12), konsistensi pemanfaatan teknologi digital dan tata kelola yang dinamis masih menjadi tantangan serius dalam menghadapi dinamika transformasi global dan nasional. Pilar adopsi TIK yang stagnan pada skor 4,7 dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan adanya stagnasi dalam transformasi digital yang seharusnya menopang percepatan produktivitas dan layanan publik yang responsif. Hal ini menjadi persoalan penting dalam konteks pelaksanaan Strategi 5 RPJMD, yang menuntut adanya birokrasi yang lebih tangkas, kolaboratif, dan berbasis data. Lebih lanjut, tantangan juga muncul pada ketidakmerataan penguatan indikator antarsektor dan antarwilayah di Kabupaten Sukoharjo, sehingga belum semua wilayah memiliki kemampuan dan dukungan infrastruktur yang seimbang dalam mendukung daya saing.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan secara agregat, penguatan daya saing daerah masih menghadapi hambatan dalam hal integrasi antar pilar pembangunan, koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan inovasi kelembagaan. Dibutuhkan strategi yang lebih adaptif dan sistematis dalam memperkuat kapasitas regulasi, pembiayaan inklusif, inovasi digital, serta integrasi lintas sektor dan pelaku pembangunan. Oleh



karena itu, reformasi tata kelola yang berbasis transformasi digital harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kinerja birokrasi, tetapi juga untuk membangun ekosistem inovasi dan pasar daerah yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan di tingkat regional maupun nasional.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah Kabupaten Sukoharjo diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berbagai isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional/Provinsi Jawa Tengah) yang tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Tabel 2.87 Tabel Isu Strategis Daerah Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu Strategis Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Jangka Menengah Kab. Sukoharjo 2025 – 2029
			Global (SDG's)	Nasional	Regional	
1. Kabupaten Sukoharjo berada pada posisi jalur yang sangat strategis yaitu pada kawasan simpang segitiga emas JOGLOSEMAR (Yogya–Solo–Semarang), yang merupakan simpang kutub pusat pertumbuhan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Yogyakarta, Solo, dan Semarang. 2. Potensi agrobisnis, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan di Jawa Tengah bahkan tingkat nasional. Selain	1. Penurunan kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya dampak perubahan iklim 2. Volume timbulan sampah yang terus meningkat belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan 3. Pengendalian alih fungsi lahan dan implementasi RTRW belum berjalan secara optimal 4. Ketahanan pangan masih belum optimal 5. Belum seimbang struktur demografi dengan upaya	1. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas air 2. Perlunya peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim 3. Perlunya peningkatan pengelolaan persampahan 4. Masih perlunya pemerataan infrastruktur pelayanan dasar sanitasi dan pengolahan limbah 5. Perlunya upaya meningkatkan kualitas tutupan lahan 6. Perlunya pengurangan resiko dan	1. Tanpa kemiskinan 2. Tanpa kelaparan 3. Keluarga sehat dan sejahtera 4. Pendidikan berkualitas 5. Kesenjangan gender 6. Air bersih dan sanitasi layak 7. Energi bersih dan terjangkau 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 9. Industri, inovasi dan infrastruktur 10. Berkurang kesenjangan 11. Kota dan pemukiman	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas; produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal; pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan; infrastruktur dan literasi digital masih terbatas; belum optimalnya integrasi ekonomi domestik; dan rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 5. Kualitas hidup dan daya saing	1. Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukoharjo 2. Tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang adaptif dan amanah (governance) 3. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah yang inklusif 4. Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif



Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu Strategis Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Jangka Menengah Kab. Sukoharjo 2025 – 2029
			Global (SDG's)	Nasional	Regional	
itu, sektor pertanian dalam arti luas tidak hanya dimanfaatkan sebagai sektor primer saja, tetapi juga untuk dikembangkan sebagai sektor sekunder melalui pengembangan produk olahan pertanian oleh UMKM serta sektor tersier melalui agrowisata hingga pemasaran/ perdagangan produk pertanian primer maupun sekunder. 3. Kabupaten Sukoharjo terdapat berbagai perusahaan kelas internasional. Kawasan peruntukan industri Kabupaten	pemenuhan kebutuhan sosial dasar secara merata dan berkelanjutan 6. Kondisi perekonomian daerah belum menunjukkan stabilitas yang memadai 7. Upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat belum berjalan secara optimal 8. Pemenuhan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber	peningkatan upaya mitigasi bencana 7. Perlunya peningkatan ketahanan pangan	yang berkelanjutan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung-jawab 13. Penanganan perubahan iklim 14. Ekosistem lautan 15. Ekosistem daratan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan	persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 3. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi 4. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi 5. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas 6. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial,	sumber daya manusia 6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat 7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	terhadap kelestarian lingkungan



Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu Strategis Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Jangka Menengah Kab. Sukoharjo 2025 – 2029
			Global (SDG's)	Nasional	Regional	
Sukoharjo tersebar di seluruh wilayah kecuali Kecamatan Bulu, Weru, Mojolaban, dan Baki. Pengembangan industri diarahkan pada Kecamatan Nguter dan Bendosari, serta industri rumah tangga tersebar di lingkungan sekitar 4. Sukoharjo juga memiliki kawasan wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata budaya. Bahkan wilayah daerah perbatasan Sukoharjo seperti kawasan Solo Baru di Kecamatan Grogol telah menjelma menjadi kawasan pusat perekonomian yang berkembang	daya manusia belum optimal 9. Pencapaian kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, serta pembangunan kepemudaan, olahraga, dan keluarga belum optimal dalam mendukung pembangunan SDM yang holistik dan inklusif 10. Pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, serta penguatan moderasi beragama dan kerukunan sosial belum optimal dalam membentuk SDM berkarakter 11. Kualitas dan kapasitas SDM			keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh 7. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas		



Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu Strategis Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Jangka Menengah Kab. Sukoharjo 2025 – 2029
			Global (SDG's)	Nasional	Regional	
pesatpermukiman seluruh kecamatan. 5. Sumber daya manusia terutama pada kelompok umur produktif sebagai pendorong utama pembangunan melalui peningkatan produktivitas yang berkualitas.	dalam mendukung daya saing daerah belum optimal 12. Dukungan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah belum optimal 13. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan belum optimal 14. Kontribusi investasi fisik dan net ekspor daerah terhadap pertumbuhan ekonomi belum optimal 15. Pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial belum optimal dalam memperkuat					



Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu Strategis Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Jangka Menengah Kab. Sukoharjo 2025 – 2029
			Global (SDG's)	Nasional	Regional	
	peran kawasan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 16. Kemandirian fiskal, kinerja BUMD, dan pengendalian disparitas belum optimal dalam mendukung stabilitas ekonomi makro 17. Implementasi reformasi birokrasi belum optimal dalam tata kelola pemerintahan 18. Reformasi hukum dan integritas birokrasi belum berkesinambungan dalam mendukung profesionalitas aparatur 19. Kesenjangan antarpilar IDSD					



Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu Strategis Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Jangka Menengah Kab. Sukoharjo 2025 – 2029
			Global (SDG's)	Nasional	Regional	
	masih terjadi dan berpotensi melemahkan daya saing daerah secara menyeluruh					

Isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukoharjo 2025-2029, meliputi: (1) Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukoharjo; (2) Tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang adaptif dan amanah (*governance*); (3) Peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah yang inklusif; dan (4) Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan.

1. Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukoharjo.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan landasan utama dalam menentukan arah kemajuan suatu daerah. Kabupaten Sukoharjo memandang pembangunan SDM sebagai investasi jangka panjang yang berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya optimal meskipun telah menunjukkan sejumlah indikator perbaikan. Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kemajuan dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat menjadi 79,30 pada tahun 2024 dan masuk dalam kategori "sangat tinggi". Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat, khususnya kelompok miskin, rentan, perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok usia lanjut. Persoalan struktural, spasial, dan sektoral masih membatasi pencapaian pembangunan SDM yang inklusif dan holistik.

Secara khusus, penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat menunjukkan sejumlah tantangan yang signifikan. Persentase penduduk miskin mencapai 7,47% (2024) atau sekitar 68.150 jiwa, angka yang memang lebih baik dibanding rata-rata Jawa Tengah dan nasional, namun belum mampu mengangkat semua kelompok rentan keluar dari jerat kemiskinan. Fenomena kemiskinan struktural masih terjadi, terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses infrastruktur dasar dan peluang ekonomi produktif yang terbatas. Ketimpangan spasial terlihat dari persebaran kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah. Hal ini menunjukkan adanya kantong-kantong kemiskinan yang belum terjangkau oleh program pembangunan secara efektif. Tingkat kemiskinan ekstrem memang rendah (0,42%), namun tetap perlu mendapat perhatian khusus, apalagi dengan garis kemiskinan yang berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat menjadi 1,21 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,30, mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin masih tinggi. Selain itu, tingginya proporsi penerima bantuan sosial yang belum seluruhnya tersasar secara efektif menunjukkan masih lemahnya integrasi dan konvergensi program perlindungan sosial di daerah.

Ketimpangan struktural dalam pembangunan SDM juga terlihat dari belum optimalnya penyediaan dan pemenuhan layanan dasar kesehatan dan

pendidikan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan, menunjukkan adanya hambatan struktural, kultural, dan sosial dalam pemberdayaan ekonomi termasuk perempuan dan kelompok muda. Sementara itu, capaian jaminan sosial ketenagakerjaan informal yang rendah, dapat pula diindikasikan bahwa akses perlindungan sosial masih belum memadai, termasuk bagi kelompok perempuan. Begitu pula, partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif dan akses terhadap layanan publik juga masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi budaya, ekonomi, maupun kelembagaan.

Di sisi lain, pembangunan kepemudaan dan olahraga yang seharusnya menjadi bagian integral dalam pengembangan SDM unggul juga belum memperoleh perhatian yang proporsional. Meskipun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) meningkat signifikan, serta tersedianya Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), peran strategis pemuda dan sektor olahraga belum sepenuhnya dikembangkan dalam sistem pembangunan daerah. Fluktuasi jumlah atlet dan belum optimalnya perolehan prestasi olahraga menunjukkan masih lemahnya sistem pembinaan dan ekosistem olahraga daerah. Minimnya ruang ekspresi, literasi kepemudaan, dan partisipasi dalam forum-forum pembangunan turut menjadi penghambat dalam memaksimalkan potensi pemuda sebagai agen perubahan. Di tengah bonus demografi yang sedang berlangsung, ketidaksiapan sistem sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam menyerap dan memberdayakan generasi muda akan menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pembangunan.

Tantangan pembangunan SDM di Sukoharjo juga terkait erat dengan dinamika transformasi keluarga, nilai budaya, serta identitas lokal. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia menunjukkan arah menuju masyarakat menua (*ageing society*), yang menuntut adanya sistem layanan kesehatan dan sosial yang lebih adaptif dan inklusif. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi telah membawa tantangan terhadap pelestarian nilai-nilai budaya lokal, di mana terjadi pergeseran identitas, spiritualitas, dan norma sosial masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Fenomena ini dapat memperlemah kohesi sosial apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan kebudayaan, pendidikan karakter, dan penguatan keluarga sebagai institusi dasar pembentukan SDM berkarakter.

Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan SDM Kabupaten Sukoharjo ke depan harus dirancang secara sistematis dan multidimensi. Pertama, perlu dilakukan penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan secara merata, dengan memperhatikan aspek inklusi dan keberpihakan pada kelompok rentan. Kedua, dibutuhkan konvergensi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan berbasis rumah tangga, komunitas, dan wilayah, yang tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga transformatif. Ketiga, diperlukan pemberdayaan pemuda dan penguatan sistem olahraga daerah

secara berkelanjutan untuk mendorong peran pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Keempat, perlindungan sosial dan kesetaraan gender harus terus diperluas dan diperkuat, termasuk bagi penyandang disabilitas dan lansia. Kelima, pelestarian nilai budaya, penguatan spiritualitas, dan ketahanan keluarga menjadi landasan penting dalam membentuk karakter dan integritas generasi muda. Seluruh strategi ini harus dilaksanakan melalui pendekatan intersektoral dan berbasis data, dengan memperkuat tata kelola kelembagaan, kolaborasi multi-pihak, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan SDM Kabupaten Sukoharjo perlu memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, menuju Sukoharjo yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2. Tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang adaptif dan amanah (*governance*)

Tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif dan amanah di Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan. Dalam era digital dan dinamika global saat ini, birokrasi tidak hanya dituntut untuk melaksanakan fungsi administratif, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi birokrasi modern yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan inovasi. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan kemajuan signifikan, sebagaimana terlihat dari peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang mencapai 86,2 pada tahun 2024 serta Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang meningkat pada tahun yang sama. Namun demikian, capaian tersebut masih menghadapi berbagai tantangan terkait konsistensi kualitas layanan publik, kesenjangan transformasi digital antar-organisasi perangkat daerah (OPD), dan keterbatasan adopsi layanan digital, seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang masih sangat rendah dari total penduduk wajib KTP. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan masih memerlukan percepatan, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, responsif, dan inklusif.

Keberlanjutan implementasi reformasi birokrasi masih menjadi hal yang krusial. Meskipun kebijakan percepatan reformasi birokrasi berbasis digital telah diimplementasikan melalui evaluasi RB General dan RB Tematik, konsistensi kualitas layanan masih belum sepenuhnya merata. Hal ini disebabkan oleh variasi kinerja antar-OPD, keterbatasan literasi digital aparatur, dan belum optimalnya budaya kerja berbasis kinerja. Tantangan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kebutuhan membangun birokrasi yang adaptif, berorientasi hasil, dan mampu merespons ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.

Selain itu, reformasi hukum dan penguatan integritas birokrasi belum berjalan secara berkesinambungan. Peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Sukoharjo yang menunjukkan capaian yang signifikan, namun hal ini tidak sejalan dengan kondisi fluktuasi Indeks Integritas Nasional (IIN) dan kembali naik pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi pengawasan, pencegahan korupsi, dan harmonisasi regulasi hukum yang adaptif. Keberhasilan penataan regulasi memerlukan koordinasi lintas sektor dan dukungan SDM ASN yang kompeten sebagai perancang produk hukum yang berkualitas, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan publik.

Daya saing daerah juga masih menghadapi kendala akibat kesenjangan antar-pilar dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Meskipun skor IDSD Sukoharjo meningkat menjadi 4,11 pada tahun 2024 dan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (3,84) serta nasional (3,43), kesenjangan antar-pilar seperti Pilar 9 (Sistem Keuangan) dan Pilar 11 (Dinamika Bisnis) masih menjadi tantangan serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem keuangan, dinamika bisnis, dan kemudahan berusaha belum sepenuhnya sejalan dengan kemajuan pada pilar lainnya seperti infrastruktur atau kapasitas inovasi. Hal ini dapat menghambat daya saing daerah secara komprehensif apabila tidak diantisipasi dengan strategi penguatan kelembagaan ekonomi, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Rendahnya partisipasi publik dan kolaborasi lintas sektor juga menjadi isu strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah. Meskipun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mendorong birokrasi kolaboratif, keterlibatan masyarakat sipil, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam perumusan maupun evaluasi kebijakan publik masih perlu ditingkatkan. Kolaborasi ini menjadi penting tidak hanya untuk mewujudkan tata kelola yang partisipatif, tetapi juga untuk memperkuat daya saing daerah melalui kebijakan hilirisasi, digitalisasi ekonomi, serta riset dan inovasi pada sektor-sektor unggulan daerah. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal diperlukan agar kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kemandirian desa dan kawasan perdesaan.

Dengan mempertimbangkan tantangan tersebut, arah kebijakan tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo ke depan perlu difokuskan pada digitalisasi sistem pemerintahan secara menyeluruh dan inklusif, penguatan birokrasi adaptif melalui peningkatan kompetensi ASN, serta harmonisasi regulasi hukum yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi. Selain itu, diperlukan strategi integrasi antar-pilar IDSD untuk memastikan daya saing daerah meningkat secara komprehensif, melalui penguatan sistem keuangan daerah, dukungan inovasi, dan pengembangan kapasitas SDM. Partisipasi masyarakat harus terus diperluas melalui mekanisme kolaborasi publik yang inklusif, forum multi-pihak, dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengambilan

kebijakan. Dengan langkah-langkah tersebut, tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu menjadi birokrasi yang lincah, berintegritas, berorientasi pada hasil, dan menjadi pilar utama dalam mendukung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan berkualitas.

3. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah yang inklusif.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan prasyarat utama dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo. Meskipun perekonomian daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,97% pada tahun 2024, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (4,95%) dan nasional (4,93%), kualitas pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya merata dan belum mampu menurunkan ketimpangan antarkelompok pendapatan secara signifikan.

Tingkat ketimpangan masih cukup tinggi, tercermin dari Gini Rasio meningkat menjadi 0,390 pada tahun 2024, dan lebih tinggi dari rata-rata provinsi (0,367) dan nasional (0,379). Ketimpangan ini juga diperkuat oleh tingginya angka rasio pengeluaran kelompok 40% terbawah sebesar 17,50%, yang menunjukkan belum meratanya hasil pembangunan antar kelompok pendapatan. Jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya di Subosukawonosraten, Sukoharjo berada pada posisi yang kurang menguntungkan.

Di sisi lain, Perekonomian daerah juga masih sangat bergantung pada sektor informal, yang mencerminkan masih terbatasnya lapangan kerja yang layak dan produktif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami stagnasi bahkan menurun, mencerminkan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, terutama bagi perempuan dan kelompok usia produktif. Sementara itu, kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang juga menggambarkan belum pulihnya pasar kerja secara menyeluruh, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan garmen yang terdampak relokasi dan tekanan pasar global.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo memang mengalami peningkatan, mencapai 79,30 pada tahun 2024, namun peningkatan ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan komponen pengeluaran per kapita yang signifikan. Artinya, daya beli masyarakat belum mengalami peningkatan yang sepadan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan ekonomi riil masyarakat, terutama kelompok rentan, masih belum terwujud optimal.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan pilar penting dalam penyediaan lapangan kerja dan menopang struktur ekonomi lokal, masih menghadapi berbagai tantangan seperti produktivitas rendah, keterbatasan akses permodalan, dan perluasan pasar. Tingkat rasio kewirausahaan memang menunjukkan pertumbuhan, tetapi kontribusi UMKM

terhadap ekspor dan transformasi ekonomi masih terbatas karena rendahnya inovasi teknologi, keterbatasan dalam hilirisasi produk, serta minimnya dukungan kebijakan fiskal dan logistik yang inklusif.

Sementara itu, sektor industri pengolahan mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB ADHB dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun secara nilai sektor ini meningkat. Penurunan proporsi ini menandakan bahwa sektor industri belum sepenuhnya mampu mendorong transformasi struktural dan peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Di sektor pertanian, meskipun Kabupaten Sukoharjo mencatat produktivitas padi sawah sebesar 56,55 ku/ha pada tahun 2024, namun terjadi penurunan produksi padi dan jagung yang signifikan akibat alih fungsi lahan dan cuaca ekstrem, sehingga sektor ini belum cukup kuat menopang daya beli petani. Harga gabah di tingkat petani dan penggilingan juga cenderung berfluktuasi dan belum mampu memberikan kepastian penghasilan yang layak bagi pelaku sektor pertanian.

Tantangan utama lainnya adalah belum optimalnya sistem pendukung transformasi ekonomi lokal yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Hal ini tercermin dari rendahnya konektivitas rantai pasok antar sektor, terbatasnya kolaborasi riset dan teknologi dengan pelaku usaha, serta rendahnya literasi kewirausahaan dan inovasi masyarakat. Infrastruktur logistik dan dukungan digitalisasi ekonomi juga masih belum merata antar wilayah, menyebabkan disparitas akses ekonomi yang cukup besar.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mengambil langkah strategis dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan, penguatan produktivitas sektor unggulan berbasis teknologi dan pasar, pemberdayaan UMKM secara terintegrasi dengan akses permodalan dan teknologi, serta penguatan konektivitas logistik dan digital antarwilayah. Pendekatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan pro-rakyat harus diarahkan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan, meningkatkan partisipasi ekonomi kelompok rentan, serta memperkuat struktur ekonomi lokal yang berbasis potensi dan keunggulan komparatif daerah.

4. Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo selama ini telah memberikan kontribusi penting dalam mendukung konektivitas wilayah, peningkatan aksesibilitas antar kawasan, dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Namun, ketangguhan infrastruktur daerah dalam merespons dinamika perubahan lingkungan dan risiko bencana alam masih menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan utama yang

mengemuka antara lain belum meratanya distribusi infrastruktur dasar yang memadai, terutama di wilayah perdesaan dan pinggiran kota yang sering kali masih mengalami keterbatasan, diantaranya akses jalan berkualitas, permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, sanitasi layak, sistem drainase yang fungsional, dan layanan air bersih yang aman, serta saluran irigasi. Tantangan serius dalam menjamin ketangguhan dan keberlanjutan infrastruktur tersebut di tengah risiko perubahan iklim dan tekanan terhadap lingkungan hidup. Infrastruktur yang belum memadai dan tidak responsif terhadap kondisi geografis dan potensi bencana berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik, kelancaran mobilitas barang dan jasa, serta perlindungan sosial masyarakat rentan, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan. Ketahanan infrastruktur terhadap risiko banjir, kekeringan, tanah longsor, serta peningkatan intensitas cuaca ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Daerah, terlebih dengan meningkatnya frekuensi kejadian bencana akibat krisis iklim global.

Kondisi infrastruktur yang belum optimal juga berkaitan erat dengan lemahnya pengendalian tata ruang, seperti terlihat dari masifnya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian sehingga perlu pengendalian dalam perencanaan yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Proses konversi lahan ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan lokal dan ketersediaan ruang terbuka hijau, tetapi juga berdampak pada penurunan kapasitas ekosistem dalam merespons tekanan lingkungan dan perubahan iklim. Sebagai akibatnya, Kabupaten Sukoharjo menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor, yang semakin intens seiring dengan menurunnya kapasitas resapan air dan terganggunya keseimbangan ekologis kawasan. Hal ini diperparah oleh kondisi kualitas lingkungan yang masih berada di bawah standar. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 tercatat hanya mencapai 63,59, sedangkan Indeks Kualitas Air (IKA) hanya sebesar 53,72 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 32,67, mencerminkan masih tingginya tekanan terhadap lingkungan hidup akibat pencemaran air dan degradasi kawasan hijau.

Salah satu tantangan serius lainnya adalah peningkatan volume timbulan sampah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 volume sampah harian telah melebihi 2.291,18 ton/hari dengan total timbulan mencapai 133.804,91 ton/tahun. Dari total tersebut, baru sekitar 79,07% sampah yang berhasil dikelola, sedangkan sisanya 20,93% belum tertangani secara optimal. Situasi ini memperbesar kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan mempertinggi potensi banjir akibat saluran air yang tersumbat oleh sampah tidak terkelola. Rendahnya kapasitas teknis dan fasilitas daur ulang, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum terintegrasinya sistem pengangkutan dan pengelolaan

sampah berbasis prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) menjadikan beban terhadap lingkungan kian meningkat.

Dalam konteks pembangunan rendah karbon dan responsif terhadap perubahan iklim, data emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren penurunan menjadi 1.358,46 Gg CO₂ eq pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan efektivitas berbagai upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Sektor energi, meskipun tetap menjadi kontributor terbesar, mengalami penurunan signifikan. Sektor pertanian sebagai penyumbang emisi terbesar kedua mengalami peningkatan proporsi. Sementara itu, sektor pengelolaan limbah menunjukkan peningkatan dari total emisi. Di sisi lain, sektor kehutanan terus menunjukkan peran penting sebagai penyerap karbon, meskipun nilai serapannya masih negatif. Tren penurunan emisi ini mengindikasikan keberhasilan awal dalam penguatan kebijakan pembangunan yang semakin selaras dengan prinsip keberlanjutan dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun demikian, peningkatan emisi dari sektor pertanian dan limbah tetap menjadi perhatian, yang menuntut strategi mitigasi yang lebih terpadu melalui pendekatan *land-based mitigation*, penguatan sistem pertanian rendah emisi, serta perbaikan manajemen limbah terintegrasi dengan dukungan teknologi ramah lingkungan.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ke depan harus diarahkan pada perencanaan yang tidak hanya berbasis pada pendekatan teknis dan fisik, tetapi juga memperhatikan dimensi ekologis dan sosial secara menyeluruh. Penguatan kapasitas infrastruktur yang responsif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana menjadi keharusan dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Kabupaten Sukoharjo perlu mengintegrasikan pendekatan *green infrastructure* dalam setiap rencana pembangunan fisik. Konsep ini tidak hanya menekankan pada efisiensi energi dan pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa fungsi ekologis kawasan tetap terjaga, seperti melalui revitalisasi ruang terbuka hijau, optimalisasi sistem drainase alami, serta penggunaan teknologi adaptif dalam sektor transportasi, energi, dan permukiman. Implementasi sistem peringatan dini bencana juga perlu diperkuat, bersamaan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur lokal.

Lebih jauh lagi, pembangunan infrastruktur harus selaras dengan komitmen pembangunan berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), serta Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya diposisikan sebagai alat teknis semata, melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap



tekanan ekologis, sosial, dan ekonomi. Hanya dengan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan tinggi, Kabupaten Sukoharjo dapat membangun wilayah yang layak huni, inklusif, ramah lingkungan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan secara adaptif dan berkelanjutan.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2045, serta memperhatikan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Visi dan misi kepala daerah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diimplementasikan melalui program prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis serta perkembangan lingkungan strategis, baik pada tingkat regional maupun nasional.

3.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo pada periode tahun 2025–2029. Visi merupakan sebuah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan, adapun visi Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025–2029 yaitu:

“SUKOHARJO LEBIH MAJU, ADIL DAN BERMARTABAT”

Makna dari frasa visi: “Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat” yaitu:

Lebih, memiliki arti bahwa Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas, keadilan yang menyeluruh, dan kehidupan yang lebih bermakna bagi seluruh warganya.

Maju, memiliki arti bahwa Sukoharjo sebagai Kabupaten yang memiliki kondisi perekonomian daerah yang tumbuh baik dengan kemudahan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam mendukung tantangan perekonomian nasional untuk mencapai posisi

nomor lima terbesar di dunia, serta tantangan Jawa Tengah sebagai kontributor perekonomian nasional. Perekonomian Kabupaten Sukoharjo yang tumbuh baik dengan perekonomian berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, serta inovatif, mandiri dengan tidak ketergantungan, tangguh, didukung dengan wilayah yang kondusif (aman).

Adil, mencerminkan komitmen untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, baik itu masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis, maupun pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, makna ADIL tidak hanya merupakan visi pemerintah daerah semata, tetapi juga menjadi visi bersama yang menggambarkan harapan dan aspirasi seluruh warga Sukoharjo untuk masa depan yang lebih baik.

Bermartabat, adalah Sukoharjo sebagai Kabupaten yang memiliki sumber daya manusia (masyarakat dan aparatur) yang berintegritas dan unggul dengan jatidiri, karakter dan budaya yang kuat, serta memiliki kepedulian yang tinggi dalam proses pembangunan yang didukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dan amanah (*governance*) dalam mewujudkan daerah yang maju dan makmur.

Dengan visi "**Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat**", terdapat nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar dari visi Kepala Daerah untuk Kabupaten Sukoharjo 2025-2029, yaitu:

1. Inovatif

Nilai ini mencerminkan komitmen untuk terus mendorong kreativitas dan inovasi dalam setiap aspek pembangunan di Sukoharjo. Hal ini mencakup penerapan teknologi baru, pengembangan potensi daerah secara kreatif, dan pencarian solusi-solusi *out of the box* untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Kabupaten Sukoharjo diharapkan bisa menjadi daerah yang dinamis, di mana ide-ide baru terus berkembang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Kolaboratif

Kolaborasi menjadi nilai penting untuk mencapai tujuan bersama. Ini berarti pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama secara harmonis. Dengan nilai kolaboratif, Sukoharjo diharapkan mampu membangun sinergi yang kuat antar semua elemen masyarakat, yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian visi daerah.

3. Adil

Keadilan menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Nilai ini menekankan pada perlakuan yang setara bagi semua warga, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga Sukoharjo mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan merasakan hasilnya.

4. Bahagia

Nilai bahagia mengacu pada penciptaan kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan setiap warga Sukoharjo merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, keseimbangan kerja-hidup, serta lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

5. Religius

Nilai religius menekankan pentingnya kehidupan yang berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan moralitas. Ini berarti integritas, etika, dan spiritualitas akan menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sukoharjo diharapkan menjadi daerah yang menghormati dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan, yang akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan bermoral tinggi.

Kelima nilai ini merupakan panduan dan komitmen untuk mewujudkan visi "**Sukoharjo Lebih Maju, Adil, dan Bermartabat**" dengan pendekatan yang holistik, mencakup aspek inovasi, kerja sama, keadilan, kesejahteraan, dan moralitas. Dalam mewujudkan visi "Sukoharjo Lebih Maju, Adil, dan Bermartabat" diimplementasikan melalui 5 misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.



Gambar 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 - 2029

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi 1

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance) Serta Layanan Publik yang Berkualitas

Misi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas" merupakan fondasi utama dalam upaya membangun Kabupaten Sukoharjo yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk terus memperbarui dan menyesuaikan kebijakan serta prosedur pemerintahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, serta adopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintahan akan lebih cepat dan tepat dalam merespons perubahan, baik dalam konteks lokal maupun global.

Selain adaptif, pemerintahan yang amanah menjadi pilar penting yang memastikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk menjalankan setiap tugas dan kewajiban dengan integritas tinggi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil akan dilandasi oleh prinsip-prinsip kejujuran dan tanggung jawab, serta melibatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pemerintahan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Untuk memastikan layanan publik yang berkualitas, Kabupaten Sukoharjo akan memperkuat sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan publik akan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur pelayanan, peningkatan kompetensi petugas, serta penggunaan teknologi digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan, seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan lain sebagainya. Dengan mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah, Kabupaten Sukoharjo yakin bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat, dan pada akhirnya, tercipta Kabupaten Sukoharjo yang lebih sejahtera dan harmonis.

Misi 2

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif dan Responsif Gender

Misi "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif, dan Responsif Gender" merupakan landasan utama dalam membangun masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang unggul dan siap bersaing di era global. Meningkatkan kecerdasan SDM tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal, tetapi juga melalui pengembangan keterampilan hidup yang relevan dengan tuntutan zaman. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperkuat pendidikan karakter agar generasi muda Sukoharjo tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang kuat. Melalui program-program pendidikan berbasis teknologi dan pelatihan keterampilan, Kabupaten Sukoharjo akan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal.

Kesehatan merupakan fondasi penting dalam menciptakan SDM yang produktif, oleh karena itu, Kabupaten Sukoharjo akan meningkatkan akses

layanan kesehatan yang berkualitas, memperluas jangkauan program kesehatan preventif, serta memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk memastikan tumbuh kembang generasi penerus yang sehat. Program-program kesehatan berbasis komunitas juga akan ditingkatkan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Di samping itu, Kabupaten Sukoharjo akan mendorong penerapan pola hidup sehat melalui berbagai kampanye dan fasilitas olahraga yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dengan tujuan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat secara fisik dan mental.

Selain itu, Kabupaten Sukoharjo memahami pentingnya responsivitas gender dalam pembangunan SDM. Dengan menjadikan responsivitas gender sebagai bagian integral dari semua kebijakan dan program, Kabupaten Sukoharjo akan mendorong kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, mulai dari akses pendidikan dan pekerjaan hingga peran aktif dalam pengambilan keputusan. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai peran perempuan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya adil bagi semua, tetapi juga memberdayakan semua kelompok masyarakat. Dengan demikian, Kabupaten Sukoharjo akan menjadi daerah yang inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang gender, dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah dan meraih kualitas hidup yang lebih baik.

Misi 3

Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif

Misi "Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif" berfokus pada menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo, dengan tujuan agar setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berarti tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka makroekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua, termasuk kelompok rentan dan marjinal. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk mendorong sektor-sektor ekonomi potensial seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Kabupaten Sukoharjo akan mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal. Ini mencakup pemberian akses

yang lebih mudah terhadap permodalan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan teknologi bagi UMKM, serta penguatan rantai pasok lokal yang akan mendorong keberlanjutan ekonomi di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, program revitalisasi pasar tradisional akan dilaksanakan untuk meningkatkan daya tarik dan efisiensi pasar lokal sebagai pusat ekonomi masyarakat. Kabupaten Sukoharjo juga akan fokus pada peningkatan infrastruktur pendukung, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi, yang akan mempermudah distribusi produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Sukoharjo.

Selanjutnya, untuk memastikan pendapatan masyarakat meningkat secara merata, Kabupaten Sukoharjo akan memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses produksi dan pemasaran. Ini termasuk program desa wisata, agroindustri, serta pengembangan koperasi berbasis digital yang dapat membantu masyarakat memasarkan produk mereka lebih luas. Kabupaten Sukoharjo juga akan mendorong investasi yang berkelanjutan dengan menarik investor yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat setempat dan memperhatikan aspek sosial serta lingkungan. Dengan pendekatan yang inklusif ini, Kabupaten Sukoharjo percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tidak hanya akan meningkat secara signifikan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

Misi 4

Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh, Kabupaten Sukoharjo akan berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar yang kokoh dan tahan terhadap berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Ini meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta jaringan irigasi yang tidak hanya memadai secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kelestarian alam. Pembangunan infrastruktur yang tangguh ini akan mendukung konektivitas antar wilayah, mempercepat akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem infrastruktur yang kuat juga akan memperkuat fondasi ekonomi daerah dengan memudahkan distribusi barang dan jasa dari desa ke kota serta mendorong investasi di sektor-sektor strategis.

Pembangunan berwawasan lingkungan akan menjadi prioritas dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur. Langkah ini mencakup pengurangan penggunaan

material yang berdampak buruk pada lingkungan, pengelolaan limbah konstruksi, serta peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Setiap proyek infrastruktur akan melalui proses penilaian dampak lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak ekosistem lokal. Selain itu, upaya penghijauan dan pengelolaan sumber daya air, termasuk pembangunan embung, waduk, dan sistem drainase yang efisien, akan menjadi bagian dari kebijakan berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir dan kekeringan.

Infrastruktur hijau juga akan diintegrasikan dengan pembangunan perkotaan, di mana ruang terbuka hijau, taman, dan area resapan air akan diprioritaskan. Pengembangan infrastruktur transportasi publik yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan jalur sepeda akan dipromosikan untuk mengurangi emisi karbon dan kemacetan lalu lintas. Selain itu, program revitalisasi sungai, pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang modern, dan penggunaan energi bersih di fasilitas umum akan menjadi bagian dari upaya untuk menjadikan Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah yang tangguh terhadap perubahan iklim dan berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Misi 5

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Dalam misi "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan," Kabupaten Sukoharjo akan berfokus pada penguatan nilai-nilai sosial yang berlandaskan kebersamaan, gotong royong, serta semangat solidaritas antarwarga. Kabupaten Sukoharjo akan mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis melalui berbagai program yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, dan olahraga. Pembinaan terhadap kelompok-kelompok sosial, pemuda, dan komunitas akan terus ditingkatkan untuk membangun kohesi sosial yang lebih kuat, serta menciptakan ruang-ruang interaksi yang inklusif dan menyatukan berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, peran lembaga masyarakat seperti karang taruna, kelompok perempuan, serta organisasi kemasyarakatan lainnya akan diperkuat untuk memperkuat kehidupan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, kehidupan keagamaan akan menjadi pilar penting dalam pembangunan spiritual masyarakat Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo akan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan yang kondusif, serta memberikan dukungan terhadap rumah-rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di seluruh wilayah kabupaten. Program-program peningkatan toleransi antarumat beragama akan diprioritaskan untuk memastikan terciptanya suasana kerukunan yang damai dan harmonis di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Selain itu, perhatian khusus akan

diberikan pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan literasi keagamaan, agar masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari secara bijak dan harmonis.

Berikut kesesuaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo dengan Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.1

**Kesesuaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029
Dengan Visi Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029**

"Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat	Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (<i>Governance</i>) Serta Layanan Publik yang Berkualitas	• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Integritas
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif dan Responsif Gender	• Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global
3. Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif	• Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Perdesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan Berkelanjutan; • Menjaga Iklim Investasi yang Kondusif dan Kolaboratif Untuk Membuka Kesempatan Kerja dan Berusaha Seluas-Luasnya Bagi Warga Jawa Tengah, serta Mengembangkan Pembiayaan Pembangunan yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi.
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan	• Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang Merata dan Berkeadilan Melalui Perencanaan Tata Ruang yang Responsif
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan	• Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah Dengan Pendekatan Budaya Lokal serta Menjamin Kebebasan Warga Dalam Menjalankan Ibadah, Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan.

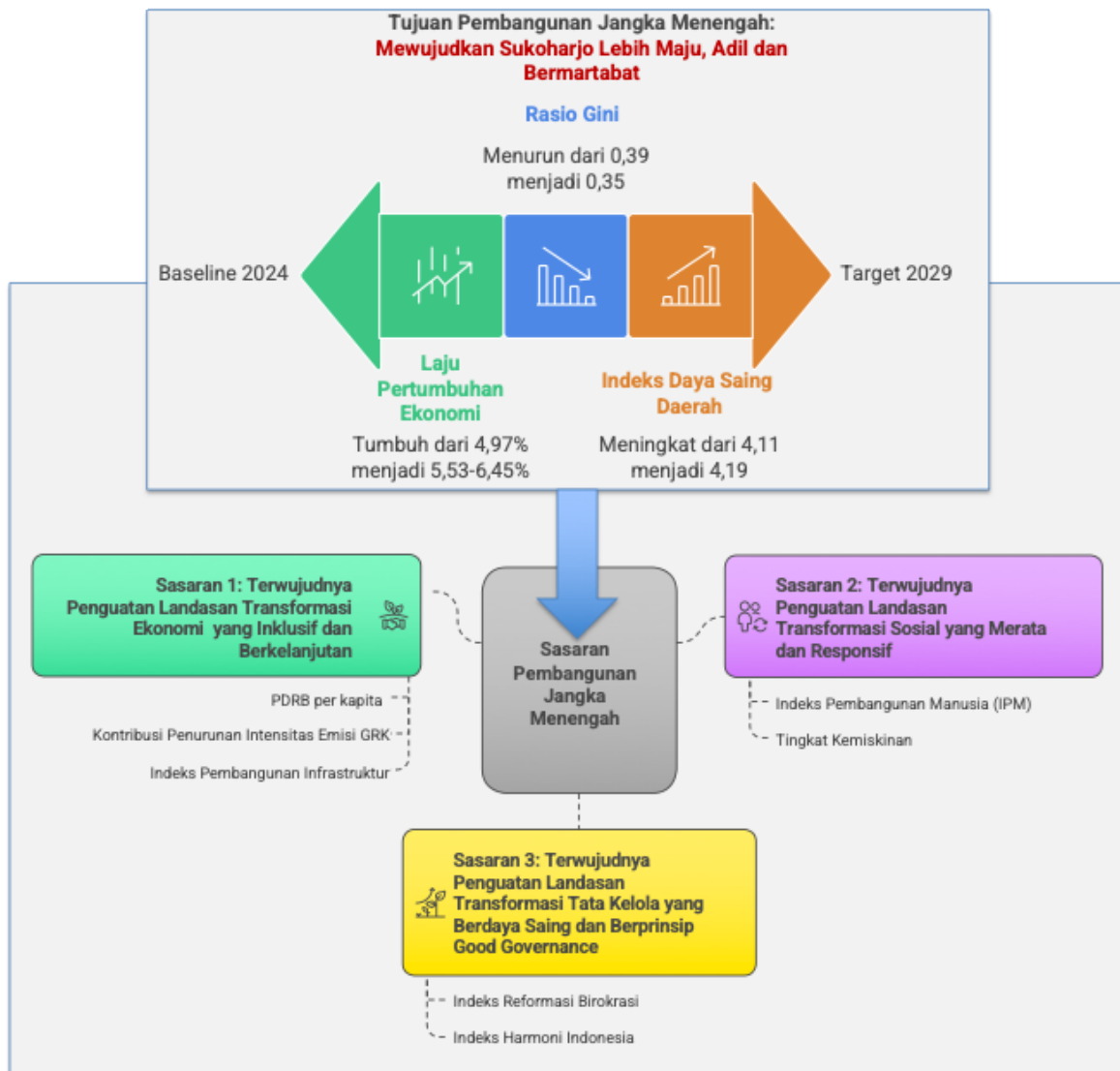
Berikut kesesuaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo dengan Visi RPJMN.

Tabel 3.2
Kesesuaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029
Dengan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029

"Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat"	Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (<i>Governance</i>) Serta Layanan Publik yang Berkualitas	• Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba dan Judi
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif dan Responsif Gender	• Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan Penyandang Disabilitas
3. Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif	• Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
	• Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Penumbuhan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan	• Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan	• Memperkokoh idelogo Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
	• Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.2. Tujuan Dan Sasaran

Implementasi pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerjanya sebagai ukuran kinerja bersifat operasional.



Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran pencapaian visi dan misi tersebut disampaikan dalam uraian sebagai berikut.

Tujuan:

Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat

Tujuan: Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat, mendukung implementasi Visi pembangunan jangka menengah daerah periode 2025-2029, “**Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat**”, dengan indikator kinerja Tujuan, yaitu:

1. **Laju pertumbuhan ekonomi** Kabupaten Sukoharjo yang tumbuh baik mencapai sekitar 5,53-6,45 pada tahun 2029 dalam mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, dimana baseline 2024 sebesar 4,97.

2. **Rasio gini**, ketimpangan di Kabupaten Sukoharjo yang berkurang/semakin rendah berkisar mencapai 0,35 (indeks) dalam mewujudkan Sukoharjo Lebih Adil, dimana baseline 2024 sebesar 0,39 (indeks).
3. **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**, kepemimpinan dan pengaruh di /lingkungan Nasional di Kabupaten Sukoharjo yang juga semakin meningkat menjadi sebesar 4,19 (indeks) pada tahun 2029 dalam mewujudkan Sukoharjo Lebih Bermartabat, dimana baseline 2024 sebesar 4,11 (indeks).

Sasaran:

Tujuan pembangunan jangka menengah daerah periode 2025-2029 dijabarkan dengan 3 sasaran, yaitu:

Sasaran 1: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Sasaran 1 dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pembentuk PDRB ditunjukkan dengan **PDRB per kapita** mencapai sekitar 70,08 juta rupiah pada tahun 2029, yang didukung oleh infrastruktur berkualitas sebagai penggerak pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan, yang ditunjukkan dengan **Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)** menjadi 1.615.147,43 TonCO₂eq pada tahun 2029 dalam rangka mendukung pencapaian *net zero emission* pada tahun 2060 dan **Indeks Pembangunan Infrastruktur** menjadi 60,78 (indeks) merupakan gambaran komitmen Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau, serta peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sasaran 1 mendukung fokus pembangunan Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan^(a) dan Peningkatan produktivitas daerah^(c), Peningkatan kualitas lingkungan hidup^(f) dan Peningkatan infrastruktur berkelanjutan^(b).

Sasaran 2: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif.

Sasaran 2 dalam rangka mencapai kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkarakter, adaptif dan tangguh dan kondusivitas wilayah yang aman, tertib, dan harmonis, ditunjukkan dengan semakin meningkat **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** menjadi 80,17 (indeks) pada tahun 2029 yang didukung oleh peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ditunjukkan dengan

Tingkat Kemiskinan / Persentase Penduduk Miskin semakin menurun menjadi 6,99-6,95% pada tahun 2029 yang diharapkan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo akan semakin menurun. Sasaran 2 mendukung fokus Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan^(a), dan Penguatan daya saing SDM berkelanjutan^(d).

Sasaran 3: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip *Good Governance*.

Sasaran 3 dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital ditunjukkan dengan **Indeks Reformasi Birokrasi** menjadi 83 (indeks) pada tahun 2029 yang didukung kondusivitas wilayah yang aman, tertib, dan harmonis, ditunjukkan dengan semakin meningkat **Indeks Harmoni Indonesia** menjadi 8 (indeks) pada tahun 2029. Sasaran 3 mendukung fokus pembangunan Tata kelola pemerintahan yang baik^(g), dan Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan berbudaya maju^(e).

Penjabaran masing-masing tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada pencapaian setiap misi di atas ditunjukkan melalui tabel 3.1 berikut ini.



Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Sumber Indikator	Kondisi Awal		Target Tahun						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan	Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	SV 1.a ⁽¹⁾	5,06	4,97	4,97- 5,20	5,50- 6,30	5,51- 6,35	5,52- 6,40	5,53- 6,45	5,54- 6,50	5,54- 6,50
		Rasio Gini	Angka / Indeks	SV 2.b ⁽¹⁾	0,401	0,39	0,37	0,365	0,360	0,355	0,35	0,345	0,345
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka / Indeks	SV 3.a ⁽¹⁾	3,69	4,11	4,12	4,15	4,17	4,18	4,19	4,2	4,2
Sasaran 1	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PDRB per kapita	Rp Juta	SV 1.b ⁽¹⁾	49,88	53,08	56,28	59,58	62,98	66,48	70,08	73,78	73,78
		Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO ₂ eq	SV 5 ⁽¹⁾	NA ⁽²⁾	NA ⁽²⁾	815.147, 43	1.015.147, 43	1.215.147, 43	1.415.147, 43	1.615.147, 43	2.015.147, 43	2.015.147, 43
		Indeks Pembangunan Infrastruktur			53,94	56,86	57,56	58,41	59,17	59,93	60,78	61,63	61,63
Sasaran 2	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka / Indeks	SV 4 ⁽¹⁾	78,65	79,3	79,5	79,75	79,8	80	80,17	80,22	80,22
		Tingkat Kemiskinan/	%	SV 2.a ⁽¹⁾	7,58	7,47	7,30- 7,10	7,20- 7,15	7,15- 7,06	7,06- 6,99	6,99- 6,95	6,95- 6,90	6,95- 6,90



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Sumber Indikator	Kondisi Awal		Target Tahun						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Persentase Penduduk Miskin											
Sasaran 3	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip <i>Good Governance</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka / Indeks	SV 3.b ⁽¹⁾	72,92	86,2	77,97	80	81	82	83	84	84
		Indeks Harmoni Indonesia	Angka / Indeks		NA ⁽³⁾	NA ⁽³⁾	6,88	7	7,5	7,8	8	8,5	8,5

Keterangan:

- 1) Merupakan Indikator Sasaran Visi dalam RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045
- 2) Data tidak tersedia akibat kebijakan metode perhitungan baru sesuai surat Bappeda Provinsi Jawa Tengah No. S/500.10.15.6/389/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Perihal Penyelarasan Target Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kabupaten/Kota
- 3) Data tidak tersedia akibat penyempurnaan pengukuran sesuai Surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.4.7/e-170/Polpum Tanggal 25 Februari 2025 Perihal Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025

3.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2026-2030 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2026-2030 dirumuskan pentahapan, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

Pentahapan pembangunan Kabupaten Sukoharjo merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029. Pentahapan pembangunan pada tahun 2026 hingga 2030, sebagai berikut:



Gambar 3.3 Pentahapan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026-2030



Tabel 3.4 Pentahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026-2030

2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional, dengan fokus pada:	Pengembangan Perekonomian Daerah Termasuk Ekonomi Syariah dan Pariwisata Berkelanjutan Serta Digitalisasi Tata Kelola dan Penguatan Konektivitas Daerah, dengan fokus pada:	Akselerasi Produktivitas Daerah, Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau, serta Ketahanan Pangan Berkelanjutan, dengan fokus pada:	Pemantapan Perekonomian Inklusif, Berkeadilan, Daya Saing Daerah, dan Kualitas Hidup Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan, dengan fokus pada:	Perwujudan Sukoharjo Yang Lebih Maju, Adil, Dan Bermartabat yang Berkelanjutan.
1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan melalui berbagai inovasi. 2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan. 3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.	1. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. 2. penguatan promosi pariwisata berbasis digital. 3. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikansarana prasarana destinasi wisata. 4. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti	1. peningkatan dan percepatan kinerja produktivitas sektor-sektor unggulan yaitu sektor pertanian untuk mendukung tumbuhnya industri pengolahan, perdagangan dan jasa, koperasi secara merata. 2. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan. 3. penerapan ekonomi hijau. 4. penerapan sirkular ekonomi dan	1. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter melalui peningkatan akses layanan pendidikan berkualitas, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kebugaran dan daya saing olahraga, peningkatan budaya literasi masyarakat, peningkatan daya saing pemuda. 2. peningkatan pemerataan layanan dan perlindungan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.	Tahun ini menjadi puncak dari semua tahapan sebelumnya. Sukoharjo diharapkan telah mencapai kondisi yang lebih maju secara ekonomi, berkeadilan dalam distribusi kesejahteraan, serta memiliki masyarakat yang bermartabat dengan kualitas hidup yang lebih baik, dan berkelanjutan.



2026	2027	2028	2029	2030
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal dan inovasi. 5. pemenuhan hak dasar masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan. 6. pengembangan keanekaragaman pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan. 7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan bio-fortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (<i>large scale food fortification/LSFF</i>).	pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital. 5. peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah termasuk antar destinasi wisata. 6. penguatan integrasi antar destinasi wisata. 7. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata. 8. penguatan fasilitas kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata. 9. <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata. 10. pengembangan kepariwisataan dan	dekarbonisasi industri melalui penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. 5. penerapan standar industri hijau dan produk ramah lingkungan. 6. peningkatan produktivitas perekonomian berbasis potensi unggulan lokal desa dengan upaya diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi dan ekonomi kreatif. 7. penguatan peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. 8. peningkatan kerja sama desa dengan pihak ketiga dan kerja sama antar desa. 9. peningkatan stabilitas produksi pertanian tanaman pangan untuk menjaga ketahanan pangan berkelanjutan	3. peningkatan pembangunan berbasis gender dan ketahanan keluarga. 4. peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja. 5. pemantapan birokrasi yang berintegritas dan dinamis. 6. peningkatan kondusivitas wilayah.	



2026	2027	2028	2029	2030
8. pencegahan pemborosan pangan (<i>food loss and waste</i>).	ekosistem ekonomi kreatif yang holistik. 11. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal <i>value chain</i> , penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) syariah. 12. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah.			

Sasaran 1:**Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian Sasaran 1, melalui Strategi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh ketahanan ekonomi lokal berbasis pertanian dan UMKM, dengan fokus pada pembukaan lapangan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi penduduk usia produktif. Arah kebijakan pada strategi 1 dalam pencapaian sasaran 1, yaitu:

- a. Memperkuat kewirausahaan dan UMKM melalui kemitraan usaha, peningkatan akses pembiayaan, pengembangan koperasi, penciptaan peluang usaha, peningkatan nilai tambah usaha sosial, dan pengembangan UMKM berbasis syariah.
- b. Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi kreatif berbasis potensi lokal melalui promosi, peningkatan SDM, dan kolaborasi yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan penguatan kelembagaan, infrastruktur, dan akses pemasaran serta permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
- d. Menciptakan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja melalui peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, termasuk pengembangan keuangan syariah, subsidi, jaminan usaha, dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- e. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.
- f. Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi dan pemasaran peluang investasi.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sesuai pelaksanaan arah kebijakan pada strategi 1 dalam pencapaian sasaran 1 yang mendukung Misi 3, yaitu:

1. UMKM Naik Kelas

Merupakan inisiatif untuk membantu UMKM di Kabupaten Sukoharjo meningkatkan skala usaha mereka dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dan dari menengah menjadi bisnis yang berkelanjutan. Program ini akan memberikan berbagai bentuk dukungan, mulai dari akses permodalan yang lebih mudah, pelatihan manajemen bisnis, penggunaan teknologi digital, hingga promosi dan perluasan akses pasar, baik lokal maupun nasional.

2. Desa Wisata Berkelanjutan

Program Desa Wisata Berkelanjutan bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di desa-desa Kabupaten Sukoharjo dengan prinsip kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

3. Subsidi Bunga Pinjaman UMK

Program Subsidi Bunga Pinjaman UMK bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, dan di Kabupaten Sukoharjo dengan mensubsidi sebagian atau seluruh bunga pinjaman modal usaha. Program ini diharapkan dapat meringankan beban bunga kredit yang seringkali menjadi hambatan bagi UMK dalam pengembangan usaha.

4. *Smart Farming*

Program *Smart Farming* adalah inisiatif untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kegiatan pertanian di Sukoharjo. Teknologi ini memungkinkan petani memantau kondisi lahan, tanaman, dan cuaca secara real-time, serta membuat keputusan yang lebih cerdas terkait dengan irigasi, pemupukan, dan pengendalian hama. Melalui penerapan teknologi ini, produksi pertanian dapat ditingkatkan, risiko kegagalan panen bisa diminimalkan, dan biaya operasional pertanian dapat ditekan.

5. Investasi Berbasis Potensi Lokal

Mendorong penanaman modal di sektor-sektor unggulan Kabupaten Sukoharjo, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, dengan menyediakan informasi investasi yang komprehensif serta insentif bagi investor yang berkontribusi pada pemberdayaan lokal.

6. Program Pengembangan Pasar Lokal dan Ekspor (*Sukoharjo Go Global*)

Meningkatkan daya saing produk lokal Sukoharjo di pasar nasional dan internasional melalui penguatan standar kualitas, branding, dan akses pasar ekspor.

7. Penguatan Rantai Pasok Produk Lokal

Memperkuat rantai pasok produk lokal dari sektor pertanian, perikanan, dan IKM untuk meningkatkan daya saing produk serta memperluas distribusi di pasar nasional.

8. Program Asuransi Pertanian

Program Asuransi Pertanian bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi petani di Kabupaten Sukoharjo terhadap risiko kerugian yang disebabkan oleh bencana alam, perubahan iklim, hama, atau penyakit tanaman.

9. Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengolahan langsung oleh masyarakat di tingkat rumah tangga. Program ini akan memberikan pelatihan dan dukungan modal kepada rumah tangga petani untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi, seperti makanan olahan, produk kemasan, dan aneka pangan lokal.

10. Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian

Program ini berfokus pada pembangunan dan revitalisasi embung, jaringan irigasi air tanah dalam, serta pemeliharaan dan perluasan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan jalan usaha tani. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi lahan pertanian serta memperbaiki akses infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sukoharjo.

Pentahapan pencapaian sasaran 1 melalui strategi 1 pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029, sebagai berikut:



Tabel 3.5 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 Dalam Pencapaian:

Sasaran 1: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Melalui Strategi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh ketahanan ekonomi lokal berbasis pertanian dan UMKM

2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
Penguatan Fondasi Kewirausahaan, UMKM Berdaya Saing, dan Kelembagaan Ekonomi Berkelanjutan, termasuk ekonomi syariah	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah	Penguatan Industri Pariwisata, Daya Saing Ekonomi Lokal, dan Akselerasi Sektor Ekonomi Utama	Pemantapan Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Konsolidasi Sektor Ekonomi Utama dalam Pemerataan Pendapatan dan Ketahanan Pangan berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Perwujudan Sukoharjo sebagai Daerah dengan Ekonomi yang Merata, Mandiri, dan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan	1) UMKM Naik Kelas , yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam memperkuat kewirausahaan dan UMKM melalui kemitraan usaha, peningkatan akses pembiayaan, pengembangan koperasi, penciptaan peluang usaha, peningkatan nilai tambah usaha sosial, dan pengembangan UMKM berbasis syariah. 2) Desa Wisata Berkelanjutan , yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi kreatif berbasis potensi lokal melalui promosi, peningkatan SDM, dan kolaborasi yang mendukung pertumbuhan
Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	
1. Memperkuat ekosistem kewirausahaan dan UMKM termasuk koperasi dengan peningkatan akses pembiayaan, kemitraan, serta pendampingan usaha melalui inkubasi bisnis, serta pengembangan UMKM berbasis syariah. 2. Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis potensi lokal, dengan pengembangan desa wisata, branding	1. Transformasi digital bagi UMKM dan koperasi, termasuk perluasan akses marketplace digital, pelatihan e-commerce, dan fasilitasi pemasaran berbasis teknologi, serta peningkatan pengembangan UMKM berbasis syariah. 2. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan teknologi, melalui program peningkatan	1. Meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal dengan mendorong hilirisasi produk unggulan daerah serta penguatan klaster industri berbasis sumber daya lokal, serta peningkatan pengembangan UMKM berbasis syariah. 2. Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan infrastruktur destinasi, penguatan promosi	1. Meningkatkan daya saing dan inovasi UMKM dan koperasi, melalui kolaborasi dengan dunia usaha, optimalisasi insentif fiskal, dan peningkatan kapasitas SDM wirausaha, serta perluasan pengembangan UMKM berbasis syariah. 2. Memperkuat industri kreatif berbasis budaya dan teknologi, dengan mendukung festival ekonomi kreatif,	1. Membangun ekonomi daerah berbasis kolaborasi dan kemitraan strategis, dengan integrasi UMKM dalam rantai pasok industri besar dan kemitraan dengan investor nasional maupun global, serta penguatan pengembangan UMKM berbasis syariah. 2. Menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi	



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
destinasi unggulan, dan pelatihan SDM pariwisata. 3. Penguatan kelembagaan petani dan UMKM agribisnis untuk meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan. 4. Perluasan akses ekonomi produktif dengan meningkatkan layanan perizinan usaha, akses permodalan, termasuk pengembangan keuangan syariah, dan pelatihan keterampilan tenaga kerja. 5. Meningkatkan kualitas pasar domestik dengan penguatan infrastruktur distribusi dan pengawasan perdagangan daerah. 6. Penyediaan informasi dan promosi investasi berbasis potensi lokal	keterampilan digital bagi pelaku industri kreatif serta penguatan jejaring bisnis kreatif. 3. Modernisasi pertanian dengan peningkatan infrastruktur irigasi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kelembagaan petani. 4. Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan akses permodalan bagi usaha ekonomi produktif, termasuk pengembangan keuangan syariah, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri. 5. Memperkuat daya saing produk unggulan daerah dengan meningkatkan standar kualitas dan pengawasan perdagangan.	berbasis media digital, dan peningkatan kualitas layanan wisata. 3. Peningkatan produktivitas pertanian melalui mekanisasi dan pemanfaatan teknologi berbasis riset dan inovasi. 4. Perluasan akses ekonomi dengan peningkatan akses permodalan bagi usaha ekonomi produktif, termasuk pengembangan keuangan syariah, serta memperkuat kemitraan antara industri, UMKM, lembaga keuangan/perbankan dan tenaga kerja lokal. 5. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan peningkatan volume ekspor dengan strategi hilirisasi produk unggulan daerah.	meningkatkan akses permodalan bagi startup kreatif, serta memperluas jejaring global. 3. Penguatan sektor pertanian dan peternakan sebagai penyokong utama ekonomi daerah melalui optimalisasi rantai pasok dan akses pasar. 4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi produktif melalui pengembangan wirausaha dan koperasi sektor unggulan, serta pengembangan permodalan bagi usaha ekonomi produktif, termasuk pengembangan keuangan syariah. 5. Meningkatkan kualitas ekspor daerah melalui sertifikasi produk, pengembangan merek	daerah, melalui penguatan daya tarik wisata unggulan, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata, serta penguatan kebijakan ekonomi kreatif berbasis inovasi dan keberlanjutan. 3. Menjadikan sektor pertanian dan industri pangan sebagai motor utama perekonomian dengan skema insentif dan perlindungan bagi petani dan pelaku usaha. 4. Memperkuat ekosistem tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan industri berbasis teknologi, serta memperkuat usaha ekonomi produktif, termasuk memperkuat	sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 3) Subsidi Bunga Pinjaman UMK, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam memperkuat kewirausahaan dan UMK melalui kemitraan usaha, peningkatan akses pembiayaan, pengembangan koperasi, penciptaan peluang usaha, peningkatan nilai tambah usaha sosial, dan pengembangan UMK berbasis syariah. 4) Smart Farming, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan penguatan kelembagaan, infrastruktur, dan akses pemasaran serta permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
guna menarik minat investor baru.	6. Meningkatkan investasi daerah dengan skema insentif dan promosi investasi berbasis keunggulan lokal. 7. Pengembangan ekonomi berbasis syariah	6. Meningkatkan daya tarik investasi dengan penyederhanaan regulasi dan penguatan ekosistem investasi berkelanjutan.	lokal, serta diversifikasi produk. 6. Menarik investasi jangka panjang dengan membangun kawasan industri berbasis potensi daerah.	pengembangan keuangan syariah. 5. Memastikan daya saing perdagangan daerah dengan memperluas akses pasar global serta memperkuat kebijakan ekspor. 6. Meningkatkan kepercayaan investor dengan transparansi kebijakan, percepatan layanan perizinan, dan pengembangan infrastruktur pendukung.	5) Investasi Berbasis Potensi Lokal, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam menciptakan peningkatan investasi dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan. Berfokus pada produk-produk yang menjadi keunggulan lokal yang mempunyai nilai daya saing dan nilai daya ungkit terhadap perekonomian. 6) Program Pengembangan Pasar Lokal dan Ekspor (Sukoharjo Go Global), yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
					7) Penguatan Rantai Pasok Produk Lokal, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah. 8) Program Asuransi Pertanian, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan penguatan kelembagaan, infrastruktur, dan akses pemasaran serta permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 9) Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
					meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan penguatan kelembagaan, infrastruktur, dan akses pemasaran serta permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 10)Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan penguatan kelembagaan, infrastruktur, dan akses pemasaran serta permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian Sasaran 1, melalui Strategi 2: Pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang semakin merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Arah kebijakan pada strategi 2 dalam pencapaian sasaran 1, yaitu:

- a. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan penataan infrastruktur antar wilayah, daerah perbatasan, serta wajah kota dilakukan untuk mendukung perekonomian dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang.
- b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor jasa konstruksi untuk memastikan pembangunan berkualitas.
- c. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
- d. Peningkatan penanganan permukiman kumuh.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi.
- f. Peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital di seluruh wilayah.
- g. Penguatan perlindungan lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran dan peningkatan pengelolaan persampahan.
- h. Peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dengan memperkuat mitigasi, respons darurat, dan pemulihan untuk mengurangi risiko serta kerentanan masyarakat.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sesuai pelaksanaan arah kebijakan pada strategi 2 dalam pencapaian sasaran 1 yang mendukung Misi 4, yaitu:

1. Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus

Program **"Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus"** bertujuan untuk memperbaiki dan memperluas jaringan jalan serta infrastruktur pendukung di Kabupaten Sukoharjo, memastikan aksesibilitas yang lebih baik antar wilayah dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Program ini akan meningkatkan kualitas jalan, terutama di daerah perbatasan dan pedesaan, serta membangun jembatan yang kokoh dan tahan lama. Dengan infrastruktur jalan yang baik, masyarakat akan lebih mudah beraktivitas, dan roda ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat. Fokus utamanya adalah pada perbaikan jalan berlubang, pelebaran jalan, serta pembangunan infrastruktur jalan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2. Penataan Wajah Kota (*Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho*)

Program ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan pedesaan dan meningkatkan tata kelola perkotaan di Kabupaten Sukoharjo dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Program ini

mencakup pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, program ini juga berfokus pada penataan kawasan perkotaan, termasuk perbaikan alun-alun, trotoar, taman kota, dan fasilitas umum lainnya. Dengan menyatukan keindahan desa dan kemajuan kota, program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang harmonis, berdaya saing, dan nyaman. Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong dan menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru serta ruang interaksi dan aktualisasi dengan sasaran 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

3. Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh

Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah lingkungan kumuh di Kabupaten Sukoharjo melalui penataan ulang kawasan, rehabilitasi permukiman, serta peningkatan infrastruktur dasar yang layak. Fokus utama dari program ini adalah menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh. Program ini akan mencakup pembangunan rumah layak huni, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, penyediaan infrastruktur jalan dan drainase yang memadai, serta pengembangan ruang publik dan hijau di kawasan yang sebelumnya tidak tertata.

4. Terangi Jalanku

Program "Terangi Jalanku" adalah inisiatif untuk meningkatkan infrastruktur penerangan jalan di Kabupaten Sukoharjo dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan. Program ini berfokus pada pemasangan dan peremajaan lampu jalan di seluruh wilayah, mulai dari kawasan perkotaan hingga pedesaan.

5. "Sukoharjo Sehat": Akses Air minum dan Sanitasi Aman

Program ini bertujuan meningkatkan akses Air minum dan Sanitasi Aman serta aman bagi seluruh masyarakat Sukoharjo dengan membangun infrastruktur distribusi air bersih, instalasi pengolahan air limbah, dan sanitasi di kawasan pedesaan dan perkotaan.

6. "Mobilitas Sukoharjo": Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas transportasi di Kabupaten Sukoharjo, baik transportasi publik maupun infrastruktur pendukung.

7. Penuntasan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK

Program ini berfokus pada pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital di seluruh sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik.

8. Program Lingkungan Sehat: Pengelolaan Sampah Terintegrasi

Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Sukoharjo melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan. Program ini akan mencakup sistem pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir dengan pendekatan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. Fokus utama dari program ini adalah untuk mengurangi timbunan sampah, meningkatkan daur ulang, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber energi terbarukan.

9. Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Program ini berfokus pada peningkatan ketahanan Kabupaten Sukoharjo terhadap bencana melalui penguatan mitigasi, respons darurat, dan pemulihan pascabencana.

Pentahapan pencapaian sasaran 1 melalui strategi 2 pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029, sebagai berikut:



Tabel 3.6 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 Dalam Pencapaian:

Sasaran 1: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
melalui Strategi 2: Pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang semakin merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan

2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
Penguatan Fondasi Infrastruktur dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk konektivitas antar obyek wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi yang Berkelanjutan dan Adaptif terhadap Risiko Lingkungan	Penguatan Infrastruktur Berbasis Keunggulan Wilayah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim dan Risiko Bencana dalam Pembangunan Berkelanjutan	Perwujudan Infrastruktur dan Ketahanan Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	1) Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus , yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan penataan infrastruktur antar wilayah, daerah perbatasan, serta wajah kota dilakukan untuk mendukung perekonomian dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor jasa konstruksi untuk memastikan pembangunan berkualitas.
Fokus Prioritas 1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur antar wilayah serta daerah perbatasan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung perekonomian daerah. 2. Peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor jasa konstruksi guna memastikan pembangunan infrastruktur berkualitas.	Fokus Prioritas 1. Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur utama di perkotaan dan daerah perbatasan guna memperkuat konektivitas antar wilayah, dan peningkatan konektivitas antar obyek wisata untuk mendukung pertumbuhan usaha dan ekonomi kreatif 2. Peningkatan sertifikasi dan keterampilan	Fokus Prioritas 1. Pengembangan infrastruktur kawasan industri dan perdagangan berbasis tata ruang guna meningkatkan daya saing daerah. 2. Implementasi sistem pelatihan tenaga kerja konstruksi berbasis digital dan teknologi bangunan hijau. 3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi berbasis ekosistem	Fokus Prioritas 1. Pemantapan pembangunan infrastruktur ekonomi dengan mengoptimalkan tata ruang dan kelestarian lingkungan. 2. Penguatan tenaga kerja konstruksi dengan penerapan teknologi konstruksi ramah lingkungan. 3. Konsolidasi akses air minum dan sanitasi dengan memperkuat pengelolaan sumber	Fokus Prioritas 1. Konsolidasi pembangunan infrastruktur berbasis keberlanjutan dan ekonomi hijau. 2. Optimalisasi tenaga kerja konstruksi dengan integrasi sistem pendidikan vokasi dan industri. 3. Keberlanjutan akses air minum dan sanitasi dengan manajemen sumber daya air terpadu.	2) Penataan Wajah Kota (Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho) , yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan penataan infrastruktur antar wilayah, daerah perbatasan, serta wajah kota



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
3. Percepatan peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat. 4. Pengurangan kawasan permukiman kumuh secara bertahap. 5. Peningkatan kualitas layanan transportasi publik untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi. 6. Penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mempercepat transformasi digital di daerah. 7. Penguatan regulasi dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengurangan pencemaran udara, air, dan tanah, serta peningkatan kapasitas	tenaga kerja konstruksi untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi. 3. Peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan dan sanitasi aman dengan target akses universal. 4. Penataan kawasan permukiman dengan pendekatan berbasis tata ruang. 5. Pengembangan sistem transportasi publik berbasis ramah lingkungan untuk mengurangi kemacetan dan emisi karbon. 6. Penguatan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi berbasis teknologi dan smart city. 7. Pengembangan dan implementasi infrastruktur hijau, seperti sistem drainase	lingkungan berkelanjutan. 4. Revitalisasi kawasan kumuh berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. 5. Integrasi moda transportasi berbasis teknologi untuk meningkatkan mobilitas perkotaan dan pedesaan. 6. Digitalisasi infrastruktur perkotaan untuk mempercepat layanan publik dan mendukung ekonomi digital. 7. Penerapan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan persampahan dan sumber daya, termasuk optimalisasi pengelolaan limbah industri dan rumah tangga untuk mengurangi dampak pencemaran, serta peningkatan mitigasi	daya air berbasis daerah. 4. Peningkatan kualitas permukiman berbasis komunitas dan pola hunian vertikal. 5. Modernisasi sistem transportasi publik dan jalan dengan teknologi ramah lingkungan. 6. Peningkatan kapasitas infrastruktur digital untuk mempercepat layanan administrasi dan ekonomi berbasis data. 7. Penguatan sistem monitoring dan pengawasan pencemaran lingkungan, dengan penerapan teknologi digital dalam pemantauan kualitas udara, air, dan limbah industri secara real-time. 8. Integrasi kebijakan manajemen risiko	4. Perwujudan kawasan bebas kumuh. 5. Transformasi transportasi berbasis energi terbarukan untuk mendukung target emisi nol karbon. 6. Penguatan ekosistem smart city dengan integrasi infrastruktur digital dan big data. 7. Konsolidasi kebijakan dan implementasi pembangunan berkelanjutan, dengan memperkuat peran sektor swasta dan masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam. 8. Optimalisasi kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, dengan menerapkan	dilakukan untuk mendukung perekonomian dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor jasa konstruksi untuk memastikan pembangunan berkualitas. 3) Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam peningkatan penanganan permukiman kumuh. 4) Terangi Jalanku, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan penataan infrastruktur antar wilayah, daerah perbatasan, serta wajah kota dilakukan untuk mendukung perekonomian dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor jasa konstruksi untuk memastikan pembangunan berkualitas.



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
kelembagaan dalam pengelolaan persampahan. 8. Pembangunan sistem mitigasi bencana berbasis komunitas, dengan peningkatan edukasi masyarakat mengenai mitigasi bencana serta penguatan infrastruktur respons darurat untuk mengurangi risiko bencana.	ramah lingkungan, ruang terbuka hijau perkotaan, dan fasilitas daur ulang persampahan yang lebih efisien. 8. Peningkatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim, melalui rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi dan penguatan adaptasi lingkungan berbasis tata ruang yang responsif terhadap risiko bencana.	perubahan iklim, dengan mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon di sektor transportasi serta industri. 8. Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi perubahan iklim.	bencana dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan fokus pada penguatan sistem peringatan dini, peningkatan infrastruktur tahan bencana, dan optimalisasi peran masyarakat dalam mitigasi risiko.	strategi adaptasi berbasis ekosistem dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam respons bencana.	5) Sukoharjo Sehat: Akses Air minum dan Sanitasi Aman, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo. 6) Mobilitas Sukoharjo: Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi. 7) Penuntasan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital di seluruh wilayah. 8) Program Lingkungan Sehat: Pengelolaan



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
					Sampah Terintegrasi, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam penguatan perlindungan lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran dan peningkatan pengelolaan persampahan. 9) Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dengan memperkuat mitigasi, respons darurat, dan pemulihan untuk mengurangi risiko serta kerentanan masyarakat.

Sasaran 2:**Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif**

Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian Sasaran 2, melalui Strategi 3 Membangun SDM unggul, sehat jasmani-rohani, produktif dan berkarakter melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Arah kebijakan pada strategi 3 dalam rangka pencapaian sasaran 2, yaitu:

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan melalui penguatan layanan primer dan rujukan, penanganan stunting yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi kesehatan, serta perluasan jangkauan pelayanan kepada kelompok rentan, termasuk lanjut usia.
- b. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui peningkatan sarana, kompetensi pendidik, manajemen mutu, pendidikan inklusi, dan budaya literasi.
- c. Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, serta perlindungan hak anak.
- d. Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pramuka, serta pelatihan startup wirausaha muda.
- e. Mengembangkan keolahragaan dengan peningkatan sarana olahraga, penghargaan atlet, dan penyelenggaraan event.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sesuai pelaksanaan arah kebijakan pada strategi 3 dalam pencapaian sasaran 2 yang mendukung implementasi Misi 2, yaitu:

1. Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD

Program Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Sukoharjo dengan menciptakan sekolah-sekolah unggulan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif, efektif, dan berfokus pada pengembangan karakter serta potensi siswa.

2. Posyandu Terpadu (*One Stop Health Center*) untuk Integrasi Layanan Primer

Program ini inisiatif untuk memperkuat layanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat melalui posyandu yang terintegrasi. Program ini bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan yang holistik dan mudah diakses, mencakup kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular. Dengan konsep "*one stop service*," posyandu ini akan menjadi pusat layanan

kesehatan primer yang komprehensif dan efisien, melayani berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat di satu lokasi.

3. Kampanye Hidup Sehat Sukoharjo (KHS)

Kampanye terpadu untuk mendorong gaya hidup sehat melalui edukasi kesehatan, pencegahan penyakit yang menjangkit semua penduduk Sukoharjo, khususnya remaja, calon pengantin, ibu hamil, lansia dan anak-anak.

4. Pencegahan dan Penanganan Stunting

Program Pencegahan dan Penanganan Stunting adalah inisiatif strategis untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sukoharjo melalui intervensi gizi dan kesehatan yang menyeluruh, mulai dari masa remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak usia 0-59 bulan. Program ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, peningkatan akses layanan kesehatan, serta edukasi kepada keluarga tentang pentingnya perawatan anak sejak dini.

5. Pendidikan Inklusi dan Keterampilan Khusus

Peningkatan akses pendidikan inklusi dan pelatihan keterampilan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang setara dan inklusif.

6. Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS)

Program untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pengembangan keterampilan, serta penerapan kebijakan responsif gender.

7. Sukoharjo Pemuda Produktif

Program pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda melalui pelatihan, mentoring, dan pendampingan bisnis untuk mendorong inovasi dan kemandirian ekonomi di kalangan pemuda.

8. Sukoharjo Juara

Optimalisasi fungsi pusat olahraga (GOR) dilakukan untuk membina dan mengembangkan atlet lokal agar bisa bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Program ini mencakup pelatihan intensif, kompetisi rutin, dan peningkatan fasilitas olahraga, dengan tujuan mencetak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Sukoharjo di berbagai kompetisi olahraga.

Pentahapan pencapaian sasaran 2 melalui strategi 3 pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029, sebagai berikut:



Tabel 3.7 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 Dalam Pencapaian:

Sasaran 2: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif

Melalui Strategi 3: Membangun SDM unggul, sehat jasmani-rohani, produktif dan berkarakter melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya

2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
Penguatan Fondasi Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	Akselerasi Pendidikan Inklusif dan Pembangunan Kesehatan yang Berkeadilan	Pemantapan SDM yang Inovatif, Tangguh, dan Adaptif terhadap Pembangunan Berkelanjutan	Perwujudan Sukoharjo sebagai daerah dengan Masyarakat yang Produktif, Adaptif, dan Tangguh terhadap perubahan global	1) Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD , yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui peningkatan sarana, kompetensi pendidik, manajemen mutu, pendidikan inklusi, dan budaya literasi. 2) Posyandu Terpadu (<i>One Stop Health Center</i>) untuk Integrasi Layanan Primer , yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan melalui penguatan layanan primer dan rujukan, penanganan stunting yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi kesehatan, serta
Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	
1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang komprehensif dan integratif. Upaya dilakukan dengan memperluas akses dan mutu layanan dasar, memperkuat promosi dan pencegahan penyakit berbasis keluarga dan komunitas, serta memperluas dukungan kader gizi dan kesehatan di lapangan. Penanganan stunting	1. Peningkatan cakupan layanan kesehatan masyarakat, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak (KIA). Penyediaan fasilitas kesehatan diperluas ke wilayah yang masih memiliki kesenjangan layanan, dengan pendekatan proaktif dan berbasis data wilayah. Program penurunan stunting diperkuat melalui inovasi intervensi gizi spesifik dan sensitif berbasis data keluarga	1. Pemantapan pengembangan sistem layanan kesehatan berbasis digital sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keterjangkauan layanan. Sistem ini mendukung pendataan keluarga risiko tinggi, pemantauan gizi, dan integrasi layanan primer secara real-time. Intervensi pencegahan stunting diperluas secara terintegrasi dengan edukasi gizi,	1. Penyempurnaan layanan kesehatan universal, dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM kesehatan, baik dari sisi jumlah, distribusi, maupun kompetensi. Pemanfaatan teknologi digital dan data semakin dimatangkan dalam manajemen kesehatan masyarakat, termasuk pemetaan beban penyakit, sistem peringatan dini stunting, dan penanganan penyakit	1. Perwujudan transformasi sistem layanan kesehatan berbasis teknologi cerdas (AI dan Big Data) untuk meningkatkan akurasi diagnosis, efektivitas pencegahan penyakit, dan efisiensi pelayanan. Teknologi digunakan untuk analisis prediktif risiko kesehatan populasi, personalisasi intervensi kesehatan, dan pemantauan kondisi kesehatan	



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
diprioritaskan melalui edukasi dan intervensi berbasis keluarga, dengan perluasan sasaran posyandu tidak hanya pada balita tetapi juga menjangkau kelompok lansia, sebagai bentuk transisi menuju pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup. Penguatan layanan primer dan sistem rujukan menjadi fondasi dalam membangun akses pelayanan yang berkeadilan dan berkualitas. 2. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan, serta meningkatkan sarana, kompetensi pendidik, dan budaya literasi. 3. Peningkatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan	berisiko tinggi. Pengembangan posyandu lansia mulai dilakukan secara sistematis, termasuk pelatihan kader dan integrasi dengan layanan primer dan rujukan. 2. Penguatan pendidikan inklusif melalui penyesuaian kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus, penguatan budaya literasi, serta peningkatan kompetensi pendidik. 3. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan penguatan peran perempuan di sektor ekonomi dan penguatan perlindungan anak dari kekerasan. 4. Mendorong jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda,	sanitasi, dan air bersih, yang berbasis pada peta wilayah dengan risiko tinggi. Penguatan posyandu lansia diperluas cakupannya, termasuk integrasi dengan program layanan kesehatan kronis dan penapisan penyakit tidak menular. 2. Meningkatkan pendidikan vokasi dan link-and-match dengan dunia industri, agar lulusan pendidikan lebih siap kerja dan berdaya saing. 3. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam ekonomi melalui pelatihan dan akses permodalan bagi wirausaha perempuan. 4. Penguatan karakter pemuda dan kepemimpinan, dengan memperluas jejaring komunitas kepemudaan dan	menular serta tidak menular. Sistem layanan terpadu untuk penanganan stunting multisektor diperkuat dengan pelibatan lintas dinas, termasuk pendidikan, sosial, dan sanitasi lingkungan. Program posyandu lansia diperkuat sebagai garda terdepan dalam sistem layanan primer untuk kelompok usia lanjut. 2. Revitalisasi pendidikan berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) untuk menciptakan SDM yang inovatif dan berdaya saing global. 3. Meningkatkan akses keuangan dan inklusi ekonomi bagi perempuan sebagai bagian dari strategi kesetaraan gender.	berbasis komunitas. Capaian penurunan stunting ditargetkan di bawah ambang batas nasional dengan penerapan layanan intervensi berkelanjutan dan adaptif, baik dari sisi gizi, sanitasi, pendidikan orang tua, maupun pelayanan primer. Program posyandu lansia ditransformasi menjadi unit pelayanan preventif dan promotif berbasis komunitas yang terintegrasi dengan sistem rujukan digital dan layanan spesialisik dasar, yang mampu menjamin kesehatan lansia secara holistik, bermartabat, dan berkelanjutan. 2. Pendidikan berbasis digitalisasi dan globalisasi, dengan	perluasan jangkauan pelayanan kepada kelompok rentan, termasuk lanjut usia. 3) Kampanye Hidup Sehat Sukoharjo (KHS), yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan melalui penguatan layanan primer dan rujukan, penanganan stunting yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi kesehatan, serta perluasan jangkauan pelayanan kepada kelompok rentan, termasuk lanjut usia. 4) Pencegahan dan Penanganan Stunting, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan melalui penguatan layanan



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
gender, serta perlindungan hak anak. 4. Meningkatkan kualitas pemuda dengan membina pemuda pelopor, mendorong wirausaha muda, dan memperkuat Pramuka sebagai wadah pembinaan karakter. 5. Pengembangan olahraga dengan peningkatan sarana olahraga, penghargaan bagi atlet berprestasi, serta penyelenggaraan event olahraga daerah.	melalui inkubasi bisnis startup dan peningkatan keterampilan pemuda dalam industri kreatif. 5. Peningkatan prestasi olahraga melalui pengembangan sport center, pembinaan atlet muda, serta penyelenggaraan kompetisi olahraga daerah.	program beasiswa kepemimpinan. 5. Mendorong olahraga sebagai industri ekonomi kreatif, dengan pelibatan UMKM dalam penyelenggaraan event olahraga daerah.	4. Peningkatan peran pemuda dalam inovasi sosial, dengan mendukung proyek-proyek sosial berbasis komunitas dan digital. 5. Meningkatkan ekosistem olahraga profesional melalui kemitraan dengan sektor swasta dan investasi dalam industri olahraga.	menghubungkan sekolah dan perguruan tinggi dengan ekosistem industri global. 3. Kesetaraan gender dalam kepemimpinan, dengan peningkatan jumlah perempuan dalam posisi strategis pemerintahan dan bisnis. 4. Pemuda sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi, dengan dukungan penuh bagi startup pemuda dan proyek inovasi berbasis teknologi. 5. Membangun Sukoharjo sebagai pusat sport tourism, dengan infrastruktur olahraga bertaraf internasional dan peningkatan daya saing atlet di kancah nasional dan internasional.	primer dan rujukan, penanganan stunting yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi kesehatan, serta perluasan jangkauan pelayanan kepada kelompok rentan, termasuk lanjut usia. 5) Pendidikan Inklusi dan Keterampilan Khusus, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui peningkatan sarana, kompetensi pendidik, manajemen mutu, pendidikan inklusi, dan budaya literasi. 6) Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS) yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, serta perlindungan hak anak. 7) Sukoharjo Pemuda Produktif, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
					meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pramuka, serta pelatihan startup wirausaha muda. 8) Sukoharjo Juara, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam Mengembangkan keolahragaan dengan peningkatan sarana olahraga, penghargaan atlet, dan penyelenggaraan event.

Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian Sasaran 2, melalui Strategi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terpadu melalui penguatan perlindungan sosial, dan penuntasan layanan dasar yang berkelanjutan dan partisipatif untuk penanggulangan kemiskinan. Arah kebijakan pada strategi 4 dalam pencapaian sasaran 2, yaitu:

- a. Meningkatkan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin dan rentan melalui penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan responsif.
- b. Meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi yang partisipatif, produktif, dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur dasar yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penyediaan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sesuai pelaksanaan arah kebijakan pada strategi 4 dalam pencapaian sasaran 2 yang mendukung Misi 3, yaitu:

1. Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar

Program Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar adalah inisiatif pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa penuh kepada pelajar berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Sukoharjo, agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Program ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang berpendidikan tinggi, memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta siap berkontribusi pada pembangunan daerah. Beasiswa diberikan setiap tahun kepada 100 orang pemuda berprestasi di Kabupaten Sukoharjo.

2. Penyediaan Rumah Layak Huni

Program "Penyediaan Rumah Layak Huni" adalah inisiatif untuk mengatasi masalah perumahan di Kabupaten Sukoharjo dengan menyediakan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membangun dan merenovasi rumah-rumah yang tidak layak huni, menggunakan konsep ramah lingkungan, serta memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan.

3. Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas

Membangun ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan pangan, lumbung pangan masyarakat dan sistem distribusi pangan yang efisien untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.

4. Santunan Kematian (Program Lanjutan)

Program Santunan Kematian merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Program ini bertujuan untuk meringankan beban finansial keluarga yang sedang berduka, terutama dalam menghadapi biaya pemakaman dan kebutuhan mendesak lainnya. Santunan ini akan diberikan dengan cepat dan tepat sasaran, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warganya dalam situasi sulit.

Pentahapan pencapaian sasaran 2 melalui strategi 3 pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029, sebagai berikut:



Tabel 3.8 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 Dalam Pencapaian:

Sasaran 2: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif

Melalui Strategi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terpadu melalui penguatan perlindungan sosial, dan penuntasan layanan dasar yang berkelanjutan dan partisipatif untuk penanggulangan kemiskinan

2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
Penguatan Fondasi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan Inovasi dan Akselerasi Akses Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Perwujudan Sukoharjo sebagai Daerah dengan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkelanjutan	
Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	
1. Peningkatan penanganan Anak Tidak Sekolah melalui verifikasi data berbasis desa dan program remedial pendidikan kesetaraan.	1. Penguatan kolaborasi multi-pihak dalam penanganan ATS dan peningkatan partisipasi sekolah.	1. Akselerasi eliminasi ATS melalui program beasiswa daerah dan dukungan pendidikan inklusif berbasis desa.	1. Pemantapan sistem monitoring dan intervensi untuk eliminasi ATS.	1. Perwujudan nol Anak Tidak Sekolah melalui pendidikan universal berbasis desa.	1) Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar , yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin dan rentan melalui penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan responsif.
2. Peningkatan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin.	2. Pengembangan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin.	2. Pengembangan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin.	2. Perluasan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin.	2. Penguatan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin.	2) Penyediaan Rumah Layak Huni , yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur dasar yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar secara bertahap melalui skema bantuan sosial terpadu dan padat karya.	3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat.	3. Penyediaan infrastruktur dasar dengan sistem berbasis pemetaan kawasan kumuh dan partisipasi warga.	3. Konsolidasi program infrastruktur dasar melalui sinergi antarinstitusi dan pendanaan alternatif.	3. Perwujudan seluruh warga dengan infrastruktur dasar yang layak melalui integrasi perencanaan dan anggaran.	3) Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas , yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penyediaan pangan
	4. Peningkatan akses pangan berkualitas melalui penguatan	4. Inovasi konsumsi pangan sehat dan berkualitas melalui kampanye gizi	4. Pemantapan ketahanan pangan dengan distribusi berbasis logistik inklusif	4. Perwujudan ketersediaan dan keterjangkauan pangan inklusif	



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
4. Penguatan sistem ketahanan pangan berbasis lokal dengan memperkuat rantai pasok petani kecil dan menjaga stabilitas harga pangan. 5. Penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial melalui pendampingan dan integrasi data penerima bantuan sosial.	distribusi pangan lokal dan stabilisasi harga. 5. Pengembangan layanan kesejahteraan sosial berbasis digital dan berbasis komunitas.	seimbang dan dukungan produksi pangan lestari. 5. Akselerasi pelayanan sosial dan bantuan perlindungan sosial adaptif untuk kelompok rentan.	dan kebijakan stabilisasi harga. 5. Konsolidasi program kesejahteraan sosial yang adaptif terhadap perubahan demografi dan risiko sosial.	melalui produksi lokal dan distribusi efisien. 5. Perwujudan sistem kesejahteraan sosial inklusif, tangguh, dan berbasis data terpadu.	yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau. 4) Santunan Kematian (Program Lanjutan), yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin dan rentan melalui penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan responsif.

Sasaran 3:

Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip *Good Governance*

Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian Sasaran 3, melalui Strategi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, layanan publik yang transparan dan berkualitas. Arah kebijakan pada strategi 5 dalam rangka pencapaian sasaran 3, yaitu:

- a. Meningkatkan layanan publik langsung dan membangun pemerintahan terbuka dengan keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan serapan aspirasi melalui kunjungan lapangan, termasuk peningkatan tata kelola dan layanan admindukcapil.
- b. Meningkatkan efisiensi kelembagaan dan manajemen SDM aparatur melalui sistem merit yang transparan, obyektif, dan akuntabel serta penataan dan pengembangan kompetensi ASN.
- c. Mengembangkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya.
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui manajemen pembangunan berbasis kinerja, pengawasan yang ketat, dan pengendalian produk hukum.
- e. Menguatkan kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber pembiayaan non pemerintah.
- f. Memperluas kerjasama antarregional untuk pembangunan kawasan, penanggulangan bencana, penguatan ekonomi, dan percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- g. Memperluas kerjasama dengan dunia usaha melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) serta kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan.
- h. Meningkatkan kemandirian desa melalui pengembangan BUMDes, usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sesuai pelaksanaan arah kebijakan pada strategi 5 dalam pencapaian sasaran 3 yang mendukung implementasi Misi 1, yaitu:

1. Sukoharjo *Digital Government* (Tol Layanan Publik)

Pengembangan platform e-government yang terintegrasi untuk semua layanan pemerintahan, termasuk administrasi kependudukan, perizinan, dan

layanan kesehatan. Sistem ini dirancang untuk memudahkan akses masyarakat dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

2. Sukoharjo Smart Village Program (Program Kampung Pintar 1 Desa 1 Program Unggulan)

Inisiatif untuk Identifikasi mengembangkan dan mengimplementasikan program/produk unggulan sesuai karakteristik dan potensi masing-masing desa. Program/produk unggulan dapat berupa : (1) Produk Ekonomi (UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, BUMDES); (2) Produk jasa (wisata desa, layanan digital, koperasi dan sebagainya); dan (3) Inovasi Sosial (layanan publik berbasis digital, pemberdayaan kelompok rentan dan sebagainya, serta inovasi program turunan program Pemerintah pusat/daerah).

3. Sukoharjo Bersih dari Korupsi (SBK)

Inisiatif untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem pengawasan internal dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah.

4. Reformasi Birokrasi Dinamis (*Dynamic Bureaucracy Reform*)

Program untuk menciptakan birokrasi yang responsif dan agile dengan mengadopsi manajemen ASN berbasis sistem merit, pengembangan kompetensi, serta penerapan budaya inovasi. Program ini juga mencakup evaluasi kinerja berkala untuk memastikan ASN bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Sukoharjo Open Government (SOG)

Inisiatif untuk membuka akses informasi publik secara luas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui SOG, masyarakat dapat berkontribusi dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang), konsultasi publik, serta pelaporan aspirasi melalui platform online dan aplikasi mobile.

Pentahapan pencapaian sasaran 3 melalui strategi 5 pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029, sebagai berikut:



Tabel 3.9 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 Dalam Pencapaian:

Sasaran 3: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance

Melalui Strategi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, layanan publik yang transparan dan berkualitas

2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
Penguatan peningkatan infrastruktur digital dan transparansi tata kelola pemerintahan	Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi	Akselerasi layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif terhadap pembangunan berkelanjutan	Perwujudan Sukoharjo sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang modern, berdaya saing, transparan, dan berbasis digital	1) <i>Sukoharjo Digital Government</i> (Tol Layanan Publik), yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan layanan publik langsung dan membangun pemerintahan terbuka dengan keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan serapan aspirasi melalui kunjungan lapangan, termasuk peningkatan tata kelola dan layanan admindukcapil. 2) <i>Sukoharjo Smart Village Program</i> (Program Kampung Pintar 1 Desa 1 Program Unggulan), yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan kemandirian desa melalui pengembangan BUMDes, usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas
Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	
1. Penguatan keterbukaan informasi dan partisipasi publik melalui digitalisasi layanan pemerintahan. 2. Meningkatkan efisiensi manajemen ASN melalui sistem merit berbasis digital yang lebih transparan dan akuntabel. 3. Pembangunan infrastruktur digital untuk mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik.	1. Memperluas layanan publik berbasis digital yang lebih interaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Peningkatan kapasitas ASN dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi kelembagaan. 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung tata kelola	1. Peningkatan kapasitas layanan digital dalam pemerintahan yang lebih cepat dan efisien. 2. Mewujudkan ASN yang lebih adaptif dalam pemanfaatan teknologi serta peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan digitalisasi. 3. Penguatan integrasi sistem digital dalam berbagai sektor layanan publik dan pengambilan kebijakan.	1. Implementasi tata kelola berbasis data untuk memastikan adaptasi kebijakan yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Penguatan sistem merit dan transparansi dalam pengelolaan SDM aparatur guna menciptakan birokrasi yang lebih profesional. 3. Penerapan teknologi big data dan AI dalam perencanaan pembangunan daerah	1. Implementasi layanan publik berbasis teknologi yang sepenuhnya terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan global. 2. Transformasi kelembagaan pemerintahan yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis kompetensi digital. 3. Pemanfaatan teknologi smart governance untuk	



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
4. Penguatan sistem pengawasan kinerja berbasis data untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. 5. Peningkatan potensi PAD melalui digitalisasi sistem pembayaran dan pengelolaan pajak/retribusi daerah. 6. Membangun sinergi antarwilayah dalam integrasi layanan digital dan pemerintahan berbasis data. 7. Mendorong dunia usaha untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital melalui CSR dan kemitraan strategis. 8. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pelayanan	pemerintahan yang inovatif. 4. Penguatan mekanisme evaluasi kinerja berbasis teknologi untuk memastikan efektivitas birokrasi. 5. Diversifikasi sumber pembiayaan daerah dengan memanfaatkan teknologi keuangan dalam optimalisasi PAD. 6. Peningkatan kerja sama regional dalam pengembangan layanan publik berbasis teknologi. 7. Memperkuat sinergi dengan sektor swasta dalam pemanfaatan AI dan big data untuk tata kelola pemerintahan. 8. Mendorong penguatan ekonomi desa melalui digitalisasi usaha BUMDes dan pengembangan program peningkatan	4. Optimalisasi pengawasan dan tata kelola berbasis data untuk mencegah ketidakefisienan birokrasi. 5. Peningkatan otonomi fiskal melalui strategi digitalisasi transaksi keuangan dan pengelolaan pajak daerah. 6. Pengembangan model kerja sama antarwilayah dalam mendukung infrastruktur digital dan tata kelola bersama. 7. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan inovasi layanan publik berbasis teknologi. 8. Percepatan pembangunan ekonomi desa melalui digitalisasi pemasaran produk lokal BUMDes,	untuk meningkatkan efektivitas tata kelola. 4. Penguatan sistem pengawasan dengan mekanisme evaluasi yang lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan. 5. Diversifikasi pendanaan pembangunan melalui optimalisasi PAD serta kemitraan publik-swasta. 6. Memperkuat jejaring kerja sama daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan berbasis inovasi. 7. Penguatan peran dunia usaha dalam mendukung program keberlanjutan melalui CSR dan investasi sosial. 8. Penguatan kemandirian desa melalui peningkatan efisiensi	mendukung kebijakan berbasis data dan inovasi. 4. Penyempurnaan sistem pengawasan yang berbasis transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. 5. Penguatan kemandirian fiskal daerah dengan sistem keuangan yang lebih inovatif dan berbasis teknologi. 6. Menjadi pusat kerja sama regional dalam pembangunan berbasis digital yang berkelanjutan. 7. Optimalisasi sinergi dengan dunia usaha dalam menciptakan ekosistem digital yang mendukung pembangunan inklusif. 8. Perwujudan desa mandiri melalui	pelayanan publik pemerintah desa. 3) Sukoharjo Bersih dari Korupsi (SBK), yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui manajemen pembangunan berbasis kinerja, pengawasan yang ketat, dan pengendalian produk hukum. 4) Reformasi Birokrasi Dinamis (<i>Dynamic Bureaucracy Reform</i>), yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan efisiensi kelembagaan dan manajemen SDM aparatur melalui sistem merit yang transparan, obyektif, dan akuntabel serta penataan dan pengembangan kompetensi ASN, dan menguatkan kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
publik berbasis digital serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan BUMDes.	kapasitas wirausaha desa berbasis teknologi.	penguatan akses permodalan usaha desa, dan pemanfaatan teknologi dalam layanan publik pemerintah desa.	dan profesionalisme pengelolaan BUMDes, serta pengembangan sistem layanan desa berbasis digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.	penguatan peran BUMDes sebagai motor ekonomi desa, digitalisasi usaha mikro desa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memberikan layanan berbasis teknologi.	sumber pembiayaan non pemerintah. 5) Sukoharjo Open Government (SOG), yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam mengembangkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya, memperluas kerjasama antarregional untuk pembangunan kawasan, penanggulangan bencana, penguatan ekonomi, dan percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan memperluas kerjasama dengan dunia usaha melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) serta kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan.

Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian Sasaran 3, melalui Strategi 6: Mewujudkan masyarakat berkarakter yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, menjaga keluhuran adat istiadat, serta menguatkan gotong royong dan kerukunan dalam harmoni kebhinekaan. Arah kebijakan pada strategi 6 dalam pencapaian sasaran 3, yaitu:

- a. Memperkuat koordinasi penanganan keamanan, ketertiban masyarakat, serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Meningkatkan kebebasan sipil dan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis serta menjaga kerukunan antarumat beragama.
- c. Mengedukasi masyarakat tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan serta meningkatkan kerjasama dengan pengampu kepentingan terkait.
- d. Melestarikan nilai budaya lokal dan cagar budaya melalui pemeliharaan nilai agama, penguatan forum kebudayaan, dan peningkatan tata kelola kebudayaan.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sesuai pelaksanaan arah kebijakan pada strategi 6 dalam pencapaian sasaran 3 yang mendukung implementasi Misi 5, yaitu:

1. Umroh Gratis untuk Takmir Masjid

Program "Umroh Gratis untuk Takmir Masjid" adalah inisiatif yang dirancang untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para takmir masjid yang telah berperan aktif dalam memajukan kehidupan keagamaan di Kabupaten Sukoharjo. Program ini bertujuan untuk memberangkatkan para takmir masjid secara gratis ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, semangat, serta dedikasi para takmir masjid dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pengelola rumah ibadah dan pelayan umat. Umroh Gratis diberikan setiap tahun kepada 24 orang takmir masjid (2 orang setiap Kecamatan).

2. Sukoharjo Mengaji

Program "Sukoharjo Mengaji" adalah inisiatif untuk memperkuat pembinaan spiritual dan meningkatkan literasi keagamaan di seluruh Kabupaten Sukoharjo. Program ini akan mendorong masyarakat di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa untuk lebih aktif dalam kegiatan pengajian dan memperdalam pemahaman ajaran agama Islam.

3. Sukoharjo Harmoni

Program ini berfokus pada pembinaan keagamaan, fasilitasi peringatan hari besar keagamaan, serta memperkuat komunikasi dan pemahaman antar umat beragama, memfasilitasi diskusi terbuka tentang isu-isu keberagaman,

serta mencari solusi bersama guna memperkuat kerukunan, toleransi, dan keberagaman di Kabupaten Sukoharjo.

4. Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren

Program "Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren" adalah inisiatif untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan pondok pesantren di Kabupaten Sukoharjo melalui pengembangan ekonomi berbasis kewirausahaan.

5. Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan

Program "Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan" adalah inisiatif untuk memperkuat dan memperbaiki infrastruktur keagamaan di Kabupaten Sukoharjo guna mendukung kegiatan ibadah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial berbasis keagamaan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa tempat-tempat ibadah, seperti masjid, mushola, gereja, pura, dan vihara, memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

6. Sukoharjo Berkarakter

Program pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti melalui kurikulum sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan program pembinaan keluarga.

7. Sukoharjo Spektakuler (Festival Budaya Sukoharjo)

Program pelestarian dan promosi budaya lokal, serta pemasaran pariwisata melalui festival tahunan yang melibatkan komunitas seni, sekolah, dan masyarakat umum, dengan fokus pada pendidikan nilai-nilai budaya dan promosi pariwisata.

Pentahapan pencapaian sasaran 3 melalui strategi 6 pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029, sebagai berikut:



Tabel 3.10 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 Dalam Pencapaian:

Sasaran 3: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip *Good Governance*

Melalui Strategi 6: Mewujudkan masyarakat berkarakter yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, menjaga keluhuran adat istiadat, serta menguatkan gotong royong dan kerukunan dalam harmoni kebhinekaan

2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
Penguatan fondasi keamanan dan harmoni sosial	Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial	Penguatan identitas budaya dan toleransi sosial	Pemantapan stabilitas sosial dan kelestarian budaya dengan optimalisasi peran teknologi	Perwujudan Sukoharjo sebagai daerah dengan Kehidupan Masyarakat Berkarakter yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1) Umroh Gratis untuk Takmir Masjid , yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan kebebasan sipil dan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis serta menjaga kerukunan antarumat beragama.
Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	Fokus Prioritas	2) Sukoharjo Mengaji , yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan kebebasan sipil dan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis serta menjaga kerukunan antarumat beragama.
1. Memperkuat koordinasi penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan mendorong sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam pencegahan tindak kriminal serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.	1. Peningkatan efektivitas lembaga keamanan dan sistem penegakan hukum, termasuk optimalisasi layanan perlindungan perempuan dan anak serta pemantapan sistem peradilan berbasis keadilan sosial.	1. Penerapan sistem keamanan berbasis komunitas dan teknologi pengawasan yang lebih canggih.	1. Penerapan sistem keamanan berbasis teknologi, termasuk penggunaan big data dalam analisis keamanan wilayah serta sistem peringatan dini untuk mencegah tindak kriminal.	1. Konsolidasi kebijakan sosial yang berorientasi pada stabilitas dan keadilan, dengan memperkuat sistem hukum yang melindungi hak dan kebebasan individu.	3) Sukoharjo Harmoni , yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam memperkuat koordinasi penanganan keamanan, ketertiban masyarakat, serta pencegahan tindak kriminal
2. Meningkatkan kebebasan sipil dan keharmonisan sosial, melalui kebijakan yang menjamin hak asasi	2. Membangun ekosistem sosial yang inklusif dan bebas dari diskriminasi, dengan mendorong regulasi yang menjamin	2. Penguatan dialog antaragama dan antarbudaya dengan kebijakan fasilitasi interaksi sosial yang sehat.	2. Penguatan kebijakan perlindungan masyarakat berbasis digital, dengan memanfaatkan teknologi untuk pelaporan tindak kekerasan dan	2. Menjadikan keharmonisan sosial sebagai pilar utama pembangunan daerah, dengan integrasi program sosial berbasis partisipasi masyarakat	
		3. Meningkatkan peran pendidikan dalam membentuk karakter masyarakat yang toleran dan berwawasan			



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
manusia, kebebasan beragama, dan perlindungan kelompok rentan. 3. Mengedukasi masyarakat tentang keberagaman dan toleransi, dengan program sosialisasi dan pelatihan berbasis komunitas yang menekankan pentingnya spiritualisme dan nilai-nilai kewarganegaraan. 4. Melestarikan nilai budaya lokal dan cagar budaya, melalui kampanye kesadaran budaya, revitalisasi situs budaya, dan penguatan tata kelola kebudayaan berbasis komunitas.	kesetaraan hak bagi seluruh masyarakat. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersamaan dan gotong royong, melalui program penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan forum lintas agama. 4. Penguatan tata kelola kebudayaan berbasis data dan inovasi, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk dokumentasi dan pelestarian warisan budaya.	kebangsaan dengan integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum sekolah. 4. Melestarikan ekspresi budaya berbasis kearifan lokal dengan penguatan peran seniman dan budayawan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.	diskriminasi secara cepat dan akurat. 3. Pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan keamanan dan harmoni sosial, melalui skema kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. 4. Digitalisasi pengelolaan cagar budaya dan penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya, dengan optimalisasi teknologi dalam promosi dan distribusi produk budaya daerah.	dan pendekatan budaya. 3. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan identitas budaya dalam kehidupan sehari-hari, melalui pendidikan karakter di sekolah, keluarga, dan lingkungan kerja. 4. Mengukuhkan kebijakan pemajuan budaya yang mendukung daya saing daerah di tingkat nasional dan global, dengan memperkuat ekosistem seni dan budaya berbasis ekonomi kreatif.	termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4) Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan kebebasan sipil dan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis serta menjaga kerukunan antarumat beragama. 5) Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam meningkatkan kebebasan sipil dan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis serta menjaga kerukunan antarumat beragama. 6) Sukoharjo Berkarakter yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam mengedukasi masyarakat tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan serta meningkatkan kerjasama dengan pengampu



2026	2027	2028	2029	2030	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
					kepentingan terkait, dan melestarikan nilai budaya lokal dan cagar budaya melalui pemeliharaan nilai agama, penguatan forum kebudayaan, dan peningkatan tata kelola kebudayaan. 7) Sukoharjo Spektakuler (Festival Budaya Sukoharjo), yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam mengedukasi masyarakat tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan serta meningkatkan kerjasama dengan pengampu kepentingan terkait, dan melestarikan nilai budaya lokal dan cagar budaya melalui pemeliharaan nilai agama, penguatan forum kebudayaan, dan peningkatan tata kelola kebudayaan.

Program prioritas pembangunan daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dan juga memperhatikan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029. Adapun program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:



Tabel 3.11 Program Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat	Sasaran 1: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Strategi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh ketahanan ekonomi lokal berbasis pertanian dan UMKM, dengan fokus pada pembukaan lapangan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi penduduk usia produktif	Arah kebijakan pada strategi 1 dalam pencapaian sasaran 1, yaitu: (a) Memperkuat kewirausahaan dan UMKM melalui kemitraan usaha, peningkatan akses pembiayaan, pengembangan koperasi, penciptaan peluang usaha, peningkatan nilai tambah usaha sosial, dan pengembangan UMKM berbasis syariah; (b) Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi kreatif berbasis potensi lokal melalui promosi, peningkatan SDM, dan kolaborasi yang mendukung pertumbuhan	1. UMKM Naik Kelas	Meningkatnya kapasitas wirausaha terhadap perizinan dan legalitas bagi UMKM, literasi dan akses keuangan, pemasaran digita, keikutserta dalam pameran skala nasional, event UMKM dan business Matching, serta monev UMKM	Pertumbuhan Wirausaha	Program Pengembangan UMKM
						Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				2. Desa Wisata Berkelanjutan	Meningkatnya pembentukan desa wisata berdasarkan klaster yang berdaya saing dalam mendukung kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				3. Subsidi Bunga Pinjaman UMK	Meningkatnya pelaksanaan penganggaran terhadap subsidi bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil Se-Kabupaten Sukoharjo	Persentase Dokumen Penganggaran Yang Tepat Waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
						Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
				4. Smart Farming	Meningkatnya produksi hasil-hasil pertanian, serta pengendalian dan	Peningkatan Produksi Pertanian	Program Penyediaan dan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; (c) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan penguatan kelembagaan, infrastruktur, dan akses pemasaran serta permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani; (d) Menciptakan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja melalui peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, termasuk pengembangan keuangan syariah, subsidi, jaminan usaha, dan		pencegahan bencana pertanian		Pengembangan Sarana Pertanian
						Prosentase SDM Petani yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian
						Persentase Peningkatan Kelembagaan Petani dan Kenaikan Kelas Kelompok	Program Penyuluhan Pertanian
						Prosentase gagal panen	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				5. Investasi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya investasi potensi unggulan daerah	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				6. Program Pengembangan Pasar Lokal dan Ekspor (Sukoharjo Go Global)	Meningkatnya ekspor produk unggulan dalam skala nasional dan llobal	Prosentase Peningkatan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor
				7. Penguatan Rantai Pasok Produk Lokal	Meningkatnya pemantauan kebutuhan pokok di 3 pasar tradisiona dalam rangka stabilitasi stok dan harga barang kebutuhan pokok masyarakat	Prosentase Pengendalian Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
						Persentase Pasar Rakyat yang ditingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; (e) Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah; dan (f) Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi dan pemasaran peluang investasi			Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				8. Program Asuransi Pertanian	Meningkanya perlindungan petani dari risiko gagal panen akibat faktor alam dan hama	Persentase Gagal Panen	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
					Meningkatnya kapasitas SDM dan kelompok pertanian dalam peningkatan produksi hasil-hasil pertanian, serta pengendalian dan pencegahan bencana pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
					Meningkatnya kapasitas SDM dan kelompok pertanian dalam	Prosentase SDM Petani yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian
						Persentase Peningkatan Kelembagaan Petani dan Kenaikan Kelas Kelompok	Program Penyuluhan Pertanian
				9. Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga	Meningkatnya kapasitas pemasaran dan packaging bagi UMKM olahan produk pertanian	Persentase SDM Pelaku UMKM Yang Ditingkatkan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
						Persentase Peningkatan Kelembagaan Petani dan Kenaikan Kelas Kelompok	Program Penyuluhan Pertanian
						Angka Konsumsi Ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
					Meningkatnya Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidaya Bersertifikat CBIB	Jumlah Pembudidaya Bersertifikat CBIB	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		Strategi 2: Pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang semakin merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan	Arah kebijakan pada strategi 2 dalam pencapaian sasaran 1, yaitu: (a) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan penataan infrastruktur antar	10. Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian	Meningkatnya areal persawahan teraliri air dalam rangka peningkatan produksi hasil-hasil pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				11. Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus	Meningkatnya aksesibilitas bagi masyarakat yang nyaman dan aman	Cakupan Wilayah Yang Terkoneksi Angkutan Umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						Persentase Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			wilayah, daerah perbatasan, serta wajah kota dilakukan untuk mendukung perekonomian dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang; (b) Peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor jasa konstruksi untuk memastikan pembangunan berkualitas; (c) Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo; (d) Peningkatan penanganan permukiman kumuh; (e) Peningkatan kualitas pelayanan transportasi guna mendukung mobilitas				dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						V/C Rasio Di Jalan Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						Proporsi Jalan dalam Kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan
						Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			12. Penataan Wajah Kota (Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho)	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata pada Penataan wajah kota (Sukoharjo kuncoro Mbangun Deso Noto Kutho) dengan penataan kawasan alun - alun/simpanglima Kabupaten Sukoharjo,Kawasan Kartasura (Eeks terminal Kartasura),Wajah Kota Ibukota Kecamatan, dan		Rasio bangunan ber PBG dan SLF	Program Penataan Bangunan Gedung
						Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
						Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
						Jumlah Terbangunnya Pujasera dan Sarana Perdagangan Lainnya	Program Peningkatan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			masyarakat dan ekonomi; (f) Peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital di seluruh wilayah; (g) Penguatan perlindungan lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran dan peningkatan pengelolaan persampahan; dan (h) Peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dengan memperkuat mitigasi, respons darurat, dan pemulihan untuk mengurangi risiko serta kerentanan masyarakat.	13. Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh	penataan bangunan dan lingkungan lainnya sesuai dengan regulasi		Sarana Distribusi Perdagangan
					Menurunnya kawasan lingkungan kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 ha Yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman
						Prosentase RTLH Diluar Kawasan Kumuh Yang Sudah Tertangani	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
						Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Aman, Pedesaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
						Persentase Desa Dengan Fasilitas Pengelolaan Persampahan Terbangun	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
						Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
						Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
							Pengembangan Sistem Drainase
						Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman Dalam Kondisi Baik	Program Pengembangan Permukiman
						Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				14. "Sukoharjo Sehat": Akses Air minum dan Sanitasi Aman	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Aman, Pedesaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
					Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
					Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
				15. Terangi Jalanku	Terpenuhinya kebutuhan PJU di jalan kabupaten/kota	Persentase Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
					Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,	Program Peningkatan Prasarana, Sarana



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
						dan Utilitas Umum) yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah	dan Utilitas Umum (PSU)
				16. "Mobilitas Sukoharjo": Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi	Tersedianya transportasi umum angkutan sekolah bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Cakupan Wilayah Yang Terkoneksi Angkutan Umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				17. Penuntasan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
					Meningkatnya layanan public secara online dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				18. Program Lingkungan Sehat: Pengelolaan Sampah Terintegrasi	Pembangunan TPST, pembangunan TPS3R, pendampingan dan pembinaan bank sampah dan eco enzim, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
	Sasaran 2: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Strategi 3: Membangun SDM unggul, sehat jasmani-rohani, produktif dan berkarakter melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.	Arah kebijakan pada strategi 3 dalam rangka pencapaian sasaran 2, yaitu: (a) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang komprehensif, penguatan sistem kesehatan, peningkatan akses dan mutu layanan dasar, termasuk pencegahan dan penanganan stunting, posyandu lansia serta peningkatan	19. Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatnya kapasitas berkurangnya Risiko Bencana	Cakupan Capaian Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
						Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana
				20. Pencegahan dan Penanganan Stunting	Menurunnya prevalensi stunting di Kabupaten Sukoharjo	Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				21. Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD	Meningkatnya Partisipasi Sekolah Tingkat SD melalui Pilot Project Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang beartisipasi dalam pendidikan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan
						Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			layanan primer dan rujukan; (b) Memperbaiki kualitas dan akses pendidikan melalui peningkatan sarana, kompetensi pendidik, manajemen mutu, pendidikan inklusi, dan budaya literasi; (c) Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, serta perlindungan hak anak; (d) Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pramuka, serta pelatihan startup wirausaha muda; dan (e) Mengembangkan keolahragaan dengan	22. Posyandu Terpadu (One Stop Health Center) untuk Integrasi Layanan Primer	Terwujudnya pelayanan kesehatan terintegrasi pada seluruh siklus hidup	Persentase ibu hamil risiko tinggi tertangani	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Persentase neonatal risiko tinggi tertangani	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (RIBK)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Persentase kecamatan dengan proporsi non-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			peningkatan sarana olahraga, penghargaan atlet, dan penyelenggaraan event.			hipertensi minimal 75%	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Persentase kecamatan dengan proporsi non-Diabetes Mellitus minimal 85%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (RIBK)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Prevalensi Obesitas > 18 tahun (RIBK)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (RIBK)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
						Persentase lanjut usia mandiri (RIBK)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Angka Keberhasilan dan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate) (RIBK,IUP)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) (RIBK, IUP)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Persentase ODHIV on ARV tersupresi viral load	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Positive Rate Malaria	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Persentase kecamatan memenuhi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
						syarat kualitas kesehatan lingkungan	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Persentase Capaian SPM RSUD Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (RIBK)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
						Persentase Kecamatan dengan Peningkatan Aktivitas Fisik Cukup	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				24. Pendidikan Inklusi dan Keterampilan Khusus	Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Pemenuhan SDM dan sarana prasana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi serta Penunjukkan piloting project Sekolah Inklusi (SD, SMP, PAUD di setiap kecamatan)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang beartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan
				25. Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS)	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam	Persentase Anggaran Responsif Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
					kemandirian ekonomi perempuan dan peran aktif perempuan dalam pembangunan.	Proporsi keluarga yang mendapatkan layanan dari Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sesuai kebutuhan.	Pemberdayaan Perempuan
							Peningkatan Kualitas Keluarga
				26. Sukoharjo Pemuda Produktif	Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan Pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Strategi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terpadu melalui penguatan perlindungan sosial, dan penuntasan layanan dasar yang berkelanjutan dan partisipatif untuk penanggulangan kemiskinan	Arah kebijakan pada strategi 4 dalam pencapaian sasaran 2, yaitu: (a) Meningkatkan pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin dan rentan dengan penguatan sistem perlindungan sosial yang responsif terutama	27. Sukoharjo Juara	Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah Atlet Berestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				28. Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar	Meningkatnya Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi berupa Beasiswa Kuliah	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				29. Penyediaan Rumah Layak Huni	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi penduduk miskin	Prosentase RTLH Diluar Kawasan Kumuh Yang Sudah Tertangani	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
						Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang	Program Pengembangan Perumahan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			penanganan anak tidak sekolah, pengembangan pembiayaan kesehatan, serta pelayanan kesejahteraan sosial; (b) Meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin dan rentan dengan pemberdayaan secara partisipatif; (c) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat; dan (d) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau	30. Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas	Meningkatnya ketahanan pangan berbasis komunitas	Memperoleh Rumah Layak Huni	
						Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
						Persentase Cadangan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
						Tingkat Konsumsi Energi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
						Persentase Kelembagaan Kemandirian Pangan yang aktif	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
						Persentase Desa/Kelurahan Rentan/Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
				31. Santunan Kematian (Program Lanjutan)	Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penduduk Miskin untuk Meningkatkan	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang	Program Pemberdayaan Sosial



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
					Kesejahteraan Sosial Warga Penduduk Miskin	Meningkat Kualitasnya dalam Penanganan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
						Persentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan PPKS Lainnya diluar HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
						Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	
	Sasaran 3: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Strategi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, layanan publik yang transparan dan berkualitas	Arah kebijakan pada strategi 5 dalam rangka pencapaian sasaran 3, yaitu: (a) Meningkatkan layanan publik langsung dan membangun pemerintahan terbuka dengan keterbukaan informasi, partisipasi publik,	32. Sukoharjo <i>Digital Government</i> (Tol Layanan Publik)	Meningkatnya penjangkauan dan aksesibilitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
						Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
						Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
						Persentase Akta Perceraian Yang	Program Pencatatan Sipil



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			dan serapan aspirasi melalui kunjungan lapangan, termasuk peningkatan tata kelola dan layanan admindukcapil; (b) Meningkatkan efisiensi kelembagaan dan manajemen SDM aparatur melalui sistem merit yang transparan, obyektif, dan akuntabel serta penataan dan pengembangan kompetensi ASN; (c) Mengembangkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya; (d)			Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	
						Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk
						Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pendaftaran Penduduk
						Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				33. Sukoharjo Smart Village Program (Program Kampung Pintar 1 Desa 1 Program Unggulan)	Meningkatnya kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
					Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
					Meningkatnya penjangkauan dan aksesibilitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
						Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
						Persentase Akta Perkawinan Yang	Program Pencatatan Sipil



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui manajemen pembangunan berbasis kinerja, pengawasan yang ketat, dan pengendalian produk hukum; (e) Meningkatkan kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber pembiayaan non pemerintah; (f) Memperluas kerjasama antarregional untuk pembangunan kawasan, penanggulangan bencana, penguatan ekonomi, dan percepatan pencapaian target			Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	
						Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
						Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk
						Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pendaftaran Penduduk
				34. Sukoharjo Bersih dari Korupsi (SBK)	Meningkatnya akuntabilitas dan Integritas Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
						Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan
						Persentase OPD Yang Melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan
						Persentase PDTT Yang Selesai Ditangani	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				35. Reformasi Birokrasi Dinamis (Dynamic Bureaucracy Reform)	Meningkatnya evaluasi kinerja berkala untuk memastikan ASN bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
						Persentase Sakip Perangkat Daerah Kategori Minimal BB	Program Perumusan Kebijakan,



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			Standar Pelayanan Minimal (SPM); (g) Memperluas kerjasama dengan dunia usaha melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) serta kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan; dan (h) Meningkatkan kemandirian desa melalui pengembangan BUMDes, usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.				Pendampingan dan Asistensi
						Persentase Wajib Lapor LHKPN Yang Melapor	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
						Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				36. Sukoharjo <i>Open Government</i> (SOG)	Meningkatnya pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan yang sesuai dengan usulan kegiatan pembangunan dari tingkat desa	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
						Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati		Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
							Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
							Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Strategi 6: Mewujudkan masyarakat berkarakter yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, menjaga keluhuran adat istiadat, serta menguatkan gotong royong dan kerukunan dalam harmoni kebhinekaan	Arah kebijakan pada strategi 6 dalam pencapaian sasaran 3, yaitu: (a) Memperkuat koordinasi penanganan keamanan, ketertiban masyarakat, serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b) Meningkatkan kebebasan sipil dan kualitas kehidupan masyarakat yang	37. Umroh untuk Masjid	Gratis Takmir	Meningkanya fasilitasi pelaksanaan ibadah umrah bagi takmir masjid sebagai bentuk penghargaan dan peningkatan Kepedulian Pemerintah terhadap Pelayan Keagamaan serta peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan takmir masjid di Kabupaten Sukoharjo	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				38. Sukoharjo Mengaji		Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pengajian dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan di Kabupaten Sukoharjo	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				39. Sukoharjo Harmoni		Meningkatnya pembinaan keagamaan guna memperkuat kerukunan,	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			harmonis serta menjaga kerukunan antarumat beragama; (c) Mengedukasi masyarakat tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan serta meningkatkan kerjasama dengan pengampu kepentingan terkait; dan (d) Melestarikan nilai budaya lokal dan cagar budaya melalui pemeliharaan nilai agama, penguatan forum kebudayaan, dan peningkatan tata kelola kebudayaan dan kepariwisataan		toleransi, keberagaman dan di Kabupaten Sukoharjo.	dan Karakter Kebangsaan Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
							Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
						Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
						Persentase linmas yang terlatih dan dikukuhkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
						Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
						Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				40. Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren	Meningkatnya fasilitas pemberdayaan ekonomi bagi pondok pesantren	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan
				41. Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Meningkatnya akses dan kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan beraktivitas keagamaan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Outcome	Indikator	Program Prioritas Pembangunan Daerah
					serta Tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang memadai bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo		
				42. Sukoharjo Berkarakter	Meningkatnya penguatan karakter yang menanamkan nilai-nilai moral, etika, budi pekerti, dan penggunaan Bahasa Jawa pada masyarakat Sukoharjo	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
				43. Sukoharjo Spektakuler (Festival Budaya Sukoharjo)	Meningkatnya pelaksanaan Event Budaya Sukoharjo dan pemenuhan sarana prasarana Taman Budaya Suryani Sukoharjo	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
						Tingkat hunian akomodasi	Program Pemasaran Pariwisata

Berikut kesesuaian program prioritas RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 3.12 Kesesuaian Program Prioritas RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Sukoharjo

No	17 Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Jawa Tengah	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukoharjo
1	Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	-	Smart Farming
2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	-	-
3	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Melahirkan Pemerintahan yang Good <i>Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	• Sukoharjo Digital Government (Tol Layanan Publik); • Reformasi Birokrasi Dinamis (Dynamic Bureaucracy Reform) • Sukoharjo Open Government (SOG)
4	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Sukoharjo Bersih dari Korupsi (SBK)
5	Pemberantasan Kemiskinan		• Subsidi Bunga Pinjaman UMK • Program Asuransi Pertanian • Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga • Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh • "Sukoharjo Sehat": Akses Air minum dan Sanitasi Aman • Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar • Posyandu Terpadu (One Stop Health Center) untuk Integrasi Layanan Primer • Pendidikan Inklusi dan Keterampilan Khusus • Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS) • Sukoharjo Pemuda Produktif • Pencegahan dan Penanganan Stunting • Penyediaan Rumah Layak Huni • Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas • Santunan Kematian (Program Lanjutan)
6	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	-	• Sukoharjo Harmoni



No	17 Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Jawa Tengah	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukoharjo
7	Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia : Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	• Posyandu Terpadu (One Stop Health Center) untuk Integrasi Layanan Primer
8	Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	• Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar
9	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	-	Bukan kewenangan Kabupaten
10	Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	-	• Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS)
11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai	• Program Lingkungan Sehat: Pengelolaan Sampah Terintegrasi; • Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
12	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan <i>daycare</i> untuk buruh di Kawasan Industri	• Smart Farming
13	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	• Penyediaan Rumah Layak Huni; • Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus • Penataan Wajah Kota (Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho) • Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh • Terangi Jalanku • Sukoharjo Sehat: akses Air minum dan Sanitasi Aman • Mobilitas Sukoharjo: Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi • Penuntasan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK
14	Melanjutkan Pemerataan	• Taruna karya mandiri melalui program kartu	• UMKM naik Kelas • Subsidi Bunga Pinjaman UMK

No	17 Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Jawa Tengah	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukoharjo
	Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota- Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya	zilenial untuk membuka lapangan kerja; • Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim; • Desa maju dan berdaya melalui Pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;	• Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga
15	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) termasuk Sumber Daya Maritim Untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	-	Bukan kewenangan Kabupaten
16	Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah	• Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, Pendidikan dan pelatihan; • Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren	• Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan • Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren • Umroh Gratis untuk Takmir Masjid • Sukoharjo Mengaji • Sukoharjo Harmoni • Sukoharjo Berkarakter
17	Pelestarian Seni, Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Prestasi Olahraga	-	• Sukoharjo Spektakuler (Festival Budaya Sukoharjo)

Berikut dukungan kegiatan Kabupaten Sukoharjo terhadap kegiatan yang didelegasikan Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota.



Tabel 3.13 Dukungan Kabupaten Sukoharjo Terhadap Kegiatan yang Didelegasikan Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten/Kota

No	Program Delegasi Provinsi Jawa tengah	Dukungan Kegiatan Kabupaten Sukoharjo
1	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	-
2	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan juru sembelihan standar RPH dan mengalokasikan anggaran untuk mendapatkan sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dan sertifikat halal melalui pengadaan sarana dan prasarana pendukungnya.
3	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri	Meningkatkan pelayanan penyuluh dalam penyusunan eRDKK serta verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi
4	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	-fasilitasi sosialisasi pelaksanaan Program/Kegiatan
5	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	-fasilitasi sosialisasi pelaksanaan Program/Kegiatan
6	Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)	Meskipun Kabupaten Sukoharjo tidak termasuk prioritas rawan kekeringan di Jawa Tengah, namun agar petani dapat memaksimalkan tanam 3 kali atau lebih dalam 1 tahun, perlu adanya dukungan penambahan air irigasi melalui pembangunan embung pertanian dan pembangunan sumur dalam.
7	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	Subsidi Bunga bagi UMK
8	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian	Agar permasalahan kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani dapat tercapai, pertanian modern berbasis integrated farming dengan teknologi dalam pengelolaan pertanian mutlak harus dilaksanakan. Kabupaten Sukoharjo sudah memberikan dukungan untuk itu, dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan drone sprayer dan bekerjasama dengan BI untuk menciptakan smart farming melalui aplikasi digital farming. Namun karena keterbatasan anggaran, dukungan APBD belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan petani, masih banyak dukungan yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaat pertanian modern berbasis integrated farming ini melalui dukungan anggaran untuk menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan peningkatan kapasitas SDM petaninya
9	Petani milenial gajian	Peningkatan Kapasitas Petani Milenial melalui pelatihan-pelatihan spesifik sesuai minat petani milenial, memberikan bantuan alat mesin pertanian, dan memberikan arena bagi petani milenial untuk menampilkan hasil pertaniannya pada acara agropolitan expo maupun pameran-

No	Program Delegasi Provinsi Jawa tengah	Dukungan Kegiatan Kabupaten Sukoharjo
		pameran di lingkup Kabupaten Sukoharjo maupun Jawa Tengah.
10	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa	Pendampingan pelayanan kesehatan hewan dan bantuan pengobatan ternak.
11	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	Di Kabupaten Sukoharjo sudah ada embrio percontohan pertanian yang terintegrasi, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas harus ada intervensi bantuan dari pemerintah, karena untuk mewujudkan itu perlu dukungan biaya yang besar dan petani tidak akan mungkin mampu mandiri. Kabupaten Sukoharjo pernah mengusulkan bantuan kegiatan pertanian yang terintegrasi dan sudah masuk dalam program prioritas tercantum pada Inpres Nomor 79 tahun 2019, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya
12	Revitalisasi embung	Sesuai usulan dari 3 Gapoktan, yaitu Gapoktan Tani Makmur, Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari, Gapoktan Cabeyan Makmur, Desa Cabeyan Kecamatan Bendosari dan Gapoktan Ngudi Rejeki Desa Karangasem Kecamatan Bulu, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan DED untuk revitalisasi embung di Gapoktan tersebut, namun karena keterbatasan alokasi APBD, ketiga usulan tersebut belum mendapatkan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunannya yaitu sejumlah Rp. 2.400.000.000. Adanya revitalisasi embung ini nanti diharapkan dapat meningkatkan luas tanam di Kabupaten Sukoharjo.
13	Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan	Pemanfaatan bantuan screenhouse untuk budidaya sayur (Kecamatan Baki dan Mojolaban) serta buah (Kecamatan Nguter) secara hidroponik.
14	Subsidi Pangan Murah	Penyediaan Cadangan Pangan yang penyalurannya sesuai Perbup
15	Penyediaan benih yang berkualitas	Alokasi APBD untuk UPTD Benih Pertanian sehingga akan meningkatkan ketersediaan benih unggul bersertifikat bagi petani.
16	Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian	Penyediaan Alsintan (traktor, combine harvester, cultivator) kepada kelompok tani melalui usulan bantuan kepada Kementerian Pertanian.

3.4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, arah kebijakan pengembangan wilayah pada kawasan strategis di Kabupaten Sukoharjo mengedepankan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai pilar penting dalam pemanfaatan ruang guna pembangunan wilayah. Pengembangan wilayah pada kawasan strategis Kabupaten meliputi: (1) Kawasan strategis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi; (2) Kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya; dan (3) Kawasan strategis dari sudut pandang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

1. Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Pertumbuhan Ekonomi

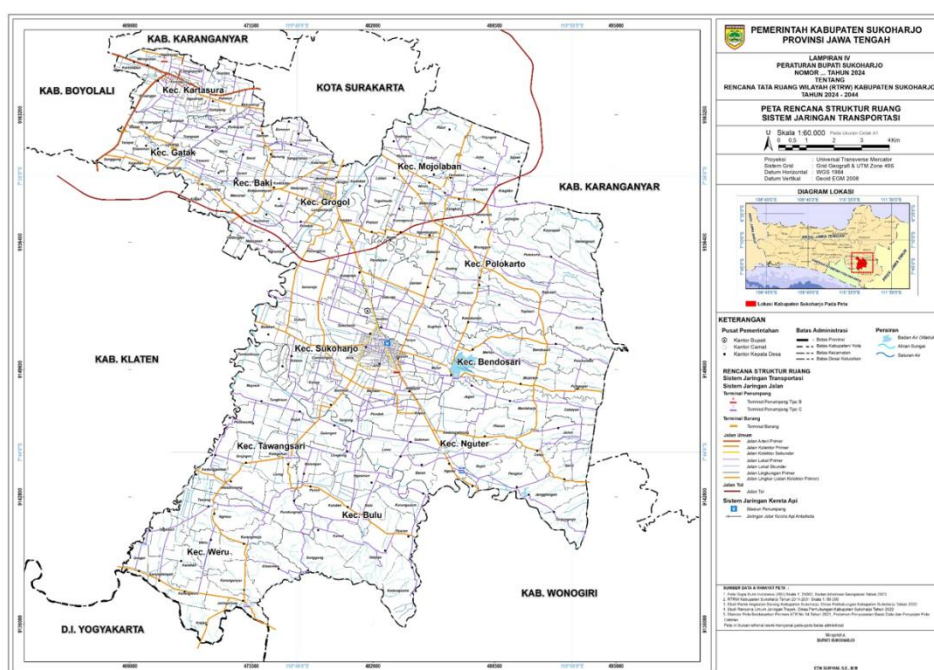
Tujuan pengembangan kawasan strategis Pertumbuhan ekonomi adalah mengembangkan kawasan perkotaan yang berkelanjutan, terintegrasi dengan pembangunan Kota Surakarta, serta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan dan mempercepat pengembangan kawasan di sekitarnya. Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo diarahkan untuk membangun wilayah perkotaan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan mampu mendorong dinamika ekonomi lokal maupun regional. Posisi Sukoharjo yang berdekatan dengan Kota Surakarta dimanfaatkan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi, dengan memperkuat hubungan fungsional antara pusat-pusat kegiatan ekonomi dan kawasan sekitarnya. Strategi ini mencakup peningkatan keterhubungan infrastruktur dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk. Prioritas utamanya meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan jalan arteri primer, penataan pusat pemerintahan dan perdagangan, penyediaan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan kawasan industri yang berwawasan lingkungan. Selain itu, dilakukan pula penguatan sarana pendukung industri, termasuk peningkatan pasokan utilitas, transportasi logistik, dan ketersediaan tenaga kerja terampil, serta rencana jalan strategis kabupaten, guna menjaga daya saing Sukoharjo sebagai simpul ekonomi strategis di wilayah Subosukowonosraten,

Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Pertumbuhan Ekonomi, dengan arah kebijakan:

- a. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan dalam Kawasan dan antar Kawasan melalui Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan Jalan Arteri Primer.

- b. Penataan dan pengembangan pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan, jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial dan RTH.
- c. Pengelolaan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan.
- d. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana pendukung kawasan peruntukan industri.
- e. Rencana jalan strategis kabupaten meliputi: pembangunan jalan lingkaran timur Sukoharjo; pengembangan desa wisata; dan pengembangan wisata budaya, wisata buatan, wisata alam.

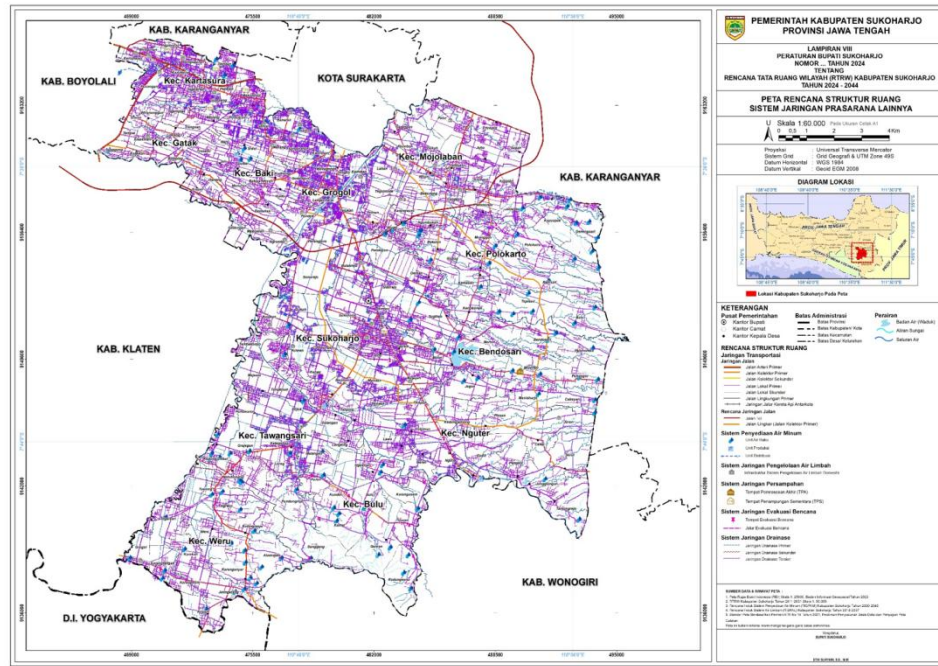
Berikut peta rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi Kabupaten Sukoharjo:



Sumber: Bapperida, 2025

Gambar 3.4 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi

Berikut peta rencana struktur ruang sistem jaringan prasarana lainnya Kabupaten Sukoharjo:



Sumber: Bapperida, 2025

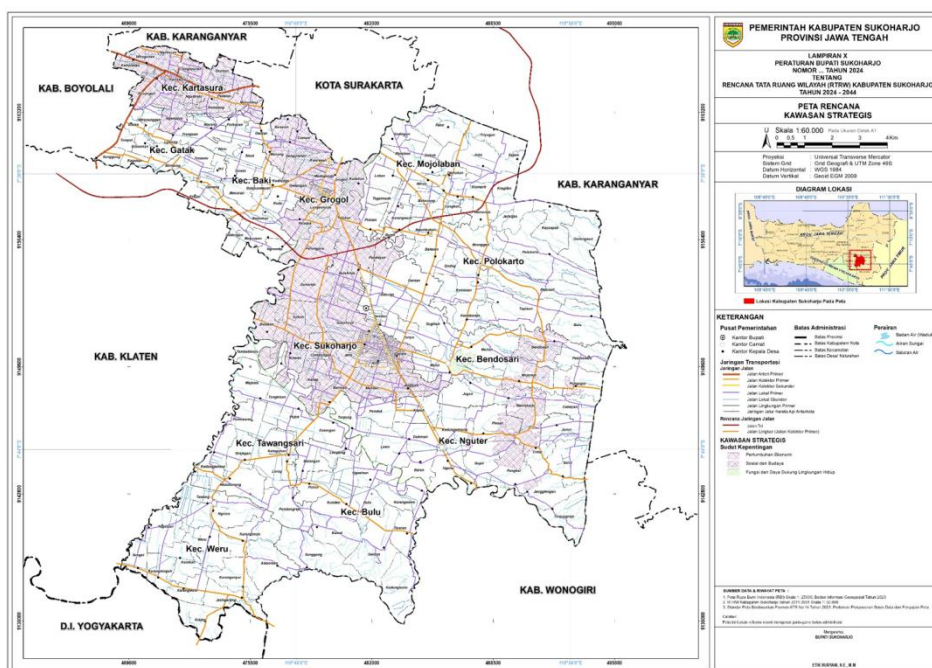
Gambar 3.5 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

2. Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Sosial Budaya

Tujuan pengembangan kawasan strategis sosial budaya adalah mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan kawasan yang dapat memacu pengembangan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pada sektor sosial budaya menekankan pada pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan pemanfaatan warisan budaya sebagai penggerak pembangunan daerah. Upaya ini diwujudkan melalui pemeliharaan cagar budaya dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, dan keaslian nilai-nilai historis. Penataan dan pengembangan kawasan cagar budaya dilakukan untuk menciptakan ruang publik yang dapat mendukung kegiatan seni, budaya, dan interaksi sosial masyarakat. Selain itu, terdapat kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu atau merusak kawasan strategis sosial budaya, sehingga kesinambungan warisan budaya dapat terjaga. Strategi ini dipadukan dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya, termasuk wisata sejarah, seni pertunjukan, dan kerajinan lokal, yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat identitas Sukoharjo sebagai bagian dari pusat budaya Jawa.

Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Sosial Budaya dengan arah kebijakan:

- a. Pemeliharaan cagar budaya dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian nilai-nilai cagar budayadan mempertahankan ciri budaya local
- b. Penataan dan pengembangan kawasan cagar budaya dan sosial budaya lainnya
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu dan/ merusak kawasan strategis sosial budaya



Sumber: Bapperida, 2025

Gambar 3.6 Peta Rencana Kawasan Strategis

3. Pengembangan Kawasan strategis dari sudut pandang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kebijakan pengembangan kawasan strategis dari sudut pandang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah:

- a. Menjamin keberlangsungan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna;
- b. Menjaga kelestarian ekosistem alami serta keseimbangan sistem tata air wilayah; dan
- c. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung sebagai penyangga lingkungan dan mitigasi bencana ekologis.

Upaya pengembangan kawasan strategis dari sudut pandang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan untuk peningkatan

pelestarian dan konservasi kawasan hutan, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), serta pemanfaatan lahan secara selektif dengan pengawasan ketat untuk mencegah degradasi lingkungan sebagai bagian dari sistem penyangga ekologis regional dan nasional. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci, dengan mendorong pengelolaan kawasan berbasis kemitraan konservasi dan kearifan lokal. Selain itu, kebijakan ini juga menitikberatkan pada pengendalian pencemaran, perlindungan air bawah tanah, serta pengembangan infrastruktur hijau seperti ruang terbuka hijau di bantaran sungai dan kolam resapan. Seluruh langkah ini dirancang untuk mempertahankan kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Pengembangan kawasan strategis dari sudut pandang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, untuk kawasan hutan dengan arah kebijakan:

- (1) Peningkatan pelestarian dan konservasi kawasan hutan melalui perlindungan kawasan hutan lindung dan hutan produksi dari alih fungsi lahan serta upaya rehabilitasi dan konservasi yang konsisten.
- (2) Penguatan peran serta kelembagaan dan masyarakat dengan mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan hutan secara partisipatif, baik melalui skema kemitraan konservasi, hutan rakyat, maupun pengelolaan berbasis kearifan lokal.
- (3) Pemanfaatan selektif dan pengawasan ketat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan kawasan hutan dengan pembatasan kegiatan eksploitasi dan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan pengawasan terpadu lintas sektor.

Pengembangan kawasan strategis dari sudut pandang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, untuk kawasan lindung sungai dengan arah kebijakan:

- (1) Penataan Ruang Kawasan Sempadan Sungai dengan menetapkan dan menegakkan batas sempadan sungai sebagai kawasan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mencegah dan menertibkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai di kawasan sempadan (misalnya permukiman liar, kegiatan industri, dan komersial).
- (2) Rehabilitasi dan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan melakukan penghijauan dan reboisasi di hulu sungai untuk meningkatkan daya serap air tanah; dan menormalisasi sungai dan saluran air untuk memperlancar aliran dan mengurangi sedimentasi yang memicu banjir.
- (3) Pengendalian Pemanfaatan Lahan dengan meningkatkan pengawasan terhadap konversi lahan di wilayah tangkapan air dan

sempadan sungai; dan mendorong penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam pemanfaatan ruang.

- (4) Pembangunan Infrastruktur Hijau dengan membangun sumur resapan, biopori, dan kolam retensi untuk meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan mengurangi limpasan permukaan; dan mengembangkan ruang terbuka hijau di sepanjang bantaran sungai untuk fungsi ekologi dan estetika.
- (5) Pengendalian Pencemaran Sungai dengan mengurangi pencemaran melalui pengelolaan limbah domestik dan industri sebelum masuk ke badan air; dan meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan air limbah terpadu di kawasan padat penduduk dan industri.
- (6) Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dengan mendorong pembentukan forum DAS dan kelompok masyarakat peduli sungai untuk pengawasan dan pemeliharaan; dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitarnya.
- (7) Perlindungan dan Pemulihan Air Bawah Tanah dengan membatasi ekstraksi air tanah yang berlebihan melalui pengaturan izin dan pemantauan penggunaan air tanah; mengembangkan recharge area (daerah imbuhan air tanah) di kawasan lindung dan sempadan sungai; dan mendorong pengalihan penggunaan air tanah ke sumber air permukaan yang dikelola dengan baik.

Dalam konteks tata ruang, kebijakan pembangunan wilayah Sukoharjo diselaraskan dengan prinsip keterpaduan antara rencana tata ruang, rencana pembangunan, dan potensi wilayah. Instrumen pengendalian seperti Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi acuan agar seluruh kegiatan pembangunan sejalan dengan peruntukan ruang dalam RTRW, termasuk menjaga kawasan lindung dari ancaman konversi lahan. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan mencakup rencana pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten. Untuk memastikan implementasi yang efektif, diterapkan mekanisme Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) yang mengharmonisasikan program pembangunan lintas sektor di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan sektoral di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berjalan sinergis dalam kerangka pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Pembangunan wilayah di Kabupaten Sukoharjo tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan yang lebih luas, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, arah

pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan melalui pembagian 5 kawasan strategis dengan total 18 wilayah pengembangan. Kabupaten Sukoharjo masuk dalam beberapa kategori kawasan strategis yang memiliki fungsi spesifik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan.

1. Kawasan Pertumbuhan

Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Surakarta dan Kawasan Pengembangan Industri Surakarta–Boyolali–Karanganyar–Sukoharjo, serta terintegrasi dalam Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Solo–Sragen–Karanganyar.

Kebijakan ini menempatkan Sukoharjo sebagai simpul pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan wilayah Subosukowonosraten, di mana pengembangan diarahkan pada: (1) Peningkatan daya saing industri manufaktur dan pengolahan; (2) Penguatan sektor perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif; dan (3) Perluasan infrastruktur pendukung kawasan metropolitan untuk mendukung pergerakan barang, jasa, dan manusia; dan (4) Sinergi pengembangan pariwisata berbasis budaya, kuliner, dan event skala nasional.

2. Kawasan Komoditas Unggulan

Sukoharjo juga termasuk dalam kawasan komoditas unggulan berbasis pertanian dan peternakan di wilayah Bengawan Solo bersama Kabupaten Sragen, Boyolali, Klaten, Karanganyar, dan Wonogiri. Fokus pengembangan diarahkan pada: (1) Peningkatan produktivitas pertanian padi, palawija, dan hortikultura; (2) Penguatan subsektor peternakan, khususnya sapi potong dan ayam ras; (3) Pengelolaan dan pengembangan komoditas perikanan air tawar; dan (4) Peningkatan hilirisasi hasil pertanian untuk mendorong nilai tambah produk.

3. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Sukoharjo merupakan bagian dari klaster Bengawan Solo dalam kategori swasembada pangan, air, dan energi, yang meliputi wilayah Sragen, Boyolali, Klaten, Karanganyar, dan Wonogiri. Arah kebijakan meliputi: (1) Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian berkelanjutan; (3) Pengelolaan sumber daya air melalui konservasi daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo; dan (3) Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mendukung ketahanan energi pedesaan.

4. Sinergi Pembangunan Wilayah

Integrasi kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan RPJMN diarahkan pada penguatan peran Sukoharjo sebagai: (1) Pusat pertumbuhan industri dan perdagangan di selatan Kota Surakarta; (2) Sentra agroindustri yang memadukan sektor pertanian, peternakan, dan

perikanan dengan inovasi pengolahan hasil; (3) Simpul transportasi dan logistik yang menghubungkan wilayah selatan dan timur Jawa Tengah; dan (4) Destinasi wisata budaya dan kreatif yang terhubung dalam jejaring Solo Raya.

Dengan demikian, arah kebijakan pengembangan wilayah Sukoharjo dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan daerah ini sebagai bagian penting dari struktur pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, sekaligus mengintegrasikan aspek ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan dalam kerangka pembangunan jangka menengah nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Sukoharjo sebagai daerah penopang utama Kota Surakarta dan motor penggerak ekonomi kawasan Subosukowonosraten.

Pada tingkat provinsi, Arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam kerangka RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat posisinya sebagai bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing, inovatif, dan terintegrasi, dengan memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah. Sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan (WP) Subosukowonosraten, Kabupaten Sukoharjo memiliki peran strategis sebagai simpul konektivitas, pusat kegiatan ekonomi kreatif, serta daerah pendukung utama bagi sektor industri dan pertanian di kawasan Solo Raya. Arah kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Sukoharjo lima tahun ke depan dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan potensi unggulan daerah, konektivitas regional, serta keterpaduan lintas sektor yang berkelanjutan.

1. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Kebijakan diarahkan untuk memperkuat posisi Sukoharjo sebagai bagian integral pengembangan Solo Raya sebagai destinasi MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) serta wisata alam dan budaya yang terintegrasi dengan destinasi unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus pengembangan meliputi peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi melalui penguatan fungsi Terminal Sukoharjo, integrasi layanan angkutan umum Batik Solo Trans (BST) ke jalur wisata, serta keterhubungan dengan Bandara Adi Soemarmo dan Yogyakarta International Airport (YIA). Pengembangan daya tarik wisata diarahkan pada pemanfaatan potensi Situs Sangiran, jalur wisata Wonogiri–Sukoharjo–Solo, serta kolaborasi dengan industri kreatif untuk menciptakan paket wisata MICE itineraries yang unik. Event budaya, festival olahraga, dan promosi terpadu akan menjadi instrumen penting dalam menarik wisatawan mancanegara maupun domestik.

2. Sektor industri dan perdagangan

Kebijakan diarahkan untuk penguatan peran Sukoharjo sebagai salah satu titik penting dalam koridor industri Surakarta–Boyolali–

Sukoharjo–Karanganyar–Klaten, dengan basis industri tekstil, mebel, serta pengolahan hasil pertanian dan pangan. Upaya strategis yang dilakukan meliputi optimalisasi jaringan jalan industri untuk memperlancar distribusi, peningkatan daya saing industri kecil dan menengah melalui pelatihan dan sertifikasi produk, fasilitasi ekspor produk unggulan daerah, serta penguatan merek lokal yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional. Serta revitalisasi pasar tradisional sebagai pusat perdagangan rakyat yang terintegrasi dengan platform digital. Kabupaten Sukoharjo juga diharapkan dapat mengoptimalkan letak strategisnya di dekat akses pintu tol Kartasura dan pintu keluar tol wilayah Sukoharjo untuk mendukung arus barang dan jasa yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Sektor pertanian dan perikanan

Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan seperti padi, tebu, ubi, ikan air tawar, dan produk peternakan. Strategi yang diambil mencakup modernisasi sistem irigasi, pembangunan dan rehabilitasi embung desa, pengembangan benih dan bibit unggul, pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta penguatan sistem sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk produk peternakan dan perikanan. Hilirisasi hasil pertanian akan difokuskan pada pengolahan berbasis UMKM yang memiliki nilai tambah, didukung oleh inovasi teknologi dan perluasan akses pasar.

4. Sektor sosial dan kependudukan

Kebijakan diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pembangunan rumah susun dengan kolaborasi BUMN/BUMD/swasta, serta penguatan perlindungan sosial bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi lokal dan pengembangan sekolah inklusif di tingkat kecamatan menjadi prioritas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi daerah.

5. Sektor infrastruktur dan kewilayahan

Kebijakan diarahkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, pengelolaan sumber daya air, serta mitigasi bencana. Pembangunan dan rehabilitasi drainase kota, peningkatan jalan penghubung antar kabupaten, pengembangan ruang terbuka hijau di perkotaan dan perdesaan, serta penguatan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional akan menjadi prioritas. Selain itu, pembangunan infrastruktur energi bersih seperti PLTP Jenawi juga menjadi bagian dari strategi ketahanan energi di wilayah Subosukowonosraten, yang memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi Sukoharjo.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Sukoharjo bersifat integratif dan kolaboratif, menghubungkan potensi lokal dengan jejaring ekonomi regional. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, daya saing produk lokal, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi ini, Sukoharjo diharapkan mampu memperkuat peranannya sebagai simpul penggerak ekonomi Solo Raya sekaligus menjadi daerah yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional.

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Sukoharjo menurunkan arahan provinsi dan nasional menjadi program-program operasional yang lebih kontekstual, antara lain pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik, revitalisasi kawasan industri ramah lingkungan, penguatan sektor pertanian dan peternakan berbasis hilirisasi, serta pelestarian kawasan strategis budaya dan lingkungan hidup. Integrasi kebijakan ini penting agar pencapaian pembangunan Sukoharjo memiliki kesinambungan dari skala nasional hingga daerah.

1. Lingkup Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, pengembangan wilayah Kabupaten Sukoharjo ditempatkan sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Surakarta, Kawasan Pengembangan Industri Surakarta–Boyolali–Karanganyar–Sukoharjo, serta Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Solo Raya. Kebijakan nasional menekankan pada peningkatan daya saing industri manufaktur, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif; penguatan kawasan komoditas unggulan pertanian, peternakan, dan perikanan di DAS Bengawan Solo; penguatan ketahanan pangan, air, dan energi; serta perluasan infrastruktur konektivitas kawasan metropolitan.

Kebijakan ini diadopsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan memperkuat Wilayah Pengembangan (WP) Subosukowonosraten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Provinsi menitikberatkan pada penguatan koridor industri Surakarta–Boyolali–Sukoharjo–Karanganyar–Klaten, optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis hilirisasi, serta peningkatan aksesibilitas transportasi darat dan logistik. Selain itu, integrasi sektor perdagangan, industri, pariwisata, dan transportasi menjadi salah satu pilar kebijakan wilayah ini.

Di tingkat Kabupaten Sukoharjo, arah kebijakan difokuskan pada pembangunan kawasan industri berwawasan lingkungan, modernisasi pertanian (irigasi, benih unggul, mekanisasi, pengendalian hama), penguatan sektor perikanan air tawar dan hilirisasi produk, serta penataan pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pasar tradisional. Peningkatan konektivitas jalan strategis kabupaten, integrasi transportasi dengan Surakarta, serta pengembangan desa wisata dan wisata budaya juga menjadi fokus utama. Sukoharjo berupaya mengoptimalkan logistik,

transportasi, dan infrastruktur kewilayahan untuk memperkuat posisinya sebagai simpul ekonomi strategis regional.

Program prioritas yang diturunkan mencakup pembangunan jaringan jalan arteri primer dan jalan lingkar, revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi dengan platform digital, pembangunan embung dan irigasi, pengembangan desa wisata, penguatan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, optimalisasi kawasan industri dan pergudangan, serta pembangunan terminal logistik dan infrastruktur penunjang. Program-program ini diharapkan mampu memadukan potensi lokal dengan jejaring ekonomi regional, sekaligus memperkuat daya saing Sukoharjo di tingkat nasional.

2. Lingkup Sosial Budaya

Dalam RPJMN 2025–2029, arah kebijakan sosial budaya difokuskan pada pelestarian warisan budaya, pengembangan pariwisata berbasis budaya, penguatan identitas lokal sebagai penggerak ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan layak, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pemanfaatan seni, tradisi, dan kerajinan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah mengadopsi kebijakan ini dengan memperkuat citra budaya Jawa sebagai daya tarik wisata, melakukan penataan dan revitalisasi kawasan cagar budaya, mengintegrasikan event budaya dengan promosi pariwisata nasional, meningkatkan layanan pendidikan vokasional dan sekolah inklusif, serta memperkuat perlindungan sosial untuk kelompok rentan.

Di tingkat RPJMD Kabupaten Sukoharjo, arah kebijakan sosial budaya mencakup pemeliharaan dan penataan cagar budaya, pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi mengancam warisan budaya, pengembangan wisata sejarah, seni, dan kerajinan lokal, penyediaan hunian layak untuk MBR, pembangunan rumah susun, penguatan pendidikan vokasional berbasis potensi lokal, serta perlindungan sosial untuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Program prioritas meliputi revitalisasi situs budaya dan kawasan heritage, penyelenggaraan festival seni dan budaya tahunan, pengembangan sentra kerajinan dan kuliner tradisional, penataan perumahan MBR, pengembangan sekolah vokasi, dan layanan perlindungan sosial inklusif. Dengan kebijakan ini, Sukoharjo diharapkan menjadi pusat pelestarian budaya sekaligus destinasi wisata budaya yang mampu berkontribusi pada ekonomi daerah.

3. Lingkup Fungsi & Daya Dukung Lingkungan Hidup

RPJMN 2025–2029 menempatkan konservasi ekosistem alami, mitigasi bencana, pengendalian pencemaran, dan penguatan ketahanan sumber daya air sebagai prioritas nasional. Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan pengembangan infrastruktur hijau menjadi strategi utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah menurunkannya melalui rehabilitasi DAS Bengawan Solo, konservasi kawasan lindung sungai dan hutan, pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui infrastruktur ramah lingkungan.

RPJMD Kabupaten Sukoharjo memperjelas arah kebijakan ini dengan fokus pada pelestarian hutan lindung dan hutan produksi, rehabilitasi DAS dan sempadan sungai, pengendalian pencemaran, perlindungan air bawah tanah, pembangunan infrastruktur hijau, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Program prioritas mencakup rehabilitasi sempadan sungai, pembangunan sumur resapan, biopori, kolam retensi, pengelolaan limbah domestik dan industri, edukasi lingkungan, serta perlindungan daerah imbuhan air tanah (recharge area). Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah Sukoharjo.

Tabel 3.14 Integrasi Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Lingkup Pengembangan Wilayah	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Sukoharjo	Indikasi Program
1. Pertumbuhan Ekonomi	• Pengembangan Kawasan Pertumbuhan: Perkotaan Surakarta; Kawasan Industri Surakarta–Boyolali–Karanganyar–Sukoharjo; Pariwisata & Ekonomi Kreatif Solo Raya. • Peningkatan daya saing industri manufaktur, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif. • Penguatan kawasan komoditas unggulan pertanian, peternakan, dan perikanan di DAS Bengawan Solo. • Penguatan ketahanan pangan, air, dan energi.- Perluasan infrastruktur konektivitas kawasan metropolitan.	• Penguatan WP Subosukowonosraten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. • Penguatan koridor industri Surakarta–Boyolali–Sukoharjo–Karanganyar–Klaten. • Optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis hilirisasi. • Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi darat dan logistik. • Integrasi sektor perdagangan, industri, pariwisata, dan transportasi.	• Pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan. • Modernisasi pertanian (irigasi, benih unggul, mekanisasi, pengendalian hama). • Penguatan sektor perikanan air tawar dan hilirisasi produk. • Penataan pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pasar tradisional. • Peningkatan konektivitas jalan strategis kabupaten dan integrasi transportasi dengan Surakarta. • Pengembangan desa wisata dan wisata budaya. • Optimalisasi logistik, transportasi, dan infrastruktur kewilayahan.	• Peningkatan jaringan jalan arteri primer dan jalan lingkar. • Revitalisasi pasar tradisional dan integrasi e-commerce. • Pembangunan embung, irigasi, dan SPAM. • Pengembangan desa wisata dan wisata budaya. • Penguatan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. • Optimalisasi kawasan industri dan pergudangan. • Pembangunan terminal logistik dan infrastruktur penunjang.



Lingkup Pengembangan Wilayah	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Sukoharjo	Indikasi Program
2. Sosial Budaya	• Pelestarian warisan budaya dan pengembangan pariwisata berbasis budaya. • Penguatan identitas budaya lokal sebagai penggerak ekonomi kreatif. • Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perumahan layak, pendidikan, dan perlindungan sosial. • Pemanfaatan seni, tradisi, dan kerajinan untuk peningkatan kesejahteraan.	• Penguatan citra budaya Jawa sebagai daya tarik wisata. • Penataan dan revitalisasi kawasan cagar budaya. • Integrasi event budaya dengan promosi pariwisata nasional. • Peningkatan layanan pendidikan vokasional dan sekolah inklusif. • Penguatan perlindungan sosial untuk kelompok rentan.	• Pemeliharaan dan penataan cagar budaya. • Pengendalian pemanfaatan ruang yang mengancam warisan budaya. • Pengembangan wisata sejarah, seni, dan kerajinan lokal. • Penyediaan hunian layak untuk MBR dan penguatan pendidikan vokasional. • Perlindungan sosial untuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.	• Revitalisasi situs budaya dan kawasan heritage. • Festival seni dan budaya tahunan. • Sentra kerajinan dan kuliner tradisional. • Penataan perumahan MBR. • Program sekolah vokasi berbasis potensi lokal. • Layanan perlindungan sosial inklusif.
3. Fungsi & Daya Dukung Lingkungan Hidup	• Konservasi ekosistem alami dan keanekaragaman hayati. • Mitigasi bencana dan pengendalian pencemaran. • Penguatan kawasan lindung dan ketahanan sumber daya air.	• Rehabilitasi DAS Bengawan Solo.- Konservasi kawasan lindung sungai dan hutan. • Pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan. • Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui infrastruktur ramah lingkungan.	• Pelestarian hutan lindung dan hutan produksi. • Rehabilitasi DAS dan sempadan sungai. • Pengendalian pencemaran dan perlindungan air bawah tanah. • Pembangunan infrastruktur hijau.	• Rehabilitasi sempadan sungai. • Pembangunan sumur resapan, biopori, kolam retensi. • Pengelolaan limbah domestik dan industri. • Edukasi lingkungan. • Perlindungan recharge area.



Lingkup Pengembangan Wilayah	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Sukoharjo	Indikasi Program
	Rehabilitasi DAS dan pengembangan infrastruktur hijau.		Penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.	

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 didukung oleh Program Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, dimana rencana pada tahun 2030 menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Program Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2026-2030 dijabarkan kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) fungsi pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) fungsi pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program pengelolaan pendidikan ini diarahkan pada peningkatan partisipasi sekolah pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan bagi warga yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar, sehingga program ini dapat mendukung fokus prioritas dalam pencapaian pendidikan berbasis digitalisasi dan globalisasi, dengan menghubungkan sekolah dan perguruan tinggi dengan ekosistem industri global. Selain itu Program ini juga mendukung program prioritas Bupati yaitu **Sekolah Efektif/Unggulan Tingkat SD** dan program prioritas **Pendidikan Inklusi dan Keterampilan Khusus**.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program pengembangan kurikulum ini diarahkan pada pengembangan kurikulum yang adaptif berbasis karakter, *soft skill* dan potensi lokal melalui penyusunan dan implementasi kurikulum muatan lokal.

c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program pendidik dan tenaga kependidikan ini diarahkan pada pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang paud, pendidikan dasar dan kesetaraan.

2. Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan mutu fasilitas pelayanan Kesehatan lanjutan dan primer sesuai standar; peningkatan layanan deteksi dini bagi ibu hamil, bayi baru lahir, balita, usia remaja, usia produktif dan lansia; pelaksanaan program prioritas Bupati yaitu **layanan Posyandu Terpadu (One Stop Health Center)**; pemberian PMT bagi balita *wasting*, *underweight*, *stunting* dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK); Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi. Program ini juga mendukung fokus prioritas dalam pencapaian Sistem layanan kesehatan berbasis teknologi AI dan Big Data untuk meningkatkan efektivitas pencegahan penyakit dan pelayanan Kesehatan. Selain itu juga mendukung program prioritas **Pencegahan dan Penanganan Stunting**, serta program prioritas **Kampanye Hidup Sehat Sukoharjo (KHS)**.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan, serta penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman diarahkan pada peningkatan pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pengawasan terhadap Makanan dan Minuman yang beredar di masyarakat.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan permasalahan Kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta Masyarakat dalam Upaya penyelenggaraan Kesehatan serta pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Kampanye Hidup Sehat Sukoharjo (KHS)**.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) diarahkan pada Pembangunan dan rehabilitasi prasaranan dan sarana Sumber Daya Air (SDA), serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigrasi. Program ini juga mendukung fokus prioritas dalam pencapaian Keberlanjutan akses air minum dan sanitasi dengan manajemen sumber daya air terpadu.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum layak dan aman kepada Masyarakat. Program ini mendukung program prioritas Bupati **Sukoharjo melalui “Sukoharjo Sehat”: akses air minum dan sanitasi aman.**

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah diarahkan pada fasilitiasi pemenuhan akses sanitasi (air limbah domestic) yang layak dan aman untuk Masyarakat. Program ini mendukung program prioritas Bupati Sukoharjo yaitu **“Sukoharjo Sehat”: akses air minum dan sanitasi aman.**

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai.

e. Program Pengembangan Permukiman

Program Pengembangan Permukiman diarahkan pada Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah.

f. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung diarahkan pada bantuan teknis pendataan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan gedung milik Pemerintah Daerah.

g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya diarahkan pada Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, sehingga dapat mendukung program prioritas Bupati yaitu **Penataan Wajah Kota (Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho)**.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus**. Program diarahkan pada meningkatkan kualitas jalan, terutama di daerah perbatasan dan pedesaan, serta membangun jembatan yang kokoh dan tahan lama. Fokus utamanya adalah pada perbaikan jalan berlubang, pelebaran jalan, serta pembangunan infrastruktur jalan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga kerja di bidang jasa konstruksi melalui pelatihan dan pembinaan. Selain itu program ini juga mendukung fokus prioritas untuk Optimalisasi tenaga kerja konstruksi dengan integrasi sistem pendidikan vokasi dan industri

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang diarahkan pada Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan diarahkan pada Pendataan, Penyediaan serta Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi; Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).

b. Program Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh**. Fokus utama dari program ini adalah menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan

berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh. Program ini akan mencakup pembangunan rumah layak huni, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, penyediaan infrastruktur jalan dan drainase yang memadai, serta pengembangan ruang publik dan hijau di kawasan yang sebelumnya tidak tertata.

c. Program Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diarahkan pada Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Program ini difokuskan pada RTLH diluar kawasan kumuh yang sudah tertangani. Program ini juga mendukung Program Prioritas Bupati yaitu **Penyediaan Rumah Layak Huni**.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) diarahkan pada pemenuhan PSU bagi perumahan yang sudah di serahkan kepada Pemda, selain itu juga mendorong kepada pengembang perumahan untuk segera menyerahkan PSU perumahan kepada Pemda.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan Produk Hukum Daerah, pengendalian terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta meingkatkan pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dan satgas Linmas. Program ini mendukung program prioritas **Sukoharjo Harmoni**.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana diarahkan pada peningkatan layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini juga mendukung Program Prioritas Bupati yaitu **Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana**.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran diarahkan pada penyediaan informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran serta meningkatkan pembinaan terkait pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran serta Penyelamatan Non Kebakaran.

6. Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial diarahkan peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, Dan Kelembagaan Dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial. Program ini mendukung program prioritas Bupati **Santunan Kematian**.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada penanganan terhadap warga negara migran korban tindak kekerasan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial diarahkan pada perlindungan dan pemenuhan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar dan fakir miskin.

e. Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam maupun sosial, penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan serta layanan psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan diarahkan pada pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten.

4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program perencanaan tenaga kerja diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja (RTK).

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja diarahkan pada peningkatan kapasitas tenagakerja sesuai kompetensi kerja dan pasar kerja serta melakukan pembinaan terhadap Lembaga pelatihan kerja swasta.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahka pada pengelolaan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenagakerja sesuai kompetensiperlindungan terhadap tanagakerja Pra dan Purna Penempatan (PMI).

d. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berdampak pada kepentingan Daerah melalui pembinaan pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/buruh, penetapan struktur skala upah dan fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemerdayaan Perempuan**

Program pengarusutamaan geder dan pemerdayaan perempuan diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah; pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; serta penguatan dan pengembangan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program perlindungan perempuan diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan; penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program peningkatan kualitas keluarga diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga. Program ini juga mendukung program prioritas Bupati yaitu **Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS)**, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kepemimpinan dengan peningkatan jumlah Perempuan dalam posisi strategis pemerintah dan sektor bisnis.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program pengelolaan sistem data gender dan anak diarahkan pada pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program perlindungan khusus anak diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak; penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

3. Pangan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan diarahkan pada fokus prioritas perwujudan ketersediaan dan keterjangkauan pangan inklusif melalui produksi lokal dan distribusi efisien.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok; menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan cadangan pangan pemerintah; serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Program ini mendukung Program Prioritas Bupati yaitu **Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas**.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program penanganan kerawanan pangan diarahkan pada penanganan desa/kelurahan rawan pangan; dan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program pengawasan keamanan pangan diarahkan pada pengawasan pangan terutama pangan segar yang beredar di pasar, hal ini dilakukan untuk memastikan setiap bahan pangan yang beredar layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

4. Pertanahan

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan.

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan diarahkan pada penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah.

c. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

d. Program Penatagunaan Tanah

Program Penatagunaan Tanah diarahkan pada peningkatan ketertiban pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

5. Lingkungan Hidup

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup diarahkan pada penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diarahkan pada pengendalian pencemaran kualitas air dan udara serta pembangunan rendah karbon.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) diarahkan pada pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) diarahkan pada Pengendalian B3 Dan LB3 Pada Penghasil Dan Pengumpul Skala Kabupaten.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diarahkan pada ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat maupun lembaga.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini menjadi program prioritas Bupati yaitu **Program Lingkungan Sehat: Pengelolaan Sampah Terintegrasi**. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Sukoharjo melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan. Program ini akan mencakup sistem pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir dengan pendekatan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. Fokus utama dari program ini adalah untuk mengurangi timbunan sampah, meningkatkan daur ulang, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber energi terbarukan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program pendaftaran penduduk diarahkan pada peningkatan layanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk, penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program pencatatan sipil diarahkan pada peningkatan layanan pencatatan sipil, penyelenggaraan pencatatan sipil, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil, penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan diarahkan pada pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada penyusunan profil kependudukan yang valid dan efektif untuk mendukung pengambilan Keputusan dan perumusan kebijakan oleh Pemerintah.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Penataan Desa

Program penataan desa diarahkan pada fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan perangkat Desa. Program ini mendukung program prioritas ***Sukoharjo Smart Village Program (Program Kampung Pintar 1 Desa 1 Program Unggulan)***.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada fasilitasi kerjasama antar Desa.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program administrasi pemerintahan desa diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat serta pemberdayaan masyarakat hukum adat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kesertaan KB. Program ini mendukung program prioritas **Pencegahan dan Penanganan Stunting**.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan.

9. Perhubungan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini merupakan program prioritas Bupati yaitu **"Mobilitas Sukoharjo": Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi**. Program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas transportasi di Kabupaten Sukoharjo, baik transportasi publik maupun infrastruktur pendukung. Program ini juga mendukung Program Prioritas **"Terangi Jalanku"**.

b. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada penanganan perlintasan kereta api.

10. Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik antar perangkat daerah maupun kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih baik.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Penuntasan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK**. Program ini berfokus pada pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital di seluruh sektor, termasuk

pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik. Selain itu juga mendukung pencapaian program prioritas **Sukoharjo Digital Government (Tol Layanan Publik)**.

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program pelayanan izin usaha simpan pinjam diarahkan pada fasilitasi pemenuhan perizinan berkaitan dengan usaha simpan pinjam.

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi diarahkan pada pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan peningkatan kualitas pengelolaan koperasi.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat yang memiliki simpanan di Koperasi.

d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program pendidikan dan latihan perkoperasian diarahkan pada peningkatan kapasitas kepada pengurus/pengawas/pengelola koperasi melalui pendidikan dan pelatihan.

e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan serta pengembangan jaringan pemasaran dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **UMKM naik Kelas**. Selain itu juga mendukung program prioritas **Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga**. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengolahan langsung oleh masyarakat di tingkat rumah tangga. Program ini juga di fokuskan untuk mewujudkan Penguatan sektor pertanian dan peternakan sebagai penyokong utama ekonomi daerah melalui optimalisasi rantai pasok dan akses pasar.

g. Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM difokuskan pada pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **UMKM naik Kelas**.

12. Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program pengembangan iklim penanaman modal diarahkan pada penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas serta dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Investasi Berbasis Potensi Lokal**.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Investasi Berbasis Potensi Lokal**. Program ini harapannya dapat mendorong penanaman modal di sektor-sektor unggulan Kabupaten Sukoharjo, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, dengan menyediakan informasi investasi yang komprehensif serta insentif bagi investor yang berkontribusi pada pemberdayaan lokal.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat dan terpadu serta fasilitasi penyelesaian pengaduan perizinan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal diarahkan pada pengembangan aplikasi dan system informasi penanaman modal yang akurat dan valid dalam mendukung iklim investasi.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan diarahkan pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda; peningkatan wirausaha muda pemula, dan pemuda kader; serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. Program ini

mendukung program prioritas Bupati yaitu **Sukoharjo Pemuda Produktif**, yang ditujukan untuk mewujudkan Pemuda sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi, dengan dukungan penuh bagi startup pemuda dan proyek inovasi berbasis teknologi. Selain itu juga mendukung program prioritas Bupati **Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar**.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan organisasi olahraga; serta menyelenggarakan kejuaraan olahraga. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Sukoharjo Juara**, yang ditujukan untuk Membangun Sukoharjo sebagai pusat *sport tourism*, dengan infrastruktur olahraga bertaraf internasional dan peningkatan daya saing atlet di kancah nasional dan internasional.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

14. Statistik

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan statistik sektoral untuk mewujudkan big data melalui penerapan portal data menuju layanan keterbukaan data, sekaligus mendukung implementasi Satu Data Indonesia melalui penyediaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

15. Persandian

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada ketangguhan layanan kemananan informasi pemerintah daerah.

16. Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program pengembangan kebudayaan diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan Lembaga kebudayaan. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Sukoharjo Spektakuler (Festival Budaya Sukoharjo)** dan program prioritas **Sukoharjo Berkarakter**.

b. Program Pembinaan Sejarah

Program pembinaan sejarah diarahkan pada pembinaan sejarah local satu daerah.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya difokuskan pada penetapan, pengelolaan, pelindungan serta pemanfaatan cagar budaya.

17. Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai SNP, peningkatan kualitas layanan Perpustakaan Daerah, serta peningkatan gemar membaca masyarakat.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.

18. Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan kearsipan Pemerintah, serta peningkatan kelestarian arsip.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada perlindungan dan penyelamatan arsip untuk mewujudkan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

4.1.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program pengelolaan perikanan tangkap diarahkan pada peningkatan potensi dan pembinaan nelayan perikanan tangkap untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan perikanan budidaya diarahkan pada fasilitasi perizinan budidaya ikan, peningkatan ketrampilan dan kualitas pembudidaya ikan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan pada pengawasan penangkapan ikan dan budidaya ikan, serta pelaku usaha pengolahan ikan.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diarahkan pada peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten sukoharjo.

2. Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada pengelolaan daya Tarik Wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Desa Wisata Berkelanjutan**, yang di tujukan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di desa-desa Kabupaten Sukoharjo dengan prinsip kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata diarahkan pada peningkatan promosi dan pemasaran destinasi wisata baik dilakukan dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Program ini juga mendukung program prioritas **Sukoharjo Spektakuler (Festival Budaya Sukoharjo)**.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diarahkan pada peningkatan dan pengembangan kapasitas dan pelaku pariwisata dan Ekraf.

3. Pertanian

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Smart Farming**, Program Smart Farming adalah inisiatif untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kegiatan pertanian di Sukoharjo. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Program Asuransi Pertanian**. Selain itu juga mendukung program prioritas **Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian**.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak serta, pengembangan lahan penggembalaan umum. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian**, yang di fokuskan pada pembangunan dan revitalisasi embung, jaringan irigasi air tanah dalam, serta pemeliharaan dan perluasan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan jalan usaha tani.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan serta fasilitasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sehingga menurunkan kemungkinan gagal panen.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan pada fasilitasi izin usaha pertanian.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program penyuluhan pertanian diarahkan pada pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan SDM penyuluh.

4. Perdagangan

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program perizinan dan pendaftaran perusahaan diarahkan pada peningkatan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha perdagangan untuk memperoleh rekomendasi izin sesuai peraturan perundangan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program peningkatan sarana distribusi perdagangan diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat/tradisional dengan melakukan revitalisasi pasar dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL). Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Penguatan Rantai Pasok Produk Lokal** serta mendukung program prioritas **Penataan Wajah Kota (Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho)**.

c. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada stabilisasi harga dan stok barang pokok penting (Bapokting) yang beredar, penyediaan informasi ketersediaan stok bapokting, serta fasilitasi sembako murah. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Penguatan Rantai Pasok Produk Lokal**.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada peningkatan promosi produk daerah yang mampu ekspor sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor daerah. Program ini mendukung program prioritas Bupati Yaitu **Program Pengembangan Pasar Lokal dan Ekspor (Sukoharjo Go Global)** ditujukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal Sukoharjo di pasar nasional dan internasional melalui penguatan standar kualitas, branding, dan akses pasar ekspor.

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program standarisasi dan perlindungan konsumen diarahkan pada pelayanan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri diarahkan pada pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

5. Perindustrian

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program perencanaan dan pembangunan industri diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri sehingga dapat meningkatkan realisasi investasi sektor industri.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada fasilitasi penerbitan izin usaha industri.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini.

6. Transmigrasi

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi diarahkan pada pemenuhan alokasi pemberangkatan transmigrasi.

4.1.4. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan serta penataan organisasi. Program ini juga mendukung pencapaian proram prioritas **Reformasi Birokrasi Dinamis** (*Dynamic Bureaucracy Reform*).

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat diarahkan pada penataan administrasi pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, serta fasilitasi kerja sama daerah. Program ini juga mendukung program prioritas Bupati **Umroh Gratis untuk Takmir Masjid, Sukoharjo Mengaji dan Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan**.

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program perekonomian dan pembangunan diarahkan pada pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Subsidi Bunga Pinjaman UMK** serta program prioritas **Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren**.

2. Sekretariat DPRD

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD diarahkan pada pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintah, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat serta pembahasan Kerjasama daerah.

4.1.5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah

Program perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembangunan daerah diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan

pembangunan daerah. Program ini mendukung program prioritas Bupati ***Sukoharjo Open Government (SOG)***.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah diarahkan pada koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA serta infrastruktur dan kewilayahan untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan Pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA serta infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Subsidi Bunga Pinjaman UMK**.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program pengelolaan barang milik daerah diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD, pengamanan aset, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi peningkatan pad melalui pajak dan retribusi daerah.

3. Kepegawaian

a. Program Kepegawaian Daerah

Program kepegawaian daerah diarahkan pada pendistribusian ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan system informasi melalui upaya pengadaan pegawai sesuai kebutuhan, pengembangan kompetensi ASN selaras dengan tujuan Pembangunan daerah, promosi dan mutasi berdasarkan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja yang transparan dan

akuntabel, pemberhentian ASN, serta menyediakan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN serta menjamin mutu dan sertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program penelitian dan pengembangan daerah diarahkan pada pelaksanaan kajian potensi unggulan daerah dan pemanfaatan hasil kajian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

b. Program Riset dan Inovasi Daerah

Program Riset dan Inovasi Daerah diarahkan pada pelaksanaan riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah, fasilitasi Kerjasama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

4.1.6. Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program penyelenggaraan pengawasan diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini mendukung program prioritas Bupati **Sukoharjo Bersih dari Korupsi (SBK)**, serta mendukung penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi manajemen risiko, penguatan integritas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

4.1.7. Unsur Kewilayahan

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan terhadap masyarakat desa dan kelurahan.

c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum diarahkan pada koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan diarahkan pada edukasi pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme; serta pembentukan kader bela negara. Program ini mendukung program prioritas **Sukoharjo Harmoni**.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi dengan memfasilitasi pemenuhan atas apek kesetaraan dan kebebasan, serta pemantauan situasi politik guna stabilitas daerah. Program ini juga mendukung program prioritas **Sukoharjo Harmoni**.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program diarahkan pada fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.



d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan pada edukasi dan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, social dan budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada edukasi tentang kewaspadaan dan meningkatkan partisipasi seluruh elemen Masyarakat dalam meminimalisir konflik dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan internal perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**. Adapun pencapaian keberhasilan Program tersebut melalui indikator Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah.



Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
Pendidikan								630.087.893.713		557.822.548.375		560.896.715.160		561.724.437.268		601.069.424.339	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya paritisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ Sederajat	%	105,8	100	100	166.166.236.202	100	143.945.168.364	100	146.737.800.399	100	147.246.524.757	100	161.102.125.794	Urusan Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ Sederajat	%	111,1	100	100		100		100		100		100		Urusan Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	91,62	92,55	93,6		94,4		95,3		96,4		97,4		Urusan Pendidikan
			Iklim Inklusivitas (SD)	Indeks	57,4	60,41	65,41		67,91		70,41		72,91		75,41		Urusan Pendidikan
			Iklim Inklusivitas (SMP)	Indeks	58,38	60,33	60,53		60,63		60,73		60,83		60,93		Urusan Pendidikan
			Iklim Keamanan (SD)	Indeks	74,1	75,26	76,06		76,56		77,06		77,56		78,06		Urusan Pendidikan
			Iklim Keamanan (SMP)	Indeks	70,26	71,32	73,12		73,62		74,12		74,62		75,12		Urusan Pendidikan
			Iklim Kebinekaan (SD)	Indeks	74,93	74,96	74,99		75,04		75,12		75,21		75,3		Urusan Pendidikan



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
			Iklim Kebinekaan (SMP)	Indeks	74,12	74,15	74,20		74,26		74,30		74,34		74,4		Urusan Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	100	493.450.000	100	498.347.500	100	526.182.250	100	464.480.000	100	579.280.000	Urusan Pendidikan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	NA	71,9	75	23.150.000	76,4	23.150.000	77,75	23.150.000	78,6	23.150.000	79	23.150.000	Urusan Pendidikan
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	89,32	82,10	82,50		85,90		86,30		86,70		87,10		Urusan Pendidikan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	463.405.057.511	100	413.355.882.511	100	413.609.582.511	100	413.990.282.511	100	439.364.868.545	Urusan Pendidikan
Kesehatan								234.406.681.988		236.533.157.544		235.979.517.544		236.904.517.544		236.608.157.544	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil risiko tinggi tertangani	%	100	100	100	74.672.922.604	100	76.874.398.000	100	75.474.398.000	100	77.134.398.000	100	77.134.398.000	Urusan Kesehatan
			Persentase neonatal risiko tinggi tertangani	%	100	100	100		100		100		100		100		Urusan Kesehatan
			Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	%	5,32	5,25	5,2		5,15		5,1		5		5		Urusan Kesehatan



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)	%	NA	39,34	39,34		39,34		45,9		45,9		52,46		Urusan Kesehatan
			Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (RIBK)	%	76,83	80	80,8		81,7		82,6		83,5		85		Urusan Kesehatan
			Persentase kecamatan dengan proporsi non-hipertensi minimal 75%	%	NA	50	58		66		75		83		91		Urusan Kesehatan
			Persentase kecamatan dengan proporsi non-Diabetes Mellitus minimal 85%	%	NA	50	58		66		75		83		91		Urusan Kesehatan
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (RIBK)	%	0	20	30		40		50		70		80		Urusan Kesehatan
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (RIBK)	%	NA	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Urusan Kesehatan
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (RIBK)	%	13,32	9,8	9		8,2		7,4		6,6		6,5		Urusan Kesehatan
			Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	80	90	90		90		90		95		95		Urusan Kesehatan
			Persentase lanjut usia mandiri (RIBK)	%	82,33	82,8	83,3		83,5		84		85		85		Urusan Kesehatan



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
			Angka Keberhasilan dan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate) (RIBK,IUP)	%	87	87	88		89		90		91		92		Urusan Kesehatan
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) (RIBK, IUP)	%	85	87	89		91		93		95		95		Urusan Kesehatan
			Persentase ODHIV on ARV tersupresi viral load	%	NA	30	30		30		40		50		50		Urusan Kesehatan
			Positive Rate Malaria	%	11,67	5	5		5		5		5		5		Urusan Kesehatan
			Persentase kecamatan memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	%	0	16,67	25		33,33		41		50		50		Urusan Kesehatan
			Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan surveilans	%	100	100	100		100		100		100		100		Urusan Kesehatan
			Persentase Capaian SPM RSUD Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo	%	80	82	83		84		85		86		87		Urusan Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (RIBK)	%	4,54	4,54	4,55	219.753.860	4,56	219.754.000	4,57	219.754.000	4,58	219.754.000	4,59	219.754.000	Urusan Kesehatan



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	%	86,09	88	91	51.137.880	93	51.138.000	95	51.138.000	97	51.138.000	99	51.138.000	Urusan Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kecamatan dengan Peningkatan Aktivitas Fisik Cukup (RIBK)	%	NA	25	41,67	559.223.100	58,33	559.223.000	75	559.223.000	100	299.223.000	100	299.223.000	Urusan Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dinas Kesehatan)	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	158.903.644.544	100	158.828.644.544	100	159.675.004.544	100	159.200.004.544	100	158.903.644.544	Urusan Kesehatan
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang								134.798.352.425		145.730.040.422		149.815.000.000		149.718.740.000		149.798.240.000	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	%	50	55	56	8.851.169.000	57	8.851.169.000	58	8.851.169.000	60	8.851.169.000	62	8.851.169.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap system peenyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	94,19	14,26	15,11	3.513.773.000	15,86	3.386.831.000	16,59	3.513.773.000	17,32	3.513.773.000	18,04	3.513.773.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	%	1,40	1,45	1,50	940.032.000	1,55	940.032.000	1,6 0	971.461.578	1,65	971.461.578	1,70	971.461.578	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas system drainase	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	%	7,45	7,95	8,44	7.474.257.737	8,94	7.474.257.737	9,43	7.474.257.737	9,93	7.474.257.737	10,42	7.474.257.737	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya bangunan ber PBG dan SLF	Rasio bangunan ber PBG dan SLF	%	26,97	27,36	27,74	32.458.312.000	28,11	35.000.000.000	28,51	40.000.000.000		30.000.000.000	29,27	30.000.000.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan	%	100	100	100	360.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggara n Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	88,3	88,35	88,4	57.968.891.003	88,45	64.923.833.000	88,5	64.730.421.000	88,55	74.524.658.000	88,6	74.683.658.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	%	100	100	100	153.158.000	100	153.158.000	100	153.158.000	100	183.161.000		183.161.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggara n Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggara an penataan ruang	Tingkat Perwujudan Rencana Tata Ruang	%	65	85	85,25	993.216.000	85,5	1.093.216.000	85,75	1.093.216.000	86	1.093.216.000	86,25	1.093.216.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	22.085.543.685	100	23.407.543.685	100	22.427.543.685	100	22.507.043.685	100	22.427.543.685	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Perumahan Dan Kawasan Permukima n								15.537.586.000		15.550.000.000		15.550.000.000		15.550.000.000		15.550.000.000	
	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	742.990.000	100	910.000.000	100	910.000.000	100	910.000.000	100	910.000.000	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 ha Yang Ditangani	%	100	100	100	740.719.000	100	740.719.000	100	740.719.000	100	740.719.000	100	740.719.000	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya penanganan RTLH diluar Kawasan kumuh	Persentase RTLH Diluar Kawasan Kumuh Yang Sudah Tertangani	%	100	100	100	3.405.059.000	100	3.405.059.000	100	3.405.059.000	100	3.405.059.000	100	3.405.059.000	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah	%	100	100	100	3.345.538.000	100	3.345.538.000	100	3.345.538.000	100	3.345.538.000	100	3.345.538.000	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	7.303.280.000	100	7.148.684.000	100	7.148.684.000	100	7.148.684.000	100	7.148.684.000	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban Umum dalam masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	98,51	98,6	98,65	6.068.213.000	98,7	6.520.000.000	98,75	7.025.000.000	98,8	7.025.000.000	98,85	6.525.000.000	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
			Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	96,96	97,6	97,7		97,8		97,9		98		98,1		Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
			Persentase linmas yang terlatih dan dikukuhkan	%	58	60	62		64		66		68		70		Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	100		100		100		100		100		Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	10.529.983.700	100	18.682.000.000	100	10.475.000.000	100	10.080.000.000	100	10.425.000.000	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana	Cakupan Capaian Penanggulangan Bencana	Nilai	0,63	0,65	0,67	1.808.745.100	0,69	4.048.305.000	0,7	2.980.125.000	0,72	3.257.125.000	0,73	2.958.125.000	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	5.131.725.000	100	6.526.515.500	100	5.355.887.000	100	5.385.887.000	100	5.385.887.000	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	0	0	60	1.747.482.000	70	1.798.000.000	80	2.500.000.000	90	3.895.000.000	100	1.750.000.000	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
			Cakupan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	56	60	65		70		75		80		85		Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
Sosial								16.162.899.660		16.163.000.000		16.163.000.000		16.163.000.000		16.163.000.000	
	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaa n sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Penanganan Sosial	%	73,52	86,47	100	392.702.200	100	392.000.000	100	392.000.000	100	392.000.000	100	392.000.000	Urusan Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani	%	100	100	100	6.444.000	100	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000	Urusan Sosial



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan PPKS Lainnya diluar HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	16,99	17,99	100	309.233.200	100	310.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	Urusan Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	4,63	5,13	100	7.454.679.700	100	7.454.000.000	100	7.454.000.000	100	7.454.000.000	100	7.454.000.000	Urusan Sosial
	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial bagi korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	73,91	73,91	100	159.055.500	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	Urusan Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	81.908.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	Urusan Sosial
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	97	100	100	7.758.877.060	100	7.760.500.000	100	7.760.500.000	100	7.760.500.000	100	7.760.500.000	Urusan Sosial
Tenaga Kerja								8.920.071.361		9.036.000.000		9.190.000.000		9.350.000.000		9.350.000.000	



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan sesuai RTK	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	%	0	6,66	20	-	40	45.000.000	60	42.500.000	80	45.000.000	100	45.000.000	Urusan Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0.03	0,45	0,45	596.900.000	0,45	607.808.639	0,45	660.308.639	0,45	707.808.639	0,45	707.808.639	Urusan Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	60	83	83	295.260.000	83	295.260.000	83	295.260.000	83	295.260.000	83	295.260.000	Urusan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	70	46,88	46,9	247.800.000	46,93	247.800.000	46,97	247.800.000	47	247.800.000	47,03	247.800.000	Urusan Tenaga Kerja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	7.204.131.361	100	7.204.131.361	100	7.204.131.361	100	7.204.131.361	100	7.204.131.361	Urusan Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak								8.380.962.950		8.381.000.000		8.381.000.000		8.381.000.000		8.381.000.000	



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	4,82	4,83	4,9	347.786.400	4,95	347.786.400	5	347.786.400	5,05	347.786.400	5,1	347.786.400	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	13,64	13,62	13,6	228.124.000	13,55	228.124.000	13,5	228.124.000	13,45	228.124.000	13,4	228.124.000	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas layanan pembelajaran keluarga	Proporsi Keluarga Yang Mendapatkan Layanan Dari Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Sesuai Kebutuhan.	%	NA	NA	50	338.474.000	55	338.474.000	60	338.474.000	67	338.474.000	68	338.474.000	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase ketersediaan Sistem Data Gender dan Anak yang terintegrasi di tingkat daerah kabupaten/kota	%	NA	NA	60	25.058.000	62	25.058.000	65	25.058.000	67	25.058.000	70	25.058.000	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	NA	NA	63,6	89.062.000	63,65	89.062.000	63,7	89.062.000	63,75	89.062.000	63,8	89.062.000	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Menurunnya kekerasan terhadap Anak	Rasio kekerasan terhadap anak, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk anak)	Rasio	-	28,09	28	117.044.400	27,95	117.044.400	27,9	117.044.400	27,85	117.044.400	27,8	117.044.400	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	7.235.414.150	100	7.235.451.200	100	7.235.451.200	100	7.235.451.200	100	7.235.451.200	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
Pangan								12.526.191.600		14.052.880.000		15.023.320.000		15.971.780.000		16.422.704.000	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi kelompok untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Kelembagaan Kemandirian Pangan yang aktif	%	38	42	46	135.000.000	51	43.305.000,00	56	51.070.000,00	61	59.360.000,00	62,5	64.630.000,00	Urusan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	137	0	128	1.457.866.000	128,2	1.800.720.000,00	128,4	1.993.330.000,00	128,55	2.167.945.000,00	128,65	2.280.676.000,00	Urusan Pangan
			Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Beras	%	1,15	0	1,34	1.457.866.000	1,32	1.800.720.000,00	1,31	1.993.330.000,00	1,29	2.167.945.000,00	1,27	2.280.676.000,00	Urusan Pangan
			Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Telur	%	3,19	0	3,17	1.457.866.000	3,15	1.800.720.000,00	3	1.993.330.000,00	3	2.167.945.000,00	3	2.280.676.000,00	Urusan Pangan
			Persentase Cadangan Pangan	%	22	0	37	1.457.866.000	39	1.800.720.000,00	41	1.993.330.000,00	43	2.167.945.000,00	44	2.280.676.000,00	Urusan Pangan
			Tingkat Konsumsi Energi	%	83,5	0	85,5	1.457.866.000	87,4	1.800.720.000,00	89,3	1.993.330.000,00	91,1	2.167.945.000,00	93	2.280.676.000,00	Urusan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Desa/Kelurahan Rentan/Rawan Pangan	%	1,2	5	4,8	180.708.000	4,2	550.965.000,00	3,6	606.860.000,00	3	662.755.000,00	2,4	686.710.000,00	Urusan Pangan



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	90	91,67	91,67	71.769.000	92	90.432.000,00	92	100.404.000,00	93	109.975.000,00	93	114.294.000,00	Urusan Pangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	4.849.384.600	100	4.364.578.000,00	100	4.298.336.000,00	100	4.299.965.000,00	100	4.153.690.000,00	Urusan Pangan
Pertanahan								177.194.000		177.194.000		177.194.000		177.194.000		177.194.000	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persentase	100	100	100	47.500.000	100	47.500.000	100	47.500.000	100	47.500.000	100	47.500.000	Urusan Pertanahan
	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	0	100	100	11.565.000	100	11.565.000	100	11.565.000	100	11.565.000	100	11.565.000	Urusan Pertanahan
	Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Cakupan perencanaan penatagunaan tanah	%	53	60	69	110.000.000	78	110.000.000	86	110.000.000	93	110.000.000	100	110.000.000	Urusan Pertanahan
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	%	100	100	100	8.129.000	100	8.129.000	100	8.129.000	100	8.129.000	100	8.129.000	Urusan Pertanahan
Lingkungan Hidup								34.992.530.652		43.000.000.000		40.500.000.000		38.000.000.000		38.000.000.000	



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan Hidup sesuai kebutuhan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	70	19	38	66.930.800	50	67.500.000	66	69.000.000	81	71.000.000	100	75.000.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup	Nilai Potensi Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Mitigasi Perubahan Iklim	Tonco2 eq	-	17.500	22.500	1.037.251.200	27.500	1.037.500.000	32.500	1.052.000.000	37.500	1.070.000.000	42.500	1.300.000.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Luas Wilayah Perkotaan	%	38	38	38,006	3.301.827.712	38,012	3.301.850.000	38,018	3.342.000.000	38,024	3.401.000.000	38,03	3.721.000.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya pengendalian B3 dan LB3	Persentase Pengendalian B3 Dan LB3 Pada Penghasil Dan Pengumpul Skala Kabupaten	%	-	16	33	17.871.500	50	18.000.000	66	19.000.000	83	21.000.000	100	25.000.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH	%	-	20	40	56.261.500	60	56.300.000	80	58.000.000	95	61.000.000	100	65.000.000	Urusan Lingkungan Hidup



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan	%	-	15	35	46.825.400	60	46.850.000	75	47.000.000	90	51.000.000	100	55.000.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Yang Diberikan	%	-	16	33	19.718.000	50	19.800.000	66	20.000.000	83	25.000.000	100	28.000.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100	22.335.200	100	22.350.000	100	23.000.000	100	27.000.000	100	31.000.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	%	73,2	73,3	73,4	15.456.956.440	73,5	23.458.970.000	73,6	20.670.000.000	73,7	17.770.000.000	74	16.200.000.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	14.966.552.900	100	14.970.880.000	100	15.200.000.000	100	15.503.000.000	100	16.500.000.000	Urusan Lingkungan Hidup
Administra si Kependudu kan Dan Pencatatan Sipil								13.031.541.900		13.050.000.000		13.100.000.000		13.100.000.000		13.100.000.000	
	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	4,79	10	15	1.117.442.040	20	1.120.000.000	25	1.145.000.000	30	1.145.000.000	35	1.145.000.000	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	83,89	85	88		91		95		98		100		Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentae Perekaman KTP-el	%	99,24	99,4	99,41		99,42		99,43		99,44		99,45		Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	98,86	97	98,87	288.233.960	98,88	289.000.000	98,89	295.000.000	98,9	295.000.000	99	295.000.000	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100	100	100		100		100		100		100		Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100	100	100		100		100		100		100		Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100	100	100		100		100		100		100		Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependuduka n	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	249.271.500	100	259.000.000	100	265.000.000	100	265.000.000	100	265.000.000	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
			Persentase Ketersediaan Sistem Informasi dan Data Kependudukan yang Terintegrasi dan bisa diakses	%	100	100	100		100		100		100		100		Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	21.125.000	100	22.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	11.355.469.400	100	11.360.000.000	100	11.370.000.000	100	11.370.000.000	100	11.370.000.000	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa								20.384.829.640		20.500.000.000		20.600.000.000		20.700.000.000		20.800.000.000	
	Program Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan Desa	Persentase Desa yang meningkat status desanya	%	23,38	5,62	10,11	243.752.500	14,61	263.752.000	19,1	283.752.000	23,6	303.752.000	28,09	323.752.000	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	%	NA	NA	20	34.080.000	40	54.080.000	60	74.080.000	80	94.080.000	100	114.080.000	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas Aparatur Desa dan Anggota BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan digital	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	81,82	100	10	2.772.984.800	20	2.792.985.000	65	2.812.985.000	75	2.832.985.000	85	2.852.985.000	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ekonomi desa dalam mendukung kemandirian dan pertumbuhan ekonomi desa	Persentase Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya	%	9,35	11,22	12,08	10.774.420.900	25,65	10.794.421.000	37,73	10.814.421.000	51,31	10.834.421.000	64,58	10.854.421.000	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	6.559.591.440	100	6.594.762.000	100	6.614.762.000	100	6.634.762.000	100	6.654.762.000	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk Dan KB								12.134.015.471		11.105.000.000		11.105.000.000		11.105.000.000		11.105.000.000	
	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19 Tahun)	Angka	3,4	4,5	4,49	34.269.000	4,48	34.269.000	4,47	34.269.000	4,46	34.269.000	4,45	34.269.000	Urusan Pengendalian Penduduk Dan KB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya kepesertaan KB	Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	%	67,57	67,57	67,6	11.822.600.471	67,65	10.793.585.000	67,68	10.793.585.000	67,7	10.793.585.000	67,75	10.793.585.000	Urusan Pengendalian Penduduk Dan KB
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pelayanan kebutuhan KB	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terenuhi (unmet need)	%	9,29	9,28	9,27	277.146.000	9,26	277.146.000	9,25	277.146.000	9,24	277.146.000	9,23	277.146.000	Urusan Pengendalian Penduduk Dan KB
Perhubungan								50.082.859.150		53.000.000.000		64.000.000.000		53.000.000.000		53.000.000.000	
	Program Penyelenggara n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi Darat	Cakupan Wilayah Yang Terkoneksi Angkutan Umum	%	100	100	100	38.746.223.528	100	41.091.000.000	100	41.091.000.000	100	41.091.000.000	100	41.091.000.000	Urusan Perhubungan



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
			Persentase Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	-	6,6	7		7,47		8,02		8,66		9,41		Urusan Perhubungan
			V/C Rasio Di Jalan Kabupaten/Kota	Angka	0,64	0,64	0,639		0,639		0,638		0,637		0,636		Urusan Perhubungan
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Angka	-	-	-		-		-		-		-		Urusan Perhubungan
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya pengelolaan perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api Yang Ditangani	%	100	100	100	810.044.740	100	820.000.000	100	820.000.000	100	820.000.000	100	820.000.000	Urusan Perhubungan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	10.526.590.882	100	11.089.000.000	100	22.089.000.000	100	11.089.000.000	100	11.089.000.000	Urusan Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika								12.053.364.500		12.500.000.000		12.500.000.000		12.500.000.000		12.500.000.000	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	99,38	99,38	91	1.124.041.780	92	1.300.000.000	93	1.300.000.000	94	1.300.000.000	94	1.300.000.000	Urusan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya layanan public secara online dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50	50	60	3.897.827.420	65	4.000.000.000	70	4.000.000.000	75	4.000.000.000	80	4.000.000.000	Urusan Komunikasi Dan Informatika
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	93,75	95	96	7.031.495.300	97	7.200.000.000	98	7.200.000.000	99	7.200.000.000	100	7.200.000.000	Urusan Komunikasi Dan Informatika



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah								17.386.129.541		17.340.952.930		17.440.613.579		17.440.613.579		17.440.613.579	
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	42,2	42,4	42,6	53.000.000	42,8	53.042.283	43	53.347.124	43,2	53.347.124	43,4	53.347.124	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	%	17,34	17,84	18,34	59.000.000	0		0		0		0	0	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi Yang Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	%	26,37	26,87	27,37	377.240.000	27,87	377.540.958	28,37	379.710.733	28,87	379.710.733	29,37	379.710.733	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	8,78	8,8	8,82	487.000.480	8,84	487.389.004	8,86	490.190.090	8,88	490.190.090	8,9	490.190.090	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	%	19,82	20	20.82	1.118.130.400	21	1.119.022.430	21.82	1.125.453.595	22	1.125.453.595	22.82	1.125.453.595	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha	%	10.46	11	11.46	128.285.600	12	128.387.945	12.46	129.125.807	13	129.125.807	13.46	129.125.807	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	15.163.473.061	100	15.175.570.310	100	15.262.786.230	100	15.262.786.230	100	15.262.786.230	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Penanama n Modal								8.356.593.000		8.500.000.000		8.600.000.000		8.700.000.000		8.800.000.000	



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	104,79	100	100	180.000.000	100	297.407.000	100	210.000.000	100	276.550.000	100	210.000.000	Urusan Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	%	-	4	4,2	85.000.000	4,4	85.000.000	4,6	85.000.000	4,8	85.000.000	5	85.000.000	Urusan Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		-	78	80	116.975.000	82	116.975.000	84	116.975.000	86	116.975.000	88	116.975.000	Urusan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	%	-	90	92	109.100.000	94	109.100.000	96	109.100.000	98	109.100.000	100	109.100.000	Urusan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal	%	-	90	90,5	34.850.000	91	34.850.000	91,5	34.850.000	92	34.850.000	92,5	134.850.000	Urusan Penanaman Modal
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	7.830.668.000	100	7.856.668.000	100	8.044.075.000	100	8.077.525.000	100	8.144.075.000	Urusan Penanaman Modal
Kepemudaan Dan Olahraga								20.202.414.200		19.000.000.000		19.000.000.000		19.000.000.000		19.000.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	22,55	22,57	22,63	3.191.480.000	22,76	4.683.500.000	22,97	4.683.500.000	23,25	4.683.500.000	23,62	4.683.500.000	Urusan Kepemudaan dan Olahraga



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		NA	21,18	21,23		21,28		21,32		21,37		21,42		Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Jumlah Pelatih Bersertifikasi	Orang	98	100	103	7.614.873.000	106	4.865.000.000	109	4.865.000.000	112	4.865.000.000	115	4.865.000.000	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	5286	300	315		331		348		365		383		Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Event Olahraga Yang Dilaksanakan Di Sarana Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Event	NA	15	16		17		18		20		21		Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Jumlah Prestasi Kepramukaan Tingkat Internasional, Nasional Dan Provinsi Yang Diraih	Medali	10	10	10	663.000.000	10	1.434.032.000	11	1.434.032.000	11	1.434.032.000	12	1.434.032.000	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	8.733.061.200	100	8.017.468.000	100	8.017.468.000	100	8.017.468.000	100	8.017.468.000	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Statistik								131.922.840		132.000.000		132.000.000		135.000.000		135.000.000	
	Program Penyelenggara n Statistik Sektor	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor	Ketersediaan Data Statistik Sektor	%	94,29	94,29	94,85	131.922.840	95,15	132.000.000	95,45	132.000.000	95,75	135.000.000	95,75	135.000.000	Urusan Statistik
Persandian								414.079.209		617.528.167		710.157.392		781.173.131		859.290.444	



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Penyelenggara n Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai	400	450	500	414.079.209	550	617.528.167	600	710.157.392	650	781.173.131	700	859.290.444	Urusan Persandian
Kebudayaa n								1.745.430.000		1.800.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengembanga n kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	76	62	63	1.516.380.000	65	1.550.000.000	68	1.620.000.000	69	1.685.000.000	71	1.685.000.000	Urusan Kebudayaan
	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya pelestarian Sejarah Lokal	Persentase Sejarah Lokal Yang Dilestarikan	%	22	32	38	81.150.000	44	82.000.000	50	85.000.000	56	95.000.000	62	95.000.000	Urusan Kebudayaan
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Dan Dilestarikan	%	7,14	8,5	9,52	147.900.000	10,88	168.000.000	12,24	195.000.000	13,61	220.000.000	14,97	220.000.000	Urusan Kebudayaan
Perpustaka an								8.190.544.048		8.190.000.000		7.895.000.000		7.890.000.000		7.900.000.000	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningktnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Peustakaan	%	1,34	1,63	1,93	622.900.000	2,23	623.000.000	2,52	431.000.000	2,82	431.000.000	3,12	435.000.000	Urusan Perpustakaan
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	%	45	54,71	60	28.000.000	62,5	28.000.000	64,71	25.000.000	66,67	25.000.000	68,42	25.000.000	Urusan Perpustakaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	74,51	75	76	7.539.644.048	77	7.539.000.000	78	7.439.000.000	79	7.434.000.000	80	7.440.000.000	Urusan Perpustakaan
Kearsipan								117.300.000		117.300.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000	



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata Kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawab an Nasional) Pasal 40 Dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	%	77,5	78	78,5	107.300.000	79	107.300.000	79,5	109.000.000	80	135.000.000	80,5	135.000.000	Urusan Kearsipan
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawab an Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	%	43,33	44	44,5	10.000.000	45	10.000.000	45,5	11.000.000	46	15.000.000	46,5	15.000.000	Urusan Kearsipan
Kelautan dan Perikanan								1.025.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000		1.100.000.000		1.050.000.000	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	404	406	410	138.000.000	412	150.000.000	420	150.000.000	430	150.000.000	440	150.000.000	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	14.476	14.494	14.570	662.000.000	14.650	730.000.000	14.730	780.000.000	14.815	730.000.000	14.910	680.000.000	Urusan Kelautan dan Perikanan



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya pengawasan terhadap Sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah Pembudidaya Bersertifikat NIB	Kelompok	5	5	5	10.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	24,20	24,50	25	215.000.000	26	200.000.000	27	200.000.000	28,50	200.000.000	30	200.000.000	Urusan Kelautan dan Perikanan
Pariwisata								745.492.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya Tarik destinasi pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	7,64	7,66	7,68	151.306.000	7,7	511.432.010	7,72	511.432.010	7,74	511.432.010	7,76	511.432.010	Urusan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya pemasaran pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	%	NA	20,21	22,29	393.100.000	30,44	257.521.059	32,98	257.521.059	35,51	257.521.059	38,08	257.521.059	Urusan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina	%	NA	20,83	22,92	201.086.000	25	231.046.931	27,08	231.046.931	29,17	231.046.931	31,25	231.046.931	Urusan Pariwisata
Pertanian								35.109.603.606		37.950.000.000		37.950.000.000		38.000.000.000		35.050.000.000	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Padi	Ton	13.106	8.386	1.181	2.000.550.000	2.500	1.990.000.000	2.500	2.040.000.000	3.000	2.040.000.000	3.500	1.990.000.000	Urusan Pertanian
			Peningkatan Produksi Jagung	Ton	2.152	332	281		300		300		400		400		Urusan Pertanian
			Peningkatan Produksi Cabe	Ku	55	10	50		60		80		100		125		Urusan Pertanian
			Peningkatan Produksi Bawang Merah	Ku	41	6	10		25		35		35		50		Urusan Pertanian
			Peningkatan Produksi Daging	Ton	292	163	141		200		250		350		400		Urusan Pertanian
			Peningkatan Produksi Telur	Ton	92	17	20		30		40		50		60		Urusan Pertanian



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Jumlah Peningkatan Luas Tanam	Ha	400	300	410	10.906.139.800	410	11.700.000.000	410	11.380.000.000	410	11.100.000.000	300	7.750.000.000	Urusan Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	34	34,5	35	335.000.000	37,5	465.000.000	40	455.000.000	42,5	465.000.000	45	435.000.000	Urusan Pertanian
			Jumlah Populasi Ternak (Animal Unit)	Ekor	20.666	20.976	21.227		21.472		21.836		22.345		22.927		Urusan Pertanian
			Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	0	50	50		50		50		50		50		Urusan Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulang an bencana pertanian	Persentase Gagal Panen	%	3	3	3	865.000.000	3	1.105.000.000	3	1.105.000.000	3	1.155.000.000	3	1.155.000.000	Urusan Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Dokumen	10	15	15	15.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	Urusan Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Prosentase SDM Petani yang ditingkatkan	%	0,5	0,5	3	1.122.500.000	3,5	1.125.000.000	3,5	1.104.000.000	4	1.104.000.000	4	1.154.000.000	Urusan Pertanian
			Persentase Peningkatan Kelembagaan Petani Dan Kenaikan Kelas Kelompok	%	2	2	2		2		2		2		2		Urusan Pertanian



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan, laporan kinerja perangkat daerah dan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tepat waktu.	%	100	100	100	19.865.413.806	100	21.535.000.000	100	21.836.000.000	100	22.106.000.000	100	22.536.000.000	Urusan Pertanian
Perdagangan								14.047.944.944		10.500.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000	
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Permohonan Izin Usaha Perdagangan Yang Memperoleh Rekomendasi	%	100	100	100	10.000.000	100	9.400.000	100	9.400.000	100	9.400.000	100	9.400.000	Urusan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persentase Pasar Rakyat yang ditingkatkan kualitasnya	%	80,77	84,65	84,65	11.833.680.924	88,46	8.855.000.000	92,31	5.355.000.000	96,31	5.355.000.000	100	5.355.000.000	Urusan Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Pengendalian Harga	%	100	100	100	352.332.500	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Urusan Perdagangan
	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Peningkatan Ekspor	%	15,45	15,65	15,85	1.001.500.000	16,05	525.000.000	16,25	525.000.000	16,45	525.000.000	16,65	525.000.000	Urusan Perdagangan
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya UTPP ber-tera sah	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTPP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	81,8	81,9	82	150.431.520	82,2	110.600.000	82,4	110.600.000	82,6	110.600.000	82,8	110.600.000	Urusan Perdagangan



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Hasil Transaksi Dalam Pameran	%	15,45	15,65	15,85	700.000.000	16,05	700.000.000	16,25	700.000.000	16,45	700.000.000	16,55	700.000.000	Urusan Perdagangan
Perindustrian								540.180.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000		800.000.000	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	34,35	95	95,5	332.740.000	96	320.000.000	96,5	355.000.000	97	390.000.000	97,5	390.000.000	Urusan Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri Yang Diterbitkan	%	66,67	90	91	80.804.000	92	110.000.000	93	145.000.000	94	180.000.000	95	180.000.000	Urusan Perindustrian
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, Dan Terkini	%	74,7	75	75,5	126.636.000	76	170.000.000	76,5	200.000.000	77	230.000.000	77,5	230.000.000	Urusan Perindustrian
Transmigrasi								35.800.000		36.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terpenuhinya alokasi pemberangkatan transmigrasi	Persentase pemenuhan alokasi tujuan transmigran	%	100	100	100	35.800.000	100	36.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Urusan Tenaga Kerja
Sekretariat Daerah								97.500.502.502		105.147.665.752		114.204.822.328		119.237.274.561		127.814.748.901	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	%	100	100	100	40.054.000.000	100	40.656.000.000	100	41.520.000.000	100	42.342.000.000	100	43.106.000.000	Sekretariat Daerah
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
			Nilai EPPD (bagian pemerintahan)	Nilai/Angka	3,3804	3,3816	3,3825		3,3835		3,3845		3,3855		3,3865		Sekretariat Daerah



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	90	90	91	1.852.568.802	92	1.962.835.682	93	2.133.109.251	94	2.253.390.176	95	2.602.675.979	Sekretariat Daerah
			Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	95,6	95,6	95,7		95,8		95,9		96			96	Sekretariat Daerah
			Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	3	3	3		3		3		3			3	Sekretariat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks PPID Setda (Bagian Prokopim)	Nilai	0	88	89	55.593.933.700	89	62.528.830.070	90	70.551.713.077	91	74.641.884.385	92	82.106.072.823	Sekretariat Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	0	80	80		81		82		83		84		Sekretariat Daerah
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	38	38	39		39		40		40		40		Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD								73.371.655.490		73.400.000.000		73.400.000.000		73.400.000.000		73.590.000.000	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundan undangan	Ketepatan Penetapan Perda Apbd Tahun N	%	100 %	100 %	100 %	28.949.260.500	100 %	28.967.606.000	100 %	28.967.606.000	100 %	28.967.606.000	100 %	29.157.606.000	Sekretariat DPRD
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Sekretariat DPRD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	98,99	100	100	44.422.394.990	100	44.432.394.000	100	44.432.394.000	100	44.432.394.000	100	44.432.394.000	Sekretariat DPRD



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
Perencanaan								9.673.314.400		9.700.000.000		9.700.000.000		9.795.000.000		9.795.000.000	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD	%	100 %	100 %	100	1.165.000.000	100	1.165.000.000	100	1.165.000.000	100	1.215.000.000	100	1.215.000.000	Fungsi Penunjang Perencanaan
			Persentase Keselarasan RPJMD Dengan Renstra PD	%	100	100	100		100		100		100		100		Fungsi Penunjang Perencanaan
			Persentase Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	%	92	100	100	431.000.000		431.000.000	100	431.000.000	100	446.000.000	100	446.000.000	Fungsi Penunjang Perencanaan
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur \Dan Kewilayahan	%	92	100	100	682000000	100	682000000	100	682000000	100	697.000.000	100	697.000.000	Fungsi Penunjang Perencanaan



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian Dan SDA	%	92	100	100	295000000	100	295000000	100	295000000	100	310000000	100	310000000	Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	-	-	100	7.100.314.400	100	7.127.000.000	100	7.127.000.000	100	7.127.000.000	100	7.127.000.000	Fungsi Penunjang Perencanaan
Keuangan								376.997.745.660		385.000.000.000		386.000.000.000		386.000.000.000		387.000.000.000	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata Kelola keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	336.202.683.262	100	340.500.000.000	100	341.000.000.000	100	341.000.000.000	100	341.500.000.000	Fungsi Penunjang Keuangan
			Persentase Dokumen Penganggaran Yang Tepat Waktu	%	100	100	100		100		100		100		100		Fungsi Penunjang Keuangan
			Persentase Perangkat Daerah dalam hal penyerapan anggarannya berdasarkan angaran kas yang telah ditetapkan	%	-	-	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Fungsi Penunjang Keuangan
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata Kelola Asset Daerah	Persentase penatausahaan aset daerah yang tertib	%	100	100	100	2.436.551.780	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	Fungsi Penunjang Keuangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya tata Kelola Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	24,7	26,05	26,45	8.114.875.444	26,85	10.500.000.000	27,25	10.500.000.000	27,8	10.500.000.000	28,05	11.000.000.000	Fungsi Penunjang Keuangan



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
			Persentase Peningkatan Target PAD	%	3,07	3,15	3,2		3,25		3,3		3,35		3,4		Fungsi Penunjang Keuangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	-	-	100	30.243.635.174	100	31.000.000.000	100	31.500.000.000	100	31.500.000.000	100	31.500.000.000	Fungsi Penunjang Keuangan
Kepegawai an								42.405.704.450		44.526.300.000		46.881.300.000		49.225.200.000		51.686.000.000	
	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepegawaian Daerah	Persentase Teenuhinya Formasi Kebutuhan ASN	%	91,4	91,5	91,6	3.187.704.450	91,7	3.347.400.000	91,8	3.643.500.000	91,9	3.826.200.000	91,9	4.017.000.000	Fungsi Penunjang Kepegawaian
			IP ASN Dimensi Kinerja	Nilai	24,04	24,04	24,04		24,04		24,04		24,04		24,04		Fungsi Penunjang Kepegawaian
			Persentase Jabatan Yang Terisi Sesuai Syarat Jabatan	%	51,6	55	60		65		70		75		75		Fungsi Penunjang Kepegawaian
			IP ASN Dimensi Disiplin	Nilai	4,995	4,995	4,995		4,995		4,995		4,995		4,995		Fungsi Penunjang Kepegawaian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	81,66	81,70	81,75	39.218.000.000	81,80	41.178.900.000	81,85	43.237.800.000	81,90	45.399.000.000	81,95	47.669.000.000	Fungsi Penunjang Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan								4.667.852.200		4.668.000.000		4.700.000.000		4.700.000.000		4.750.000.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan SDM	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	27,49	27,5	27,51	4.667.852.200	27,52	4.668.000.000	27,53	4.700.000.000	27,54	4.700.000.000	27,55	4.750.000.000	Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
			IP ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan	Nilai	20,51	20,515	20,52		20,525		20,53		20,535		20,54		Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Penelitian Dan								641.000.000		650.000.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000	



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
Pengemban gan																	
	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	%	0	0	100	265.000.000	100	269.500.000	100	269.500.000	100	294.500.000	100	294.500.000	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	50	50	50	376.000.000	50	380.500.000	50	380.500.000	50	405.500.000	50	405.500.000	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Pengawasa n								15.932.596.000		16.000.000.000		16.500.000.000		16.500.000.000		16.500.000.000	
	Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewenga n atau penyimpanga n baik bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	99,34	99,5	99,60 %	2.389.046.000	99,7	2.456.450.000	99,8	2.656.450.000	99,9	2.656.450.000	100	2.656.450.000	Fungsi Pengawasan
			Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	%	99	99	99,2		99,3		99,4		99,5		99,6		Fungsi Pengawasan
			Persentase OPD Yang Melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP	%	100	100	100		100		100		100		100		Fungsi Pengawasan



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
			Persentase PDTT Yang Selesai Ditangani	%	100	100	100		100		100		100		100		Fungsi Pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	%	100	100	100	2.152.190.000	100	2.152.190.000	100	2.452.190.000	100	2.452.190.000	100	2.452.190.000	Fungsi Pengawasan
			Persentase Sakip Perangkat Daerah Kategori Minimal BB	%	22	25	28		31		33		36		39		Fungsi Pengawasan
			Persentase Wajib Lapor LHKPN Yang Melapor	%	100	100	100		100		100		100		100		Fungsi Pengawasan
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Indeks	2,8	3	3		3		3		3		3		Fungsi Pengawasan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	11.391.360.000	100	11.391.360.000	100	11.391.360.000	100	11.391.360.000	100	11.391.360.000	Fungsi Pengawasan
Kecamatan Weru								3.422.783.500		3.430.000.000		3.450.000.000		3.550.000.000		3.450.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	-	89,25	89,5	30.000.000	89,65	30.000.000	89,8	30.000.000	90	35.000.000	90,25	30.000.000	Kecamatan Weru
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Weru)	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100	100	72.760.000	100	73.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	80.000.000	Kecamatan Weru



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	15.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	17.000.000	100	16.000.000	Kecamatan Weru
	Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	100	100	217.500.000	100	218.000.000	100	219.000.000	100	220.000.000	100	219.000.000	Kecamatan Weru
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	100	100	31.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	32.000.000	100	30.000.000	Kecamatan Weru
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	100	100	3.056.523.500	100	3.063.000.000	100	3.075.000.000	100	3.156.000.000	100	3.075.000.000	Kecamatan Weru
Kecamatan Bulu								3.559.689.100		3.560.000.000		3.570.000.000		3.670.000.000		3.570.000.000	
	Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	-	87	87,5	20.000.000	88	20.000.000	88,5	20.000.000	89	30.000.000	89,5	20.000.000	Kecamatan Bulu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100	100	100	74.500.000	100	74.500.000	100	84.500.000	100	100.000.000	100	84.500.000	Kecamatan Bulu



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	7.150.000	100	7.150.000	100	7.150.000	100	15.000.000	100	7.150.000	Kecamatan Bulu
	Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	100	100	224.000.000	100	224.000.000	100	224.000.000	100	224.000.000	100	224.000.000	Kecamatan Bulu
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaran Pemerintah Desa	Persentase Adminitrasi Desa tepat waktu	%	100	100	100	37.500.000	100	37.500.000	100	37.500.000	100	40.000.000	100	37.500.000	Kecamatan Bulu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	100	100	3.196.539.100	100	3.196.850.000	100	3.196.850.000	100	3.261.000.000	100	3.196.850.000	Kecamatan Bulu
Kecamatan Tawangsari								3.691.949.400		3.695.000.000		3.700.000.000		3.800.000.000		3.700.000.000	
	Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	-	90	90	30.000.000	92	30.000.000	94	31.000.000	96	41.000.000	98	31.000.000	Kecamatan Tawangsari
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Tawangsari)	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	92	83.000.000	94	83.000.000	96	84.000.000	98	94.000.000	100	84.000.000	Kecamatan Tawangsari



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	90	17.000.000	94	18.000.000	96	19.000.000	98	29.000.000	100	19.000.000	Kecamatan Tawangsari
	Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	100	90	217.080.000	94	218.080.000	96	219.080.000	98	229.080.000	100	219.080.000	Kecamatan Tawangsari
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaran Pemerintah Desa	Persentase Adminitrasi Desa tepat waktu	%	100	100	90	51.000.000	92	52.000.000	94	53.000.000	96	63.000.000	98	53.000.000	Kecamatan Tawangsari
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	100	100	3.293.869.400	100	3.293.920.000	100	3.293.920.000	100	3.343.920.000	100	3.293.920.000	Kecamatan Tawangsari
Kecamatan Nguter								3.705.670.624		3.706.000.000		3.710.000.000		3.810.000.000		3.710.000.000	
	Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	-	90,3	90,4	30.500.000	90,5	30.500.000	90,6	30.500.000	90,7	30.500.000	90,8	30.500.000	Kecamatan Nguter
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100	100	98.000.000	100	98.000.000	100	98.000.000	100	98.000.000	100	98.000.000	Kecamatan Nguter



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	Kecamatan Nguter
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	100	100	223.000.000	100	223.000.000	100	223.000.000	100	223.000.000	100	223.000.000	Kecamatan Nguter
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggar aan Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Nguter
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	100	100	3.285.170.624	100	3.285.500.000	100	3.289.500.000	100	3.389.500.000	100	3.289.500.000	Kecamatan Nguter
Kecamatan Sukoharjo								40.721.157.500		40.725.000.000		40.750.000.000		40.850.000.000		40.750.000.000	
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	-	92,25	92,5	68.815.000	92,75	70.000.000	93	70.000.000	93,25	70.000.000	93,5	70.000.000	Kecamatan Sukoharjo
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100	92,5	15.438.392.000	100	17.000.000.000	100	17.250.000.000	100	17.500.000.000	100	17.500.000.000	Kecamatan Sukoharjo



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	134.100.000	100	160.000.000	100	162.000.000	100	164.000.000	100	162.000.000	Kecamatan Sukoharjo
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	100	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	Kecamatan Sukoharjo
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaran Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	100	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	Kecamatan Sukoharjo
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	96,32	100	100	24.873.850.500	100	23.289.000.000	100	23.062.000.000	100	22.910.000.000	100	22.812.000.000	Kecamatan Sukoharjo
Kecamatan Bendorari								5.729.788.068		5.730.000.000		5.735.000.000		5.835.000.000		5.735.000.000	
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	-	90,9	90,92	36.140.000	90,94	36.140.000	90,95	36.140.000	90,96	36.140.000	91	36.140.000	Kecamatan Bendorari
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100	100	861.483.000	100	861.483.000	100	861.483.000	100	861.483.000	100	861.483.000	Kecamatan Bendorari



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	34.716.200	100	34.716.200	100	34.716.200	100	34.716.200	100	34.716.200	Kecamatan Bendosari
	Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	100	100	217.760.000	100	217.760.000	100	217.760.000	100	217.760.000	100	217.760.000	Kecamatan Bendosari
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaran Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	100	100	51.370.000	100	51.370.000	100	51.370.000	100	51.370.000	100	51.370.000	Kecamatan Bendosari
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	100	100	4.528.318.868	100	4.528.530.800	100	4.533.530.800	100	4.633.530.800	100	4.533.530.800	Kecamatan Bendosari
Kecamatan Polokarto								4.004.679.400		4.004.900.000		4.010.000.000		4.110.000.000		4.010.000.000	
	Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	88,23	88,4	88,5	37.700.000	89	37.700.000	89,5	37.700.000	90	37.700.000	90,5	37.700.000	Kecamatan Polokarto
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100	100	88.500.000	100	88.500.000	100	88.500.000	100	88.500.000	100	88.500.000	Kecamatan Polokarto



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	Kecamatan Polokarto
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum						216.200.000		216.200.000		216.200.000		216.200.000		216.200.000	Kecamatan Polokarto
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggar aan Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	100	100	68.000.000	100	68.000.000	100	68.000.000	100	68.000.000	100	68.000.000	Kecamatan Polokarto
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	100	100	3.570.279.400	100	3.570.500.000	100	3.575.600.000	100	3.675.600.000	100	3.575.600.000	Kecamatan Polokarto
Kecamatan Mojolaban								3.830.256.032		3.831.000.000		3.835.000.000		3.935.000.000		3.835.000.000	
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	-	88,75	89	25.000.000	89,5	25.000.000	90	25.000.000	90,5	25.000.000	91	25.000.000	Kecamatan Mojolaban
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	82.000.000	100	82.000.000	100	82.000.000	Kecamatan Mojolaban



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	Kecamatan Mojolaban
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	100	100	216.115.000	100	216.200.000	100	216.200.000	100	216.200.000	100	216.200.000	Kecamatan Mojolaban
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggar aan Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	100	100	42.500.000	100	43.500.000	100	45.000.000	100	46.000.000	100	48.000.000	Kecamatan Mojolaban
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	100	100	3.450.641.032	100	3.450.300.000	100	3.450.800.000	100	3.549.800.000	100	3.447.800.000	Kecamatan Mojolaban
Kecamatan Grogol								3.830.589.500		3.831.000.000		3.835.000.000		3.933.000.000		3.835.000.000	
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	-	100	100	55.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	Kecamatan Grogol
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan						95.000.000		95.000.000		95.000.000		100.000.000		100.000.000	Kecamatan Grogol



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kecamatan Grogol
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan						225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	Kecamatan Grogol
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggar aan Pemerintah Desa						68.000.000		63.000.000		68.000.000		73.000.000		78.000.000	Kecamatan Grogol
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	100	100	3.357.589.500	100	3.363.000.000	100	3.352.000.000	100	3.450.000.000	100	3.347.000.000	Kecamatan Grogol
Kecamatan Baki								3.752.479.250		3.753.000.000		3.755.000.000		3.855.000.000		3.755.000.000	
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	-	90	90,25	20.000.000	90,5	20.000.000	90,75	20.000.000	91	20.000.000	91,25	20.000.000	Kecamatan Baki
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Kecamatan Baki



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Kecamatan Baki
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	100	100	216.000.000	100	216.000.000	100	216.000.000	100	216.000.000	100	216.000.000	Kecamatan Baki
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaran Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	100	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	Kecamatan Baki
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	100	100	3.371.479.250	100	3.372.000.000	100	3.374.000.000	100	3.474.000.000	100	3.374.000.000	Kecamatan Baki
Kecamatan Gatak								3.997.644.480		3.998.000.000		4.000.000.000		4.100.000.000		4.000.000.000	
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	-	85,9	86	20.000.000	86,25	20.000.000	86,5	20.000.000	86,75	25.000.000	87	20.000.000	Kecamatan Gatak
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	100	100	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	70.000.000	Kecamatan Gatak



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	15.000.000	Kecamatan Gatak
	Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya penyelenggaran urusan pemerintahan umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	100	100	226.000.000	100	226.000.000	100	226.000.000	100	230.000.000	100	226.000.000	Kecamatan Gatak
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaran Pemerintahan Desa	Persentase Adminitrasi Desa tepat waktu	%	100	100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	37.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	Kecamatan Gatak
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	3.631.644.480	100	3.632.000.000	100	3.632.000.000	100	3.710.000.000	100	3.624.000.000	Kecamatan Gatak
Kecamatan Kartasura								8.243.701.670		8.245.000.000		8.250.000.000		8.350.000.000		8.250.000.000	
	Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	83,71	85	85,5	54.000.000	86	54.000.000	86,5	55.000.000	87	55.000.000	87,5	55.000.000	Kecamatan Kartasura
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	100	100	100	1.307.852.670	100	1.310.000.000	100	1.310.000.000	100	1.410.000.000	100	1.310.000.000	Kecamatan Kartasura



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Capaian Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	Kecamatan Kartasura
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya penyelenggaran urusan pemerintahan umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	100	100	221.000.000	100	221.000.000	100	222.000.000	100	222.000.000	100	222.000.000	Kecamatan Kartasura
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap Pemerintah Desa	Persentase Adminitrasi Desa tepat waktu	%	100	100	100	47.000.000	100	47.000.000	100	48.000.000	100	48.000.000	100	48.000.000	Kecamatan Kartasura
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	6.588.849.000	100	6.588.000.000	100	6.589.000.000	100	6.589.000.000	100	6.589.000.000	Kecamatan Kartasura
Pemerintah an Umum								13.793.309.000		13.795.000.000		23.800.000.000		33.800.000.000		14.000.000.000	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	80	82	83	1.873.370.000	84	1.880.000.000	85	3.000.000.000	86	4.000.000.000	87	1.890.000.000	Pemerintahan Umum
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	80	82	84	1.794.531.000	86	1.800.000.000	88	6.910.000.000	89	12.910.000.000	90	1.810.000.000	Pemerintahan Umum



Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Baseline		Target										PD Yang Menangani Urusan
					2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	85	75	76	1.331.677.000	77	1.330.000.000	78	2.500.000.000	79	3.500.000.000	80	1.380.000.000	Pemerintahan Umum
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%	85	85	87	750.300.000	88	750.000.000	89	1.900.000.000	90	2.900.000.000	91	800.000.000	Pemerintahan Umum
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	80	80	81	3.067.400.000	82	3.065.000.000	83	4.500.000.000	84	5.500.000.000	85	3.130.000.000	Pemerintahan Umum
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	4.976.031.000	100	4.970.000.000	100	4.990.000.000	100	4.990.000.000	100	4.990.000.000	Pemerintahan Umum

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan indikator yang dipilih dari tujuan dan/atau sasaran pembangunan daerah. IKU Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada periode tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,97	4,97-5,20	5,50-6,30	5,51-6,35	5,52-6,40	5,53-6,45	5,54-6,50
2.	Rasio Gini	Angka / Indeks	0,39	0,37	0,365	0,360	0,355	0,35	0,345
3.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka / Indeks	4,11	4,12	4,15	4,17	4,18	4,19	4,2
4.	PDRB per kapita	Rp Juta	53,08	56,28	59,58	62,98	66,48	70,08	73,78
5.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	NA ⁽¹⁾	815.147,43	1.015.147,43	1.215.147,43	1.415.147,43	1.615.147,43	2.015.147,43
6.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	53,94	56,86	58,41	59,17	59,93	60,78	61,63
7.	Tingkat Kemiskinan/ Persentase Penduduk Miskin	%	7,47	7,30-7,10	7,20-7,15	7,15-7,06	7,06-6,99	6,99-6,95	6,95-6,90
8.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka / Indeks	86,2	77,97	80	81	82	83	84
9.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka / Indeks	79,3	79,5	79,75	79,8	80	80,17	80,22
10.	Indeks Harmoni Indonesia	Angka / Indeks	NA ⁽²⁾	6,88	7	7,5	7,8	8	8,5

Keterangan:

- 1) Data tidak tersedia akibat kebijakan metode perhitungan baru sesuai surat Bappeda Provinsi Jawa Tengah No. S/500.10.15.6/389/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Perihal Penyelarasan Target Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kabupaten/Kota
- 2) Data tidak tersedia akibat penyempurnaan pengukuran sesuai Surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.4.7/e-170/Polpum Tanggal 25 Februari 2025 Perihal Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2030. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut.



Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Aspek Geografi Dan Demografi									
1.	Indeks Ketahanan Pangan (IUP)	Indek	90,93	91,35	91,56	91,76	91,97	92,18	92,35	Urusan Pangan
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (IUP)	%	8,05	8	7,95	7,9	7,85	7,8	7,46	Urusan Pangan
3.	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	94,05	94,31	94,58	94,84	95,10	95,37	95,63	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian (IUP)	%	0	0	1	2	3	4	5	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	%	63,59	69,98	70,02	70,07	70,11	70,16	70,21	Urusan Lingkungan Hidup
6.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)	% RT	1,41	1,44	1,47	1,50	1,53	1,56	1,59	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (IUP)	Angka	32,87	55	56,25	57,5	58,75	60	61,25	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	%	N/A	52	53	54	55	56	57	Urusan Perhubungan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.	Rasio Kecelakaan Transportasi Jalan	Rasio	-	-	10,016	9,87	9,75	9,52	9,45	Urusan Perhubungan
10.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)	%	15,37	15,37	20,04	24,70	29,37	34,03	38,70	Urusan Lingkungan Hidup
11.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	49,69%	64	70	76	80	85	87	Urusan Lingkungan Hidup
12.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (kumulatif)	TonCO2 eq	NA	815.147,43	1.015.147,43	1.215.147,43	1.415.147,43	1.615.147,43	2.015.147,43	Urusan Lingkungan Hidup
13.	Indeks Risiko Bencana (IUP)	Indek	64,18	64,13	64,12	64,1	64,08	64,05	64	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
14.	Indeks Ketahanan Daerah	Indek	0,63	0,65	0,67	0,69	0,70	0,72	0,73	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
15.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	Urusan Pengendalian Penduduk Dan KB
16.	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	43,61	43,55	43,45	43,38	43,29	43,20	43,10	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.	Kepadatan Penduduk	Orang/ km ²	1.858	1.860	1.865	1.870	1.880	1.885	1.890	Urusan Administrasi Kependudukan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										dan Pencatatan Sipil
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,97	4,97-5,20	5,50-6,30	5,51-6,35	5,52-6,40	5,53-6,45	5,54-6,50	Fungsi Penunjang Perencanaan
2.	Tingkat Kemiskinan	%	7,47	7,30-7,10	7,20-7,15	7,15-7,06	7,06-6,99	6,99-6,95	6,95-6,90	Fungsi Penunjang Perencanaan
3.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (IUP)	%	17,5	17,5	17,69	17,88	18,07	18,26	18,45	Fungsi Penunjang Perencanaan
4.	PDRB Per Kapita	Rp Juta	53,08	56,28	59,58	62,98	66,48	70,08	73,78	Fungsi Penunjang Perencanaan
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP)	%	3,65	4,00-3,40	3,61-3,31	3,41-3,31	3,31-3,21	3,39-2,86	2,86-2,82	Urusan Tenaga Kerja
6.	Rasio Gini	Indeks	0,39	0,37	0,365	0,360	0,355	0,35	0,345	Fungsi Penunjang Perencanaan
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,3	78,7	79,75	79,8	80	80,17	80,22	Fungsi Penunjang Perencanaan
8.	Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikessos)	Indeks	NA	56,63	57,63	58,63	59,63	60,63	61,63	Urusan Sosial
9.	Usia Harapan Hidup (IUP, RIBK)	Tahun	78,01	78,08	78,2	78,32	78,45	78,59	78,74	Urusan Kesehatan
10.	Prevalensi Stunting (IUP, RIBK)	%	16,8	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	Urusan Kesehatan
11.	Jumlah Kematian Ibu (IUP, RIBK)	orang	11	11	10	10	10	9	9	Urusan Kesehatan
12.	Jumlah Kematian Balita (RIBK)	orang	106	106	106	106	104	104	104	Urusan Kesehatan
13.	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (RIBK)	%	NA	20	30	40	50	70	80	Urusan Kesehatan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14.	Cakupan imunisasi bayi lengkap (RIBK)	%	100	97	97	98	99	99	99	Urusan Kesehatan
15.	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (RIBK)	%	76,83	80	80,8	81,7	82,6	83,5	85	Urusan Kesehatan
16.	Persentase Kecamatan dengan Peningkatan Aktivitas Fisik Cukup (RIBK)	%	NA	25	41,67	58,33	75	100	100	Urusan Kesehatan
17.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (<i>treatment coverage</i>) (IUP)	%	85	87	89	91	93	95	95	Urusan Kesehatan
18.	Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (<i>treatment success rate</i>) (IUP, RIBK)	%	87	87	88	89	90	91	92	Urusan Kesehatan
19.	Cakupan Kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (IUP)	%	98,37	98,6	98,67	98,75	98,82	99	99	Urusan Kesehatan
20.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (IUP)	Tahun	10,19	10,28	10,37	10,46	10,55	10,64	10,73	Urusan Pendidikan
21.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,01	10,1	10,29	10,35	10,47	10,66	10,72	Urusan Pendidikan
22.	Harapan Lama Sekolah (IUP)	Tahun	13,92	13,94	13,96	13,97	13,98	13,99	14	Urusan Pendidikan
23.	Skor Kemampuan Numerasi SD (IUP)	Nilai	50,75	52,55	53,74	54,68	55,86	56,72	57,95	Urusan Pendidikan
24.	Skor Kemampuan Numerasi SMP (IUP)	Nilai	67,54	68,08	69,35	70,22	71,14	72,09	73,01	Urusan Pendidikan
25.	Skor Kemampuan Literasi SD (IUP)	Nilai	65,95	65,97	66,02	66,07	66,12	66,17	66,23	Urusan Pendidikan
26.	Skor Kemampuan Literasi SMP (IUP)	Nilai	78,31	79,20	79,98	80,40	81,05	81,87	82,64	Urusan Pendidikan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
27.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (IUP)	%	15,68	15,74	16,37	17,00	17,62	18,25	18,88	Urusan Pendidikan
28.	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (IUP)	%	87,38	88,43	89,16	89,97	90,56	91,71	92,65	Urusan Pendidikan
29.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	%	99,64	99,66	99,69	99,72	99,75	99,78	99,81	Urusan Pendidikan
30.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	%	40,79	40,85	41,05	41,31	41,63	41,96	42,30	Urusan Pendidikan
31.	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	85,4	85,43	85,46	85,49	85,52	85,55	85,58	Urusan Pendidikan
32.	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	89,32	82,10	82,50	82,90	83,30	83,70	84,10	Urusan Pendidikan
33.	Iklim Inklusivitas (SD)	Indeks	57,4	60,41	60,85	60,93	61,05	61,23	61,85	Urusan Pendidikan
34.	Iklim Inklusivitas (SMP)	Indeks	58,38	60,33	60,53	60,63	60,73	60,83	60,93	Urusan Pendidikan
35.	Iklim Keamanan (SD)	Indeks	74,1	75,26	76,06	76,56	77,06	77,56	78,06	Urusan Pendidikan
36.	Iklim Keamanan (SMP)	Indeks	70,26	71,32	73,12	73,62	74,12	74,62	75,12	Urusan Pendidikan
37.	Iklim Kebinekaan (SD)	Indeks	74,93	74,96	74,99	75,04	75,12	75,21	75,3	Urusan Pendidikan
38.	Iklim Kebinekaan (SMP)	Indeks	74,12	74,15	74,20	74,26	74,30	74,34	74,4	Urusan Pendidikan
39.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan Kebudayaan (IUP)	%	53,04	53,04	53,53	54,02	54,51	55,00	55,49	Urusan Pendidikan
40.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya	%	27,14	30,00	30,98	31,96	32,93	33,91	34,89	Urusan Kebudayaan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (IUP)									
41.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah (IUP)	orang	16.210	30.203	30.277	30.352	30.426	30.500	30.574	Urusan Kebudayaan
42.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (IUP)	%	25,17	36,00	36,25	36,50	36,75	37,00	37,25	Urusan Kebudayaan
43.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	75,32	75,5	76	76,5	77	77,5	78	Urusan Perpustakaan
44.	Tingkat pemanfaatan Perpustakaan (IUP)	%	0,55	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,68	Urusan Perpustakaan
45.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (IUP)	%	35,34	37,28	40,32	43,11	46,18	49,12	52,09	Urusan Tenaga Kerja
46.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	67,43	67,45	67,5	68	68,5	68,7	69	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
47.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	67,99	67,99	68	68	68,01	68,01	68,02	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
48.	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) (IUP)	Indeks	67,99	70,82	71,24	71,67	72,09	72,51	72,93	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
49.	Indeks Ketimpangan Gender (IUP)	Indeks	0,166	0,160	0,165	0,159	0,157	0,155	0,158	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Pelindungan Anak
50.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	60,83	62	64	66	68	70	72	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
51.	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,524	0,527	0,53	0,533	0,536	0,539	0,542	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
52.	Indeks Zakat Nasional/IZN (Baznas)	Indeks	0,76	0,77	0,77	0,78	0,78	0,79	0,79	Fungsi Pendukung Sekretariat Daerah
III	Aspek Daya Saing									
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,11	4,12	4,15	4,17	4,18	4,19	4,2	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
2.	Angka Ketergantungan	%	43,61	43,55	43,45	43,38	43,29	43,20	43,10	Urusan Tenaga Kerja
3.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP)	%	-0,17	0,93	0,35	0,36	0,35	0,9	0,81	Urusan Perindustrian
4.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (IUP)	%	3,94	3,99	4,04	4,09	4,14	4,19	4,24	Urusan Pariwisata
5.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	Orang	19	90	110	130	150	170	190	Urusan Pariwisata
6.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,1334	0,1355	0,1376	0,1397	0,1418	0,1439	0,1459	Urusan Pariwisata
7.	Rasio Kewirausahaan Daerah (IUP)	%	3	3,37	3,46	3,57	3,68	3,73	3,85	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
8.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (IUP)	%	0,77	1,33	1,42	1,52	1,61	1,70	1,79	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,21	68,30	68,50	68,80	69,00	69,20	69,50	Urusan Tenaga Kerja



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	%	56,92	60,03	60,86	61,70	62,53	63,36	64,19	Urusan Tenaga Kerja
11.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	62,22	65	67	68	69	71	72	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
12.	Kapabilitas Inovasi (Bagian dari IDSD) (IUP)	Angka	4,28	3,98	4,05	4,11	4,18	4,24	4,31	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
13.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (IUP)	%	22,43	23,05	23,13	23,21	23,29	23,36	23,44	Urusan Penanaman Modal
14.	Ekspor Barang dan Jasa	%	15,45	15,65	15,85	16,05	16,25	16,45	16,65	Urusan Perdagangan
15.	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	68,76	69,25	69,45	69,95	70,30	70,66	71,16	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
16.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (IUP)	%	91,63	92,63	93,63	94,63	95,63	96,63	97,63	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
17.	Indeks Desa	Indeks	0,794	0,804	0,814	0,824	0,834	0,844	0,844	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
18.	Persentase Desa Mandiri (IUP)	%	40,67	45,33	48	50,67	53,33	56	58,67	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
19.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (IUP)	%	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	Fungsi Penunjang Keuangan
20.	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik	%	2,16	2,16	1,96	1,76	1,55	1,35	1,15	Fungsi Penunjang



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kabupaten/Kota Per PDRB (IUP)									Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
21.	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB (IUP)	%	3,79	3,79	3,38	2,97	2,56	2,15	1,74	Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
22.	Return on Aset (ROA) BUMD (IUP)	%	3,65	4,73	4,77	4,82	4,86	4,90	4,94	Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
23.	Disparitas Harga	%	14,75	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	Urusan Perdagangan
24.	Tingkat Inflasi	%	1,50	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	Urusan Perdagangan
25.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	4,65	4,65	4,67	4,69	4,71	4,73	4,75	Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
26.	Nilai Produksi Sektor Pertanian (Rupiah)	Rupiah	42.534.000	42.977.325	43.125.000	43.437.500	43.550.000	44.125.000	44.562.500	Urusan Pertanian
27.	Prosentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan (%)	%	0,1	0,13	0,54	0,55	0,58	0,63	0,69	Urusan Kelautan dan Perikanan
28.	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	produk	NA	80	80	80	80	80	80	Urusan Perindustrian
IV Aspek Pelayanan Umum										
1.	Indeks Reformasi Hukum (IUP)	Indeks	99,62	85	85,7	86,4	87,1	87,8	88,5	Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (IUP) / Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	4,45	4,46	4,47 / 2,00	4,48 / 2,30	4,49 / 2,60	4,50 / 2,90	4,51 / 3,10	Urusan Komunikasi Dan Informatika
3.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (IUP)	%	NA	78,00	79,75	81,50	83,25	85,00	86,75	Urusan Komunikasi Dan Informatika
4.	Indeks Pelayanan Publik (IUP)	Indeks	4,6	4,55	4,6	4,61	4,62	4,66	4,67	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
5.	Indeks Integritas Nasional (IUP)	Indeks	79,37	79,02	80,04	81,06	82,07	83,09	84,11	Fungsi Pengawasan
6.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	74,87	75,46	76,33	77,4	79,11	79,5	80,7	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
7.	Persentase Penegakan Perda	%	96,96	97,60	97,70	97,80	97,90	98,00	98,10	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
8.	Persentase Capaian Aksi HAM	%	97,20	97,50	97,75	98,00	98,25	98,50	98,75	Setda (Bagian Hukum)
9.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	NA	75,46	76,33	77,40	79,11	79,50	80,70	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10.	Jumlah Kejadian Konflik SARA (IUP)	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
11.	Tingkat Pemenuhan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	90,5	91,01	91,79	92,46	93,21	93,88	94,47	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
12.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Indeks	62,28	62,5	63	63,5	64	64,5	65	Urusan Kearsipan
13.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	80	80	82	83	84	85	85	Unsur Pendukung Sekretariat DPRD
14.	Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	66,94	68	70	72	74	76	80	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
15.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	77,49	78	79	80	81	82	83	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
16.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,59	86,62	86,75	86,80	86,85	86,90	87,00	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
17.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	-	79	80	81	82	83	84	Unsur Penunjang Perencanaan
18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	78,78	78,8	78,85	78,9	78,95	80	80,05	Unsur Penunjang Keuangan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19.	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,748	0,756	0,76	0,765	0,768	0,77	0,773	Unsur Penunjang Kepegawaian
20.	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	2,8	3	3	3	3	3	3	Unsur Penunjang Pengawasan
21.	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Indeks	2,68	3	3	3	3	3	3	Unsur Penunjang Pengawasan
V	Indikator Kinerja Kunci									
A	Pendidikan									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	87,38	88,43	89,16	89,97	90,56	91,71	92,65	Urusan Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	96,36	99,60	99,65	99,70	99,75	99,80	99,85	Urusan Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	85,63	99,99	99,99	99,99	99,99	100	100	Urusan Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	40,79	40,85	41,05	41,31	41,63	41,96	42,30	Urusan Pendidikan
B	Kesehatan									
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	Urusan Kesehatan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	%	83,5	83,75	84,00	84,25	84,50	84,75	85,00	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	65	66	67	68	69	69,5	70	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	94,19	94,31	94,44	94,57	94,69	94,82	94,95	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,79	99,84	99,87	99,90	99,93	99,96	100	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	26,97	27,36	27,74	28,13	28,51	28,89	29,27	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (IUP)	%	88,30	88,35	88,40	88,45	88,50	88,55	88,60	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
D	Perumahan dan Kawasan Permukiman									



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	4,22	8,25	11,48	14,70	17,93	21,15	24,38	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	57,92	64,94	71,95	78,96	85,97	92,99	100	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	11,61	12,53	13,35	14,17	15,00	15,82	16,64	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
E	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	98,51	98,60	98,65	98,70	98,75	98,80	98,85	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	96,96	97,60	97,70	97,80	97,90	98,00	98,10	Urusan Ketenteraman



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	56	60	65	70	75	80	85	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	19,6	17	17	16	16	15	15	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Masyarakat (Satpol PP)
F	Sosial									
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Sosial
G	Tenaga Kerja									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	6,66	20	40	60	80	100	Urusan Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0.03	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	Urusan Tenaga Kerja
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	65.448	68.039	70.734	73.535	76.448	79.475	82.623	Urusan Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	70	46,88	46,9	46,93	46,97	47	47,03	Urusan Tenaga Kerja
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam	%	60	83	83	83	83	83	83	Urusan Tenaga Kerja



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah									
H	Pemberdayaan Perempuan dan Anak									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	4,82	4,83	4,9	4,95	5	5,05	5,1	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 penduduk perempuan	13,64	13,62	13,6	13,55	13,5	13,45	13,4	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
I	Pangan									
1	Persentase Cadangan Pangan	%	22	74	37	39	41	43	44	Urusan Pangan
J	Pertanahan									
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	89,44	90	92	94	96	98	100	Urusan Pertanahan
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	0	0	0	0	0	0	0	Urusan Pertanahan
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	77,85	79	80	81	82	83	84	Urusan Pertanahan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	10	20	40	60	80	100	Urusan Pertanahan
5	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Pertanahan
K	Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota (IUP)	Indeks	63,59	69,98	70,02	70,07	70,11	70,16	70,21	Urusan Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	62,81	64	70	76	80	85	88	Urusan Lingkungan Hidup
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	47	30	30	30	30	30	30	Urusan Lingkungan Hidup
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Perekaman KTP Elektronik	%	99,24	99,4	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	83,89	83,9	84	84,2	84,4	84,6	84,8	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	98,86	98,9	99	99,2	99,4	99,6	99,8	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Perangkat Daerah	5	6	7	8	9	10	11	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
N	Pengendalian Penduduk dan KB									
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	angka	1,33	1,40	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67,57	67,57	67,6	67,65	67,68	67,7	67,75	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	9,29	9,28	9,27	9,26	9,25	9,24	9,23	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
O	Perhubungan									
1	Rasio konektivitas	Indeks	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	Urusan Perhubungan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota		0,64	0,64	0,639	0,639	0,638	0,637	0,636	Urusan Perhubungan
P	Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	55	60	65	70	75	80	Urusan Komunikasi Dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50	55	60	65	70	75	80	Urusan Komunikasi Dan Informatika
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	69,63	69,64	69,65	69,66	69,67	69,68	69,69	Urusan Komunikasi Dan Informatika
Q	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	14,45	14,95	15,45	15,95	16,45	16,95	17,45	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	16.69	17	17.69	18	18.69	19	19.69	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
R	Penanaman Modal									



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	20	4	4	4	4	4	4	Urusan Penanaman Modal
S	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	NA	21,18	21,23	21,28	21,32	21,37	21,42	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	NA	22,57	22,63	22,76	22,97	23,25	23,62	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	53	58	59	60	61	62	63	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
T	Statistik									
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Statisik
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Statisik
U	Persandian									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	NA	NA	20	40	60	80	100	Urusan Persandian
V	Kebudayaan									
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	7,14	8,50	9,52	10,88	12,24	13,61	14,97	Urusan Kebudayaan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
W	Perpustakaan									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (TGM)	Indeks	70,9	71	71,5	72	72,5	73	73,5	Urusan Perpustakaan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	75,32	75,5	76	76,5	77	77,5	78	Urusan Perpustakaan
X	Kearsipan									
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	Urusan Kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	43,3	44	44,5	45	45,5	46	46,5	Urusan Kearsipan
Y	Perikanan									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	14.880	14.900	15.154	15.412	15.720	16.040	16.175	Urusan Perikanan
Z	Pariwisata									
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	2	2,05	2,1	2,14	2,18	2,21	2,24	Urusan Pariwisata



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	manca negara per Bangsa									
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	11,07	11,10	11,13	11,16	11,18	11,20	11,21	Urusan Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	%	2,76	2,80	2,85	2,89	2,93	2,96	2,99	Urusan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,69	3,74	3,79	3,83	3,87	3,90	2,92	Urusan Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	7,66	7,66	7,68	7,70	7,72	7,74	7,76	Urusan Pariwisata
AA	Pertanian									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ku/Ha	70,59	66,10	66,30	66,80	67,00	67,90	68,60	Urusan Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-361	50	50	50	50	50	50	Urusan Pertanian
AB	Perdagangan									
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Perdagangan
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	95,781	96,387	96,993	97,599	98,205	98,811	99,417	Urusan Perdagangan
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	81,8	81,9	82	82,2	82,4	82,6	82,8	Urusan Perdagangan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
AC	Perindustrian									
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	21,31	21,81	22,31	22,81	23,31	23,81	24,31	Urusan Perindustrian
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	60,63	61,56	61,91	62,27	62,62	63,52	64,33	Urusan Perindustrian
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	66,67	67	68	70	72	74	76	Urusan Perindustrian
4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	74,7	75	75,5	76	76,5	77	77,5	Urusan Perindustrian
AD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota									
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	16,79	16,77	16,75	16,73	16,71	16,69	16,67	Fungsi Penunjang Keuangan
2	Rasio PAD	%	24,7	26,05	26,45	26,85	27,25	27,8	28,05	Fungsi Penunjang Keuangan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3	3	3	3	3	3	Fungsi Pengawasan
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	Fungsi Pengawasan
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	67,40	67,38	67,36	67,34	67,32	67,30	67,28	Fungsi Penunjang Keuangan
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Fungsi Penunjang Keuangan
AE	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota									
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,95	1,43	1,45	2,86	2,86	4,29	4,29	Setda-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	76,76	76,76	77	77,5	78	78,5	79	Setda-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	46,15	47	48	49	50	51	52	Setda-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan	%	69,71	25	30	35	40	45	50	Setda-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah									
AF	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76,28	76,29	76,30	76,31	76,32	76,33	76,34	Fungsi Penunjang Kepegawaian
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	41,94	41,95	41,96	41,97	41,98	41,99	42	Fungsi Penunjang Kepegawaian
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	8,22	8,23	8,24	8,25	8,26	8,27	8,28	Fungsi Penunjang Kepegawaian
AG	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota									
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	1,17	1,15	1,13	1,11	1,09	1,07	1,05	Fungsi Penunjang Keuangan
2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	42,39	42,35	42,30	42,25	42,20	42,15	42,10	Fungsi Penunjang Keuangan
3	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset	Ya Ya Ya Ya	Ya Ya Ya Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	Fungsi Penunjang Keuangan



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)								
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,71	7,70	7,69	7,68	7,67	7,66	7,65	Fungsi Penunjang Keuangan
AH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota									
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to</i>	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Komunikasi dan Informatika



No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Yang Menangani Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<i>frontline service delivery units)</i>									
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Komunikasi dan Informatika

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran tema kebijakan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 tahap I, yaitu Penguatan Landasan Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Sukoharjo. RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun selain memperhatikan kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 Tahap I, juga mengacu RPJM Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan kebijakan sektoral lainnya.

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 disusun untuk menjawab permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah Sukoharjo dalam lima tahun ke depan. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah, serta bagi dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Kabupaten Sukoharjo. Seluruh pihak diharapkan dapat mendukung implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Sukoharjo dalam **“Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat”**, yang dijabarkan dalam tiga sasaran daerah yaitu: 1) Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, 2) Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif, 3) Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip *Good Governance*.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk memastikan RPJMD Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan dengan baik dan mengarah pada pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD yang harus dipedomani adalah sebagai berikut:

1. Bupati Sukoharjo berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat agar dimengerti dan dipahami sehingga dapat berpartisipasi maupun mengawal pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas kinerja atas pelaksanaan RPJMD.
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan semua pemangku kepentingan agar mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.

3. Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah.
4. RPJMD ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
5. Untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan, Badan yang diberikan tugas fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah, berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD kedalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
6. RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), transformasi digital, pembangunan rendah karbon, serta pembangunan berketahanan iklim.
7. RPJMD ini menjadi dasar bagi DPRD dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
8. Upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, dan hibah, untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Untuk menjamin tercapainya kinerja pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengendalian Risiko Strategis Pemerintah Daerah yang kontinu dan partisipatif

untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah dengan memanfaatkan infrastruktur sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan manajemen risiko yang dimulai dari identifikasi risiko, penilaian risiko, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), pelaksanaan pengendalian, komunikasi dan evaluasi pengendalian, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

2. Untuk mengetahui pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah dan target-target kinerja RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sukoharjo berkewajiban melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD minimal 1 kali dalam lima tahun.

5.3 Perubahan RPJMD

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Pedoman terkait perubahan RPJMD diatur sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku ;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
2. Perubahan terhadap target kinerja tahunan RPJMD dapat dilakukan melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

5.4 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Periode 2025-2030. Sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2030-2035 belum tersusun, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan hukum, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD



dan RAPBD Tahun Anggaran 2030 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun berkenaan.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

ETIK SURYANI